

**DISKURSUS PARADIGMA MAKROEKONOMI INKLUSIF DALAM
PERSPEKTIF AL-QUR'AN: TINJAUAN TAFSIR KONTEKSTUAL PADA
AYAT-AYAT MATA UANG DALAM PARADIGMA ORTODOKS DAN
HETERODOKS**

TESIS

**Diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua
untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag.)**



Oleh:
Unggul Purnomo Aji
NIM: 222510077

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
KONSENTRASI ILMU TAFSIR
PASCASARJANA UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA
2024 M./1446 H.**

ABSTRAK

Berkembangnya disiplin Ilmu Ekonomi dari gerakan moral-filosofis menjadi menjadi ilmu yang mapan dimulai di era Adam Smith dan terus berkembang hingga saat ini serta menciptakan dikotomi secara paradigmatik. Paradigma ekonomi yang tetap berpegang dengan acuan-acuan premis filosofikal kemudian disebut dengan paradigma ortodoks sedangkan paradigma ekonomi yang berlepas dari pakem filosofis klasik dan merekonstruksinya dengan menggunakan pendekatan secara arkeologis-antropologis kemudian disebut dengan paradigma heterodoks. Kedua paradigma ini memiliki pijakan epistemologis yang berbeda dan memberikan konsekuensi serta sudut pandang yang berbeda dalam melihat fenomena ekonomi.

Urgensi penelitian ini adalah, dengan berkembangnya sistem moneter dan tantangan zaman saat ini, dikajinya kedua paradigma ini menjadi penting karena keduanya menawarkan tinjauan teoretis dan praktis yang berbeda sehingga diharapkan salah satu dari keduanya bisa ditemukan korelasi dan signifikansinya jika dihubungkan dengan nilai inklusifitas yang menekankan pada proses ekonomi supaya bisa dirasakan manfaatnya oleh semua kalangan secara merata dan prinsip ekonomi Islam yang menekankan intervensi pemerintah sebagai tanggung jawab kekuasaan dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi seperti pengangguran, ketimpangan, kemiskinan serta peningkatan standar kemakmuran seperti pendidikan dan kesehatan gratis.

Research gap dari penelitian ini adalah ditemukan fakta akademik bahwa sejauh ini penelitian dengan topik ekonomi di Indonesia hanya bersifat parsial yakni hanya pada level dialektika antar teori yang bersebrangan dan belum sampai pada level paradigmatik sehingga hal ini mendorong dan memotivasi peneliti untuk lebih meningkatkan diskusinya pada level paradigmatik sehingga dapat diketahui semua signifikansinya secara simultan jika dihubungkan dengan nilai inklusifitas dan prinsip ekonomi Islam.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui titik temu dan titik seteru dari kedua paradigma ini secara teoretis, proposal kebijakan moneter dan fiskal, melihat signifikansi kedua paradigma ini jika dikorelasikan dengan nilai inklusifitas dan prinsip ekonomi Islam, serta meninjau signifikansi penafsiran ayat-ayat mata uang dalam cakupan perbedaan historisitas, konteks, sistem dan standard etis-akademis dalam upaya kontekstualisasi pada era modern saat ini.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini secara garis besar menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian kepustakaan dengan desain *grounded theory* serta menggabungkan metode penafsiran

maudhu'i dan tafsir kontekstual pada ayat-ayat yang dikaji dalam penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan fakta empiris bahwa kedua paradigma ini berbeda hampir secara menyeluruh dan keduanya memiliki pendekatan dan cara yang berbeda dalam proposal kebijakannya secara moneter dan fiskal. Juga ditemukan fakta empiris bahwa paradigma heterodoks lebih koheren jika dikorelasikan dengan nilai inklusifitas dan prinsip ekonomi Islam. Hal ini disebabkan karena paradigma heterodoks menekankan terhadap pentingnya peran sebuah otoritas dalam relasinya untuk mewujudkan kesejahteraan secara umum dan memberikan ruang kepada pihak pencipta uang untuk melakukan defisit spending secara kontinyu tanpa memiliki risiko bangkrut. Hal ini kemudian secara praktis bisa digunakan untuk mengimplementasikan program-program peningkatan kesejahteraan seperti program jaminan pekerjaan, pendidikan dan kesehatan gratis, penghijauan dan lain sebagainya seperti yang pernah dilakukan pada program “*New Deal*” di Amerika atau “*NREGA*” di India yang terbukti mampu meningkatkan *standard of living* masyarakatnya. Temuan lain dari penelitian ini adalah tawaran kontekstualisasi penafsiran dari mata uang (*dinâr, dirham*, emas, perak dan wariq) yang dahulu ditafsirkan dengan “alat tukar” menjadi “satuan hitung” karena sejak zaman Sumeria Kuno hingga saat ini belum ada satupun temuan antropologis yang melegitimasi bahwa uang adalah “alat tukar.” Hal ini diperantarai bahwa munculnya uang tidak pernah terlepas dari eksisnya suatu otoritas yang dengan kata lain bahwa uang mustahil uang muncul secara insidental dan ia selalu diedarkan dan ditarik sebagai pajak dengan sengaja oleh otoritas yang menciptakannya.

Kata Kunci: Paradigma Ekonomi, Heterodoks, Ortodoks, Inklusif, Prinsip Ekonomi Islam, Perspektif Al-Qur’an.

ABSTRACT

The development of Economics as a discipline from a moral-philosophical movement to an established science began in the era of Adam Smith and has continued to evolve, creating a paradigmatic dichotomy. Economic paradigms that adhere to philosophical premises are referred to as orthodox paradigms, while those that depart from classical philosophical frameworks and reconstruct them using archaeological-anthropological approaches are called heterodox paradigms. These two paradigms have different epistemological foundations, leading to differing consequences and perspectives in analyzing economic phenomena.

The urgency of this research lies in the evolving monetary system and the challenges of the modern era. Analyzing these two paradigms is essential as they offer differing theoretical and practical insights. This analysis aims to identify correlations and significance when linked to inclusivity values, which emphasize economic processes that benefit all levels of society, and Islamic economic principles, which highlight government intervention as a responsibility to address economic issues such as unemployment, inequality, poverty, and enhancing welfare standards, including free education and healthcare.

The research gap addressed in this study is the academic finding that most economic research in Indonesia remains partial, limited to dialectical discussions between opposing theories without delving into the paradigmatic level. This motivates researchers to elevate the discourse to the paradigmatic level to simultaneously identify its significance in relation to inclusivity values and Islamic economic principles.

The objectives of this research are to identify the commonalities and divergences between these two paradigms theoretically, analyze their monetary and fiscal policy proposals, assess their significance when correlated with inclusivity values and Islamic economic principles, and review the interpretation of currency-related verses in terms of historical context, system, and ethical-academic standards for modern contextualization.

This study employs a qualitative approach using literature review methods with a grounded theory design, combined with *maudhu'i* and contextual exegesis methods on the Quranic verses analyzed in this research.

The findings reveal empirical evidence that the two paradigms differ almost entirely in their approaches and proposals for monetary and fiscal policies. It also shows that the heterodox paradigm is more coherent when correlated with inclusivity values and Islamic economic principles. This

coherence is attributed to the heterodox paradigm's emphasis on the role of authority in achieving general welfare, including allowing monetary authorities to perform continuous deficit spending without risk of bankruptcy. This practical application enables welfare programs such as job guarantees, free education and healthcare, reforestation, and others, as seen in the "New Deal" program in the United States or "NREGA" in India, which successfully improved the standard of living. Another key finding is the proposed contextualization of interpreting currency (dinar, dirham, gold, silver, and wariq) from being traditionally defined as "mediums of exchange" to "units of account." Since the Sumerian era, no anthropological evidence has legitimized money as a "medium of exchange." The emergence of money has always been tied to the existence of an authority, indicating that money does not arise incidentally but is intentionally circulated and taxed by the issuing authority.

Keywords: Economic Paradigm, Heterodox, Orthodox, Inclusive, Islamic Economic Principles, Quranic Perspective.

الملخص

إن تطور علم الاقتصاد من حركة أخلاقية-فلسفية إلى علم راسخ بدأ في عصر آدم سميث واستمر في التطور حتى اليوم، مما أوجد انقسامًا باراديجماتيًا. يُطلق على النماذج الاقتصادية التي تلتزم بالمبادئ الفلسفية اسم النماذج الأرثوذكسية، في حين تُعرف النماذج التي تنفصل عن الأطر الفلسفية الكلاسيكية وتعيد بنائها باستخدام مناهج أثرية-أنثروبولوجية بالنماذج غير الأرثوذكسية. هذان النموذجان لهما أسس معرفية مختلفة، مما يؤدي إلى عواقب ووجهات نظر متباينة في تحليل الظواهر الاقتصادية.

تكمن أهمية هذه الدراسة في تطور النظام النقدي وتحديات العصر الحديث. إن تحليل هذين النموذجين أمر بالغ الأهمية لأنه يقدم رؤى نظرية وعملية مختلفة. يهدف هذا التحليل إلى تحديد العلاقات والارتباطات ومدى أهميتها عند ربطها بقيم الشمولية، التي تؤكد على العمليات الاقتصادية التي تفيده جميع فئات المجتمع، ومبادئ الاقتصاد الإسلامي، التي تؤكد على تدخل الحكومة كمسؤولية لحل المشكلات الاقتصادية مثل البطالة وعدم المساواة والفقير، وتحسين معايير الرفاهية مثل التعليم والرعاية الصحية المجانية. الفجوة البحثية التي تتناولها هذه الدراسة هي اكتشاف أن معظم الدراسات الاقتصادية في إندونيسيا لا تزال جزئية، ومقتصرة على مناقشات جدلية بين نظريات متعارضة دون التعمق في المستوى الباراديجماتي. وقد دفع هذا الأمر الباحثين إلى رفع النقاش إلى المستوى الباراديجماتي لفهم مدى أهميته في ضوء قيم الشمولية ومبادئ الاقتصاد الإسلامي.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد نقاط الالتقاء والاختلاف بين هذين النموذجين من الناحية النظرية، وتحليل مقترحاتهما للسياسات النقدية والمالية، وتقييم مدى أهميتهما عند ربطهما بقيم الشمولية ومبادئ الاقتصاد الإسلامي، بالإضافة إلى مراجعة تفسير الآيات القرآنية المتعلقة بالعملة في ضوء السياق التاريخي والنظام والمعايير الأخلاقية-الأكاديمية من أجل التكييف العصري.

تعتمد هذه الدراسة على منهجية نوعية باستخدام مراجعة الأدبيات مع تصميم يعتمد على نظرية المؤرصة (Grounded Theory) بالإضافة إلى استخدام منهجي التفسير الموضوعي والتفسير السياقي للآيات القرآنية التي تم تحليلها في هذه الدراسة.

تشير النتائج إلى وجود أدلة تجريبية على أن النموذجين مختلفان تقريبًا في كل شيء، وأن لكل منهما نهجًا مختلفًا ومقترحات متباينة للسياسات النقدية والمالية. كما تكشف النتائج أن النموذج غير الأرثوذكسي أكثر انسجامًا مع قيم الشمولية ومبادئ الاقتصاد الإسلامي. ويعود ذلك إلى تركيز هذا النموذج على أهمية دور السلطة في تحقيق الرفاهية العامة، بما في ذلك السماح للسلطات النقدية بتنفيذ إنفاق بالعجز بشكل مستمر دون مخاطر الإفلاس. ويسمح هذا التطبيق العملي بتنفيذ برامج رفاهية مثل ضمان الوظائف

والتعليم المجاني والرعاية الصحية وإعادة التشجير وغيرها، كما حدث في برنامج “العهد الجديد” (New Deal) في الولايات المتحدة أو “نريغا” (NREGA) في الهند، والتي نجحت في تحسين مستوى المعيشة.

ومن النتائج الرئيسية الأخرى الاقتراح بإعادة تفسير العملات (الدينار، الدرهم، الذهب، الفضة، والورق) من كونها تُعرّف تقليدياً بأنها “وسائل تبادل” إلى “وحدات حساب”. فمنذ عصر السومريين لم يتم العثور على دليل أنثروبولوجي يثبت أن المال كان “وسيلة تبادل”. وبدلاً من ذلك، فإن ظهور المال كان دائماً مرتبطاً بوجود سلطة، مما يشير إلى أن المال لا ينشأ بشكل عشوائي ولكنه يُداول ويُفرض عليه الضرائب بشكل مقصود من قبل السلطة المصدرة.

الكلمات المفتاحية: النماذج الاقتصادية، غير الأرثوذكسية، الأرثوذكسية، الشمولية، مبادئ الاقتصاد الإسلامي، المنظور القرآني.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang beranda tangan dibawah ini

Nama : Unggul Purnomo Aji
Nomor Induk Mahasiswa : 222510077
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Tafsir
Judul Tesis : Diskursus Paradigma Ekonomi Inklusif
dalam Perspektif Al-Qur'an

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah murni hasil karya sendiri, apabila saya mengutip dari orang lain maka akan saya cantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di lingkungan atas perbuatan tersebut, sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Universitas PTIQ Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Malang, 8 Oktober 2024
Yang membuat pernyataan



Unggul Purnomo Aji

TANDA PERSETUJUAN TESIS

DISKURSUS PARADIGMA MAKROEKONOMI INKLUSIF DALAM
PERSPEKTIF AL-QUR'AN: TINJAUAN TAFSIR KONTEKSTUAL PADA
AYAT-AYAT MATA UANG DALAM PARADIGMA ORTODOKS DAN
HETERODOKS

Diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua
untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag.)

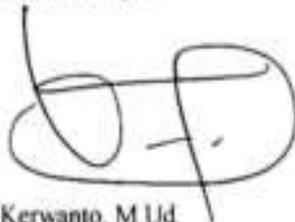
Disusun oleh
Unggul Purnomo Aji
222510077

Telah selesai dibimbing oleh kami dan menyetujui untuk selanjutnya dapat
diujikan.

Jakarta, 15 Oktober 2024

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Kerwanto, M.Ud.

Pembimbing II



Dr. Nurbaiti, M.A.

Mengetahui
Ketua Program Studi



Dr. Abd. Muid N., M.A.

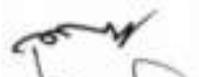
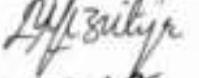
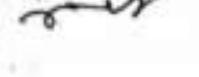
TANDA PENGESAHAN TESIS

DISKURSUS PARADIGMA MAKROEKONOMI INKLUSIF DALAM
PERSPEKTIF AL-QUR'AN: TINJAUAN TAFSIR KONTEKSTUAL PADA
AYAT-AYAT MATA UANG DALAM PARADIGMA ORTODOKS DAN
HETERODOKS

Disusun oleh:

Nama : Unggul Purnomo Aji
Nomor Induk Mahasiswa : 222510077
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Tafsir

Telah diujikan pada sidang munaqosyah pada tanggal 18 November 2024

| No | Nama Penguji | Jabatan dalam Tim | Tanda Tangan |
|----|--------------------------------------|---------------------|---|
| 1 | Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si. | Ketua |  |
| 2 | Prof. Dr. Nur Arfiyah Febriani, M.A. | Penguji I |  |
| 3 | Dr. Abd. Muid N., M.A. | Penguji II |  |
| 4 | Dr. Kerwanto, M.Ud. | Pembimbing I |  |
| 5 | Dr. Nurhaiti, M.A. | Pembimbing II |  |
| 6 | Dr. Abd. Muid N., M.A. | Panitera/Sekretaris |  |

Mengetahui
Direktur Pasca Sarjana
Universitas PTIQ Jakarta


Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

| Arab | Latin | Arab | Latin | Arab | Latin |
|------|-------|------|-------|------|-------|
| ا | ʾ | ز | z | ق | q |
| ب | b | س | s | ك | k |
| ت | t | ش | sy | ل | l |
| ث | ts | ص | sh | م | m |
| ج | j | ض | dh | ن | n |
| ح | h | ط | th | و | w |
| خ | kh | ظ | zh | هـ | h |
| د | d | ع | ʿ | ء | a |
| ذ | dz | غ | g | ي | y |
| ر | r | ف | f | - | - |

Catatan:

- a. Konsonan yang ber-*syaddah* ditulis rangkap, misal رَبّ ditulis *rabba*
- b. Vokal panjang (mad) ditulis dengan (^), misalnya القارعة ditulis *al-qâri'ah*
- c. Kata sandang *alif + lam* (ال) jika diikuti huruf qomariyah misalnya الكافرون Ditulis *al-kâfirûn*, sedangkan jika diikuti syamsiyah misalnya الرجال bisa ditulis *ar-rijâl* atau *al-rijâl*.
- d. *Ta' marbutah* (ة) apabila terletak diakhir kalimat maka dibaca h dan jika ditengah dibaca t.
- e. Penulisan kalimat dilakukan sesuai urutan katanya, misal وهو خير الرازيقین ditulis *wa huwa khair al-râziqîn*.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad saw., begitu juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta para umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya. Amin.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini tidak sedikit hambatan, rintangan serta kesulitan yang dihadapi. Namun berkat bantuan dan motivasi serta bimbingan yang tidak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Rektor Universitas PTIQ Jakarta: Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A. yang telah memberikan dukungan moral dan fasilitas yang memadai dalam proses penyelesaian tesis ini. Semoga segala jasa dan kontribusi beliau selalu mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Swt.
2. Direktur Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta: Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M. Si. yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan yang sangat berarti selama proses penyusunan tesis ini. Kepedulian beliau terhadap kualitas akademik dan semangat beliau dalam mengembangkan pendidikan tinggi Islam telah menjadi teladan bagi penulis. Semoga segala kebaikan dan ilmu yang beliau berikan menjadi amal kebaikan yang membawa keberkahan.

3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Universitas PTIQ Jakarta: Dr. Abd. Muid N, M.A. atas bimbingan, dorongan, dan nasihat yang sangat berharga selama proses studi hingga penyusunan tesis ini. Semoga segala dedikasi dan ilmu yang beliau bagikan akan senantiasa menjadi amal kebaikan yang abadi.
4. Dosen Pembimbing Tesis, yakni Dr. Kerwanto, M.Ud. dan Dr. Nurbaiti, M.A., dan juga terkhusus kepada Dosen Penguji Tesis sekaligus Dosen Penguji Work in Progress satu dan dua yakni Prof. Dr. Nur Arfiyah Febriani, M.A. yang telah menyediakan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan petunjuknya dalam penyusunan Tesis ini.
5. Kepala Perpustakaan beserta staf TU Universitas PTIQ Jakarta atas bantuan, pelayanan, dan dukungan yang sangat berharga selama penulis menyelesaikan studi dan penyusunan tesis ini.
6. Segenap Civitas Universitas PTIQ Jakarta, para dosen yang telah memberikan ilmu dan fasilitas, kemudahan dalam penyelesaian penulisan Tesis ini.
7. Ibunda tercinta, Dr. Mudrikah Rohmawati, M.Pd. yang selalu memberi support baik waktu dan materi sehingga tesis ini bisa diselesaikan.
8. Guru tercinta, Romo KH. Ihsan Noor dan Gus H. Muhammad Fatchulloh yang selalu memberikan support dan ruang pada aktualisasi diri penulis di Pondok Pesantren Nurul Hikmah Assalafiyah.
9. Nenek tercinta, Kim Cho (Susanti) dan semua keluarga penulis dari jalur Ibu yang telah memberikan teladan dan memberikan spirit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
10. Bapak serta Adik-adik beserta seluruh keluarga besar penulis yang selalu menjadi pelecut semangat dalam menyelesaikan tesis ini.
11. Sahabat-sahabat akademik seperjuangan yang ditengah kesibukan pribadinya namun semangatnya dalam menuntut ilmu dan berdialektika selalu menyala, terkhusus kepada Yogi Sulaiman, Amir Marup, Rahmat Sipahutar, Muhammad Habibie dan seluruh anggota kelas 2E dan 4B yang meskipun terkadang merepotkan namun memberikan dorongan moril luar biasa bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
12. Sahabat-sahabat di Pondok Pesantren Nurul Hikmah Assalafiyah terkhusus Ariful Badri dan Nur Ahmad yang jikalau tanpa bantuan tenaga dari mereka dalam mengurus Pesantren niscaya tesis ini akan sulit terselesaikan.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Tesis ini. Hanya harapan dan doa, semoga Allah Swt. memberikan balasan

yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah berjasa dalam membantu penulis menyelesaikan Tesis ini. Akhirnya kepada Allah Swt. penulis serahkan segalanya dalam mengharapkan keridhaan, semoga tesis ini bermanfaat bagi masyarakat umumnya dan bagi penulis khususnya, serta anak dan keturunan penulis kelak. Amin.

Malang, 8 Oktober 2024

Unggul Purnomo Aji

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------|----------|
| Judul..... | i |
| Abstrak | iii |
| Pernyataan Keaslian Tesis | ix |
| Tanda Persetujuan Tesis | xi |
| Tanda Pengesahan Tesis | xiii |
| Pedoman Transliterasi..... | xv |
| Kata Pengantar | xvii |
| Daftar Isi | xxi |
| Daftar Tabel | xxv |
| BAB I: PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 13 |
| C. Batasan Masalah | 13 |
| D. Rumusan Masalah | 14 |
| E. Tujuan Penelitian | 14 |
| F. Manfaat Teoretis | 15 |
| G. Manfaat Praktis | 15 |
| H. Kerangka Teori | 15 |
| I. Tinjauan Pustaka | 19 |
| J. Metodologi Penelitian | 23 |
| 1. Sumber Data Penelitian | 24 |
| 2. Teknik Pengumpulan Data | 25 |

| | |
|--------------------------------|----|
| 3. Teknik Analisa Data | 25 |
| 4. Triangulasi Data | 26 |
| K. <i>Research Gap</i> | 27 |
| L. <i>Novelty</i> | 27 |
| M. Sistematika Penulisan | 27 |

| | |
|--|-----------|
| BAB II: DEFINISI EKONOMI DAN PENJELASAN KEDAULATAN MATA UANG SERTA PENJELASAN PARADIGMA ORTODOKS DAN HETERODOKS | 29 |
| A. Definisi Ekonomi Secara Etimologi | 29 |
| B. Definisi Ekonomi Secara Terminologi | 34 |
| C. Definisi Ekonomi Secara Epistemologi | 39 |
| D. Kedaulatan Mata Uang | 44 |
| E. Paradigma Ortodoks | 50 |
| 1. Teori Uang | 51 |
| 2. Teori Suku Bunga dan Pengangguran..... | 52 |
| 3. Relasi Otoritas dan Pasar | 55 |
| 4. Konsekuensi Teoretis | 58 |
| 5. Konsekuensi Praktis | 61 |
| 6. Refleksi Moneter | 65 |
| 7. Refleksi Fiskal | 68 |
| F. Paradigma Heterodoks..... | 71 |
| 1. Teori Uang | 75 |
| 2. Teori Suku Bunga dan Pengangguran | 81 |
| 3. Relasi Otoritas dan Pasar | 86 |
| 4. Konsekuensi Teoretis | 90 |
| 5. Konsekuensi Praktis | 94 |
| 6. Refleksi Moneter | 100 |
| 7. Refleksi Fiskal | 104 |
| G. Sinopsis Komparasi Paradigma Ortodoks dan Heterodoks | 108 |

| | |
|--|------------|
| BAB III: ULASAN ISLAM TENTANG PARADIGMA EKONOMI, RELASI NEGARA DAN PASAR SERTA KONTEKSTUALISASI PENAFSIRAN TENTANG MATA UANG..... | 111 |
| A. Ulasan Islam Tentang Paradigma Ekonomi | 111 |
| B. Definisi Negara Secara Etimologi, Terminologi, dan Epistemologi | 114 |
| 1. Wilayah | 114 |
| 2. Penduduk | 114 |
| 3. Pemerintah | 115 |
| 4. Kedaulatan | 115 |
| C. Tujuan, Fungsi, Peran, dan Sistem Negara..... | 116 |

| | |
|--|------------|
| D. Hak dan Kewajiban Negara terhadap Rakyat | 118 |
| E. Hak dan Kewajiban Rakyat terhadap Negara | 19 |
| F. Relasi Negara dan Pasar dalam Islam serta Hak dan Kewajiban Pemerintah kepada Rakyat dalam Islam | 121 |
| G. Inklusifitas dalam Ekonomi | 138 |
| H. Tafsir Kontekstual | 140 |
| I. Metode Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed | 142 |
| J. Kontekstualisasi Ayat-Ayat Mata Uang | 144 |
| | |
| BAB IV: SINTESIS: PARADIGMA EKONOMI ORTODOKS, HETERODOKS, INKLUSIFITAS DAN PRINSIP ISLAM..... | 151 |
| A. Titik Temu dan Titik Seteru Paradigma Heterodoks dan Ortodoks secara Paradigmatik | 151 |
| B. Titik Temu dan Titik Seteru Proposal Kebijakan Moneter antara Paradigma Ortodoks dan Heterodoks | 156 |
| C. Titik Temu dan Titik Seteru Proposal Kebijakan Fiskal antara Paradigma Ortodoks dan Heterodoks | 160 |
| D. Signifikansi Paradigma Heterodoks dan Ortodoks dalam Mengakomodasi Prinsip Ekonomi Islam | 163 |
| E. Signifikansi Paradigma Heterodoks dan Ortodoks dalam Mengakomodasi Nilai Inklusivitas Ekonomi | 165 |
| F. Signifikansi Paradigma Ortodoks dan Heterodoks terhadap Kontekstualisasi Ayat-Ayat yang Mendefinisikan tentang Mata Uang ... | 166 |
| | |
| BAB V HASIL: PENUTUP..... | 169 |
| A. Simpulan | 169 |
| B. Saran | 171 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | 173 |
| LAMPIRAN | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |

DAFTAR TABEL

| | |
|------------------|-----|
| Tabel 2.1 | 45 |
| Tabel 2.2 | 46 |
| Tabel 2.3 | 46 |
| Tabel 2.4 | 47 |
| Tabel 2.5 | 48 |
| Tabel 2.6 | 108 |
| Tabel 2.7..... | 108 |
| Tabel 2.8 | 109 |
| Tabel 2.9 | 109 |
| Tabel 2.10 | 109 |
| Tabel 2.11 | 110 |
| Tabel 2.12 | 110 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ilmu Ekonomi merupakan salah satu ilmu terpenting dalam sejarah peradaban kehidupan umat manusia. Jika ilmu ekonomi ditarik secara etimologi yang berasal dari akar kata *Oikos* (rumah tangga) dan *Nomos* (pengaturan) dalam bahasa Yunani maka secara definitif ia adalah ilmu terkait segala pengaturan dalam rumah tangga. Namun secara terminologi, ia adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang pengelolaan dan pengurusan sumber daya materil dalam suatu lingkup tertentu yang bertujuan untuk kesejahteraan individu dalam lingkup tersebut.¹ Dengan definisi ini maka secara profetik-eksistensial ilmu ekonomi secara implisit telah eksis sejak Nabi Adam AS karena tidak ada satupun dari umat manusia yang tidak mengaplikasikannya baik secara makro bahkan dalam lingkup mikro (lingkup terkecil seperti keluarga atau bahkan diri sendiri) baik disadari maupun tidak.²

Dalam berjalannya aktifitas perekonomian tersebut, uang adalah instrumen terpenting di dalamnya. Uang dengan berbagai variasi bentuknya seperti sekarung gandum, koin emas, perak atau logam, uang kertas bahkan uang fiat menjadi tolak ukur dan indikator dalam setiap aktifitas yang

¹ Iskandar Putong, *Economics: Pengantar Mikro dan Makro*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010, hal. 1.

² Satia Baktiyani Wahidah & Ahmad Saepudin, "Dimensi Ekonomi Dalam Kehidupan Nabi Adam: Tafsir Surat Thaha 117-119 Dan Surat Al-Baqarah Ayat 36," dalam *Jurnal EKSISBANK*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2018, hal. 31-35.

berhubungan dengan pengelolaan sumber daya materil. Uang pada saat ini merupakan indikator utama dalam mengukur membesar atau menyusutnya aktifitas ekonomi dalam lingkup kecil (mikro) ataupun besar (makro) serta digunakan juga dalam mengukur indeks-indeks tertentu semisal kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, inflasi (riba) dan lain sebagainya.³

Secara arkeologis, uang terindikasi digunakan sejak peradaban timur kuno atau biasa disebut *Ancient Near East* yang meliputi peradaban awal manusia seperti di daerah Mesopotamia, Mesir, Anatolia, Kan'an dan Caucasus. Para arkeolog yang tergabung dalam *The International Scholars Conference on Ancient Near Eastern Economies (ISCANEE)* yang mana mereka melaksanakan penelitian secara mendalam dan dalam kurun waktu yang lama mengemukakan pendapatnya dalam diskusi ilmiah di British Museum pada tahun 2002 yang kemudian dilanjutkan pada seminar di Yunani pada tahun 2004 dan menghasilkan publikasi berjudul "*Labor In The Ancient World.*" Seri final dari diskusi tersebut dipublikasi pada tahun 2015 dengan memasukkan tinjauan studi pada era Neolitik dan Mesir kuno dan menetapkan sebuah kesimpulan berarti bahwa uang secara meyakinkan pertama kali digunakan dalam perekonomian ialah pada milenia ketiga sebelum masehi yang mana setiap "sen" dari uang tersebut selalu dikeluarkan atau diedarkan pertama kali oleh kuil atau kerajaan kekuasaan setempat.⁴

Pada era peradaban timur kuno tersebut uang memiliki bentuk yang sama sekali berbeda dengan yang digunakan sekarang. Satuan uang di masa itu misal pada era Sumeria dan Babylonia kuno ketika Ur-Namma dan dan Shulgi menjabat sebagai pemimpin kerajaan Ur III di akhir millenium ketiga sebelum masehi adalah menggunakan satu karung gandum sebagai satuan hitung. Kemudian dengan berkembangnya perekonomian dan berkembangnya masyarakat kala itu mendorong monetisasi yaitu perubahan terhadap wujud uang yang dari satu sak gandum menjadi sebuah koin perak dengan berat semisal delapan gram untuk lebih memudahkan transaksi dalam perekonomian.⁵

Secara fungsi, uang pada masa itu memiliki fungsi sebagai *record-keeping* (pencatatan perekonomian) yang setiap satuannya adalah *state*

³ Solikin Dan Suseno, *Uang: Pengertian, Penciptaan dan Peranannya dalam Perekonomian*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPPSK) Bank Indonesia, 2002, hal. 1-58.

⁴ Michael Hudson, *...and forgive them their debt: Lending, Foreclosure and Redemption from Bronze Age Finance to the Jubilee Year*, Dresden: ISLET-Verlag, 2018, hal. 25-28.

⁵ Michael Hudson, *...and forgive them their debt: Lending, Foreclosure and Redemption from Bronze Age Finance to the Jubilee Year*, hal. 60-61.

unit of account (satuan hitung milik kekuasaan baik kuil atau kerajaan) dan bersifat kredit. Artinya uang tersebut tidaklah muncul secara insidental melainkan sengaja diedarkan oleh pencipta mata uang (*currency issuer*) yang kemudian uang tersebut ditarik kembali sebagai pajak (*tax*) atas kekuatan otoritas (*provisioning power*) yang dimiliki oleh kuil atau kerajaan atau entitas otoritas yang lain.⁶

Sifat kredit dari uang tersebut memiliki arti bahwa ekonomi adalah sebuah relasi sosial antara kreditor dan debitor. Secara definitif kreditor adalah pihak yang memberikan pinjaman (mengedarkan uang) sedangkan debitor adalah pihak yang membayar pinjaman (menggunakan uang). Terminologi antara kreditor dan debitor ini diambil karena sesuai dengan analisa *balance sheet* yang berisikan equilibrium atas aset dan liabilitas. Sebagai contoh jika suatu unit ekonomi sebagai kreditor memiliki aset 100 maka pasti unit lain sebagai debitor akan memiliki liabilitas sejumlah 100 pula.⁷

Dalam implementasi praktek ekonomi secara empiris-historis-antropologis pada masa lampau, suatu kekuasaan yang mencangkup suatu wilayah tertentu maka sumber daya alam di dalamnya dikuasai secara mutlak oleh kuil-kuil atau kerajaan-kerajaan. Kuil atau kerajaan ini memiliki perekonomian agraris tradisional yang menjadi pola perekonomian utama yang mana hasil sumber daya alam termasuk hasil panennya tersentralisasi -disetorkan- kepada pusat pemerintahan. Kuil atau kerajaan sebagai otoritas tertinggi ini memberikan otoritas pengelolaan tanah kepada warganya dengan bayaran makanan pokok dengan memberikan kewajiban bagi pengelola tanah tadi -rakyat- untuk membayar sewa tanah dengan dengan jumlah panen tertentu di akhir waktu panen yang mayoritas berupa gandum atau bahan makanan lainnya. Dari sini terlihat bahwa pola ekonomi yang ada bersifat kredit bukan barter.⁸

Dengan berkembangnya perekonomian dan institusinya yang terjadi, kuil-kuil atau kerajaan-kerajaan lokal mulai menerapkan standard khusus untuk memudahkan melacak, menghitung, mengontrol dan merencanakan perekonomian dengan menggunakan satuan hitung semisal satu koin perak sebanding dengan sekarung gandum untuk memudahkan

⁶ Michael Hudson, "Origins of Money and Interest: Palatial Credit, Not Barter," dalam Battilossi, S., Cassis, Y., Yago, K. (eds) *Handbook of the History of Money and Currency*, Singapore: Springer, 2020. https://doi.org/10.1007/978-981-13-0596-2_1 diakses 1 Agustus 2024.

⁷ Erick Tymoigne, *The Financial System and The Economy: Principles of Money and Banking*, Portland: Lewis and Clark College, 2018, hal. 1-8.

⁸ Michael Hudson, *...and forgive them their debt: Lending, Foreclosure and Redemption from Bronze Age Finance to the Jubilee Year*, hal. 55-69.

perhitungan (*account-keeping*) produksi, distribusi, konsumsi, dan perdagangan yang dilakukan oleh kuil atau kerajaan.⁹

Perekonomian di Mesopotamia dan Mesir Kuno selain menerapkan hal yang disebut di atas juga melakukan aktifitas perdagangan internasional seperti mengimpor metal, tekstil, dan bahan-bahan lain dengan menggunakan mata uang yang secara internasional disepakati seperti emas, perak atau komoditas tertentu. Hal ini secara mendetail dijelaskan oleh Renger,¹⁰ Bongenaar¹¹, Garfinkle¹² dan juga dalam paper Hudson and Wunsch¹³ yang berjudul “*Survey Account-Keeping and Monetization of The Mesopotamian and Egyptian Economies from The Inception of Written Accounts in The Late 4th Millennium BC to The NeoBabylonian Period.*”

Disini jelas bahwa uang selalu melekat dalam konteks publik, dan sulit berkembang tanpa katalisator publik yaitu dengan pengawasan -*crediting* dan *debiting money*- secara berkelanjutan agar uang dapat diterima oleh masyarakat. Dalam kajian antropologis tadi terdapat indikasi bahwa: *pertama*, ada relasi antara pencipta uang yang memonopoli perekonomian dengan otoritasnya yang kemudian mengedarkan uang. Seperti dalam kasus uang dengan bentuk gandum yang mana uang tersebut diberikan di kepada masyarakat dengan sebagai upah dari mempekerjakan mereka -*provisioning power*- untuk mengelola lahan agraria milik kuil atau kerajaan yang kemudian masyarakat

⁹ Michael Hudson, *...and forgive them their debt: Lending, Foreclosure and Redemption from Bronze Age Finance to the Jubilee Year*, hal. 60-69; Michael Hudson, “Palatial Credit: Origins of Money and Interest,” website <https://michael-hudson.com/2018/04/palatial-credit-origins-of-money-and-interest/> diakses 20 Agustus 2024.

¹⁰ Johannes Renger, “Interaction of Temple, Palace, and Private Enterprise in the Old Babylonian Economy,” dalam Lipinski, Eduard (ed.), *State and Temple Economy in the Ancient Near East (Leuven)* I, 1979, hal. 249-256; Johannes Renger, “Patterns of Non-Institutional Trade and Non-Commercial Exchange in Ancient Mesopotamia at the Beginning of the Second Millennium BC,” dalam Alfonso Archi, *Circulation of Goods in Non-Palatial Context in the Ancient Near East*, Roma: Incunabula Graeca LXXII, 1984, hal. 31-115.

¹¹ Bongenaar, A. C. V. M., ed., *Interdependency of Institutions and Private Entrepreneurs*, Istanbul: MOS Studies 2, 2000.

¹² Steven J. Garfinkle., “Shepherds, Merchants, and Credit: Some Observations On Lending Practices in Ur III Mesopotamia,” dalam *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, edisi 47 Tahun 2004, hal. 1-30; Steven J. Garfinkle, *Entrepreneurs and Enterprise in Early Mesopotamia: A Study of Three Archives from the Third Dynasty of Ur (2112–2004 BC)*, Bethesda, Maryland: CDL Press, 2012.

¹³ Michael Hudson, “The Development of Money-of-Account in Sumer’s Temples,” dalam Michael Hudson and Cornelia Wunsch, (ed.), *Creating Economic Order: Record-Keeping, Standardization and the Development of Accounting in the Ancient Near East*, Bethesda: CDL Press, 2004, hal. 303-329.

membayar sewa atau pajak di akhir panen dengan besaran gandum tertentu. Dari sini terlihat bahwa secara moneter kuil atau kerajaan mengedarkan uang -gandum- terlebih dahulu sebelum menariknya kembali sebagai pajak, hal ini juga berlaku pada uang koin dan semisalnya.

Kedua, pengguna uang yaitu rakyat dari kuil atau kerajaan tersebut secara moneter mendapatkan pekerjaan terlebih dahulu kemudian mereka mendapatkan upah -uang gandum/perak- yang kemudian dengannya mereka bisa membayar pajak atau melakukan jual beli dengan anggota masyarakat yang lain.¹⁴ *Ketiga*, ekonomi yang terbagi dari dikotomi antara pencipta dan pengguna uang ini secara moneter berbeda dan memiliki konsekuensinya secara teoretis dan praktis. Secara teori, pencipta uang tidak memiliki risiko bangkrut (*insolvency risk*) karena ia melakukan *spending* terlebih dahulu sebelum melakukan *tax and borrowing* -(TaB)- sedangkan pengguna uang memiliki risiko bangkrut karena ia harus mendapatkan uang terlebih dahulu -*tax and borrowing*- sebelum bisa melakukan *spending* -(TaB)S.¹⁵

Analogi sederhana dari model ekonomi yang ditemukan oleh para arkeolog ini adalah dengan mengasumsikan bahwa di suatu tempat ada seorang ayah yang memiliki beberapa anak. suatu hari, ia mengumumkan kepada anak-anaknya untuk mengumpulkan kartu khusus dengan tanda tangannya dengan melakukan beberapa pekerjaan rumah. Pada poin ini anak-anak menanyakan urgensi mengumpulkan kartu-kartu tersebut. Kemudian orang tua membuat aturan bahwa jika ingin hidup layak dan makan bersama disini, maka setiap bulan setiap anak wajib mengumpulkan 200 lembar kartu tersebut. Disini pemberian pungutan akhir bulan -pajak- oleh orang tua -pencipta uang- membuat kartu-kartu tersebut bernilai dan dicari oleh anak-anak -pengguna uang.¹⁶

Dalam contoh ini, orang tua yang berperan sebagai pencipta uang mengedarkan uangnya terlebih dahulu sebelum bisa menariknya kembali sebagai pajak. Kemudian pajak yang ditariknya bukanlah suatu pendapatan baginya -karena ia yang menciptakannya- dan dia tidak akan pernah bangkrut karena ia bisa menciptakan uang kapan saja dan dengan apa saja dibantu otoritas -kekuasaan- yang dimilikinya. Berbeda halnya dengan anak-anak yang dalam hal ini berperan sebagai pengguna uang, kartu-kartu tadi adalah pendapatan bagi mereka dan mereka memiliki risiko bangkrut karena mereka tidak bisa menciptakannya.

¹⁴ Michael Hudson, *...and forgive them their debt: Lending, Foreclosure and Redemption from Bronze Age Finance to the Jubilee Year*, hal. 55-78.

¹⁵ Stephanie Kelton, *The Deficit Myth: Modern Monetary Theory and The Birth Of The People's Economy*, New York: Public Affairs, 2020, hal. 28-44, 83-94, 107, 215-238.

¹⁶ Metafor ini diambil dari: Warren Mosler, *7 Deadly Innocent Frauds of Economic Policy*, United States: Valence Co.Inc, 2004, hal. 23-25.

Secara praktik, kemampuan *provisioning power* dari pencipta uang dengan sendirinya menciptakan pengangguran dan ketimpangan jika distribusi ekonomi tidak diberikan dengan merata. Dengan metafor tadi seandainya orang tua memberikan kewajiban kepada setiap anak 200 kartu perbulan dan ia hanya mengeluarkan 100 kartu atau ditambah bahwa setiap anak tidak diberikan kesempatan yang sama dalam mendapatkan kartu, maka analogi ini secara sederhana membuktikan argumentasi diatas. Sejatinya dalam hal ini, jika terjadi anomali ekonomi yang menyebabkan terjadinya kemiskinan dan ketimpangan maka pihak pencipta uanglah yang paling bertanggung jawab untuk menyelesaikannya karena hanya ia adalah unit ekonomi yang mampu melakukan budget defisit.¹⁷

Budget defisit (*current account deficit*) adalah fenomena ekonomi yaitu pencipta uang menyebarkan uang lebih banyak dari pada menariknya kembali sebagai pajak. Dalam analisa sektoral jika salah satu pihak semisal pencipta uang mengalami defisit dalam hal ini maka pihak lain (pengguna uang) akan mengalami surplus. Defisit yang dialami oleh pencipta uang tidaklah berarti apapun bagi dirinya karena ia dapat menciptakan uang kapan saja dan di mana saja, justru hal tersebut menjadi sangat bermanfaat bagi pengguna uang karena jika ia mengalami defisit maka itu adalah sebuah krisis bagi perekonomian.¹⁸

Secara analogis dengan contoh menggunakan metafor seorang ayah dan beberapa anak diatas, maka jika ayah mengedarkan kartu khusus kurang dari 200 setiap bulan kepada anak-anaknya, disisi lain ia mewajibkan kepada anaknya untuk mengumpulkan 200 koin, maka konsekuensinya adalah anak tersebut tidak mungkin bisa mengumpulkan jumlah kartu khusus tersebut yang berdampak pada pemenuhan kebutuhannya.

Secara empiris, budget surplus (*fiscal balance surplus*) -pajak lebih tinggi dari pada spending- yang terjadi di Indonesia pada kurun 1994 sampai tahun 1997 menyebabkan *gross private saving* (keseimbangan sektor privat) minus dan menjadi penyebab terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan. Hal ini sekali lagi menegaskan bahwa entitas pencipta dan pengguna mata uang memiliki fungsi, batasan, otoritas, dan tugas yang berbeda yang tidak bisa disamakan keduanya.¹⁹

¹⁷ Warren Mosler, *Soft Currency Economics II: What Everyone Thinks That They Know About Monetary Policy Is Wrong*, United States: Valence Co.Inc, 1996, hal. 76-79.

¹⁸ William Mitchel & Thomas Fazi, *Reclaiming The State: A Progressive Vision of Sovereignty for a Post-Neoliberal World*, London: Pluto Press, hal. 172-220.

¹⁹ Asian Development Bank, *Policies to Support The Development of Indonesia's Manufacturing Sector During 2020-2024*, Philippines: Asian Development Bank, 2019, hal. 233. DOI: <http://dx.doi.org/10.22617/TCS199910-2> Diakses 25 Agustus 2024.

Secara ringkas, paradigma heterodoks memberikan konsepsi bahwa uang adalah *state unit of account* yang dikeluarkan oleh pencipta currency yang mana pencipta ini tidak memiliki insolvency risk dan memiliki *provisioning power* yang menentukan terhadap pengangguran, kemiskinan, ketimpangan bahkan terhadap inflasi.

Sebaliknya, paradigma yang berlawanan dengan argumentasi diatas yang menjadi paradigma arus utama ekonomi di dunia bahkan di Indonesia mengatakan bahwa uang berasal dari barter. Argumen ini didasarkan pada pemikiran ekonomi ortodoks yang mengatakan bahwa uang muncul secara insidental akibat dari bertemunya dua kepentingan yang sulit ditemukan. Dalam contoh seperti ketika seseorang punya apel namun ia butuh nanas dan orang lain butuh apel dan memiliki nanas maka dalam hal ini barter mudah dilakukan. Namun dalam kondisi jika seseorang punya apel dan butuh nanas sedangkan orang lain punya nanas dan butuh daging maka hal ini sulit ditemukan sehingga hal ini mendorong manusia untuk berinovasi dengan menciptakan perantara (*medium of exchange*). Hal inilah yang melatarbelakangi terciptanya uang menurut paradigma ini.²⁰

Dalam paradigma ini, bentuk apapun dari uang mulai dari koin, kertas maupun uang fiat adalah representasi dari komoditas yang ditukarkan yang memiliki fungsi barter. Pandangan ortodoks ini kemudian dianut oleh berbagai aliran pemikiran dalam ekonomi yang menjadi arus utama paradigma ekonomi di dunia seperti aliran *Neo-classical* yang dipelopori oleh Jevons, Walras dan Menger, aliran *Bastard Keynesian* yang dipelopori oleh Samuelson, Hicks dan Tobin, aliran *Monetarists* yang dipelopori oleh Friedman dan Greenspan, aliran *New Keynesian* yang dipelopori oleh Mankiw, Stiglitz dan Blinder dan lain sebagainya.²¹

Dalam perkembangannya, paradigma ortodoks ini menggunakan banyak sekali adopsi filosofis dan formulasi persamaan matematis yang sangat rumit akan tetapi secara historis-arkeologis permodelan ini tidak memiliki basis pijakan sejarah apapun.²² Serta seluruh permodelan yang dibuat umumnya didesain dengan menggunakan parameter ilusi dan mengabaikan variabel real seperti relasi unit ekonomi antara kreditor dan debitor. Akibatnya, kesalahan premis awal dalam menentukan definisi uang ini menimbulkan permasalahan yang serius ketika diimplementasikan dalam menganalisa ekonomi secara empirik. Hal ini sering kali menjadi pemicu ketidakfahaman pada anomali dari akumulasi ekonomi yang buruk

²⁰ Abhijit V. Banerjee & Eric S. Maskin, *The Quarterly Journal of Economics*, https://scholar.harvard.edu/files/maskin/files/a_walrasian_theory_of_money_and_barter.pdf Diakses 25 Agustus 2024.

²¹ William Mitchel, L. Randall Wray & Martin Watts, *Macroeconomics*, Red Globe Press: London, 2019, hal. 432-496.

²² William Mitchel, L. Randall Wray & Martin Watts, *Macroeconomics*, hal. 32-33.

menjadi sering kali tidak terdeteksi dan hanya dianggap sebagai eksternal shock atau akibat berantai dari mekanisme pasar akibat dari ketidaklengkapan asumsi teoretis dalam paradigma ini. Serta dalam pengaplikasiannya, khususnya dalam menyelesaikan masalah kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, inflasi dan lain sebagainya, paradigma ini secara gegabah mengembalikan fenomena tadi kepada mekanisme pasar dan hanya bisa diintervensi melalui injeksi ekonomi tanpa memberikan proposal konkrit terkait kebijakan apa yang tepat secara fiskal dan moneter.²³

Berbeda halnya dengan pemikir heterodoks seperti Hyman Minsky ataupun Wynne Goodley dengan analisa *sektoral balance* yang bahkan tidak hanya mampu melahirkan kebijakan fiskal dan moneter yang tepat sasaran dalam mengentaskan kemiskinan, pengangguran dan lain lain namun juga mampu memprediksi kapan terjadinya krisis ekonomi.²⁴ Hal ini terjadi karena paradigma ortodoks mengabaikan aspek sejarah dan variabel-variabelnya serta mengandalkan permodelan ekonomi yang berbasis dari imajinasi namun tidak sesuai dengan realita empiris.²⁵

Sebagai tambahan, akibat dari permodelan filosofis-matematis yang mengabaikan variabel kesejarahan dan realita empiris yaitu relasi antara pencipta uang dan penggunaannya, paradigma ortodoks ini beranggapan bahwa pemerintah dan rumah tangga adalah unit ekonomi yang sama yang membutuhkan pemasukan sehingga keduanya dituntut untuk memiliki surplus dalam pendapatan untuk memajukan dirinya masing masing. Hal ini tentunya tidak logis dan mengada-ada karena dalam analisa *balance sheet* jika suatu unit ekonomi surplus semisal unit pemerintah maka unit yang lain -rumah tangga atau swasta- akan defisit.²⁶

Kesimpulan singkatnya, dalam konstruksi berfikir, pandangan ortodoks yang mendefinisikan uang adalah *medium of exchange* ini memiliki berbagai konsekuensi teoretis dan praktis yang kontras dengan paradigma heterodoks. *Pertama*, paradigma ortodoks menafikan peran eksistensi dari suatu otoritas pencipta uang -seperti kuil, kerajaan,

²³ Hyman Minsky, *Stabilizing An Unstable Economy*, United States: Yale University Press, 1986, hal. 129-157.

²⁴ Lihat: *Financial Instability Theory* yang dicetuskan Hyman Minsky dalam L. Randall Wray, *Why Minsky Matters*, UK: Princenton Press, 2016, hal. 71-87; *Three Sectoral Balances* oleh Wynne Goodley dalam Wynne Godley, *What If They Start Saving Again? Wynne Godley on the US Economy*, London Review of Books 22, no. 13 www.lrb.co.uk/v22/n13/wynne-godley/what-if-they-start-saving-again. Diakses 22 Agustus 2024

²⁵ Steve Keen, *Debunking Economics: The Naked Emperor Dethroned*, London: Zrd Books, 2011, hal. 39-141.

²⁶ Stephanie Kelton, *The Deficit Myth: Modern Monetary Theory and The Birth Of The People's Economy*, hal. 21-27.

pemerintahan, dsb- dan menganggap munculnya uang adalah merupakan suatu kejadian yang insidental.²⁷ *Kedua*, berdasarkan argumen pertama maka paradigma ortodoks ini menghilangkan peran pencipta dan pengguna uang yang artinya antara pencipta -pemerintah- dan pengguna -rumah tangga- adalah merupakan suatu unit ekonomi yang sama.²⁸ *Ketiga*, dengan menyamakan pencipta dan pengguna uang maka paradigma ortodoks ini mengabaikan analisa *balance sheet* yang tentu hal ini adalah penafian terhadap realita moneter saat ini.²⁹ *Keempat*, paradigma ortodoks ini menganggap bahwa inflasi, kemiskinan, ketimpangan dan lain sebagainya merupakan hal yang terjadi atas mekanisme pasar -*market equilibrium*- dan tidak ada satu pihakpun yang bisa bertanggung jawab untuk mengontrol dan menyelesaikan masalah ini.³⁰ *Terakhir*, yang paling fatal dari paradigma ini adalah menganggap bahwa pajak merupakan pendapatan negara dan budget surplus merupakan sebuah kebaikan yang mana realitanya adalah sebaliknya, justru hal tersebut adalah pemicu dari krisis ekonomi dan timbulnya berbagai macam permasalahan ekonomi seperti ketimpangan.³¹

Hampir semua akademisi Islam mendalilkan bahwa pada awal mula penciptaan manusia berusaha untuk mencukupi kehidupan mereka sendiri secara mandiri yang kemudian seiring berjalannya waktu manusia mulai bertransaksi dengan barter.³² Menurut al-Ghazali dari barter ini kemudian manusia mengevolusi sistim pembayaran dengan menggunakan satuan khusus yang disebut dengan uang akibat dari kesulitan menyamakan nilai dari komoditas-komoditas yang dipertukarkan, persis seperti paradigma ortodoks.³³

Menyadari kelemahan sistem barter ini, menurut akademisi Islam yang lain seperti Fazlur Rahman, Rasulullah SAW sendiri mengisyaratkan untuk mengganti barter dengan uang seperti hadis yang diriwayatkan oleh Said al-Khudri: “Telah menceritakan Abu Thahir dan Harmalah bin Yahya

²⁷ Steve Keen, *Debunking Economics: The Naked Emperor Dethroned*, hal. 357-362.

²⁸ Stephanie Kelton, *The Deficit Myth: Modern Monetary Theory and The Birth Of The People's Economy*, hal. 21-43

²⁹ Erick Tymoigne, *The Finansial System and The Economy: Principles of Money and Banking*, Second Draft, Portland: Lewis & Clark College, 2018, hal. 2-10

³⁰ William Mitchel, L. Randall Wray & Martin Watts, *Macroeconomics*, hal. 438-442

³¹ Asian Development Bank, *Policies to Support The Development of Indonesia's Manufacturing Sector During 2020-2024*, hal. 233.

³² Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Cet. II, Jakarta: Kencana, 2007, hal. 239.

³³ Adiwarmar Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Ed. 3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hal. 335.

dan lafadnya oleh Harmalah, Telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb, telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Shihab, Telah mengabarkan kepada kami 'Amir bin Sa'ad bin Abi Waqas, bahwasanya Abu Said Al Khudri berkata: Rasulullah SAW melarang kita melakukan dua macam jual beli dan dua macam pakaian. Beliau melarang *mulamasah* (wajib membeli jika pembeli telah menyentuh barang dagangan) dan *munabadzah* (sistem barter antara dua orang dengan melemparkan barang dagangan masing-masing tanpa memeriksanya) dalam jual beli.”³⁴

Dalam khazanah kajian Islam sendiri, uang disebut juga dengan *nuqûd* (jamak dari *naqd*) yang secara bahasa menunjukkan sesuatu yang bernilai.³⁵ Meski begitu, dalam Al-Qur'an sendiri istilah ini tidak ditemukan melainkan diwakili oleh kata *dînâr*, *dirham* dan *wariq*.³⁶ Adapun *dînâr* berasal dari bahasa Romawi, *denarius*, yaitu nama untuk emas yang dicetak.³⁷ Sedangkan *dirham* dari bahasa Yunani yang memiliki arti perak cetakan.³⁸ Kedua kata tersebut terdapat pada Surat Ali Imran ayat 75 dan Yusuf ayat 20, sedangkan kata *wariq* ada pada surat al-Kahfi ayat 19. Adapun dalam hadits, kata *dînâr* dan *dirham* terdapat pada hadits yang diriwayatkan Utsman bin Affan “Jangan kalian jual satu *dinar* dengan dua *dînâr*, dan satu *dirham* dengan dua *dirham*.”³⁹ dan juga Nabi Muhammad saw bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudry : “Jangan kalian jual emas dengan emas, perak dengan perak kecuali sama nilai, ukuran dan timbangan.”⁴⁰

Secara terminologi, uang diartikan oleh al-Ghazali dan Ibn Khaldun sebagai apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga, media transaksi pertukaran dan media simpanan⁴¹ dengan penjelasan:

1. Uang Sebagai Ukuran Harga

³⁴ Lihat: Shahih Muslim bab *Ibtha al-bai' al-mulamasah wa al-munabadzah*, juz 3, no. 1512.

³⁵ Al-Zamakhsyari, *Asas al-Balaghoh*, Beirut: Dar Shadir, 1979, hal. 650

³⁶ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 2.

³⁷ Anestas al-Kramly, *al-Nuqud al-'Arabiyah wa al-Islamiyah wa Ilmu al-Nammiyat*, t.t.: al-Markaz al-Islamy, 1987, hal. 30.

³⁸ Ahmad, *Al-Mishbah Al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir li al-Rafi'i*, Kairo: Al-Amiriah, 1926, hal. 262.

³⁹ Abi al-Husaini Muslim ibn al-Hujaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim, Kitab Al-Mutsaqat, Bab Al-Riba*, Beirut: Dar al-Kutub al-Islami, 1998, Hadits no. 2967 hal. 748.

⁴⁰ Abi al-Husaini Muslim ibn al-Hujaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Hadits no. 2966, hal. 765.

⁴¹ Adimawan A Karim, *Ekonomi Makro Islami*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 80.

Abu Ubaid (w. 224 H) menyatakan bahwa *dirham* dan *dînâr* adalah nilai harga sesuatu, sedangkan segala sesuatu tidak bisa menjadi nilai harga keduanya.⁴² Al-Ghazali (w. 505 H) menegaskan bahwa Allah menciptakan *dînâr* dan *dirham* sebagai hakim penengah diantara seluruh harta agar seluruh harta bisa diukur dengan keduanya. Dikatakan, unta ini menyamai 100 *dînâr*, sekian ukuran minyak za'faran ini menyamai 100. Keduanya kira-kira sama dengan satu ukuran, maka keduanya bernilai sama. Ibn Rusyd (w. 595 H) menyatakan bahwa, ketika seseorang susah menemukan nilai persamaan antara barang-barang yang berbeda, jadikan *dînâr* dan *dirham* untuk mengukurnya. Apabila seseorang menjual kuda dengan beberapa baju, nilai harga kuda itu terhadap beberapa kuda adalah nilai harga baju itu terhadap beberapa baju. Maka jika kuda itu bernilai 50, tentunya baju-baju itu juga harus bernilai 50.⁴³

2. Uang Sebagai Media Transaksi

Uang menjadi media transaksi yang sah yang harus diterima oleh siapa pun bila ia ditetapkan oleh negara. Inilah perbedaan uang dengan media transaksi lain seperti cek. Berlaku juga cek sebagai alat pembayaran karena penjual dan pembeli sepakat menerima cek sebagai alat bayar. Begitu pula dengan kartu debit, kartu kredit dan alat bayar lainnya. Pihak yang dibayar dapat saja menolak penggunaan cek atau kartu kredit sebagai alat bayar sedangkan uang berlaku sebagai alat pembayaran karena negara mensahkannya. Umar bin Khatab RA pernah menjelaskan bahwa saat ia ingin menjadikan uang dari kulit unta, lalu ada yang memberi masukan, bahwa jika itu dilakukan maka unta akan punah, lalu ia membatalkan keinginannya tersebut. Sebaliknya emas dan perak tidak serta merta menjadi uang bila tidak ada stempel (*sakkah*) negara. Imam Nawawi menegaskan bahwa makruh hukumnya bagi rakyat biasa mencetak sendiri *dirham* dan *dînâr*, sekalipun dari bahan yang murni, sebab pembuatan tersebut adalah wewenang pemerintah. Kemudian apabila dirham tercampur maka dapat diketahui kadar campurannya, dengan demikian boleh menggunakannya baik dengan kebendaannya maupun dengan nilainya. Adapun jika kadar campuran tersebut tidak diketahui, maka di sini ada dua pendapat. Pendapat yang paling sah mengatakan hukumnya boleh. Sebab, yang dimaksudkan adalah lakunya di pasaran. Campuran dari tembaga yang terdapat pada dirham tersebut tidak mempengaruhi, sebagaimana halnya adonan.⁴⁴

⁴² Abu Ubaid al-Qasim bin Salam, *Al-Amwal*, Ditahqiq oleh: Muhammad Khalil Harras, Beirut: Dar al-Fikr, 1988, hal. 512.

⁴³ Ressi Susanti, "Sejarah Transformasi Uang Dalam Islam," dalam *Jurnal of Islam and Plurality*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2017, hal. 33-42.

⁴⁴ Ressi Susanti, *Sejarah Transformasi Uang Dalam Islam*, hal. 33-42.

3. Uang sebagai media penyimpanan nilai

Al-Ghazali pernah menjelaskan bahwa karena disebabkan oleh jual beli, muncul kebutuhan terhadap dua mata uang. Seseorang yang ingin membeli makanan dengan baju, dari mana dia mengetahui ukuran makanan dari nilai baju tersebut. Jual beli terjadi pada jenis barang yang berbeda-beda seperti dijual baju dengan makanan dan hewan dengan baju.

Barang-barang ini tidak sama, maka diperlukan “hakim yang adil” sebagai penengah antara kedua orang yang ingin bertransaksi dan berbuat adil satu dengan yang lain. Keadilan itu dituntut dari jenis harta. Kemudian diperlukan jenis harta yang bertahan lama karena kebutuhan yang terus-menerus. Jenis harta yang paling bertahan lama adalah barang tambang. Maka dibuatlah uang dari emas, perak, dan logam. Ibnu khaldun juga mengisyaratkan uang sebagai alat simpanan. Ia menyatakan, kemudian Allah Ta’ala menciptakan dari dua barang tambang, emas dan perak sebagai nilai untuk setiap harta. Dua jenis ini merupakan simpanan dan perolehan orang-orang di dunia kebanyakannya. Dari ketiga fungsi tersebut jelaslah bahwa yang terpenting adalah stabilitas uang, bukan bentuk uang itu sendiri. *Dînâr* yang terbuat dari emas dan diterbitkan oleh raja Dinarius dari Kerajaan Romawi memenuhi kriteria uang yang nilainya stabil. Begitu pula uang *dirham* yang terbuat dari perak dan diterbitkan oleh Ratu dari Kerajaan Sasanid Persia juga memenuhi kriteria uang stabil. Sehingga, meskipun *dînâr* dan *dirham* diterbitkan oleh bukan negara Islam, keduanya dipergunakan di zaman Rasulullah saw.⁴⁵

Sejauh penelusuran peneliti secara historis dalam lingkup sejarah Islam sejak zaman Nabi hingga saat ini, semua argumentasi baik dalam kitab tafsir maupun kitab sejarah hampir semuanya mengidentikkan asumsi bahwa uang adalah *medium of exchange* (alat tukar) yang mana pemahaman ini secara konsekuensi teoretis dan praktis akan memiliki implikasi yang hampir sama dengan pandangan ortodoks.⁴⁶

Menurut al-Mawdudi, Islam datang dengan membawa prinsip pokok dalam ekonomi yaitu: 1) kesetaraan, keseimbangan dan keharmonisan dalam mendapatkan hak. Hak disini merupakan hak-hak universal seperti mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak dalam segi pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. 2) Mekanisme atau proses ekonomi harus dijalankan dengan prinsip syariah yang halal dan *thayyibah*, yaitu proses berjalannya ekonomi harus memiliki kepastian misalnya bebas dari spekulasi-spekulasi yang menyebabkan

⁴⁵ Ressi Susanti, *Sejarah Transformasi Uang Dalam Islam*, hal. 33-42.

⁴⁶ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya 'Ulûm al-Dîn*, Semarang: Toha Putera. t.th, Jilid IV, hal. 88

terjadinya *ghurur* (ketidakjelasan) dalam ekonomi. 3) Tidak menggunakan riba yaitu dalam menjalankan prinsip ekonomi Islam, penyelenggara haruslah bersih dari praktik-praktik riba yang dalam hal ini adalah suku bunga acuan pada bank sentral idealnya adalah 0%. Prinsip ini dalam perspektif Islam adalah sebuah kewajiban untuk diaplikasikan dalam upaya untuk mencapai tujuan ekonomi yaitu kemakmuran, peningkatan standard hidup dan juga diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan sosial seperti pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan.⁴⁷

B. Identifikasi Masalah

Dalam penelitian yang membahas perbandingan antara paradigma heterodoks, ortodoks dan Islam ini yang mana ketiga paradigma tersebut dihubungkan dengan variabel prinsip ekonomi dalam Islam yang diarahkan untuk memastikan paradigma ekonomi mana yang paling sesuai dengan prinsip ekonomi Islam serta ditujukan pula untuk memberikan penafsiran ulang pada ayat-ayat yang berhubungan dengannya mengindikasikan adanya beberapa permasalahan. Diantaranya adalah:

1. Adanya perbedaan pandangan terkait dengan sejarah penciptaan atau munculnya uang dalam pandangan heterodoks, ortodoks dan Islam.
2. Adanya perbedaan defintif terkait asumsi teoretis dasar tentang definisi uang dalam pandangan heterodoks, ortodoks dan Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan sudut pandang kesejarahan dalam awal mula penciptaan uang.
3. Adanya perbedaan sudut pandang dalam bentuk, fungsi, dan sifat uang dalam pandangan heterodoks, ortodoks dan Islam.
4. Adanya perbedaan terkait implikasi teoretis akibat berbedanya definisi uang dalam dalam pandangan heterodoks, ortodoks dan Islam.
5. Adanya perbedaan terkait implikasi praktis akibat berbedanya definisi uang dalam dalam pandangan heterodoks, ortodoks dan Islam.
6. Penelitian yang ada saat ini belum mampu memotret sejauh mana titik temu dan titik seteru antara paradigma heterodoks, ortodoks dan Islam.
7. Belum ditemukan penelitian yang menguji paradigma mana yang paling koheren, reliabel dan valid dalam mengimplementasikan prinsip ekonomi Islam.

C. Batasan Masalah

⁴⁷ Sayyid Abu al-A'la al-Mawdudi, *First Principles of Islamic Economics*. United Kingdom: The Islamic Foundation, 2011, hal. 81-113

Batasan dari penelitian ini adalah pengkhususan pembahasan pada ayat-ayat yang berkaitan dengan ekonomi khususnya pada inti perdebatan tentang definisi uang yang mana hal ini memiliki kandungan teoretis yang kompleks jika ditarik pada implikasi selanjutnya. Pembahasan ini juga mengambil kepada sumber-sumber kitab tafsir klasik maupun kontemporer serta tambahan dari argumentasi akademisi Islam dengan alasan bahwa pembahasan mufassir yang mengkhususkan diri pada fan ilmu ekonomi adalah sangat sedikit sehingga dengan meluaskan cakupan kepada akademisi Islam diharapkan menjadi representasi dari penafsiran uang dan kesatuan kompleksitas teori dibelakangnya.

Pembahasan disini juga membuka diri terhadap proposal ekonomi yang ditawarkan mufassir karena dengan itu dapat dipahami pangkal paradigma yang digunakan sebagai pijakan sehingga kompleksitas penafsiran secara utuh dapat diperlihatkan dengan terang benderang.

Yang terakhir adalah batasan pembahasan disini adalah terkait dengan perkembangan sistem moneter dari yang zaman dahulu hingga masa sekarang sehingga diharapkan dengan mengetahui perkembangan ini maka penafsiran juga akan mengikuti azas pragmatisme dalam teori kebenaran yang tentunya hal ini merupakan sebuah keniscayaan universal karena Al-Qur'an bersifat *shalih fi kulli zaman wa makan*.

D. Rumusan Masalah

1. Apa titik temu dan titik seteru paradigma heterodoks dan ortodoks secara paradigmatic
2. Apa titik temu dan titik seteru proposal kebijakan moneter antara paradigma heterodoks dan ortodoks
3. Apa titik temu dan titik seteru proposal kebijakan fiskal antara paradigma heterodoks dan ortodoks
4. Bagaimana signifikansi paradigma heterodoks dan ortodoks dalam mengakomodasi prinsip ekonomi islam
5. Bagaimana signifikansi paradigma heterodoks dan ortodoks dalam mengakomodasi nilai inklusivitas ekonomi
6. Bagaimana signifikansi paradigma ortodoks dan heterodoks terhadap kontekstualisasi ayat-ayat yang mendefinisikan tentang mata uang

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui titik temu dan titik seteru paradigma heterodoks dan ortodoks secara paradigmatic
2. Untuk mengetahui titik temu dan titik seteru proposal kebijakan moneter antara paradigma heterodoks dan ortodoks
3. Untuk mengetahui titik temu dan titik seteru proposal kebijakan fiskal antara paradigma heterodoks dan ortodoks

4. Untuk mengetahui signifikansi paradigma heterodoks dan ortodoks dalam mengakomodasi prinsip ekonomi islam
5. Untuk mengetahui signifikansi paradigma heterodoks dan ortodoks dalam mengakomodasi nilai inklusivitas ekonomi
6. Untuk mengetahui signifikansi paradigma ortodoks dan heterodoks terhadap kontekstualisasi ayat-ayat yang mendefinisikan tentang mata uang

F. Manfaat Teoretis

1. Mengetahui titik temu dan titik seteru paradigma heterodoks dan ortodoks secara paradigmatic
2. Mengetahui titik temu dan titik seteru proposal kebijakan moneter antara paradigma heterodoks dan ortodoks
3. Mengetahui titik temu dan titik seteru proposal kebijakan fiskal antara paradigma heterodoks dan ortodoks
4. Mengetahui signifikansi paradigma heterodoks dan ortodoks dalam mengakomodasi prinsip ekonomi islam
5. Mengetahui signifikansi paradigma heterodoks dan ortodoks dalam mengakomodasi nilai inklusivitas ekonomi
6. Mengetahui signifikansi paradigma ortodoks dan heterodoks terhadap kontekstualisasi ayat-ayat yang mendefinisikan tentang mata uang tawaran kontekstualisasi penafsiran ayat-ayat mata uang

G. Manfaat Praktis

1. Mengetahui proposal kebijakan paradigma ortodoks dan heterodoks dalam signifikansinya dengan nilai inklusifitas
2. Mengetahui proposal kebijakan paradigma ortodoks dan heterodoks dalam signifikansinya dengan prinsip ekonomi Islam

H. Kerangka Teori

Paradigma ini berangkat menggunakan pendekatan kesejarahan yang berbasis pada bukti empirik daripada mekanisme ekonomi secara moneter yang ditelusuri dari sejak zaman Mesopotamia Kuno hingga mekanisme ekonomi secara moneter hari ini. Bukti empirik ini kemudian diformulasikan oleh para pakar yang kemudian mendefinisikan bahwa uang adalah *state unit of account* yang selanjutnya menginspirasi akan lahirnya aliran ekonomi *Post-Keynesian* dan *Modern Monetary Theory*.⁴⁸ Dalam kerangka teoretisnya, aliran ini mendalilkan bahwa segala fenomena ekonomi yang meliputi khususnya pada kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan inflasi merupakan

⁴⁸ Steve Keen, *Debunking Economics: The Naked Emperor Dethroned*, hal.8-9.

murni kebijakan politik dari sebuah otoritas (pencipta uang) dalam wilayah tersebut. Hal ini dilandaskan bahwa otoritas tersebut mengedarkan uang terlebih dahulu sebelum menariknya sebagai pajak yang mana dalam hal ini uang adalah - *state unit of account*- yang memiliki konsekuensi bahwa otoritas tersebut tidak memiliki risiko bangkrut dan ia memiliki kekuatan alokasi anggaran yang tak terbatas yaitu hanya dibatasi oleh kemampuannya sendiri dalam sumber daya.⁴⁹

Paradigma ini memiliki konsep inti yang disebut dengan *NAIBER* (*Non-Accelerating Inflation Buffer Employment Rasio*) yaitu sebuah konsep pengembangan yang digagas oleh William Mitchel, dkk yang dikembangkan dari proposal Hyman Minsky tentang *Employer of Last Resort*.⁵⁰ *NAIBER* sendiri adalah sebuah akumulasi dari konsekuensi teoretis yang melihat bahwa jika ada sebuah otoritas pencipta uang menciptakan sejumlah uang dengan basis konsumsi yang sesuai dengan kapasitas ekonomi maka selama kapasitas ekonomi tersebut mampu mengakomodasinya maka hal tersebut tidak akan berujung pada timbulnya inflasi.⁵¹

Secara implementatif, proposal kebijakan yang dirumuskan oleh paradigma ini adalah Jaminan Pekerjaan yang mana dengan proposal kebijakan ini maka secara langsung akan berdampak pada penurunan angka pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan serta secara instan mampu meningkatkan kapasitas ekonomi seperti yang terjadi pada kebijakan *The New Deal* era Roosevelt pasca Amerika mengalami *great depression* pada tahun 1930-an silam.⁵²

Paradigma ini juga menyoroti inflasi yang mana variabel ini adalah murni keputusan pemerintah untuk menetapkan batas dasar dalam *banking reserve* dimana jika pemerintah mencabut batasan tersebut maka *interest rates* akan menuju kepada 0% yang sangat sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang anti riba.⁵³ Fenomena ini pernah terjadi pada krisis ekonomi Amerika pada tahun 2007 silam yang mana ketika itu Bank Sentral Amerika atau yang bernama The Fed menghilangkan batasan *banking reserves* sehingga dengan dikeluarkannya stimulus ekonomi yang besarnya hampir 3 kali lipat dari GDP Amerika akan tetapi suku bunga

⁴⁹ Steve Keen, *Debunking Economics: The Naked Emperor Dethroned*, hal. 326-460.

⁵⁰ L. Randall Wray, *Why Minsky Matters*, hal. 33-36.

⁵¹ Mitchell et al, *Macroeconomics*, hal. 301-311.

⁵² Roubini and Mihm, *Crisis Economics: A Crash Course in the Future of Finance*, London: Penguin, 2011, hal. 161.

⁵³ William Mitchel & John Muysken, *Full Employment Abandoned: Shifting Sands and Policy Failures*, Northampton: Edward Elgar, 2008, hal. 205-223.

acuan tetap 0,25%.⁵⁴ Hal ini membuktikan bahwa inflasi merupakan variabel *exogenous* dikontrol penuh oleh kebijakan dari pemerintah, tidak semata-mata tergantung pada mekanisme pasar.⁵⁵

Sebaliknya, secara genealogis, paradigma ortodoks mendasarkan asumsinya pada pemikiran filosofis dari filsuf ekonomi yang dengannya terefleksikan silogisme matematis yang pada awalnya memunculkan konsep bahwa uang tercipta dari barter.⁵⁶ Pandangan uang tercipta dari barter ini kemudian melahirkan berbagai aliran ekonomi dari aliran *Malthus, Neoclassical, Clark, Marshall, Bastard Keynesian, Monetarist, Austrians, New Keynesian, Real Business Cycle, New Monetarist* dan lain sebagainya yang menitik beratkan bahwa mekanisme ekonomi tumbuh secara mandiri dari adanya otoritas dan semua fenomena ekonomi - pengangguran, kemiskinan, ketimpangan dan inflasi- adalah konsekuensi murni dari mekanisme pasar.⁵⁷ Mekanisme pasar yang dimaksud disini ialah sebuah equilibrium (*trade off*) yang mana hal tersebut mendalilkan bahwa fenomena ekonomi apapun terjadi atas dasar equilibrium pasar dimana intervensi yang dilakukan pemerintah hanya mampu mengubah posisi equilibrium tersebut namun hal ini adalah *zero-sum game* (jika satu variabel menang maka satu variabel lagi akan kalah).⁵⁸

Pandangan ini memiliki konsep inti yang bernama *NAIRU (Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment)* yaitu sebuah konsep semisal pada kasus pengangguran dan inflasi maka jika pemerintah ingin menurunkan angka pengangguran maka inflasi akan naik dan sebaliknya jika pemerintah ingin menurunkan angka inflasi maka pengangguran akan naik.⁵⁹ Dalam kerangka teorinya, pandangan ini banyak sekali menggunakan rasionalisasi diagram yang hanya berdasarkan pada simulasi matematis -seperti *Philips Curve* yang menjelaskan tentang *trade off* antara pengangguran dan inflasi- namun hal tersebut sering kali menemui paradox ketika dihubungkan dengan data yang empirik.⁶⁰

Secara implementatif, paradigma ini hanya memberikan sebuah proposal *pump priming* (injeksi ekonomi) yang secara praktik memiliki

⁵⁴ L. Randall Wray, *Modern Money Theory: A Primer on Macroeconomics for Sovereign Monetary Systems*, New York: Palgrave Macmillan, 2015, hal. 270-272.

⁵⁵ William Mitchell & John Muysken, *Full Employment Abandoned: Shifting Sands and Policy Failures*, hal. 218-220.

⁵⁶ Michael Hudson, *...and forgive them their debt: Lending, Foreclosure and Redemption from Bronze Age Finance to the Jubilee Year*, hal. 55-69.

⁵⁷ Mitchell et al, *Macroeconomics*, hal. 432-442.

⁵⁸ Steve Keen, *Debunking Economics: The Naked Emperor Dethroned*, hal. 171-174; William Mitchell & John Muysken, *Full Employment Abandoned: Shifting Sands and Policy Failures*, hal. 218-220; Mitchell et al, *Macroeconomics*, hal. 336-347, 438-442.

⁵⁹ Mitchell et al, *Macroeconomics*, hal. 269-288.

⁶⁰ Mitchell et al, *Macroeconomics*, hal. 301-311.

berbagai permasalahan teknis yaitu: 1) bahwa proposal kebijakan ini memiliki *time-lag* (jeda waktu) tidak langsung menyelesaikan masalah, 2) menimbulkan masalah lain karena injeksi ekonomi merata tidak membantu meningkatkan produktifitas ekonomi melainkan hanya mentransfer uang dari pemerintah kepada pemilik kapital lewat masyarakat yang tentu dengan tidak meningkatnya kapasitas ekonomi maka hal ini akan rawan sekali memicu terjadinya inflasi, 3) kebijakan hanya bersifat temporer karena jika injeksi ekonomi dilakukan terus menerus maka hanya akan menimbulkan inflasi, 4) bersifat paradox karena ketika sudah terjadi inflasi maka pemerintah menurunkan injeksi yang mana jika dihubungkan dengan sifat efisiensi yang dimiliki oleh pemilik kapital *-private enterprises-* maka ketika ekonomi secara spiral menurun maka pemilik kapital akan meminimalisir biaya produksi -seperti phk, dll- yang mana hal ini akan berkonsekuensi pada naiknya angka pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan.⁶¹

Dalam paradigma ini, inflasi adalah merupakan suatu variabel yang *endogenous* -diluar kontrol otoritas- dimana asumsi ini selain didasarkan pada equilibrium dengan total employment juga didasarkan pada teori *QTM (Quantity Theory of Money)* yang mana jika uang diedarkan relatif lebih banyak dari jumlah penduduk dengan velocity yang rendah maka hal ini akan memicu inflasi.⁶² Teori ini memiliki sejumlah kecacatan jika asumsi ini dihubungkan dengan data empirik seperti semisal fenomena krisis ekonomi di Amerika yang jelas paradox dengan asumsi ini.⁶³ Paradigma ini secara singkat memandang bahwa segala fenomena ekonomi yang adalah mayoritas merupakan hasil dari mekanisme pasar dan tidak ada peran pemerintah yang bisa mengintervensi di dalamnya karena pasar adalah variabel yang berada diluar jalur kontrol pemerintah.⁶⁴

Akademisi Islam sejak era *mutaqoddimin* (awal) memberikan kontribusi yang kurang signifikan khususnya dalam diskursus ilmu ekonomi. Sejak awal, ilmu ekonomi yang berkembang dalam khazanah Islam lebih cenderung merupakan perkembangan tersier -bukan primer-dari perkembangan dalam diskursus insider -dalam keilmuan Islam sendiri- khususnya pada perluasan masalah fiqih.⁶⁵ Refleksi dari hal ini

⁶¹ Mitchell et al, *Macroeconomics*, hal.193-202, 438-442.

⁶² Mitchell et al, *Macroeconomics*, hal. 254-267.

⁶³ L. Randall Wray, *Modern Money Theory: A Primer on Macroeconomics for Sovereign Monetary Systems*, hal. 270-272.

⁶⁴ Steve Keen, *Debunking Economics: The Naked Emperor Dethroned*, hal. 177-202.

⁶⁵ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami: Telaah komprehensif Sistem Keuangan Islami*, Penerjemah: Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

memunculkan asumsi yang masih ambigu terkhusus pada perkembangan paradigma Islam dalam ilmu ekonomi yang berakibat pada munculnya asumsi paradigma ekonomi yang hanya dibangun berdasarkan pada preskripsi fiqih yang diajukan oleh akademisi Islam pada masa lalu.

Lemahnya bangunan teoretis ini kemudian ditarik dan secara terburu-buru digunakan sebagai basis argumentatif oleh akademisi Islam era dewasa ini. Efek dari pada hal ini adalah munculnya suatu pemahaman yang hanya bersifat konfirmatif bagi paradigma yang muncul pada fan ilmu ekonomi. Sedangkan mayoritas penelitian dari akademisi Islam sendiri cenderung mengabaikan aspek kesejarahan dalam perkembangan peradaban Islam dan dengan sembrono kemudian mengawinkan ilmu ekonomi dengan Islam hanya dalam pemahaman yang terkesan sangat singkat dan terburu-buru. Kecerobohan ini salah satu indikasi kuatnya adalah menganggap uang -yang disebut sebagai *nuqud* atau *dînâr* atau *dirham* atau *wariq*- sebagai alat tukar (*medium of exchange*) yang jelas dalam pemaparan latar belakang sebelumnya hal ini adalah asumsi filosofis tanpa melalui uji dalam pendekatan sejarah yang memiliki signifikansi rendah secara empiris.⁶⁶

Dari sini terlihat bahwa hingga saat ini paradigma ekonomi Islam memiliki keidentikan dengan dengan paradigma ekonomi ortodoks. Maka untuk selanjutnya, penelitian ini juga ditujukan untuk merangkum secara kuantitatif yaitu dengan mengumpulkan semua materi literatur terkait dengan pandangan ekonomi dalam khazanah Islam dan mengujinya secara mendalam yaitu dimaksudkan selain untuk melihat kecenderungan argumentatsinya apakah lebih dekat ke arah paradigma heterodoks atau ortodoks juga untuk memberikan kritik dan kebaruan terhadap penafsiran ekonomi yang saat ini berkembang dalam perkembangan integrasi keilmuan dalam khazanah tafsir itu sendiri.

I. Tinjauan Pustaka

Mengingat masalah uang merupakan salah satu kajian ekonomi yang selalu menarik untuk dikaji dan digali, maka penulis mencoba melakukan penelusuran dan pengelompokan terhadap berbagai bahan pustaka yang membahas tentang uang dalam Islam. Adapun beberapa bahan pustaka yang membahas masalah uang dalam Al-Qur'an yang penulis temukan

Dalam melihat suatu bangunan paradigmatis, suatu kajian harus melihat kepada dasar dari elemen teori yang menjadi fondasi dalam bangunan paradigma tersebut. Untuk itu maka tinjauan kepustakaan yang

⁶⁶ Siti Mujibatun, "Konsep Uang dalam Hadis", *Desertasi*, Semarang: IAIN Walisongo, 2012.

dihadirkan disini dikerucutkan kepada suatu topik yang merepresentasi titik temu dan titik tolak awal dalam ketiga paradigma tersebut yang dalam hal ini adalah uang. Perbedaan penafsiran dalam mendefinisikan uang ini memiliki konsekuensi teoretis dan praktis yang sangat jauh karena disini adalah titik awal dimana bangunan paradigma itu dibangun. Adapun penelitian-penelitian yang berfokus dalam mendeskripsikan uang dalam khazanah ekonomi antara lain:

1. Desertasi milik Siti Mujibatun yang berjudul “Konsep Uang dalam Hadits” mengkonklusikan bahwa dalam telaah hadis nabawi, uang memiliki sedikitnya lima belas jenis antara lain *dirham* (uang perak), emas, perak, *dînâr* (uang emas), *wariq* (uang perak), *nuqud* (uang emas dan perak), *sikkah* (uang emas dan perak), *fulus* (uang emas bercampur tembaga), secara tidak langsung dengan kata *saman* (harga), *qimah* (harga, nilai), *‘ain* (barang), *si’r* (harga), *ajr* (upah), *sarwah* (harta kekayaan) dan *sarf* (benda sejenis yang dipertukarkan). Secara fungsi, Siti Mujibatun menjelaskan bahwa uang hanya berfungsi sebagai: 1) harta simpanan atau kekayaan, 2) alat tukar, 3) modal, 4) standard nilai, 5) denda/kafarah/pajak. Ia juga memberikan rekomendasi bahwa terjadinya perubahan jenis uang emas (koin) berdampak pada perubahan nilai harga uang dari masing-masing negara yang mengeluarkannya. Untuk itu, guna menciptakan equilibrium dari pemilik uang (investor) dengan pengguna uang (pengusaha), pendekatan dengan sistem sewa modal merupakan keniscayaan, sebagaimana yang dipraktikkan oleh Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) saat ini. Secara kesimpulan, Siti Mujibatun mendeskripsikan uang sebagai alat tukar yang mana dalam hal ini ia berargumentasi dengan menafikan peran pencipta uang.⁶⁷
2. Buku *Mata Uang Islami* Terjemah dari buku *al-Auraq al-Naqdiyyah fi al-Iqtishâd al-Islâmyy* karya Ahmad Hasan. Buku ini membahas konsep uang dalam Islam dan permasalahan mata uang kertas dengan metode *istinbâth* (penelusuran sumber-sumber pendapat para ahli fiqh yang berhubungan dengan masalah keuangan). Hasil Kesimpulan dalam tulisan Hasan menyatakan bahwa meskipun uang tidak harus berasal dari emas, tetapi dalam perspektif fiqh dinyatakan bahwa uang sejenis tidak boleh dipertukarkan secara berlebihan.⁶⁸
3. *Sistem Moneter Islam* buku karya Dr. M. Umer Chapra menguraikan sistem penghapusan bunga (riba) dalam sistem ekonomi konvensional

⁶⁷ Siti Mujibatun, “Konsep Uang dalam Hadis”, *Desertasi*, Semarang: IAIN Walisongo, 2012.

⁶⁸ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami: Telaah komprehensif Sistem Keuangan Islami*, Penerjemah: Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

yang tidak sesuai dengan prinsip asas syariat Islam, dan juga memperkenalkan sistem baru yang lebih tepat dengan menggunakan sistem moneter Islam. Pandangan Chapra dalam analisa moneternya meskipun memiliki keidentikan dalam pengistilahan seperti proposal supaya bank sentral bisa bertindak sebagai *lender of last resort* seperti yang digagas Hyman Minsky dalam paradigma heterodoks namun proposal yang ditawarkan olehnya adalah *investment led-growth* yang jelas hal ini merupakan proposal paradigma ortodoks. Dari pandangan ini, peneliti melihat adanya standard ganda dalam pemikiran Chapra karena ia berdiri pada dua idealisme yang saling bertentangan dalam sudut pandang moneter.⁶⁹

4. Buku milik Jack Weatherford yang berjudul *The History of Money* menguraikan sejarah perkembangan uang yang melalui tiga fase yaitu: 1) fase tunai klasik, 2) uang kertas dan 3) uang elektronik. Meskipun secara kesejarahan dalam perkembangan perubahan bentuk uang buku ini cukup mendetail, tapi secara konten buku ini sama sekali tidak memberikan referensi ilmiah apapun yang bisa digunakan sebagai sandaran argumentatif dalam sudut pandang arkeologis. Berbeda dengan Michael Hudson yang meneliti dengan topik yang sama yang mana ia memberikan bukti konkrit hasil riset bertahun-tahun dengan berkolaborasi dengan para antropologis, arkeologis dan ekonom-ekonom yang kemudian diujikan dan diseminarkan secara internasional serta argumentasinya dapat diterima secara empiris.⁷⁰
5. Tesis karya Khopiatuziadah yang berjudul “Konsep Uang dan Kebijakan Moneter dalam Islam: Studi Atas Pemikiran M.A. Choudhury.” disimpulkan bahwa Rasulullah merekomendasikan penggunaan logam mulia dalam setiap transaksi pasar.⁷¹
6. Tesis karya Darwis Harahap yang berjudul “Analisis Stabilitas Dinar Emas dan Dolar AS dalam Denominasi Rupiah.” Dari hasil penelitiannya dengan beragam alat uji dijelaskan bahwa tingkat stabilitas Dinar emas lebih tinggi dibandingkan dengan dolar AS.⁷²
7. Tesis karya Shofiyah yang berjudul “Konsep Uang Dalam Al-Qur’an: Telaah Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Ibnu Katsir” mensinopsiskan bahwa uang dalam Al-Qur’an memiliki lima jenis yaitu: 1) *dînâr*, 2) dirham, 3) emas, 4) perak dan 5) *wariq* yang semuanya memiliki fungsi sebagai *medium of exchange* dan *unit of account*. Namun

⁶⁹ M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2000.

⁷⁰ Jack Weatherford, *The History of Money*, New York: Crown Publisher, 1988.

⁷¹ Khopiatuziadah, “Konsep Uang dan Kebijakan Moneter dalam Islam: Studi atas Pemikiran M.A. Choudhury,” *Tesis*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2004.

⁷² Darwis Harahap, “Analisis Stabilitas Dinar Dirham dan Dolar AS dalam Denominasi Rupiah”, *Tesis*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2006.

definisi *unit of account* disini tidak ada penjelasan sama sekali yang mirip dengan penjelasan paradigma hetreodox dan justru semua argumentasinya lebih identik dengan paradigma ortodoks.⁷³

8. Buku yang ditulis oleh Ahmad Izzan dan Syahri Tanjung dengan judul *Referensi Ekonomi Syariah; Ayat-ayat al-Qur'an yang berdimensi Ekonomi*, didalamnya dibahas mengenai ayat-ayat ekonomi yang disusun secara tematik yang disusun berdasar kandungan isi ayat al-Qur'an.⁷⁴
9. Penelitian Takiddin yang berjudul "Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam" dalam *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, menguraikan masalah uang dalam perspektif ekonomi Islam. Hasil penelitiannya dijelaskan bahwa menurutnya uang yang terbaik digunakan dalam ekonomi Islam adalah *dînâr* dan *dirham*, serta fungsi dari kedua mata uang tersebut tidak lain hanya sebatas sebagai alat tukar dan tidak untuk dijadikan komoditi, Islam juga melarang transaksi di pasar uang dan pasar modal.⁷⁵
10. Penelitian Muslimin Kara yang berjudul "Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam" dalam *Jurnal Assets* menegaskan bahwa uang adalah alat tukar yang dapat digunakan dalam suatu wilayah tertentu, tidak harus *dînâr* ataupun *dirham*, uang terus berevolusi mengikuti perkembangan sejarah dan jenisnya pun beragam.⁷⁶
11. Jurnal yang ditulis oleh Rina Rosiana yang berjudul "Pemikiran Imam al-Ghazali tentang Uang" kembali mempertegas bahwa uang memiliki dua fungsi, yaitu sebagai media pertukaran dan sebagai satuan hitung. Jadi, permintaan uang hanya untuk motif transaksi dan motif kehati-hatian. Berbeda dengan ekonomi konvensional, uang berfungsi sebagai media penyimpan nilai dan kekayaan yang membuat permintaan uang untuk motif spekulatif. Hal ini lah yang mendorong seseorang untuk menjadikan uang sebagai komoditas bisnis, yang bisa diperdagangkan dengan orientasi bunga. Sebab, bunga tersebut dianggap sebagai harga dalam menggunakan uang. Jadi, orang lebih tertarik memperdagangkan uang di sektor non riil,

⁷³ Sofiah, "Konsep Uang dalam Al-Qur'an: Telaah Tafsir al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir," *Tesis*, Jember: Program Studi Ekonomi Syari'ah Pascasarjana IAIN Jember, 2016.

⁷⁴ Ahmad Izzan & Syahri Tanjung, *Referensi Ekonomi Syariah: Ayat-ayat al-Qur'an yang berdimensi Ekonomi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

⁷⁵ Takiddin, "Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam", dalam *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, edisi: Juni Tahun 2014, hal. 206-212

⁷⁶ Muslimin Kara, "Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam", dalam *Jurnal Assets*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2012, hal. 44-55.

daripada digunakan sebagai transaksi di sektor riil, yang bisa mengakibatkan terhambatnya arus aktivitas ekonomi.⁷⁷

Dari sekian penelitian terkait tentang definisi uang yang menjadi landasan dari bangunan paradigmatis dalam ilmu ekonomi, rerata hampir semuanya menggunakan pemahaman yang sama, yaitu hanya memfabrikasi paradigma ortodoks yang begitu menghegemoni dan populer di Indonesia. Belum ada satu tulisanpun dari Akademisi Islam maupun Mufassir Islam yang menulis dalam topik khusus dalam ekonomi untuk membedakan paradigma ekonomi inklusif yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam saat ini. Untuk itu, penelitian ini berusaha memberikan pembaharuan dalam upaya menawarkan alternatif paradigma baru dalam merekonsepsi paradigma ekonomi Islam yang mana hal ini juga berimplikasi pada pembaruan penafsiran-penafsiran khususnya pada ayat-ayat yang mengandung diskursus ekonomi.

J. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu studi kepustakaan. Metode ini diambil karena sumber data dari penelitian yang dilakukan merujuk pada sumber-sumber data kepustakaan yang kemudian hal tersebut didialektikakan tanpa memiliki urgensi kebutuhan pada data lapangan secara *real-time*.⁷⁸

Sedangkan desain metode kualitatif-kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *grounded theory*. *Grounded theory* adalah sebuah pendekatan yang reflektif dan terbuka, di mana pengumpulan data, pengembangan data, pengembangan konsep teoritis, dan ulasan literatur berlangsung dalam proses siklus (berkelanjutan). Pendekatan *grounded theory* bergerak dari level empirikal menuju ke level konseptual-teoritik atau penelitian untuk menemukan teori berdasarkan data. Pada pendekatan ini, dari datalah suatu konsep dibangun. Dari datalah suatu hipotesis dibangun. Kategori-kategori dan konsep-konsep dikembangkan oleh peneliti di lapangan. Data yang bertambah dimanfaatkan untuk verifikasi teori yang timbul di lapangan yang terus menerus disempurnakan selama penelitian berlangsung.⁷⁹

Desain penelitian ini meskipun termasuk dalam cakupan metode kualitatif namun memiliki perbedaan dari desain kualitatif lainnya seperti desain studi kasus, fenomenologi dan sebagainya. Perbedaan itu antara lain: 1) Dalam sebagian besar pendekatan, peneliti mengikuti prosedur

⁷⁷ Rina Rosia, "Pemikiran Imam al-Ghazali Tentang Uang," dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2018, hal. 14-27.

⁷⁸ M. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hal. 27.

⁷⁹ Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989, hal. 8-9.

analisis sistematis. Dalam proses pengumpulan dan dan analisisnya, *grounded theory* lebih terstruktur dibanding model riset kualitatif lain meski strateginya sama. 2) Dalam penelitian, proses riset memungkinkan untuk mendapat sebuah asumsi. Ini berarti menjauhkan diri dari teori yang sudah ada, guna memusatkan diri pada penemuan dan pemahaman baru yang akan dimunculkan lewat riset. 3) Peneliti tidak semata-mata menjelaskan, tetapi juga mengonseptualisasikan; mereka akan berupaya keras untuk menghasilkan dan mengembangkan teori.⁸⁰

Seperti penelitian kebanyakan, *grounded theory* mengharuskan para peneliti melakukan interpretasi teoretis. Dengan demikian, dituntut untuk terus menerus mengontribusikan pengetahuan sesuai dengan disiplin atau profesi. Sebagaimana disebutkan oleh Diana Vaughan, ia menulis tentang sebuah pendekatan alternatif untuk memproduksi teori umum. Diana mengusulkan “pengolahan teori” yang berangkat dari teori sebelumnya dan mengembangkan teori tersebut dengan menghubungkannya dengan analisis kasus yang bersifat kualitatif. Di dalam metodologi *grounded theory* selalu ditekankan bahwa seumum apapun teori, seluas apapun cakupannya, atau seabstrak apa pun bentuknya, teori mesti selalu dikembangkan melalui data, inilah aspek terpenting di dalam metodologi *grounded theory*. Seperti apa pun upaya yang dilakukan untuk membangun teori umum atau teori substantif, kita akan tetap mengalami kegagalan ketika terlampaui terikat dengan konsep-konsep dan kerangka-kerangka konseptual yang dipaparkan oleh *grounded theory* pendahulu. Yang berbahaya adalah ketika konsep-konsep dan kerangka kerangka konseptual dari teori terdahulu tersebut tidak disesuaikan dengan penelitian terkini. Konsep-konsep dan kerangka-kerangka konseptual tersebut harus selalu disesuaikan dengan data yang diperoleh.⁸¹

Karakteristik Utama *grounded theory* adalah dengan menggunakan:

- 1) Pendekatan induktif di mana peneliti mulai dengan mengumpulkan data baik dari literatur yang sudah ada maupun dari lapangan yang kemudian mengembangkan teori dari data tersebut, bukan dari hipotesis atau asumsi semata.
- 2) Iteratif dan siklis yaitu proses penelitian ini bersifat iteratif, dengan pengumpulan data dan analisis dilakukan secara berulang. Setiap siklus dapat mengubah pemahaman awal dan memandu peneliti untuk kembali kepada temuan-temuan terbaru untuk memperoleh lebih banyak data dan memastikan komprehensitas, kompleksitas dan reliabilitas argumentasi terbangun sesuai kaidah-kaidah akademik.
- 3)

⁸⁰ Christine Daymon et al., *Metode-Metode Riset Kualitatif Dalam Public Relations & Marketing Communications*, Bandung: PT Bentang Pustaka, 2008, hal. 35.

⁸¹ Diana Vaughan, *Theori Elaboration: The heuristic of Case Analysis*, New York: Cambridge University Press, 1992, hal. 175.

Proses pengkodean khusus yakni bahwa analisis data dalam grounded theory melibatkan beberapa tahap pengkodean: pengkodean terbuka, pengkodean aksial, dan pengkodean selektif. Tahapan ini membantu mengidentifikasi kategori, tema, dan hubungan dalam data. 4) Menggunakan sampel teoritis yaitu bahwa desain *grounded theory* menggunakan sampling teoritis, di mana pemilihan sampel data didasarkan pada kebutuhan teori yang sedang diujikan.⁸²

1. Sumber Data Penelitian

Keotentikan data dalam menetapkan sumber data dalam studi kepustakaan memegang peranan yang sangat penting. Keotentikan tersebut haruslah ditinjau dari: 1) keaslian teks, 2) keaslian penulis 3) keaslian bentuk naskah dan 4) keaslian sumbernya.⁸³

Adapun sumber dalam data ini terdapat dua sumber yaitu: 1) primer dan 2) sekunder. Sumber data primer ialah data-data yang diperoleh langsung dari tokoh melalui karya-karyanya sedangkan data sekunder adalah data-data penunjang yang didapatkan diluar dari pemikiran tokoh utama yang dikaji yang berhubungan dan dengan tokoh utama.⁸⁴

Dalam penelitian ini, sumber data primer merupakan karya utama para pemikir dari aliran paradigma heterodoks, ortodoks dan Islam yang meliputi buku, jurnal, kitab tafsir, maupun kitab lainnya yang merepresentasikan pemikiran aliran ekonomi yang dianutnya. Adapun data sekunder didapatkan dari akademisi-akademisi yang ikut memberikan respon argumentatif baik dukungan, kritik dan sanggahan terhadap pemikir yang mewakili paradigma ekonomi yang dianutnya.

2. Teknik Pengumpulan Data

Koentjaraningrat berpendapat bahwa teknik kepustakaan merupakan cara pengumpulan bermacam-macam material data yang terdapat di ruang kepustakaan, baik kepustakaan manual ataupun digital yang berupa buku, jurnal kitab dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan penelitian. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dan informasi melalui pembacaan literatur atau sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, penelitian terdahulu, makalah, jurnal, artikel, hasil laporan dan majalah yang berkaitan dengan penelitian. Dengan teknik ini peneliti dapat mengumpulkan berbagai referensi teori tentang kajian teoretis yang berhubungan dengan permasalahan dan penelitian ini.⁸⁵

⁸² Glaser B.G. & Strauss A.L., *The Discovery of Grounded Theory*, New York: Aldine Publishing Co, 1967, hal. 249.

⁸³ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015 hal. 67.

⁸⁴ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2020, hlm. 58.

⁸⁵ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hal. 420.

3. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan bisa dengan menggunakan metode analisis isi ataupun dengan analisis data model Miles dan Huberman. Analisis isi adalah sebuah teknik analisa data dalam penelitian yang difokuskan pada konten aktual seperti buku teks, esay, jurnal, dan sebagainya sehingga sumber-sumber tadi dapat digunakan peneliti untuk mengkaji pemikiran manusia secara tidak langsung melalui analisis terhadap komunikasi atau karya mereka. Sedangkan pada model Miles dan Huberman menekankan pada aktifitas analisis data yang harus dilakukan secara interaktif dan dilakukan secara terus-menerus sampai dirasa cukup.⁸⁶

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan keduanya dikarenakan keduanya memiliki kegunaan dalam penelitian yang mana sumber primer dan sekunder seperti yang dijelaskan sebelumnya menjadi pusat analisis yang merepresentasikan pemikiran penulis dan analisa yang berulang memastikan bahwa komperhensifitas argumentasi terpenuhi dan arah kepada obyektifitas peneliti dapat menjadi lebih dekat.

Adapun langkah-langkah atau prosedur dalam teknik analisis data ini adalah sebagai berikut: 1) Peneliti memutuskan tujuan khusus yang ingin dicapai, 2) Mendefinisikan istilah-istilah yang penting harus dijelaskan secara rinci, 3) Mengkhususkan unit yang akan dianalisis, 4) Mencari data yang relevan, 5) Membangun hubungan konseptual untuk menjelaskan bagaimana sebuah data berkaitan dengan tujuan, 6) Merencanakan penarikan data, 7) Merumuskan pengkodean kategori, 8) Mereduksi data yaitu peneliti melakukan pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasian data mentah dalam catatan-catatan tertulis, 9) Display data, tahap ini data yang sudah direduksi kemudian didisplay hingga memberikan pemahaman terhadap data tersebut, 10) Kesimpulan, setelah reduksi dan display data terlaksana, maka dilakukan konklusi atau penarikan kesimpulan dari data yang telah diteliti. Dari kesimpulan tersebut dipaparkan penemuan baru dari penelitian yang dilakukan. Hasil kegiatan ini masih bisa diteliti kembali, dengan kembali melakukan reduksi, display data dan kembali akan menghasilkan konklusi, begitu seterusnya agar mendapatkan hasil yang maksimal.⁸⁷

Adapun terkait sumber data yang mencangkup pada penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dalam penelitian ini adalah menggukanan teknik analisa data dengan metode *maudhu'i*. Metode ini adalah menghimpun ayat-ayat

⁸⁶ Milya Sari & Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA," dalam *Jurnal Natural Science: Jurnal Pendidikan Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2020, hal. 41-53.

⁸⁷ Fraenkel, J.R & E. Wallen, *How to Design and Evaluate Research in Education*, Singapore: Mc Graw Hill, 2007, hal 433-440.

yang membicarakan topik tertentu kemudian mengumpulkan kitab-kitab tafsir yang membahas pada topik yang telah ditetapkan tersebut. Adapun secara teknis maka dalam menerapkan metode ini diperlukan langkah-langkah seperti: 1) menetapkan topik, 2) menghimpun ayat-ayat yang berkaitan, 3) menyusun urutan ayat (misal periode turunnya), 4) memahami korelasi ayat, 5) melengkapi pembahasan dengan hadits ataupun penafsiran dari mufassir lain, 6) mengkompromikan antara 'am dan khas, *mutlaq* dan *muqoyyad*, *nasikh* dan *mansukh* dan sebagainya, 7) menyusun pembahasan dalam kerangka yang utuh.⁸⁸

4. Triangulasi Data

Triangulasi data adalah istilah yang diperkenalkan oleh Norman K. Denzin yang meminjam dari istilah militer yang secara terminologi adalah cara untuk meningkatkan derajat validitas dan kredibilitas dalam suatu temuan riset dengan cara membandingkannya pada pendekatan yang berbeda.⁸⁹ Perbedaan pendekatan ini menurut Denzin (dikutip oleh Patton) meliputi empat pendekatan⁹⁰ yaitu: 1) Triangulasi sumber data, adalah penggunaan beragam sumber data dalam suatu kajian, 2) Triangulasi antar-peneliti atau biasa diistilahkan Triangulasi investigator (jika penelitian dilakukan secara berkelompok) penggunaan beberapa evaluator atau ilmuwan yang berbeda, 3) Triangulasi metode, penggunaan metode ganda untuk mengkaji masalah atau program tunggal, seperti wawancara, pengamatan dan dokumen dan sumber data lainnya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi, 4) Triangulasi teori, adalah penggunaan sudut pandang ganda dalam menafsirkan seperangkat tunggal data. Adapun dalam penelitian ini keempat cara triangulasi ini akan digunakan secara bersamaan dalam upaya untuk meningkatkan derajat validitas, reliabilitas dan kredibilitas yang mumpuni.

K. *Research Gap*

Research gap dari penelitian ini adalah ditemukan fakta akademik bahwa sejauh ini penelitian ekonomi di Indonesia hanya bersifat parsial yakni hanya pada level mendialektikakan antar teori yang bersebrangan dan belum sampai pada level paradigmatis sehingga hal ini mendorong dan memotivasi peneliti untuk lebih meningkatkan diskusinya pada level paradigmatis sehingga dapat diketahui semua simultan signifikansi setiap paradigma jika dihubungkan dengan nilai inklusifitas dan prinsip ekonomi Islam.

⁸⁸ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1994, hal. 112-114.

⁸⁹ Anselm L. Strauss, *Qualitative Analysis for social Scientist*, Cambridge: Cambridge University Press, 1987, hal. 284.

⁹⁰ Patton, *How to Use Qualitative Methodss in Evaluation*, diterjemahkan oleh: Budi Puspo Priyadi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hal. 331.

L. Novelty

Belum ada satu penelitianpun di Indonesia yang membandingkan secara simultan dalam spektrum ilmu ekonomi secara paradigmatik dan dihubungkan dengan nilai inklusifitas dan prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini memberikan kebaruan dengan mendialektikakan disiplin Ilmu Ekonomi secara paradigmatik yang dihubungkan dengan nilai inklusifitas dan Prinsip Ekonomi Islam serta memberikan tawaran baru dalam penafsiran terkait mata uang.

M. Sistematika Penulisan

Dibawah ini merupakan sistematika penulisan tesis ini.

Bab I berisi terkait latar belakang permasalahan yaitu pergulatan yang sangat pelik terkait distingsi premis dasar dalam tiga paradigma yaitu pada variabel uang. Kemudian dilanjutkan pada identifikasi permasalahan, batasan permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian yang masing masing meliputi 7 aspek. Serta diteruskan pada metode penelitian yang meliputi sumber data, teknik analisis data, triangulasi data dan sistematika penulisan.

Bab II berisikan khusus pada pembahasan definisi ekonomi secara etimologi, terminologi dan epistemologi serta juga membahas terkait paradigma ortodoks dan heterodoks dalam teori uang, teori suku bunga dan pengangguran, relasi otoritas dan pasar, konsekuensi teoretis konsekuensi praktis, refleksi moneter, refleksi fiskal

Bab III pada penelitian ini menjelaskan tentang ulasan singkat tentang paradigma ekonomi Islam yang dilanjutkan dengan pembahasan prinsip ekonomi Islam yang meliputi apa hak dan kewajiban pemerintah kepada rakyatnya pada aspek pengangguran, ketimpangan, kemiskinan, pendidikan dan kesehatan serta tak lupa memberikan bab khusus terkait riba yang tentu dua hal ini juga menjadi bab krusial dalam ekonomi masa kini.

Bab IV ini membahas tentang sintesa paradigma ortodoks dan heterodoks terkait titik temu dan titik seteru paradigma ortodoks dan heterodoks secara paradigmatik, titik temu dan titik seteru paradigma ortodoks dan heterodoks dalam kebijakan moneter, titik temu dan titik seteru paradigma ortodoks dan heterodoks dalam kebijakan fiskal, perbandingan dan berdebatan kedua paradigma dalam mengakomodasi prinsip ekonomi Islam.

Bab IV adalah penutup yaitu simpulan dan saran dan dilanjutkan dengan riwayat hidup penulis.

BAB II

DEFINISI EKONOMI DAN PENJELASAN KEDAULATAN MATA UANG SERTA PENJELASAN PARADIGMA ORTODOKS DAN HETERODOKS

A. Definisi Ekonomi Secara Etimologi

Secara bahasa, istilah ekonomi terbentuk dari akar kata *oikos* (rumah tangga) dan *nomos* (pengaturan) yang jika digabung menjadi *oekonomia* dalam bahasa Yunani yang mana istilah ini pertama kali diistilahkan oleh Penulis Yunani Kuno bernama Xenophone pada abad ke empat sebelum masehi yang merepresentasikan seni untuk memajemen rumah tangga.¹

Secara literatur, ilmu ekonomi sendiri pasca dicetuskan oleh Filusuf Yunani Kuno menjadi diskursus moral yang menjadi sub-ordinat dari ilmu politik, moral dan teologi yang mana hal ini terus berkembang dari abad keempat sebelum masehi hingga pada masa Skolastik pada abad 17-an seperti yang dikemukakan oleh Francis Hutcheson dari University of Glasgow dengan karya *A Short Introduction to Moral Philosophy* yang menekankan pada tiga diskursus inti yaitu: hak pribadi, ilmu ekonomi dan politik dengan semangat spiritual-eksistensial dalam basis argumentasinya.²

Dalam perkembangan selanjutnya, disiplin ilmu ekonomi mulai memisahkan diri dari kajian teosofis pada awal abad 18-an yang disinyalir diawali oleh Adam Smith dengan karyanya *Inquiry into the Nature and*

¹ Roger E. Backhouse & Steven G. Medema, "Retrospective on the Definition of Economics," dalam *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 23 No. 1 Tahun 2009, hal. 221-233.

² Norbert Gotz, "Moral Economy: Its Conceptual History and Analytical Prospects," dalam *Jurnal of Global Ethics*, Vol. 11 No. 2 Tahun 2015, hal. 147-162.

Causes of the Wealth of Nations yang memberikan gambaran terkait teori tentang akumulasi kekayaan dalam bingkai *self-interest* baik dalam lingkup mikro ataupun makro dalam bingkai ekonomi merkantilis.³ Pergeseran ini merupakan sebuah konsekuensi dari munculnya revolusi industri yang mengarahkan ilmu ekonomi pada sebuah ranah diskusi yang hanya membahas pada ha-hal materialistis seperti yang dikemukakan oleh ekonom klasik (*Classical Economist*). Teori-teori tersebut antara lain dicetuskan oleh Adam Smith tentang *Theory of Absolute Cost Advantage*, David Ricardo tentang *Theory of Comparative Advantage* yang menitikberatkan pada perhitungan matematis berdasarkan pada ekuilibrium yang diskursus ini berada di luar dari jangkauan diskursus nilai moral, teologi dan etis serta lebih menekankan pada individualisme-materialistis.⁴

Dari sini terlihat bahwa definisi ekonomi berkembang menyesuaikan dengan perkembangan peradabannya yang mana pada awal kemunculannya ekonomi merupakan sebuah cabang dari diskursus etika-moral-filosofis dari ilmu politik yang menekankan pada etika dan manajerial keluarga yang secara praktis menjadi pedoman bagi pengelolaan aktifitas ekonomi secara pribadi dan dalam bermasyarakat. Hal ini diperkuat oleh Aristoteles yang menjabarkan bahwa dalam membangun sebuah negara maka diawali dengan membangun rumah tangga atau keluarga (*oikos*), sejumlah keluarga akan membentuk desa, sejumlah desa akan membentuk negara atau kota (*polis*). Menurutnya, mengatur rumah tangga, desa dan negara yang membedakan hanyalah ruang lingkungannya. Rumah tangga, desa, dan negara terbentuk secara alamiah untuk memenuhi tujuan eksistensinya dalam seluruh kegiatan ekonomi, sosial, dan politik yang merupakan bentuk implementasi dari sistem nilai Yunani yang menekankan kepentingan umum -kesejahteraan masyarakat secara luas- di atas kepentingan individu yang mana definisi ekonomi semacam ini melahirkan *homo politicus* (manusia yang cinta pada keadilan dan kesejahteraan umum).⁵

Namun belakangan pandangan filsuf Yunani tentang ekonomi ini yang dilestarikan hingga zaman skolastik ini berubah dan kemudian tereduksi secara sempit hanya kepada arah materialistik yang mementingkan kepentingan individu. Cikal bakal definisi ini disandarkan

³ Adam Smith (1776), *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, Oxford: Oxford University Press, 1976, hal. 428.

⁴ Anis Byarwati & Tjiptohaadi Sawarjuwono, "Ekonomi Islam atau Iqtishad" dalam *Jurnal IMANES: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi Islam*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2013, hal. 14-25.

⁵ W.I.M Polli, *Tonggak-Tonggak Sejarah Pemikiran Ekonomi*, Surabaya: Brillian Internasional, 2010, hal. 6-8.

pada pemikiran Adam Smith yang menyatakan bahwa tindakan individu yang mementingkan kepentingan diri sendiri pada akhirnya akan membawa kebaikan masyarakat seluruhnya karena tangan tak tampak (*invisible hand*) yang bekerja melalui proses kompetisi dalam mekanisme pasar.⁶ Dalam model definisi ekonomi seperti ini, manusia ditempatkan sebagai *homo economicus* yaitu manusia yang berkecenderungan materialis hedonis, sehingga ia selalu dianggap memiliki serakah atau rakus terhadap materi. Dalam perspektif materialisme hedonisme murni, segala kegiatan manusia diorientasikan kepada segala sesuatu yang bersifat material. Manusia dianggap merasa bahagia jika segala kebutuhan materialnya terpenuhi secara melimpah. Pengertian kesejahteraan yang materialistis seperti ini seringkali menafikan keterkaitannya dengan unsur-unsur spiritual, sosial dan moralitas. Dalam definisi ini, materi adalah sangat penting bahkan dianggap sebagai penggerak utama perekonomian. Dari sinilah sebenarnya, istilah kapitalisme berasal, yaitu paham yang menjadikan kapital (modal / material) sebagai isme (tujuan utama).⁷

Dalam Khazanah Islam sendiri, ilmu ekonomi disebut juga dengan ‘ilmu *al-iqtishâd*’ meskipun dalam kitab-kitab klasik istilah ini tidak ditemukan. Istilah ini baru muncul pada sekitar awal abad 11 Masehi diprakarsai oleh al-Ghazali dalam kitabnya ‘*Thya’ Ulum al-Din*. Dalam kitabnya tersebut, al-Ghazali menyatakan bahwa mempelajari ilmu *al-iqtishâd* adalah wajib bagi orang yang mermaqom rezeki kasab -wajib mencari- bukan kepada yang bermaqom *tajrîd* -rezekinya datang sendiri- dengan tujuan untuk menghindaari kesulitan dalam bermuamalah yaitu supaya orang dalam golongan ini bisa menjauhi segala larangan dalam aktifitas ekonominya.⁸

Secara kebahasaan, *al-iqtishâd* merupakan masdar dari fi’il madhi *iqdashoda* (arab) yang berasal dari akar kata *qashada* (arab) secara literal memiliki arti seimbang, tengah, tidak berlebihan, balanced, in between, equilibrium. Kata *qashada* ini yang mana masdarnya *qashdun* (arab) juga memiliki arti *tawassuth* yaitu moderat dan *al-i’tidal* yakni sikap adil⁹ Al-Qur’an sendiri menyebutkan kata *qashada* (arab) dan tasrifnya sebanyak enam kali antara lain:

⁶ P. Samuelson & W. D. Nordhaus, *Microeconomic*, (ed 17), New York: McGraw-Hill. 2001, hal. 30-31; 216.

⁷ M. U. Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi*, Jakarta. Gema Insani Press, 2010, hal. 3.

⁸ Dimiyati, *Teori Keuangan Islam: Rekonstruksi Metodologis Terhadap Konsep Keuangan al-Ghazali*, Yogyakarta: UII Press, 2007, hal. 1-3.

⁹ Kamus al-Ma’ani, dalam Website <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/-اقتصاد-في-النفقة/>? Diakses 7 September 2024.

1. Dalam surah An-Nahl ayat 9 yang mana kata *qashdun* disini dijabarkan sebagai jalan yang lurus.

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِزٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَكُمُ أَجْمَعِينَ

Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. dan Jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar).

2. Dalam surah Luqman ayat 32, kata *muqtashidun* (arab) isim fa'il dari kata *iqtashada* (arab) diartikan juga dengan jalan yang lurus.

وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوَاجٌ كَالظَّلْلِ دَعَا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمَا

يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كَأُلُوفٍ خَتَّارٍ كَفُورٍ

Apabila mereka digulung ombak besar seperti awan tebal, mereka menyeru kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya baginya. Kemudian, ketika Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, sebagian kecil (saja) di antara mereka yang tetap menempuh jalan yang lurus. Tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami selain pengkhianat yang tidak berterima kasih.

3. Dalam Surah Fathir ayat 32 yang mana kata *muqtashidun* (arab) diartikan sebagai pertengahan.

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ۗ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ

بِالْخَيْرَاتِ ۗ إِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ

Kemudian kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang Menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang pertengahan dan diantara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan 9 dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang Amat besar.

4. Dalam Surah Al-Maidah ayat 66 kata *muqtashidah* (arab) diartikan dengan umat (golongan) yang pertengahan atau lurus.

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ

مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ

Dan Sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat dan Injil dan (Al Quran) yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. Diantara mereka ada golongan yang pertengahan/lurus dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka.

5. Dalam Surah Luqman ayat 19 kata *waqshid* (arab) fi'il amar dari *qashada* memiliki makna sederhana atau berlaku wajar."

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

Dan sederhanalah (berlakulah secara wajar) dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

6. Terakhir ada pada Surah At-Taubah ayat 42 yang mana lafadz *qâshidan* yang menjadi na'at (sifat) dari lafadz safaran menunjukkan makna sederhana atau dekat.

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعَدَتْ عَلَيْهِمُ السُّعْيَةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu Keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, pastilah mereka mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu Amat jauh terasa oleh mereka. mereka akan bersumpah dengan (nama) Allah: "Jikalau Kami sanggup tentulah Kami berangkat bersama-samamu." mereka membinasakan diri mereka sendiri dan Allah mengetahui bahwa Sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

Menurut al-Misri, ayat ayat yang dijabarkan yang menjelaskan tentang makna al-iqtishad dengan segala perubahan bentuk morfologisnya mengindikasikan bahwa secara bahasa *al-iqtishâd* memiliki pemaknaan yang sangat identik dengan *al-tawassuth* (moderat/pertengahan/seimbang) dan *al-istiqôm* (lurus) yang mana berlaku lurus ini juga erat kaitannya dengan berlaku adil (*al-adalah*).¹⁰ Simpulan dari definisi-definisi kosakata yang diuraikan diatas maka tampaklah bahwa ekonomi (*al-iqtishâd*) dalam Islam tidak melulu melihat ekonomi adalah hanya tentang produksi, distribusi dan konsumsi secara materialis melainkan ia menekankan bahwa ekonomi harus dilandasi oleh nilai moral dan etis yang mana hal tersebut memadukan keserasian dan keseimbangan antara duniawi-*ukhrawi*, keharmonisan sosial dalam menyelesaikan ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin dengan instrumen zakat, dan yang paling penting adalah menempatkan manusia bukan sebagai subjek yang materialis melainkan menempatkan manusia sebagai individu sosial dan religius yang seimbang dan moderat.¹¹

¹⁰ R. Y. Al-Misri,, *Ushulul Iqtishad al-Islamiyah*. Beirut. Dar al-Qalam, 2005, hal. 11.

¹¹ Anis Byarwati & Tjiptohadi Sawarjuwono, "Ekonomi Islam atau Iqtishad," dalam *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Islam*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2013, hal. 14-24.

Namun dalam masalah pendefinisian ini ada sebagian cendekiawan muslim khususnya di Indonesia yang tidak menggunakan istilah *al-iqtishâd* melainkan ekonomi Islam. Permasalahan etimologis yang muncul dalam penggunaan nama ini adalah merujuk bahwa sebuah nama yang merepresentasikan sebuah gagasan filosofis itu berkembang dan berubah seiring waktu yang mana hal ini dipengaruhi oleh perbenturan antara budaya, kondisi sosial, perkembangan peradaban dan hegemoni yang mempengaruhi ilmu pengetahuan. Maka dari sini dapat disimpulkan bahwa istilah *al-iqtishad* yang menaungi pemahaman keseimbangan antara nilai-nilai sosial dan spiritual dalam melaksanakan kegiatan mu'amalah dengan istilah ekonomi saat ini yang cenderung materialistik yang mendasarkan hanya pada perhitungan matematis dan mengabaikan nilai moral dan etis dalam mengatur pola produksi, distribusi dan konsumsi merupakan sesuatu yang sangat berbeda. Kemudian mencatutkan nama Islam dan menempelkannya pada sebuah konsep materialistis merupakan sesuatu yang inkoheren secara logika.¹²

B. Definisi Ekonomi Secara Terminologi

Pengertian terminologi adalah suatu penjelasan atas istilah, kata, konsep, maupun hal-hal tertentu yang dapat memberikan pemahaman bagi manusia. Terminologi adalah sebuah studi yang memfokuskan diri pada temuan konseptual secara linguistik dan penggunaan istilahnya dalam suatu disiplin tertentu. Terminologi fokus mendeskripsikan istilah dalam domain pengetahuan tertentu bagaimana dia ditransmisikan, berkembang, dan bagaimana makna-makna tersebut dipergunakan untuk menunjukkan sebuah teorema yaitu dasar asumsi dari suatu teori itu bekerja.¹³ Teori sendiri merupakan serangkaian asumsi, konsep, abstrak, definisi dan proposisi untuk menerangkan sesuatu fenomena sosial atau kerangka konseptual secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar premis premis yang ada.¹⁴ Dalam penelitian ini, istilah ekonomi menjadi mapan menjadi sebuah disiplin ilmu pertama kali diprakarsai oleh Adam Smith yang ulasannya akan dibahas berikut ini.

Adam Smith, pelopor ilmu ekonomi, memberikan definisi konseptual ekonomi *self-interest* yang memberikan petunjuk bahwa semua partisipan dalam pasar bertindak atas dasar kepentingan

¹² Anis Byarwati & Tjiptohadi Sawarjuwono, "Ekonomi Islam atau Iqtishad," hal. 14-24.

¹³ Pamela Faber & Silvia Montero Martinez, "Terminologi" dalam *Jurnal Akademia*, https://www.researchgate.net/publication/334112813_Terminology diakses 23 September 2024.

¹⁴ Masri Singarimbun Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: LP3ES. 1998, hal. 37.

pribadinya¹⁵ yang bertemu satu sama lain hingga menjadi sebuah ekuilibrium yang mana hal ini disebut dengan *market clearing economy* (pasar bebas ekonomi). Hal ini sedikit sulit ditemukan secara empirik, pada akhir abad 1870an M, William Jevons, Leon Walras dan Carl Menger mencoba membuktikan premis ini yang kemudian pada tahun 1890-an, J.B. Clark menyusul pendahulunya tersebut dengan mengembangkan misi untuk menunjukkan bahwa konsep pasar bebas ini merupakan hal yang paling efisien untuk menciptakan keadilan dalam ekonomi yang mana ia menciptakan konsep *marginal productivity theory* yang mensinopsiskan bahwa alokasi sumber daya tergantung pada kontribusi individu pada proses produksi.¹⁶

Di awal abad 19 Masehi, teori Smith dan koleganya ini menjadi sebuah teori yang mapan dengan nama *neoclassical* meskipun secara praktik belum terbukti empirik. Usaha penelaahan terus berlanjut hingga sekitar tahun 1950an Masehi dengan menggabungkan teknik kalkulasi matematis yang dilakukan oleh Arrow, Hahn dan Debreu¹⁷ yang intinya mencoba mendemonstrasikan *general equilibrium model*. Sayangnya permodelan ini bermasalah dan selalu memunculkan ketidakstabilan pada ekuilibrium dengan tetap mempercayai premis bahwa *invisible hand* akan selalu mendorong ekonomi menuju ekuilibrium yang inklusif.¹⁸

Namun permodelan ini meninggalkan jejak kritik yang sangat tajam bahwa kemungkinan ekuilibrium yang tidak terbatas yang muncul dari konsep ini membawa kepada sebuah ketidakpastian yakni ekuilibrium mana yang ideal dan sesuai. Juga kritik lain menyebutkan bahwa permodelan ini berlaku surut dimana hasil ekuilibrium baru diketahui setelah suatu kebijakan ekonomi dibuat sehingga memunculkan jarak antara ranah teoretis dan ranah praktis.¹⁹

¹⁵ Leonidas Montes, "Adam Smith: Self- Interest And The Virtues" dalam Ryan Patrick Hanley, *Adam Smith: His Life, Thought, and Legacy*, Princeton: Princeton University Press, 2016, hal. 138-156. <https://doi.org/10.1515/9781400873487-012>.

¹⁶ Hugh M. Neary, "Equilibrium Structure in an Economic Model of Conflict," dalam *Jurnal Economic Inquiry*, Vol. 35 No. 3 Tahun 2007, hal. 480-494.

¹⁷ John Geanakoplos, "Arrow-Debreu Model of General Equilibrium," dalam Eatwell et al, *General Equilibrium*, London: Palgrave Macmillan, 1989, hal. 43-61.

¹⁸ G. Chichilnisky, "Markets with Endogenous Uncertainty: Theory and Policy", dalam *Jurnal Theory and Decision*, Volume 41, No. 2 Tahun 1996, hal. 99-131; G. Chichilnisky, "Existence and Optimality of General Equilibrium with Endogenous Uncertainty" dalam Graciel Chichilnisky, *Markets Information and Uncertainty: Essays in Honor of Kenneth Arrow*, Cambridge University Press, 2008, hal. 72-97

¹⁹ Backovic Marko & Popovic Zoran, "The Analysis Model of General Equilibrium and Financial Instability of Economic System," dalam *Jurnal Montenegrin Journal of Economic*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2012, hal. 63-85.

Model konseptual ini kemudian dikritik oleh Karl Marx khususnya pada *marginal productivity theory* yang secara teoretis mensinopsikan bahwa alokasi sumber daya tergantung pada kontribusi individu pada proses produksi namun pada prakteknya adalah sebuah perbudakan dan eksploitasi kelas kapitalis kepada kelas pekerja yang kemudian ia mengembangkan teori sosialisnya. Teori ini berangkat pada fenomena kesamaan posisi antara budak dengan tuannya, rakyat jelata kepada raja feodalnya, serta pekerja kepada pemilik modal yang pada intinya menyerap dan mengeksploitasi surplus produktifitas pekerja kepada kaum kapitalis pemilik modal sehingga menghasilkan ketimpangan yang mana ketimpangan ini berpengaruh pada konflik sosial dan revolusi tanpa henti. Dan untuk menghentikan konflik ini diperlukan sebuah pemerintahan yang menerapkan kesetaraan kelas yang disebut dengan sosialisme atau pada taraf puncak disebut komunisme dimana faktor produksi dikuasai penuh oleh negara dan surplus produktifitas dibagikan secara sama rata ke seluruh masyarakat.²⁰

Namun kritik Marx pada teori ekonomi yang berkembang kala itu meskipun memiliki dampak politik yang kuat seperti pengadopsian pemikirannya oleh Uni Soviet dan Negara-Negara dunia ketiga dalam melawan hegemoni kolonialisme, namun dalam perkembangan diskursus ilmu ekonomi hal tersebut tidak cukup signifikan. Teori lama, *Neoclassical*, justru semakin memiliki legitimasi kuat dalam dunia akademik -terlepas bahwa teori lama ini menguntungkan bagi negara pemegang hegemoni- karena Perdana Menteri Inggris, Margareth Thatcher dan Presiden Amerika Serikat, Raegan mengaplikasikannya.²¹

Teori *neoclassical* ini kemudian terus berkembang di akhir milenium 19 Masehi menjadi banyak aliran seperti aliran *Austrians*, *General Equilibrium*, *Monetarist*, *New Classical*, *Real Business Cycle*, *Dynamic Stochastic General Equilibrium* dan sebagainya yang menekankan pengembangannya pada permodelan matematis dengan dasar asumsi bahwa semua aktor ekonomi memegang ekspektasi rasional - pengembangan dari konsep *self interest*- dan ekonomi -pasar- akan selalu menuju kestabilannya sendiri. Pengembangan ini kemudian menghubungkan fenomena krisis ekonomi dengan kesalahan intervensi dari luar mekanisme pasar seperti kebijakan pemerintah dan kondisi eksternal.²²

²⁰ John Pullen, *The Marginal Productivity Theory of Distribution*, London, Routledge, 2010, hal. 138-144.

²¹ Hansjorg Herr, "Finansial Liberalization, Deregulated Labour Market and New Aset Market-Driven Capitalism," dalam Sharit K. Bhowmik, *The State of Labour: The Global Finansial Crisis and Its Impact*, London: Routledge, 2014, hal. 55-82.

²² William Mitchell et al, *Macroeconomics*, hal. 432-435.

Pada intinya, pemikir-pemikir ini yang diidentifikasi sebagai pemikir ortodoks memberikan penguatan argumentasi bahwa: 1. Setiap aktor ekonomi memiliki kepentingan pribadi, 2. Ekonomi akan selalu pada ekuilibriumnya, intervensi pemerintah hanya mengubah ekuilibrium itu sementara, 3. Uang selalu netral, hanya sebagai perantara, tidak memiliki kekuatan nilai, 4. Krisis terjadi karena ada *external shock* yang mengganggu stabilitas produktifitas pekerja seperti perkembangan teknologi.²³

Perkembangan teori ekonomi pada masa lampau ini -yaitu dari Smith, Rixardo hingga Marx- menekankan kepada konflik kelas dimana pekerja berjuang untuk memperebutkan distribusi dari output sedangkan kaum kapitalis mempertahankan pengangguran guna menurunkan ongkos produksi. Dalam poin ini jika kaum pekerja menginginkan kenaikan gaji maka kaum kapitalis mengganti mereka dengan para pengangguran guna menurunkan tuntutan kenaikan tersebut. Kondisi ini memustahilkan tercapainya *full employment* karena jika semua terpekerjakan maka ongkos produksi -kenaikan upah- tidak bisa dihindarkan. Secara singkat kondisi ini menciptakan suatu *trade-off* antara *full employment* dan inflasi.²⁴

Dengan kata lain, menurut *labour theory of value*, pekerja menciptakan semua nilai (profit) dan hanya menerima sebagian kecil dari apa yang mereka produksi. Sisanya diambil oleh kaum kapitalis sebagai profit -baik dari pemilik modal, pajak kepada pemerintah- yang menegaskan bahwa ekuilibrium disini adalah sebuah tendensi kepada distribusi output yang sama antara keduanya. Prinsip ini adalah yang dipegang oleh penerus pemikiran Marxis hingga hari ini.²⁵ Hingga lahir pemikir baru, John M. Keynes di era setelahnya yang terpengaruh oleh pemikiran Malthus dan Marshall. Dari Malthus, Keynes mengadopsi teori agregat demand yang merekognisi bahwa dari produksi yang cukup besar akan mencukupi untuk membeli semua outputnya -konsep yang mirip dengan pemikir klasik yang mengatakan bahwa suplai menciptakan permintaannya sendiri- dan menciptakan sebuah diskursus besar kala itu

²³ James Tobin, "Money and Finance in the Macroeconomic Process" dalam *Jurnal of Money, Credit and Banking*, Vol. 14 No. 2 Tahun 1982, hal. 171-204.

²⁴ Ian Wright, "Classical Macrodynamics and The Labor Theory of Value," dalam *Jurnal Open Discussion Papers in Economic*, No. 76 Tahun 2011, hal. 2-21

<https://doi.org/10.21954/ou.ro.00015ea0> diakses 24 September 2024.

²⁵ P. Garegnani, "On the Labour Theory of Value in Marx and in the Marxist Tradition" dalam *Jurnal Review of Political Economy*, Vol. 30 No. 4 Tahun 2018, hal. 618–642. <https://doi.org/10.1080/09538259.2018.1509546> Diakses 24 September 2024

bahwa untuk mendorong ekonomi menuju *full employment* maka jarak permintaan (*demand gap*) tersebut harus diisi dan dipenuhi.²⁶

Keynes memberikan argumentasi bahwa tidak semua pendapatan pekerja dibelanjakan sebagai konsumsi, beberapa ditabung atau diinvestasikan. Maka kondisi ini bertendensi menurunkan perputaran ekonomi, untuk itu *demand gap* tersebut haruslah diisi dengan berbagai skema seperti kucuran dana tambahan dari pemerintah dan investasi yang hal disebut juga dengan *effective demand*.²⁷

Dari Marshall, Keynes mempelajari mekanisme institusi secara detail yang memberikan perhatian juga kepada pasar finansial seperti pasar saham, pasar komoditas, pasar internasional. Dia juga berkecimpung sebagai penasihat utama di Kementerian Keuangan Inggris (*UK Treasury*) dan mengembangkan *general theory* yang memberikan kontribusi untuk membedakan mana mikro dan makroekonomi. Dia memberikan banyak sekali komentar terhadap permasalahan ekonomi - seperti hiperinflasi di Weimar, Jerman- dan juga aktif dalam mempublikasi tulisan -seperti pamflet *The End of Laissez-Faire* yang menjadi basis argumen pembangun *general theory* miliknya.²⁸

Depresi besar yang terjadi di Amerika menjadi sebuah momen yang memvalidasi keabsahan pemikiran Keynes. *The invisible hand* - mekanisme pasar tanpa intervensi pemerintah- yang menurut asumsi ekonom sebelumnya selalu membawa ekonomi pada ekuilibrium nyatanya membuat keadaan semakin memburuk. Hal ini ditenggarai oleh banyaknya perusahaan-perusahaan yang bangkrut, banyaknya pekerja yang di phk, menurunnya output ekonomi membuat perputaran ekonomi mengecil secara drastis. Asumsi teori klasik dengan menurunkan upah yang dihipotesiskan akan meningkatkan pekerjaan dan penjualan terbukti gagal total. Disini peran pemerintah untuk mencegah krisis ekonomi semakin dalam menjadi sebuah kewajiban dan mengindikasikan bahwa mekanisme pasar akan gagal secara endogen kecuali diiringi oleh kebijakan pemerintah yang tepat.²⁹

Keynes dengan *general theory* miliknya memberikan solusi dan memberikan justifikasi terhadap paradigma teoretis dan kebijakan yang

²⁶ Jordi Gali, "Notes for a New Guide to Keynes: Wages, Aggregate Demand, and Employment," dalam *Jurnal of the European Economic Association*, Vol. 11 No. 5 Tahun 2013, hal. 973-1003. <https://doi.org/10.1111/jeea.12032> Diakses 24 September 2024

²⁷ John Maynard Keynes, *The General Theory of Employment, Interest and Money*, London: Palgrave Macmillan, 2018, hal. 21-30.

²⁸ John Maynard Keynes, "The End of Laissez-Faire," dalam John Maynard Keynes, *Essays in Persuasion*, London: Palgrave Macmillan, 2010, hal. 272-294.

https://doi.org/10.1007/978-1-349-59072-8_21 diakses 24 September 2024

²⁹ Hyman Minsky, *Stabilizing an Unstable Economy*, hal. 15-41.

ada yaitu tentang intervensi dari pemerintah untuk mengembalikan agregat demand. Pandangan ini menjadi cukup populer diantara pakar ekonomi.³⁰ Namun setelah Keynes wafat pada tahun 1946 Masehi, sekelompok ekonom muda seperti Samuelson dan Hansen mensintesakan pemikiran Keynes ini dengan pemikiran ortodoks klasik yang menghasilkan konsep IS-LM model. Hal ini merupakan suatu kemunduran karena ide visioner dari Keynes tentang intervensi pemerintah yang pada awalnya menyentuh wilayah fiskal dan moneter secara real diganti dengan konsep-konsep ekuilibrium yang diadopsi dari dongeng *invisible hand*.³¹

Pengikut Keynes yang lain yaitu Robinson menolak pemikiran Samuelson dan Hansen. Dia bersama koleganya, Minsky, Neville, Goeffrey, Rymes, Garegnani, Pasinetti, dan Labini mengembangkan suatu model ekonomi yang meneruskan spirit dari *general theory* dengan memberikan analisa konkrit terhadap kerja fiskal dan moneter serta memberikan analisa yang konsisten terkait dengan analisa *balance sheet* dari setiap unit ekonomi yang memberikan pemahaman utuh bagaimana ekonomi bekerja, bukan dari kerangka konseptual dari dongeng belaka. Mereka menamakan diri mereka sebagai *Post-Keynesian Economist*, pelopor dari berdirinya aliran heterodoks.³²

Ekonom *Post-Keynesian* ini mendefinisikan ekonomi sebagai relasi integral antar unit ekonomi yang didasari oleh keterikatan *balance sheet* - liabilitas dan aset- khususnya pihak pencipta uang dan pengguna uang. Berbeda dengan definisi ekonomi dari golongan ortodoks yang mendeskripsikan ekonomi sebagai ekuilibrium mekanisme pasar tanpa memiliki basis landasan empirik yang memadai, golongan heterodoks memberikan deskripsinya melalui telaah mendalam dalam konteks finansial-moneter serta kajian antropologis yang diuji secara ketat dengan diskusi yang panjang. Keketatan metodologis ini menghasilkan banyak sekali rumusan dan temuan yang valid dan reliabel ketika diujikan pada tataran praktikal di lapangan.³³

³⁰ F.F. Filho & F.H.B. Terra, "Keynes' Interventionist-Reformist Economic Policies" dalam *Jurnal Investigacion Economica*, Vol 71 No. 281 Tahun 2012, hal. 17-41. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0185-16672012000300003&script=sci_arttext diakses 25 September 2024.

³¹ John Hicks, "IS-LM: An Explanation," dalam *Journal of Post Keynesian Economics*, Vol. 3 No. 2 Tahun 1980, hal. 139-54.

³² Steve Keen, *Debunking Economic: The Naked Emperor Dethroned*, hal. 468-469.

³³ P. A. O'Hara, "Principles of Institutional-Evolutionary Political Economy: Converging Themes from the Schools of Heterodoxy," dalam *Jurnal of Economic Issues*, Vol. 41 No. 1 Tahun 2007, hal, 1-42. <https://doi.org/10.1080/00213624.2007.11506993> diakses 25 September 2024.

C. Definisi Ekonomi Secara Epistemologi

Istilah epistemologi berasal dari bahasa Inggris *epistemology* yang merupakan gabungan dua perkataan Yunani yaitu *episteme* yang bermaksud pengetahuan dan *logos* yang bermaksud ilmu, sains, kajian, teori dan pembahasan.³⁴ Epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas tentang suatu hakikat, makna, kandungan, sumber dan proses ilmu. Jadi dapat dikatakan bahwa epistemologi itu berarti “pembahasan tentang ilmu pengetahuan.”³⁵

Istilah epistemologi juga dikaitkan dengan konsep ilmu yaitu suatu pengetahuan yang membawa kepada pemahaman kebenaran. Oleh karena itu pembahasan epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas asal-usul, struktur, metode dan keabsahan ilmu.³⁶ Dalam bahasa Arab, perkataan epistemologi diterjemahkan sebagai *nazariyyah al-ma`rifah*. Imam `Abd al-Fattahdi dalam bukunya yang berjudul *Madhkal ila al-Falsafah* menerangkan bahwa istilah *nazariyyah al-ma`rifah* mempunyai dua pengertian yaitu:³⁷ a) pengertian yang luas mencakupi seluruh pembahasan filsafat yang penting serta mempunyai hubungan dengan ilmu pengetahuan seperti ilmu-ilmu psikologi, biologi, sosiologi, sejarah dan sebagainya, b) pengertian yang sempit bermaksud ilmu yang membicarakan tentang hakikat ilmu pengetahuan, definisinya, dasarnya, sumbernya, syaratnya, dan bidangnya. Sementara itu, Jamil Saliba dalam *al-Mu`jam al-Falsafi* mendefinisikan *nazariyyah al-ma`rifah* sebagai pembahasan mengenai hakikat ilmu, sumber asalnya, ketinggian nilainya, cara mendapatkannya serta cakupannya.³⁸

Paradigma merupakan seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis dan membentuk sebuah kerangka pemikiran yang berfungsi untuk memahami, menafsirkan dan menjelaskan kenyataan atau masalah yang dihadapi. Pemahaman konsep paradigma tersebut relevan untuk pengembangan penelitian dan ilmu pengetahuan.³⁹ Paradigma

³⁴ William L. Reese, *Dictionary of Philosophy and Religion: Eastern and Western Thought*, New Jersey: Humanities Press, 1980, hal. 151.

³⁵ Muhammad Zainiy Uthman, “Latāif al-Asrār Li Ahl Allāh al-Atyar Karangan Nūr al-Din al-Raniri: Satu Tinjauan Epistemologi dalam Falsafah Epistemologinya” dalam Hashim Awang et al., *Pengajian Sastra dan Sosio-budaya Melayu Memasuki Alaf Baru*, Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 1998, hal. 408.

³⁶ Dagobert D. Runes, *Dictionary of Philosophy*, New Jersey: Little-Field, Adams & Co., 1982, hal. 94 & 161.

³⁷ Abd al-Fattah, *Madkhal ila al-Falsafah*, Kaherah: Dar al-Falsafah, (t.th), hal. 146.

³⁸ Jamil Saliba, *al-Mu`jam al-Falsafi al-Alfaz al-`Arabiyyah wa al-Faransiyyah wa al-Injiliziyyah wa al-Latiniyyah*, Beirut: Dar al-Kitab al-Lubnani, 1979, hal. 241.

³⁹ Ahimsa Putra dan Jawahir Thontowi, “Paradigma Profetik Dalam Pengajaran Dan Penelitian Ilmu Hukum”, dalam *Jurnal UNISIA*, Vol. 37 No. 76 Tahun 2012, hal. 89.

merupakan pandangan dasar mengenai pokok bahasan ilmu. Paradigma mendefinisikan dan membantu menemukan sesuatu yang harus diteliti dan dikaji, pertanyaan yang harus dimunculkan, cara merumuskan pertanyaan, dan aturan-aturan yang harus diikuti dalam menginterpretasikan jawaban. Paradigma adalah bagian dari kesepakatan (*consensus*) terluas dalam dunia ilmiah yang berfungsi membedakan satu komunitas ilmiah tertentu dengan komunitas lainnya. Paradigma berkaitan dengan pendefinisian, teori, metode, hubungan antara model, serta instrumen yang tercakup di dalamnya.⁴⁰

Pemilihan paradigma penelitian menggambarkan pilihan suatu kepercayaan dari sisi ontology, epistemology and methodology yang akan mendasari dan memberi pedoman seluruh proses penelitian. Sebuah penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menjawab suatu permasalahan penelitian dengan menggunakan analisis dan data tertentu. Dengan penelitian tersebut akan diketahui seberapa jauh kerja konsep, teori, pertanyaan serta hipotesis dapat digunakan. Paradigma digunakan sebagai alat analisis yang bermanfaat untuk memahami tingkat hubungan antara suatu sudut pandang konsesus dengan sudut pandang lainnya.⁴¹

Berdasarkan penjelasan diatas maka yang dimaksudkan dengan definisi ekonomi secara epistemologi dan paradigmatis adalah mendiskusikan dan mengkategorisasi teori-teori ekonomi menjadi bangunan utuh dari sebuah paradigma serta melihat secara mendalam dan membandingkan antara paradigma satu dengan yang lain yang dalam hal ini adalah paradigma ekonomi ortodoks dan heterodoks.

Dalam diskursus ekonomi, paradigma ekonomi digolongkan menjadi dua yaitu heterodoks dan ortodoks. Adapun paradigma orthodox diwakili oleh Aliran *Real Business Cycle*, *New Classical*, *New Keynesians*, *New Monetary Consensus*, *General Equilibrium Theory*, *Austrians*, *Monetarist*, *Bastard Keynesians* yang mana paradigma ini secara genealogis bersumber dari pemikir klasik seperti Smith, Ricardo, Malthus dan diteruskan oleh pemikir neoklassik seperti Alvin, Hansen, Samuelson dan lain lain.⁴²

Paradigma heterodox meliputi teori-teori dan pemikiran dari tokoh-tokoh yang tergabung dalam aliran MMT yang dipelopori oleh Randall Wray, William Mitchell, Eric Tymoigne, Michael Hudson, Warren Mosler, dan Stephanie Kelton. Aliran ini secara genealogis merujuk pada pemikiran Post-Keynesian yang dipelopori oleh Minsky, Davidson,

⁴⁰ A. Y. Lubis, *Filsafat Ilmu: Klasik hingga Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hal. 165.

⁴¹ Y. S. Lincoln & E.G. Guba, *Paradigmatic Controversies, Contradictions and Emerging Confluences*, California: Sage Publications, 2000, hal. 163.

⁴² William Mitchell et al., *Macroeconomics*, hal. 432-434.

Harcourt, Neville, dan Goodley yang mana aliran ini juga terpengaruh pada pemikiran dari Robinson, Keynes dan Veblen.⁴³

Kedua paradigma ini memiliki perbedaan yang cukup kontras baik secara teoretis dan praktis. Penjelasan secara rinci pada pembahasan selanjutnya. Secara teoretis paradigma ortodoks mendalilkan bahwa: 1) uang bersifat netral karena ia hanyalah sebagai perantara dari barter (*medium of exchange*),⁴⁴ 2. Negara tidak bisa mencapai *full employment* (kesejahteraan penuh tanpa pengangguran) karena paradigma ini berpijak pada permodelan ekuilibrium bahwa jika *full employment* tercapai maka dorongan kenaikan upah akan meningkat yang memicu inflasi,⁴⁵ 3. Mekanisme pasar bersifat natural, *invisible hand* akan selalu menuntunnya kepada ekuilibrium dan intervensi dari pemerintah hanya berefek secara temporer, mekanisme pasar akan menyelesaikan permasalahannya sendiri.⁴⁶

Secara praktis, paradigma ortodoks menganggap bahwa: 1. semua permasalahan ekonomi yaitu pengangguran, kemiskinan, ketimpangan adalah hasil dari bertemunya ekuilibrium dari mekanisme pasar,⁴⁷ 2. Campur tangan dari pemerintah hanya menyelesaikan permasalahan ini dalam jangka pendek, namun dalam jangka panjang kondisi akan kembali ke ekuilibrium,⁴⁸ 3. Paradigma ini juga menjelaskan -dalam *quantity theory of money*- bahwa jika pemerintah berupaya melakukan spending misal untuk meningkatkan kesejahteraan seperti pendidikan dan kesehatan gratis maka hal tersebut akan berujung inflasi karena semakin banyak jumlah uang yang diedarkan maka nilainya akan semakin menurun,⁴⁹ 4. Mencapai *full employment* dalam paradigma ini adalah kemustahilan, ia

⁴³ William Mitchell et al., *Macroeconomics*, hal. 436-437

⁴⁴ Pavlina Tcherneva, "Money: Comparison of the Post Keynesian and Orthodox Approaches," dalam *Jurnal Oeconomicus*, Vol. 4 No. 6 Tahun 2001, hal. 109-144.

⁴⁵ Emilio Diaz Calleja & Ruben Osuna Guerrero, "Inside Orthodoxy: The Return of Classical Macroeconomics and the Problem of Unemployment," dalam *International Journal of Political Economy*, Vol. 30 No. 2 Tahun 2000, hal. 7-34.

⁴⁶ Stainslaw Wellisz, "On External Diseconomies and Government-Assisted Invisible Hand," dalam *Jurnal Economica*, Vol. 21 No. 124 Tahun 1964, hal. 345-362.

⁴⁷ Howard Sherman, "The Sad of Orthodox Economics" dalam *Jurnal of Economic Issues*, Vol. 9 No. 2 Tahun 1975, hal. 243-250.

⁴⁸ A. P. Budd, "The Debate on Fine-Tuning: The Basic Issues," dalam *Jurnal National Institute Economic Review*, Edisi 74 Tahun 1975, hal. 56-59. <https://doi.org/10.1177/002795017507400105> diakses 28 September 2024.

⁴⁹ Alexander Jung, "The Quantity Theory of Money, 1870-2020," dalam *Jurnal ECB Working Paper No. 2024/2940*. <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4828359> diakses 28 September 2024.

memerlukan pengangguran (*reserve army of unemployed and underemployed labour*) untuk mengantisipasi *cost-push inflation*.⁵⁰

Sedangkan paradigma heterodoks secara teoretis menggarisbawahi bahwa: 1. Uang tidaklah netral, ia selalu muncul dari relasi pencipta dan pengguna uang (*state unit of account*),⁵¹ 2. Negara sangat mungkin mencapai *full employment* karena pencipta uang memiliki kekuasaan atas uang yang tidak terbatas dan hanya dibatasi oleh kapasitas ekonominya sendiri dan inflasi tercipta karena pengeluaran (*spending*) oleh pencipta uang yang dilakukan relatif lebih besar dari kapasitas ekonomi. Selama kapasitas ekonomi mampu mengakomodasi pengeluaran tersebut maka inflasi adalah fenomena yang mustahil terjadi,⁵² 3. Pasar merupakan wilayah residual dari kebijakan sebuah otoritas -pencipta uang- dimana tidak ada ekuilibrium pasti yang bisa digunakan sebagai patokan. Sebaliknya pasar merupakan relasi *balance sheet* antar unit ekonomi yang harus diintervensi -distabilisasi- guna membuat berjalannya pasar menjadi inklusif dan berkelanjutan.⁵³

Secara praktik, paradigma heterodoks memberikan penegasan yakni: 1. Semua permasalahan ekonomi bersumber dari keputusan politik oleh pencipta uang. Ketidakmauan pencipta uang untuk mengucurkan dana terhadap pengangguran merupakan alasan kenapa pengangguran itu tercipta, begitu juga dengan kemiskinan dan ketimpangan.⁵⁴ 2. Pemerintah -pencipta uang- merupakan *lender of last resort* yaitu pihak yang paling bertanggung jawab dalam mengontrol berjalannya ekonomi,⁵⁵ 3. Inflasi dalam paradigma ini merupakan akumulasi bukan dari berapa banyaknya uang, melainkan apakah kapasitas ekonomi sudah mencapai kulminasi atau belum. Selain itu paradigma ini juga menjelaskan bahwa peredaran uang adalah sesuatu yang diluar kontrol pemerintah sedangkan suku bunga acuan -yang menstimulasi inflasi- adalah kebijakan yang bisa dikontrol -melalui penetapan bunga dalam *interbank lending* pada *open market operation*- sehingga berapapun jumlah uang yang beredar asalahkan

⁵⁰ Jeffrey D. Straussman, "The Reserve Army of Unemployed Revisited," dalam *Jurnal Society*, Vol. 14 No. 3 Tahun 1977, hal. 40-45.

⁵¹ Pavlina Tcherneva, "Money: Comparison of the Post Keynesian and Orthodox Approaches," hal. 109-144.

⁵² Tony Ramsay, "The Jobs Guarantee: A Post Keynesian Analysis," dalam *Jurnal of Post Keynesian Economics*, Vol. 25 No. 2 Tahun 2002, hal. 273-291.

⁵³ Jan Kregel, "Regulating The Financial System in a Minskian Perspective," dalam Jan Kregel et al., *Financial Stability and Growth: Perspective on Financial Regulation and New Developmentalism*, New York: Routledge, 2014, hal. 127-142.

⁵⁴ Warren Mosler, "Full Employment and Price Stability," dalam *Jurnal Post Keynesian Economics*, Vol. 20 No. 2 Tahun 1997, hal. 167-182.

⁵⁵ Hyman P. Minsky, "Money and The Lender of Last Resort," dalam *Jurnal Challenge*, Vol. 28 No. 1 Tahun 1985, hal. 12-18.

kapasitas ekonomi mampu menampungnya dan dihilangkannya batasan dalam *interbank lending*, maka inflasi akan menuju nol persen. Dengan ini maka pembiayaan dalam membuat program pendidikan dan kesehatan gratis sangat potensial untuk dilakukan,⁵⁶ 4. Mencapai *full employment* adalah keniscayaan dalam paradigma ini. Dengan tidak terbatasnya kemampuan pencipta uang dalam wilayahnya sendiri, maka akan sangat mudah membeli apapun secara domestik termasuk membeli pengangguran dan menciptakan program seperti jaminan pekerjaan yang tidak hanya mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi melainkan juga bisa digunakan untuk membangun faktor-faktor dari *capital formation* seperti pembangunan infrastruktur umum, rumah sakit, penghijauan dan lain semisalnya.⁵⁷

D. Kedaulatan Mata Uang (*Sovereignty of Currency*)

Kedaulatan uang adalah kondisi yang memungkinkan sebuah otoritas pencipta uang untuk menciptakan uang dengan skala yang tak terbatas. Persyaratan dari kondisi ini adalah setiap otoritas yang memiliki wilayah dalam jangkauan otoritasnya menggunakan satu mata uang yang diedarkan dan ditarik kembali sebagai pajak. Kondisi semacam ini memungkinkan bahwa otoritas tersebut mampu membeli apapun secara domestik dan dengan kekuasaannya mampu membuat program apapun termasuk program jaminan pekerjaan.⁵⁸

Kondisi lain yang menyempurnakan kedaulatan ini adalah jika otoritas pencipta uang memiliki kekuatan bahwa mata uangnya diterima secara internasional. Hal ini memungkinkan dilakukannya *trade deficit* - perdagangan minus, yakni mengimpor lebih banyak dari pada mengekspor- sehingga otoritas tersebut mampu mendapatkan komoditas terbaik dari dunia.⁵⁹ Instrumen lain adalah jika otoritas pencipta uang melakukan kebijakan *floating exchange rates* (nilai tukar bebas) yang dengan ini secara otomatis akan membatasi perilaku impor dan ekspor. Rumusan batasan impor-ekspor ini diambil dari asumsi bahwa jika otoritas terlalu banyak mengimpor maka mata uang asing akan menjadi

⁵⁶ Warren Mosler, "Full Employment and Price Stability," dalam *Jurnal of Post Keynesian Economics*, Vol. 20 No. 2 Tahun 1997, hal. 167-182.

⁵⁷ Pavlina R. Tcherneva, "The Job Guarantee: Modern Money Theory's Proposal for Full Employment and Price Stability," dalam Yeva Nersisyan & L. Randall Wray, *The Elgar Companion to Modern Money Theory*, Massachusetts: Edward Elgar Publishing, Inc., 2024, hal. 196-212.

⁵⁸ L. Randall Wray, "Sovereign Currency and Non-Sovereign Budgets: The Modern Money Theory Approach," dalam *Jurnal Public Budgeting & Finance*, Vol. 40 No. 3 Tahun 2020, hal. 26-48.

⁵⁹ L. Randall Wray, *Modern Money Theory*, hal. 59-69.

lebih mahal relatif dengan mata uang domestik yang kemudian dengan naiknya komoditas asing akan mengurangi perilaku impor, dan sebaliknya.⁶⁰

Contoh dari negara yang memiliki kedaulatan penuh atas mata uangnya adalah Inggris, Kanada, Australia dan khususnya Amerika. Negara-negara ini memiliki satu mata uang yang diedarkan dan ditarik sebagai pajak, mata uangnya memiliki demand secara internasional, dan mereka menerapkan *floating exchange rates*. Kondisi ini memungkinkan otoritas pencipta uang mereka melakukan *budget deficit* dan *trade deficit* yang hanya dibatasi oleh kapasitas ekonomi mereka sendiri (*self-imposed constraint*).⁶¹ Dalam hal ini pajak bukanlah sebuah pendapatan bagi mereka dan mereka tidak memerlukan pendapatan apapun dalam menciptakan uang, cukup dengan *keystroke* yaitu mengetik nominal dalam komputer di bank sentral dan mengirimkannya kepada unit ekonomi (pengguna uang) manapun.⁶²

Berikut adalah analisa *balance sheet* secara moneter yang menunjukkan bahwa negara yang berdaulat dengan mata uangnya akan mampu membeli apapun secara domestik tanpa ada risiko kebangkrutan. Untuk itu, pertama perlu diketahui bahwa: 1) sekuritas (*securities*), 2) instrumen finansial bank domestik (*domestic private banks' finansial instruments*), 3) instrumen mata uang asing (*foreign denominated finansial instrument*), 4) koin dan uang pembayaran bank sentral seperti surat hutang (*coins and treasury currency*), 5) aset lain seperti bangunan dan lain sebagainya (*other assets*), merupakan aset dalam *balance sheet* bank sentral.⁶³

Sedangkan yang masuk dalam liabilitas dan *net-worth* adalah: 1) uang cash (*vault cash*), 2) devisa perbankan (*checking account due to banks*), 3) akun kementrian keuangan dan semisalnya (*treasury's account*), 4) akun pihak asing dalam negeri (*foreigners*), 5) liabilitas lain

⁶⁰ L. Randall Wray, *Modern Money Theory*, hal. 138-162

⁶¹ Hongkil Kim, "Sovereign Currency and Long-Term Interest Rates," dalam

Malcom Sawy

Routledge 2022

⁶² L. F.

Real-World Eco

⁶³ Eric

Clark College,

| Assets | Liabilities and Net Worth |
|---|---|
| A1: Securities | L1: Federal Reserve Notes in circulation and vault cash |
| A2: Domestic private banks' financial instruments | L2: Reserve balances (Checking Account due to banks) |
| A3: Foreign-denominated financial instruments | L3: Treasury's account and Federal Notes Held by Treasury |
| A4: Coins and Treasury currency | L4: Account due to Foreigners and others |
| A5: Other assets (buildings, furniture, etc.) | L5: Other liabilities (including equity capital) |

Future?, London:

ry." dalam *Jurnal*

ortland: Lewis &

seperti kepemilikan produksi (*equity capital*).⁶⁴ Secara singkat akan kita lihat pada tabel 2.1. dibawah ini:

Tabel 2.1.
Balance Sheet Bank Sentral

1. Skema *spending* dari pemerintah (pencipta uang)

Dalam kasus jika pemerintah atau bank sentral (pencipta uang) melakukan *spending*, misal membeli mobil dari Mr. A seharga \$100 yang mana Mr. A memiliki akun di bank U maka analisis *balance sheet* seperti tabel 2.2. dibawah ini:⁶⁵

| Fed | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Δ Assets | Δ Liabilities and Net Worth |
| | Reserve Balances (L2): +\$100 |
| | Treasury Account (L3): -\$100 |
| Bank U | |
| Δ Assets | Δ Liabilities and Net Worth |
| Reserve: +\$100 | Deposit of Mr A: +\$100 |
| Mr A | |
| Δ Assets | Δ Liabilities and Net Worth |
| Car: -\$100 | |
| Account of Mr A: +\$100 | |

Tabel 2.2.
Skema *Spending*

Disini muncul pertanyaan apakah akun Kementerian Keuangan (*treassury account*) perlu memajaki terlebih dahulu sebelum bisa membeli mobil. Pada dasarnya, meskipun *treassury account* tidak memiliki uang, pencipta uang hanya tinggal mengentri nominal pada akun Mr. A pada akun bank U untuk membeli mobil Mr. A. Pencipta uang tidak memerlukan pendapatan terlebih dahulu untuk bisa melakukan *spending* seperti pada tabel 2.3 ini:⁶⁶

⁶⁴ Eric Purnomo Aji, *Spending, and* <https://neweco.governmentdo>

⁶⁵ Eric

⁶⁶ Eric

| Fed | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Δ Assets | Δ Liabilities and Net Worth |
| | Reserve Balances (L2): \$80 |
| | Treasury Account (L3): +\$20 |
| Bank U | |
| Δ Assets | Δ Liabilities and Net Worth |
| Reserve: \$80 | Deposit of Mr A: \$80 |
| Mr A | |
| Δ Assets | Δ Liabilities and Net Worth |
| Account of Mr A: \$80 | |

-130; Unggul
ncy Risk on
dalam *website*
=

39.

Tabel 2.3.**Skema Spending dengan Akun Kementerian Keuangan**

Selama sebuah negara memiliki bank sentral dan mengedarkan serta memajaki dengan uangnya sendiri maka ia mampu membeli apapun secara domestik, baik membeli komoditas, aset, bahkan pengangguran (dengan mempekerjakannya).

2. Skema penarikan pajak oleh pemerintah (pencipta uang)

Mengikuti contoh diats, jika pemerintah dalam kasus ini memajaki Mr. A sebesar \$20 maka mekanisme *balance sheet* menjadi seperti berikut:

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| Fed | |
| Δ Assets | Δ Liabilities and Net Worth |
| | Reserve Balances (L2): +\$100 |
| | Treasury Account (L3): \$0 |
| Bank U | |
| Δ Assets | Δ Liabilities and Net Worth |
| Reserve: +\$100 | Deposit of Mr A: +\$100 |
| Mr A | |
| Δ Assets | Δ Liabilities and Net Worth |
| Car: -\$100 | Account of Mr A: +\$100 |

Tabel 2.4.**Skema Penarikan Pajak**

Bank sentral mengurangi sejumlah \$20 pada rekening Mr. A pada Bank U sehingga jumlah liabilitas yang ada pada bank U dan bank sentral menjadi hanya \$80 dari yang awalnya \$100. Terlepas bahwa \$20 tersebut mengalir kepada rekening fiskal dari *treasury*, namun secara kuantitas keseluruhan, aktifitas pemungutan pajak adalah hanya mengurangi secara agregat pada uang yang berada pada liabilitas bank sentral. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak merupakan penghapusan pada agregat keseluruhan dari uang yang beredar dan hal itu bukanlah pendapatan bagi pencipta uang (pemerintah).⁶⁷

3. Skema ketika pemerintah mengeluarkan surat hutang

Mengikuti contoh sebelumnya ketika pemerintah mengeluarkan surat hutang semisal \$30, maka simulasinya adalah seperti pada tabel 2.5 sebagai berikut:

⁶⁷ Eric Tymoigne, *The Financial System and The Economy*, hal. 139.

| Fed | |
|-----------------|------------------------------------|
| Δ Assets | Δ Liabilities and Net Worth |
| | Reserve Balances (L2): \$50 |
| | T-Bond: +\$30 |

| Bank U | |
|-----------------|------------------------------------|
| Δ Assets | Δ Liabilities and Net Worth |
| Reserve: \$50 | Deposit of Mr A: \$50 |

| Mr A | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Δ Assets | Δ Liabilities and Net Worth |
| Account of Mr A: \$50 | |
| T-Bond: +\$30 | |

Tabel 2.5.
Skema Pengeluaran Surat Hutang

Surat hutang (*treasury bond/T-bond*) yang dibeli oleh Mr. A sebesar \$30 merupakan aset banginya karena surat hutang pemerintah selalu memberikan bunga namun tidak lebih *liquid* dari uang cash. Namun secara agregat hal tersebut tidak berarti apa apa karena jumlah liabilitas yang ada pada akun bank sentral tetaplah \$80 namun pada akun liabilitas dari Bank U berkurang dari \$80 menjadi \$50. Hal ini adalah indikasi bahwa dikeluarkannya surat hutang pemerintah bukanlah untuk menambah pembiayaan pemerintah melainkan hanya untuk mengurangi (*to drain*) cadangan uang (*banking reserves*) pada liabilitas sektor privat (bank domestik dan akun personal).⁶⁸

Mekanisme ini memiliki perbedaan dengan negara-negara seperti Uni Eropa yang menggunakan Euro sebagai mata uang resminya yang meninggalkan bank sentral masing masing di dalam negaranya dalam penciptaan mata uang dan digantikan dengan *European Central Bank (ECB)*. Konsekuensi praktisnya adalah negara negara ini secara moneter hanya setingkat provinsi atau negara bagian yang dalam proses penciptaan uangnya bergantung pada ECB. ECB secara moneter adalah berdaulat seperti contoh diatas namun bagi negara-negara Uni Eropa, landasan fiskal yang berlaku bagi adalah mereka harus mendapatkan pendapatan terlebih dahulu baik dari ekspor maupun pajak sebelum bisa mengalokasikan uangnya karena mereka bukan lagi pencipta uang sendiri.⁶⁹

⁶⁸ Eric Tymoigne, *The Financial System and The Economy*, hal. 150.

⁶⁹ William Mitchell & Thomas Fazi, *Reclaiming The State: A Progressive Vision of Sovereignty for a Post-Neoliberal World*, London: Pluto Press, 2017, hal. 76-160.

Indonesia sendiri ada dalam posisi negara yang berdaulat atas mata uangnya. Indonesia memiliki bank sentral sendiri yang mengedarkan dan menarik uangnya sendiri yakni Rupiah. Ini berarti bahwa Indonesia memiliki kemampuan tak terbatas secara domestik dalam menciptakan program-program yang bisa meningkatkan dan memaksimalkan kapasitas ekonominya. Namun meskipun secara domestik hal ini sangat mungkin dilakukan, namun Indonesia mempunyai batasan dalam melakukan penciptaan uang. Hal ini dikarenakan mata uang Rupiah tidak memiliki demand secara internasional dan Indonesia memiliki hutang yang cukup banyak yang didenominasi oleh mata uang asing sehingga jika Indonesia misalkan melakukan impor lebih besar dari ekspor maka hal ini akan menaikkan jumlah hutang dan menurunkan laba ekspor.⁷⁰

Hutang yang didenominasi oleh mata uang asing tidak bisa di bayar kecuali dengan cara kita melakukan ekspor lebih banyak dari impor dan mendapatkan mata uang penghutang tersebut. Permasalahan muncul ketika ekspor yang dilakukan merupakan barang mentah yang tidak memiliki *value added* sehingga hutang asing merupakan ekstraksi pada ekonomi domestik. Venezuela/bolivia merupakan salah satu negara yang mengalami ini. Ekspor sangat tinggi namun bukannya menyelesaikan permasalahan hutang asing melainkan memperburuk ekonomi karena ekspor yang dilakukan tidak membantu meningkatkan kapasitas ekonomi domestik, justru memperburuknya dan untuk memperbaiki perekonomian mereka melakukan hutang asing lagi. Demikian pula pola yang terjadi di Indonesia.⁷¹

Negara yang memiliki kedaulatan terhadap mata uangnya sangatlah tidak harus melakukan hutang asing untuk pembiayaan domestik, karena ia bisa menciptakan mata uangnya sendiri. Namun pemahaman ini sangat jarang diketahui oleh pengambil kebijakan maupun pakar ekonomi domestik karena ketidaktahuan mereka pada mekanisme moneter yang ada saat ini. Ketidaktahuan ini diinisiasi oleh kesalahan paradigma yang dianut yang menafikan peran pemerintah (pencipta uang) pada relasinya dalam ekonomi. Akibatnya fatal, karena menganggap pencipta uang dan pengguna uang dalam satu kuadran yang sama maka hutang asing menjadi pilihan pembiayaan yang hal ini berakibat pada menurunnya kedaulatan pencipta uang pada uang ciptaannya.⁷²

⁷⁰ Mitchell et al., *Macroeconomics*, hal. 538-540; I. Randall Wray, *Modern Money Theory*, hal. 158-266.

⁷¹ Michael Hudson, *The Bubble and Beyond*, Dresden: ISLET-Verlag, 2012, hal. 35; 47; 98-107; 162-169; 195-260; 438-478; 550-582.

⁷² Stephanie Kelton, *The Deficit Myth*, hal. 21-43.

Negara-negara berkembang seperti Indonesia mengalami *trade deficit* pada tiga sektor yaitu ketergantungan pada sektor energi seperti BBM, makanan pokok seperti beras dan produk manufaktur seperti kendaraan dan alat elektronik. Ketergantungan ini membuat hutang asing Indonesia semakin membengkak setiap tahunnya terlebih dalam membeli produk-produk tersebut rerata harus menggunakan USD sehingga semakin membuat hutang asing menjadi sangat berat. Pengaruh hutang asing ini adalah jika pemerintah kemudian menciptakan uangnya misal untuk membuat program jaminan pekerjaan, hal ini akan berpengaruh pada penurunan harga rupiah sehingga hutang semakin tinggi dan biaya impor kebutuhan pada tiga sektor tersebut semakin tak terjangkau yang mempengaruhi harga energi, makanan dan produk manufaktur secara domestik. Tentu solusinya akan sangat mudah ketika pemerintah mampu melakukan tukar hutang asing (*debt swap*) dengan mata uang dan bunga yang rendah serta memperbaiki defisit pada tiga sektor utama tersebut yang kemudian perlahan akan meningkatkan kedaulatan Indonesia atas Rupiahnya sehingga memudahkan pemerintah dalam membangun program kesejahteraan.⁷³

E. Paradigma Ortodoks

Paradigma ortodoks seperti yang dijelaskan sebelumnya adalah diwakili oleh Aliran *Real Business Cycle*, *New Classical*, *New Keynesians*, *New Monetary Consensus*, *General Equilibrium Theory*, *Austrians*, *Monetarist*, *Bastard Keynesians* yang mana paradigma ini secara genealogis bersumber dari pemikir klasik seperti Smith, Ricardo, Malthus dan diteruskan oleh pemikir neoklassik seperti Alvin, Hansen, Samuelson dan lain lain.⁷⁴

Paradigma ini saat ini menghegemoni dunia akademik di seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Ada relasi bahwa hegemoni ini juga berhubungan dengan negara pemegang hegemoni saat ini yaitu Amerika Serikat untuk mempertahankan kepentingannya. Kepentingan itu ialah supaya semua negara pengadopsi paradigma ini lupa akan kekuatan yang dimilikinya untuk menciptakan uang sehingga negara-negara ini tetap memiliki ketergantungan pada USD.⁷⁵

⁷³ Unggul Purnomo Aji, "The Economic Problem in Global South," dalam *website* <https://neweconomicthinking1.blogspot.com/2020/11/the-economic-problem-in-global-south.html?m=1> diakses 29 September 2024.

⁷⁴ William Mitchell et al, *Macroeconomics*, hal. 432-436.

⁷⁵ Dong Xulin, "World Crisis, Currency War and The End Of US/Dollar Hegemony: A Conversation with Michael Hudson." Dalam *Jurnal Internasional Critical Thought*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2011, hal 92-107.

Kepentingan lain yang dituliskan dalam dokumen resmi Amerika adalah bahwa Amerika memiliki populasi satu persen dunia yang menguasai lebih dari lima puluh persen sumber daya di dunia, dan mereka akan mempertahankannya sampai kapanpun. Dengan menjebak negara-negara yang memiliki sumber daya alam melimpah dengan hutang luar negeri dengan didenominasi oleh USD dengan perantara paradigma ortodoks ini akan memastikan bahwa sumber daya alam di dunia akan tetap berada pada genggaman Negri Paman Sam dengan alasan bahwa satu-satunya cara bagi negara yang berhutang adalah dengan melakukan ekspor sebanyak mungkin yang mana sebagian besar dari mereka melakukannya tanpa *value added* yakni berupa *raw materials*. Ini memastikan ekstraksi rantai dagang global khususnya sumber daya alam tetap terpusat ke Amerika.⁷⁶

Adapun pembahasan mengenai paradigma ortodoks haruslah melihat kepada aspek-aspek vital yaitu: 1) terkait dengan teori uang, apa definisi yang diberikan terkait uang, 2) terkait suku bunga (inflasi) dan pengangguran, terkhusus apakah dengan diselesaikannya pengangguran kemudian ada relasi terkait dengan inflasi, 3) melihat lebih jauh tentang hubungan sebuah otoritas pemerintahan dengan pasar yang berjalan, 4) melihat secara mendetail terkait dari konsekuensi teoretis dari paradigma ini, 5) merefleksikan secara mendalam terkait dengan implikasi praktisnya, 6) kemudian disusul dengan refleksi kebijakan moneter dari paradigma ini dan terakhir adalah menyangkut dengan refleksi fiskal, sejauh mana paradigma ini berhasil dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

1. Teori Uang

Dalam diskursus teori tentang uang, ada dua dikotomi paradigma yang saling bertentangan yaitu: 1) paradigma uang komoditas dan 2) paradigma uang kredit. Paradigma uang komoditas melihat uang lahir dari evolusi dari aktifitas barter. Karena uang ia merupakan representasi dari sebuah komoditas maka suplai uang mempengaruhi nilainya karena semakin banyak jumlah uang maka nilai asli dari uang tersebut akan turun.⁷⁷ Sebaliknya, paradigma kredit mengatakan bahwa uang merupakan hasil pertukaran komoditas umum dan secara historis hanya muncul setelah negara mampu menciptakan kebutuhan untuk menggunakan mata uang kedaulatannya dengan mengenakan pajak pada penduduk. Bagi paradigma ini, kemampuan uang untuk bertindak

⁷⁶ Grzegorz Nycz, "Questioning the Neoliberal Paradigm: A Critique of the Washington Consensus in Historical Perspective." Dalam *Jurnal of American Studies*, Edisi 11 Tahun 2010, hal. 79-90.

⁷⁷ Timothy J. Kehoe et al., "More on Money as A Medium of Exchange," dalam *Jurnal Economic Theory*, Vol. 3 No. 2 Tahun 1993, hal. 297-314.

sebagai unit akun untuk kredit/utang pada dasarnya bergantung pada kepercayaan pada kedaulatan atau kekuatan kedaulatan untuk memaksakan kehendaknya pada penduduk. Penggunaan uang sebagai unit akun untuk utang/kredit mendahului munculnya ekonomi yang didasarkan pada pertukaran komoditas umum. Jadi Chartalisme berpendapat bahwa uang pertama kali muncul sebagai unit akun dari utang dan bukan dari pertukaran.⁷⁸

Paradigma ortodoks mengidentifikasi uang dengan mengadopsi paradigma uang komoditas sebagai alat tukar murni untuk mengatasi *double coincidence* dari sistim barter. Asumsi ini didasarkan pada *quantity theory of money* yang mengatakan bahwa nominal uang beredar -money- (M_s) yang bersirkulasi diantara individu -velocity circulation- (V_t) harus sama dengan kepada total nilai nominal transaksi -price- (P) setiap periode -real output/GDP- (Y). Maka persamaannya adalah $M_s V_t = P Y$.⁷⁹

Teori ini memberikan gambaran bahwa:

- a) Jika M naik sedangkan $V = P Y$ konstan maka akan terjadi kenaikan harga (inflasi).
- b) Jika M turun sedangkan $V = P Y$ konstan maka akan terjadi penurunan harga (deflasi).
- c) Jika V naik sedangkan $M = P Y$ konstan maka akan terjadi kenaikan harga (inflasi).
- d) Jika V turun sedangkan $M = P Y$ konstan maka akan terjadi penurunan harga (deflasi).
- e) Jika P naik sedangkan $MV = Y$ konstan maka akan terjadi kenaikan harga (inflasi).
- f) Jika P turun sedangkan $MV = Y$ konstan maka akan terjadi penurunan harga (deflasi).
- g) Jika Y naik sedangkan $MV = P$ konstan maka akan terjadi penurunan harga (deflasi).
- h) Jika Y turun sedangkan $MV = P$ konstan maka akan terjadi kenaikan harga (inflasi).⁸⁰

Secara singkat, teori ini mengatakan bahwa jika uang beredar meningkat namun tidak diiringi dengan peningkatan output ekonomi

⁷⁸ Pavlina R. Tcherneva, "Chartalism and the Tax-Driven Approach to Money," dalam Philip Arestis & Malcom Sawyer, *A Handbook of Alternative Monetary Economics*, Massachusetts, Edward Elgar Publishing, 2006, hal. 69.

⁷⁹ Milton Friedman, *Quantity Theory of Money*, London: Palgrave Macmillan, 1989, hal. 1-40.

⁸⁰ Sigbert J. Prais, "Some Mathematical Notes On The Quantity Theory Of Money In An Open Economy," dalam *Jurnal International Monetary Fund*, Vol. 8 No. 2 Tahun 1961, hal. 212-226.

dan penurunan kecepatan sirkulasi maka kenaikan harga adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan, begitu pula sebaliknya. Kemudian peredaran uang dalam teori ini diasumsikan dikontrol penuh oleh bank sentral (*exogenous money*).⁸¹

2. Teori Suku Bunga dan Pengangguran

Paradigma ortodoks dalam permasalahan hubungan antara suku bunga dan inflasi mereka mengadopsi *philips-curve* (kurva philips) dan *say's law* (hukum say). *Phillips Curve* dan *Say's Law* adalah dua konsep ekonomi yang berasal dari perspektif yang secara genealogis hampir sama dan berhubungan meskipun berfokus pada aspek yang berbeda dari perekonomian.⁸²

Phillips Curve menggambarkan hubungan terbalik antara inflasi dan pengangguran dalam jangka pendek. Menurut *Phillips Curve*, ketika tingkat pengangguran rendah, inflasi cenderung tinggi, karena tingginya permintaan tenaga kerja yang mendorong kenaikan upah dan harga. Sebaliknya, ketika pengangguran tinggi, inflasi biasanya rendah, karena permintaan agregat lebih rendah dan tekanan upah berkurang. *Phillips Curve* lebih dikenal dalam konteks ekonomi keynesian versi ortodoks yang melihat intervensi pemerintah dalam mengelola permintaan agregat sebagai alat untuk mengatur perekonomian.⁸³

Say's Law berasal dari pandangan ekonomi klasik yang menyatakan bahwa penawaran menciptakan permintaannya sendiri (*Supply creates its own demand*). Prinsip ini berpendapat bahwa barang yang diproduksi akan menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membeli barang yang diproduksi lainnya, sehingga krisis kelebihan produksi atau kekurangan permintaan secara umum tidak akan terjadi. *Say's Law* lebih cocok dalam ekonomi pasar tribal, di mana keseimbangan akan dicapai secara otomatis tanpa perlu intervensi pemerintah.⁸⁴

Pada hubungannya antara *Phillips Curve* dan *Say's Law* menggambarkan pandangan yang cukup berbeda tentang bagaimana

⁸¹Ghislain Deleplace, "Orthodox versus Unorthodox Views on Ricardo's Theory of Money," dalam *Jurnal The European Journal of the History of Economic Thought*, Vol. 27 No. 6 Tahun 2020, hal. 819-836.

⁸²David Laidler, "On Say's Law, Money, and the Business Cycle," dalam *Arsip Department of Economics Research Reports*, No. 8106 Department of Economics, University of Western Ontario, Tahun 1981, hal. 1-56. <https://ir.lib.uwo.ca/economicsresrpt> diakses 30 September 2024.

⁸³Maximova Alisa, "The Relationship Between Inflation and Unemployment: A Theoretical Discussion about The Philips Curve," dalam *Journal of International Business and Economics*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2015, hal. 89-97.

⁸⁴Thomas Sowell, *Say's Law: An Historical Analysis*. United States: Princeton University Press, 2015, hal. 3-39.

ekonomi berfungsi. Pada konteks pendekatan terhadap permintaan dan penawaran, *Phillips Curve* menekankan pada pentingnya permintaan agregat dalam mengelola inflasi dan pengangguran,⁸⁵ sedangkan *Say's Law* menekankan pada penawaran dan bagaimana produksi akan menciptakan permintaan yang sesuai.⁸⁶ Pada peran intervensi pemerintah, *Phillips Curve* seringkali digunakan sebagai dasar untuk argumen bahwa pemerintah perlu memainkan peran aktif dalam mengelola permintaan agregat melalui kebijakan fiskal atau moneter⁸⁷ sementara itu, *Say's Law* menekankan pasar bebas dan percaya bahwa ekonomi akan mencapai keseimbangan tanpa perlu intervensi pemerintah.⁸⁸

Pada konteks konsekuensi inflasi dan pengangguran, *Phillips Curve* mengakui adanya *trade-off* antara inflasi dan pengangguran dalam jangka pendek, sementara *Say's Law* tidak secara langsung membahas inflasi atau pengangguran, tetapi mengasumsikan bahwa pasar bebas akan mengatasi masalah tersebut dengan sendirinya. Secara umum, *Phillips Curve* lebih berkaitan dengan ekonomi makro modern yang berfokus pada bagaimana mengelola fluktuasi jangka pendek dalam perekonomian, sementara *Say's Law* lebih mencerminkan pandangan ekonomi klasik yang percaya bahwa keseimbangan jangka panjang akan terjadi secara alami melalui mekanisme pasar yang terjadi secara alami.⁸⁹

Dalam pandangan ortodoks ini, mereka mengasumsikan bahwa kondisi *full-employment* yang sekaligus diiringi dengan inflasi yang rendah adalah mustahil terjadi. Hal ini lantaran jika semua orang dipekerjakan hal ini akan mendorong kenaikan upah yang mendorong kenaikan harga (inflasi) sehingga solusi satu-satunya adalah menyisakan sebagian friksi kecil masyarakat untuk menjadi pengangguran (*reserve army of unemployment*) untuk menjaga

⁸⁵ J. Imbs et al, "Sectoral Phillips Curves and The Aggregate Phillips curve," dalam *Jurnal of Monetary Economics*, Vol. 58 No. 4 Tahun 2011, hal. 328-344.

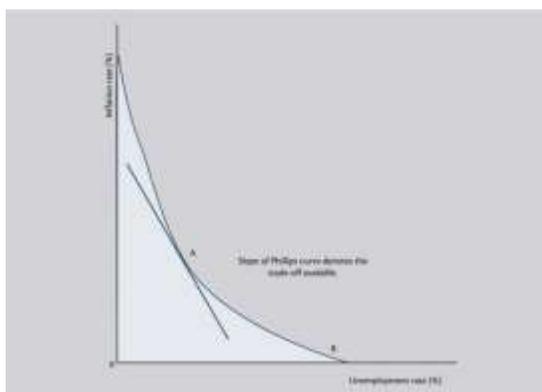
⁸⁶ Steven Kates, "Supply Creates its Own Demand: A Discussion of the Origins of the Phrase and of its Adequacy as an Interpretation of Say's Law of Markets," dalam *Jurnal History of Economics Review*, Vol. 41 No.1 Tahun 2005, hal. 49-60.

⁸⁷ Carl F. Christ, "A Short-Run Aggregate-Demand Model of The Interdependence and Effects of Monetary and Fiscal Policies with Keynesian and Classical Interest Elasticities," dalam *Jurnal The American Economic Review*, Vol. 57 No. 2 Tahun 1967, hal. 434-443.

⁸⁸ Alvin I. Goldman & James C. Cox. "Speech, Truth, and The Free Market for Ideas." Dalam *Jurnal Legal Theory*, Vol. 2 No.1 Tahun 1996, hal. 1-32.

⁸⁹ Ippei Fujiwara & Kiminori Matsuyama, "Competition and The Philips Curve," dalam *Discussion Paper*, London: Centre for Economic Policy Research, 2023, hal. 1-45.

dorongan *cost push inflation* menjadi minimal dan memastikan harga-harga akan stabil,⁹⁰ berikut adalah gambaran *philips curve*:



Gambar 2.1.
Philip's Curve

Dari gambar ini terlihat jelas *trade off* antara prosentase pengangguran dan inflasi yakni jika inflasi mendekati nol maka pengangguran naik dan sebaliknya.

3. Relasi Otortas dan Pasar

Dalam paradigma ekonomi ortodoks, relasi antara otoritas (pemerintah) dan pasar didasarkan pada keyakinan mendalam terhadap efisiensi pasar bebas. Ekonomi ortodoks, yang berakar dari ekonomi klasik dan neoklasik, mengutamakan pasar sebagai mekanisme utama dalam mengalokasikan sumber daya, dengan pemerintah memainkan peran yang lebih terbatas dan hanya terlibat dalam kondisi tertentu. Teori ini sangat memengaruhi pandangan terhadap kebijakan ekonomi di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang mengedepankan kapitalisme pasar bebas.⁹¹

Pasar bebas menjadi pusat perhatian dalam paradigma ortodoks karena dianggap sebagai cara paling efisien untuk mengalokasikan sumber daya. Hal ini didasarkan pada teori hukum permintaan dan penawaran di mana harga barang dan jasa ditentukan oleh interaksi antara konsumen dan produsen. Menurut pandangan ini, ketika permintaan meningkat, harga akan naik, mendorong produsen untuk memproduksi lebih banyak, yang pada gilirannya menurunkan harga

⁹⁰ Laurence Ball & N. Gregory Mankiw. "The NAIRU in Theory and Practice," dalam *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 16 No.4 Tahun 2002, hal. 115-136.

⁹¹ Cass R. Sunstein, *Free Markets and Social Justice*, New York: Oxford University Press, 1997, hal. 271-297.

kembali seiring bertambahnya pasokan. Mekanisme ini dikenal sebagai *self-correcting mechanism* atau mekanisme penyeimbang otomatis.⁹²

Ekonomi ortodoks juga mengajarkan bahwa pasar akan mencapai efisiensi alokatif dan efisiensi produktif secara alami. Efisiensi alokatif berarti bahwa barang dan jasa akan dialokasikan kepada mereka yang paling membutuhkannya berdasarkan kesediaan membayar, sementara efisiensi produktif terjadi ketika barang diproduksi dengan biaya terendah yang mungkin. Oleh karena itu, intervensi otoritas dianggap tidak perlu dan bahkan dapat merusak dinamika pasar ini.⁹³

Pasar bebas juga dianggap memiliki kapasitas untuk mengatasi ketidakseimbangan ekonomi. Misalnya, dalam kasus krisis, teori ekonomi ortodoks percaya bahwa pasar akan beradaptasi melalui mekanisme harga, di mana penurunan permintaan akan diikuti oleh penurunan harga, yang pada akhirnya akan mengembalikan keseimbangan. Keyakinan ini membuat kebijakan *laissez-faire*, di mana pemerintah tidak ikut campur dalam aktivitas ekonomi, menjadi populer di kalangan pendukung ortodoksi ekonomi.⁹⁴

Meski ekonomi ortodoks mengutamakan kebebasan pasar, peran otoritas tetap dianggap penting dalam beberapa aspek. Otoritas dalam paradigma ini sering disebut sebagai *night watchman state* atau negara penjaga malam. Ini berarti bahwa pemerintah hanya bertugas menjaga agar aturan dasar dipatuhi dan mencegah penyimpangan yang bisa merusak pasar, seperti pencurian, penipuan, atau monopoli yang berlebihan.⁹⁵

Dalam ekonomi ortodoks, pemerintah juga memiliki peran penting dalam penegakan hukum dan perlindungan hak milik pribadi. Hak milik dianggap sebagai elemen fundamental dari pasar yang sehat. Tanpa kepastian hak milik, produsen tidak akan memiliki insentif untuk berinvestasi dan memproduksi barang, yang pada akhirnya akan merusak mekanisme pasar.⁹⁶

⁹² George Soros, "Toward A Global Open Society," dalam *Jurnal The Atlantic*, Vol 281 No. 1 Tahun 1998, hal. 20-24.

⁹³ A. E. Buchanan, *Ethics, Efficiency, and Market*, Oxford: Clarendon Press, 1985, hal. 18-26.

⁹⁴ G. R. Steele, "Laissez-faire and The institutions of The Free Market," dalam *Jurnal Economic Affairs*, Vol. 19 No. 3 Tahun 1999, hal. 47-50.

⁹⁵ Barbara H. Fried, *The Progressive Assault on Laissez Faire: Robert Hale and The First Law and Economic Movement*, United States: Havard University Press, 1998, hal. 160-202.

⁹⁶ Barbara H. Fried, *The Progressive Assault on Laissez Faire: Robert Hale and The First Law and Economic Movement*, hal. 160-202.

Selain itu, meski pasar dianggap efisien, otoritas juga diperlukan untuk menangani situasi di mana pasar gagal. Kondisi ini dikenal sebagai kegagalan pasar (*market failure*), yang mencakup berbagai situasi seperti eksternalitas yaitu dampak ekonomi pada pihak ketiga, misalnya polusi, barang publik -seperti pertahanan negara-, dan monopoli. Dalam kasus ini, otoritas dapat melakukan intervensi untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya tetap efisien dan adil.⁹⁷

Contoh nyata dari intervensi pemerintah yang diterima dalam paradigma ortodoks adalah dalam kasus eksternalitas negatif, seperti polusi. Karena pasar tidak selalu memperhitungkan dampak negatif dari produksi terhadap lingkungan, pemerintah dapat memberlakukan pajak atau regulasi untuk mengurangi dampak tersebut. Namun, regulasi ini harus bersifat minimal agar tidak merusak dinamika pasar.⁹⁸

Ekonomi ortodoks juga mengakui pentingnya stabilitas ekonomi makro. Monetarisme, salah satu aliran ekonomi ortodoks yang berkembang pada abad ke-20, menekankan peran otoritas moneter dalam menjaga stabilitas harga dan inflasi. Menurut monetarisme, bank sentral harus mengontrol jumlah uang yang beredar agar tidak terjadi inflasi yang berlebihan, tetapi intervensi ini harus dilakukan dengan hati-hati dan terbatas agar tidak mengganggu efisiensi pasar.⁹⁹

Selain itu, peran otoritas juga penting dalam menjaga keseimbangan makroekonomi melalui kebijakan fiskal yang berorientasi pada stabilitas, seperti pengelolaan utang dan defisit anggaran. Namun, sekali lagi, kebijakan ini harus tetap meminimalkan gangguan pada pasar dan tidak menciptakan distorsi yang merusak efisiensi.¹⁰⁰

Ekonomi ortodoks sangat skeptis terhadap intervensi pemerintah yang terlalu besar, karena dianggap dapat menyebabkan distorsi ekuilibrium pada pasar. Misalnya, subsidi atau regulasi yang

⁹⁷ Veni Reza, "Kegagalan Pasar (Market Failure): Information Asymmetric, Externalities, Public Goods Dan Inefficient Allocation, dalam *Jurnal Indratech*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2021, hal. 20-28. <http://ojs.stmikindragiri.ac.id/index.php/jit/article/view/85> diakses 30 September 2024.

⁹⁸ Krishnan S. Anand & François C. Giraud-Carrier. "Pollution Regulation of Competitive Markets," dalam *Jurnal Management Science*, Vol. 66 No.9 Tahun 2020, hal. 4193-4206.

⁹⁹ David Laidler, "Financial Stability, Monetarism and The Wicksell Connection," dalam *Jurnal Review of Economic Analysis*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2009, hal. 60-79.

¹⁰⁰ Gordana Jevđović & Ivan Milenković, "Monetary versus Fiscal Dominance in Emerging European Economies," dalam *Jurnal Facta Universitatis, Series: Economics and Organization*, Edisi ke 1 Tahun 2018, hal. 125-133.

berlebihan dapat menyebabkan inefisiensi dengan mendorong produksi barang yang seharusnya tidak kompetitif atau menghambat inovasi. Begitu pula dengan kontrol harga yang diterapkan pemerintah, yang dapat menyebabkan kelangkaan atau surplus yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, dalam paradigma ortodoks, intervensi pemerintah hanya diperbolehkan dalam batas-batas tertentu, dan harus selalu bertujuan untuk memperbaiki kegagalan pasar tanpa mengganggu dinamika pasar secara keseluruhan.¹⁰¹

Dalam paradigma ekonomi ortodoks, pasar dan otoritas memiliki hubungan yang kompleks namun terstruktur dengan baik. Pasar dianggap sebagai mekanisme utama yang mampu mencapai efisiensi dan keseimbangan, sementara otoritas memiliki peran terbatas untuk menjaga aturan dasar, mengatasi kegagalan pasar, dan memastikan stabilitas makroekonomi. Keseimbangan antara kebebasan pasar dan intervensi pemerintah inilah yang menjadi fondasi utama dari pandangan ekonomi ortodoks, di mana efisiensi dan kebebasan individu menjadi prioritas.¹⁰²

4. Konsekuensi Teoretis

Paradigma ekonomi ortodoks, yang mencakup prinsip-prinsip ekonomi klasik dan neoklasik, menghasilkan sejumlah konsekuensi teoretis yang berdampak signifikan terhadap pemahaman dan kebijakan ekonomi. Konsekuensi-konsekuensi ini mencakup bagaimana pasar diatur, peran pemerintah, cara menangani krisis, pandangan tentang pengangguran, distribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi. Pada intinya, paradigma ortodoks meyakini bahwa pasar bebas merupakan mekanisme paling efektif untuk mencapai efisiensi ekonomi, dengan intervensi pemerintah yang diminimalkan.¹⁰³

Konsekuensi teoretis pertama dari paradigma ortodoks adalah keyakinan pada efisiensi pasar bebas. Ekonomi ortodoks mengasumsikan bahwa pasar yang kompetitif, di mana harga dan kuantitas ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran, akan mencapai efisiensi alokatif dan efisiensi produktif. Ini berarti bahwa pasar akan secara otomatis mengalokasikan sumber daya kepada

¹⁰¹ Anne O. Krueger, "Government Failures in Development," dalam *Jurnal of Economic perspectives*, Vol. 4 No. 3 Tahun 1990, hal. 9-23.

¹⁰² Joseph E. Stiglitz, "Markets, Market Failures, and Development," dalam *Jurnal The American Economic Review*, Vol. 79 No. 2 Tahun 1989, hal.197–203. <http://www.jstor.org/stable/1827756>. Diakses 30 September 2024.

¹⁰³ Nima Roshnaei & Nargs Khoramshahi, "Government Intervention in Free Market: The Shipping Industri," dalam *Jurnal of Entrepreneurship, Business and Economics*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2020, hal. 180-203.

individu dan perusahaan yang dapat menggunakan mereka paling efektif, dan produksi barang atau jasa akan terjadi pada tingkat biaya terendah.¹⁰⁴

Dari perspektif ortodoks, pemerintah tidak perlu terlalu terlibat dalam mengatur pasar karena mekanisme pasar sudah cukup untuk menciptakan keseimbangan yang optimal. Misalnya, jika harga suatu barang terlalu tinggi, permintaan akan menurun, sehingga produsen akan menurunkan harga agar sesuai dengan permintaan. Sebaliknya, jika harga terlalu rendah, permintaan akan melebihi pasokan, yang pada akhirnya akan mendorong harga naik kembali hingga mencapai titik keseimbangan. Keyakinan ini mengarah pada pandangan bahwa campur tangan pemerintah yang berlebihan dapat menciptakan distorsi pasar dan menurunkan efisiensi.¹⁰⁵

Contoh lain dari keyakinan pada efisiensi pasar bebas adalah terkait dengan subsidi dan regulasi. Dalam pandangan ortodoks, subsidi kepada industri yang tidak kompetitif dapat menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien, karena perusahaan-perusahaan tersebut akan bertahan meski tidak memiliki daya saing yang kuat. Sementara itu, regulasi yang terlalu ketat dapat menghambat inovasi dan membatasi dinamika pasar.¹⁰⁶

Konsekuensi teoretis kedua dari paradigma ekonomi ortodoks adalah bahwa pasar memiliki kemampuan *self-correcting* atau penyesuaian diri. Dalam jangka panjang, pasar dianggap mampu menyesuaikan dengan perubahan kondisi ekonomi tanpa perlu intervensi eksternal yang besar. Konsep ini didasarkan pada teori bahwa harga dan upah akan beradaptasi secara otomatis terhadap perubahan permintaan dan penawaran.¹⁰⁷

Sebagai contoh, dalam kasus resesi ekonomi, ortodoks berpendapat bahwa harga dan upah akan turun, sehingga meningkatkan daya beli konsumen dan mendorong peningkatan permintaan. Akhirnya, permintaan ini akan mendorong produksi kembali, mengurangi pengangguran, dan membawa ekonomi kembali ke keadaan keseimbangan. Oleh karena itu, intervensi kebijakan fiskal yang agresif, seperti pengeluaran pemerintah untuk mendorong

¹⁰⁴ G. R. Steele, "Laissez-faire and The institutions of The Free Market," dalam *Jurnal Economic Affairs*, Vol. 19 No. 3 Tahun 1999, hal. 47-50.

¹⁰⁵ A. E. Buchanan, *Ethics, Efficiency, and Market*, hal. 18-26.

¹⁰⁶ Jezyl Cutamora, "The Market Distortion Effect of Government Intervention in Higher Education," dalam *Jurnal Recoletos Multidisciplinari Research Journal*, Vol. 9 No. 1 Tahun 2021, hal. 123-131.

¹⁰⁷ Roger W. Garrison, *Time and Money: The Macroeconomics of Capital Structure*, New York: Routledge, 2001, hal. 63-69.

permintaan agregat, dianggap tidak diperlukan dan bahkan bisa mengganggu proses penyesuaian pasar.¹⁰⁸

Konsekuensi ketiga dari paradigma ortodoks juga mencakup gagasan tentang pengangguran alami (*natural rate of unemployment*). Menurut teori ini, selalu ada tingkat pengangguran yang wajar dan tak terhindarkan dalam perekonomian, bahkan ketika pasar berada pada titik keseimbangan penuh. Pengangguran ini terjadi karena beberapa faktor, seperti friksional (orang yang pindah pekerjaan) dan struktural (perubahan teknologi yang membuat beberapa keterampilan menjadi usang).¹⁰⁹

Implikasi dari teori ini adalah bahwa kebijakan yang bertujuan untuk menghilangkan pengangguran secara total dianggap tidak realistis dan bahkan mungkin merugikan. Jika pemerintah mencoba menurunkan tingkat pengangguran di bawah tingkat alami dengan menggunakan kebijakan fiskal atau moneter ekspansif, hal ini dapat menyebabkan inflasi. Oleh karena itu, dalam pandangan ortodoks, kebijakan harus fokus pada menjaga tingkat pengangguran di sekitar tingkat alami, daripada mencoba mencapai pekerjaan penuh dalam arti tradisional.¹¹⁰

Konsekuensi keempat dari paradigma ortodoks adalah pendekatan terhadap distribusi pendapatan. Ekonomi ortodoks sering kali menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh efisiensi pasar lebih penting daripada redistribusi pendapatan. Dalam pandangan ini, ketidakesetaraan ekonomi dipandang sebagai hasil alami dari perbedaan keterampilan, bakat, dan produktivitas di antara individu-individu. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam redistribusi kekayaan dianggap minimal untuk menghindari disinsentif terhadap kerja keras dan inovasi.¹¹¹

Kebijakan-kebijakan redistributif, seperti pajak progresif yang tinggi atau transfer kesejahteraan yang besar, dianggap dapat menghambat insentif individu untuk bekerja keras atau berinovasi. Oleh karena itu, dalam ekonomi ortodoks, ketimpangan pendapatan dianggap tidak terlalu menjadi masalah asalkan pertumbuhan

¹⁰⁸ David Warsh, *Knowledge and the Wealth of Nations*, United States: W. W. Norton & Company, Inc., 2006, hal. 107-110.

¹⁰⁹ Richard T. Froyen, *Macroeconomics: Theories and Policies*, London: Pearson Educated Limited, 2006, hal. 50-66; 212-227.

¹¹⁰ Danilo Freitas Ramalho da Silva, "Friedman, Phelps, Lucas and The Natural Rate of Unemployment," dalam *Jurnal CHOPE*, Edisi ke 11 Tahun 2011, hal. 1-44.

¹¹¹ Kim Song Tan & Sock-Yong Phang, "From Efficiency-Driven to Innovation-Driven Economic Growth: Perspective from Singapore," dalam *Research Working Paper 3569*, World Bank Group, Vol. 1 No. 1 tahun 2005, hal. 1-41.

ekonomi terus terjadi dan kesempatan tersedia bagi semua individu untuk berpartisipasi dalam pasar.¹¹²

Terakhir, paradigma ekonomi ortodoks, terutama dalam aliran monetarisme, menekankan pentingnya stabilitas harga dan inflasi yang terkendali. Para ekonom ortodoks percaya bahwa inflasi yang tinggi dapat mengganggu fungsi pasar dengan merusak insentif dan mengurangi daya beli. Oleh karena itu, kebijakan moneter yang konservatif dan berfokus pada pengendalian jumlah uang yang beredar dianggap penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi.¹¹³

Bank sentral, dalam pandangan ortodoks, harus fokus pada menjaga inflasi rendah dari pada berupaya menstimulasi pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan moneter yang ekspansif. Prinsip ini tercermin dalam kebijakan target inflasi yang diadopsi oleh banyak negara di dunia.¹¹⁴

Secara singkat, paradigma ekonomi ortodoks membawa sejumlah konsekuensi teoretis yang mendalam, termasuk keyakinan pada efisiensi pasar, pentingnya penyesuaian diri pasar, teori pengangguran alami, serta pandangan mengenai distribusi pendapatan dan stabilitas ekonomi. Secara umum, paradigma ini menekankan peran pasar yang dominan dan meminimalkan intervensi pemerintah, serta menekankan pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makroekonomi sebagai prioritas utama kebijakan ekonomi.

5. Konsekuensi Praktis

Paradigma ekonomi ortodoks, dengan keyakinan kuat pada efisiensi pasar bebas dan minimnya intervensi pemerintah, memiliki konsekuensi praktis yang signifikan dalam berbagai aspek kebijakan ekonomi dan kehidupan masyarakat. Prinsip-prinsip ortodoks ini tidak hanya membentuk bagaimana pemerintah merumuskan kebijakan ekonomi tetapi juga memengaruhi distribusi pendapatan, kebijakan ketenagakerjaan, stabilitas ekonomi, hingga pengelolaan krisis. Berikut adalah beberapa konsekuensi praktis utama dari paradigma ekonomi ortodoks.

Pertama, konsekuensi praktis yang paling terlihat dari paradigma ekonomi ortodoks adalah pengurangan peran pemerintah dalam regulasi ekonomi dan pengelolaan pasar. Kebijakan yang didasarkan

¹¹² Stefanie Stantcheva, "The Effects of Taxes on Innovation: Theory and Empirical Evidence," dalam *Jurnal NBER Working Paper No. 29359*, Tahun 2021, hal. 1-18.

¹¹³ David Laidler, "Financial Stability, Monetarism and The Wicksell Connection," dalam *Jurnal Review of Economic Analysis*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2009, hal. 60-79.

¹¹⁴ Ben S. Bernanke & Frederic S. Mishkin. "Inflation targeting: a new framework for monetary policy?," dalam *Jurnal of Economic perspectives*, Vol. 11 No. 2 Tahun 1997, hal. 97-116.

pada pandangan ini cenderung menghindari intervensi pemerintah yang berat di pasar, terutama dalam hal pengaturan harga, subsidi, dan proteksi bagi industri tertentu.¹¹⁵

Sebagai contoh, dalam ekonomi yang berpegang pada prinsip ortodoks, deregulasi industri menjadi kebijakan yang umum. Pemerintah berusaha untuk mengurangi regulasi yang dianggap menghambat persaingan dan inovasi. Hal ini terlihat dalam kebijakan deregulasi sektor telekomunikasi, energi, dan keuangan di banyak negara. Deregulasi ini bertujuan untuk mendorong kompetisi pasar, mengurangi monopoli, dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Namun, dampak negatif dari deregulasi juga terlihat, seperti dalam krisis keuangan global tahun 2008, yang sebagian dipicu oleh pengawasan yang longgar terhadap industri keuangan.¹¹⁶

Selain itu, kebijakan fiskal pemerintah juga cenderung berhemat (*asusterity*) dalam pengeluaran publik. Pemerintah yang menganut paradigma ortodoks sering memotong anggaran belanja publik (*government's spending*), seperti subsidi, pelayanan kesehatan, pendidikan, atau bantuan sosial, dengan tujuan mengurangi defisit anggaran dan utang publik. Kebijakan ini dapat mengurangi beban keuangan pemerintah tetapi sering kali berdampak negatif pada kelompok masyarakat yang rentan, yang bergantung pada layanan publik tersebut.¹¹⁷

Kedua, paradigma ortodoks, terutama dalam bentuk monetarisme, sangat menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Konsekuensi praktisnya adalah bahwa bank sentral di banyak negara menerapkan kebijakan target inflasi sebagai panduan utama dalam mengelola kebijakan moneter. Fokus utama dari kebijakan ini adalah untuk menjaga inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil, dengan asumsi bahwa inflasi yang terkendali akan menciptakan kondisi ekonomi yang lebih kondusif bagi pertumbuhan jangka panjang.¹¹⁸

¹¹⁵ Miles Kahler, "Orthodoxy and Its Alternatives: Explaining Approaches to Stabilization and Adjustment," dalam Joan M. Nelson, *Economic Crisis and Policy Choice: The Politics of Adjustment in the Third World*, Princeton: Princeton University Press, 1990, hal. 33-62.

¹¹⁶ James Peoples, "Deregulation and the labor market," dalam *Jurnal of Economic Perspectives*, Vol. 12 No. 3 Tahun 1998, hal. 111-130.

¹¹⁷ Abby Kendrick & Juan Pablo Bohoslavsky, "Austerity Measures and Womens Social and Economic rRghts: We Need to Look Deeper," dalam Christiana Binder et al., *Research handbook on Internasional Law and Social Rights*, Massachusetts: Edward Elgar Publishing Limited, 2020, hal. 326-339.

¹¹⁸ Alfredo Saad-Filho, "Monetary Policy in the Neo-Liberal Transition: A Political Economy Critique of Keynesianism, Monetarism and Inflation Targeting," dalam Robert

Sebagai contoh, kebijakan suku bunga tinggi sering digunakan untuk menekan inflasi yang naik, dengan harapan dapat mengurangi permintaan agregat. Kebijakan seperti ini mungkin efektif dalam menjaga stabilitas harga, tetapi sering kali mengorbankan pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Dalam banyak kasus, suku bunga tinggi dapat menghambat investasi, memperlambat pertumbuhan, dan menyebabkan peningkatan pengangguran jangka pendek.¹¹⁹

Ketiga, salah satu kritik utama terhadap paradigma ekonomi ortodoks adalah pengabaian terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Dalam pandangan ortodoks, ketidaksetaraan ekonomi dianggap sebagai hasil alami dari mekanisme pasar yang mencerminkan perbedaan keterampilan, produktivitas, dan kontribusi individu terhadap ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan redistribusi, seperti pajak progresif yang tinggi atau program kesejahteraan sosial yang kuat, sering kali dianggap mengganggu efisiensi pasar.¹²⁰

Akibatnya, negara-negara yang menerapkan prinsip ekonomi ortodoks sering kali memiliki kebijakan pajak yang relatif rendah, terutama bagi kelompok berpendapatan tinggi, dengan harapan dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun, hal ini sering kali menyebabkan ketimpangan ekonomi yang semakin lebar. Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan tidak selalu terdistribusi secara merata, dan sebagian besar manfaatnya cenderung dinikmati oleh kelompok kaya, sementara kelompok masyarakat berpenghasilan rendah justru semakin tertinggal.¹²¹

Sebagai contoh, di beberapa negara yang menerapkan kebijakan ekonomi neoliberal yang merupakan varian dari ortodoks kesenjangan pendapatan semakin meningkat, pelayanan umum menurun, peningkatan *capital formation* tidak terjadi. Hal ini sering

Albritton et al., *Political Economy and Global Capitalism: The 21st Century, Present and Future*, London: Anthem Press, 2007, hal. 89-123.

¹¹⁹ J. S. L. McCombie & M. R. M. Spreafico, "Income Inequality and Growth: Problems with The Orthodox Approach," dalam *Konferensi Analyzing Growth and Inequality in the 21st Century The INET Conference Paris*, 2015, hal. 1-43.

¹²⁰ Kim A. Weeden & David B. Grusky, "Inequality and market failure," dalam *Jurnal American Behavioral Scientist*, Vol. 58 No. 3 Tahun 2014, hal. 473-491.

¹²¹ Edmund Amann & Werner Baer, "Economic Orthodoxy versus Social Development? The Dilemmas Facing Brazil's Labour Government," dalam *Jurnal Oxford Development Studies*, Vol. 34 No. 2 Tahun 2006, hal. 219-241.

kali menimbulkan ketidakpuasan sosial dan memperburuk ketidakadilan ekonomi di masyarakat.¹²²

Keempat, dalam situasi krisis ekonomi, konsekuensi praktis dari paradigma ortodoks adalah minimnya intervensi pemerintah untuk menstimulasi permintaan agregat atau menyelamatkan sektor-sektor ekonomi yang bermasalah. Kebijakan ekonomi yang mengikuti paradigma ortodoks cenderung mengandalkan mekanisme pasar untuk menyesuaikan diri. Sebagai contoh, ketika terjadi resesi, ortodoks percaya bahwa harga dan upah akan menyesuaikan secara otomatis, mengembalikan ekonomi ke keadaan keseimbangan tanpa perlu adanya stimulus fiskal besar-besaran.¹²³

Namun, pendekatan ini sering dikritik, terutama dalam konteks krisis besar seperti *Great Depression* pada tahun 1930-an dan Krisis Keuangan Global 2008. Dalam kedua kasus tersebut, kurangnya intervensi awal oleh pemerintah dianggap memperburuk krisis. Respon yang lambat atau minimal dari pemerintah dalam bentuk pengeluaran publik dan intervensi pasar menyebabkan penurunan ekonomi yang lebih dalam dan pemulihan yang lebih lambat. Sebagai reaksi, banyak negara kemudian mulai mengadopsi pendekatan yang lebih aktif dan intervensionis untuk menangani krisis, seperti yang dilakukan dalam kebijakan *New Deal* di Amerika Serikat dan program stimulus fiskal besar-besaran pasca-krisis 2008.¹²⁴

Kelima, dalam paradigma ortodoks, fleksibilitas pasar tenaga kerja sangat penting untuk menjaga efisiensi ekonomi. Kebijakan ketenagakerjaan cenderung mendorong liberalisasi pasar tenaga kerja, yang berarti mengurangi perlindungan terhadap pekerja seperti aturan upah minimum yang ketat, kebijakan yang membatasi PHK, atau regulasi yang melindungi serikat pekerja. Dalam pandangan ortodoks, pasar tenaga kerja yang fleksibel akan memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan tenaga kerja mereka sesuai dengan

¹²² Thomas Stubbs et al., "Poverty, Inequality, and The International Monetary Fund: How Austerity Hurts The Poor and Widens Inequality," dalam *Jurnal of Globalization and Development*, Vol. 13 No. 1 Tahun 2022, hal. 61-89.

¹²³ Miles Kahler, "Orthodoxy and Its Alternatives: Explaining Approaches to Stabilization and Adjustment," dalam Joan M. Nelson, *Economic Crisis and Policy Choice: The Politics of Adjustment in the Third World*, Princenton: Princenton University Press, 1990, hal. 33-62.

¹²⁴ Peter Alexis Gourevitch, "Breaking with Orthodoxy: The Politics of Economic Policy Responses to The Depression of the 1930s," dalam *Jurnal International Organization*, Vol. 38 No.1 Tahun 1984, hal. 95-129.

kebutuhan, yang pada gilirannya akan mendorong efisiensi dan pertumbuhan ekonomi.¹²⁵

Namun, dalam praktiknya, kebijakan semacam ini sering menyebabkan ketidakstabilan kerja bagi banyak pekerja, terutama di sektor-sektor dengan upah rendah. Pekerja cenderung lebih mudah diberhentikan dan memiliki lebih sedikit jaminan pekerjaan, yang dapat menimbulkan ketidakpastian ekonomi dan sosial. Fleksibilitas pasar tenaga kerja yang berlebihan juga dapat menurunkan daya tawar pekerja dalam negosiasi upah, sehingga berdampak pada stagnasi upah dan kondisi kerja yang lebih buruk bagi banyak orang.¹²⁶

Secara singkat dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa paradigma ekonomi ortodoks, dengan fokusnya pada efisiensi pasar dan minimnya intervensi pemerintah, membawa sejumlah konsekuensi praktis yang berdampak pada kebijakan publik dan masyarakat. Pengurangan peran pemerintah, pengendalian inflasi ketat, pengabaian distribusi pendapatan, serta penanganan krisis yang minim intervensi adalah beberapa dampak utama dari penerapan prinsip-prinsip ortodoks. Meskipun paradigma ini telah terbukti mendukung efisiensi ekonomi dalam beberapa konteks, kritik utama terhadapnya adalah ketidakmampuannya untuk mengatasi masalah ketimpangan dan dampak sosial dari fleksibilitas pasar yang berlebihan.

6. Refleksi Moneter

Refleksi moneter dari paradigma ekonomi ortodoks mencakup pemahaman tentang bagaimana kebijakan moneter dipengaruhi oleh keyakinan akan efisiensi pasar, penyesuaian otomatis, dan minimnya intervensi pemerintah. Salah satu aspek paling signifikan dari paradigma ortodoks adalah penekanan pada stabilitas harga. Dalam konteks kebijakan moneter, bank sentral didorong untuk memprioritaskan pengendalian inflasi di atas pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Ini berarti bahwa, meskipun ada resesi atau tekanan

¹²⁵ D. Spencer, "Love's Labor's Lost? The Disutility of Work and Work Avoidance in the Economic Analysis of Labor Supply," dalam *Jurnal Review of Social Economy*, Vol. 61, No. 2 Tahun 2003, hal. 235-250; D. Spencer, "Deconstructing the Labour Supply Curve," dalam *Jurnal Metroeconomica*, Vol. 55, No. 4 Tahun 2004, hal. 442-458; D. Spencer, "From Pain to Opportunity Cost: The Eclipse of the Quality of Work as a Factor in Economic Theory," dalam *Jurnal History of Political Economy*, Vol. 36, No. 2 Tahun 2004, hal. 1-25.

¹²⁶ William F. Mitchell, "The Nairu, Structural Imbalance and The Macroequilibrium Unemployment Rate," dalam *Jurnal Australian Economic Papers*, Vol. 26 No. 48 Tahun 1987, hal. 101-118.

ekonomi lainnya, bank sentral mungkin cenderung menaikkan suku bunga untuk menahan inflasi, daripada menurunkan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan.¹²⁷

Dalam pendekatan ini, inflasi dianggap sebagai musuh utama stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan moneter yang pro-inflasi sering kali dihindari, bahkan jika ada risiko pertumbuhan yang melambat. Misalnya, kebijakan target inflasi yang diadopsi oleh banyak bank sentral, seperti Federal Reserve di Amerika Serikat dan European Central Bank, menunjukkan fokus yang kuat pada stabilitas harga.¹²⁸

Paradigma ortodoks sering kali berhubungan erat dengan paham aliran ekonomi moneterisme yaitu sebuah aliran yang mengedepankan peran jumlah uang dalam peredaran sebagai determinan utama dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Para ekonom moneteris percaya bahwa mengontrol jumlah uang yang beredar adalah kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi.¹²⁹

Dari perspektif ini, bank sentral harus menggunakan instrumen seperti suku bunga dan operasi pasar terbuka untuk mengatur jumlah uang dalam perekonomian. Kenaikan suku bunga dianggap efektif untuk mengekang inflasi dengan mengurangi permintaan agregat, sedangkan penurunan suku bunga bertujuan untuk mendorong investasi dan konsumsi.¹³⁰

Namun, pendekatan moneteris juga menghadapi kritik, terutama dalam konteks krisis ekonomi. Misalnya, selama krisis keuangan global 2008, bank sentral di seluruh dunia terpaksa menerapkan kebijakan moneter yang sangat longgar, termasuk suku bunga

¹²⁷ Matthew Watson, "The Institutional Paradoxes of Monetary Orthodoxy: Reflections on The Political Economy of Central Bank Independence," dalam *Jurnal Review of International Political Economy*, Vol. 9 No. 1 Tahun 2002, hal. 183-196.

¹²⁸ Joseph Okwori & John Abu, "Monetary Policy and Inflation Targeting in Nigeria," dalam *Jurnal International Journal of Economics and Financial Management*, Vol. 2 No. 3 Tahun 2017, hal. 1-12.

¹²⁹ Gregorius Nasiansenus Masdjojo, "Kajian Pendekatan Keynesian Dan Moneteris Terhadap Dinamika Cadangan Devisa Melalui Penelusuran Neraca Pembayaran Internasional: Studi Empiris Di Indonesia Periode 1983-2008," dalam *Tesis*, Universitas Diponegoro 2010.

¹³⁰ Ho-fung Hung & Daniel Thompson. "Money Supply, Class Power, and Inflation: Monetarism Reassessed," dalam *Jurnal American Sociological Review*, Vol. 81 No. 3 Tahun 2016, hal. 447-466.

mendekati nol dan program *quantitative easing*, yang berbeda dengan pendekatan ortodoks yang lebih tradisional.¹³¹

Dalam kerangka paradigma ortodoks, ada keyakinan bahwa pasar akan menyesuaikan diri secara otomatis untuk mencapai keseimbangan. Konsekuensinya, ketika terjadi guncangan ekonomi, kebijakan moneter cenderung dilihat sebagai alat yang kurang diperlukan untuk mendukung pemulihan. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa harga dan upah akan turun secara otomatis dalam kondisi resesi, tanpa memerlukan intervensi yang signifikan dari kebijakan moneter.¹³²

Namun, dalam praktiknya, respons pasar terhadap guncangan tidak selalu terjadi dengan cepat atau efisien. Ketidakpastian di pasar dapat menyebabkan penundaan dalam pemulihan, dan oleh karena itu, pendekatan ini sering kali dinilai terlalu optimis.¹³³

Paradigma ortodoks juga dipengaruhi oleh model-model ekonomi neoklasik, yang menekankan pada rasionalitas dan pengambilan keputusan optimal oleh individu. Dalam konteks ini, ada asumsi bahwa pelaku ekonomi baik individu maupun perusahaan akan membuat keputusan yang rasional berdasarkan informasi yang ada dan ekspektasi masa depan.¹³⁴

Hal ini memiliki dampak pada cara kebijakan moneter dikomunikasikan dan diterapkan. Bank sentral berusaha untuk membentuk ekspektasi pasar melalui komunikasi transparan dan *guidance* ke depan (*forward guidance*), di mana mereka memberikan petunjuk tentang arah kebijakan di masa depan. Pendekatan ini berupaya meminimalkan ketidakpastian dan memberikan kejelasan kepada pasar untuk membantu pengambilan keputusan.¹³⁵

¹³¹ L. Randall Wray, "Money, Interest Rates, and Monetarist Policy: Some More Unpleasant Monetarist Arithmetic?," dalam *Jurnal of Post Keynesian Economics*, Vol. 15 No. 4 Tahun 1993, hal. 541-569.

¹³² Ravi Batra, "The Long-Run Real-Wage Rigidity and Full Employment Adjustment in the Classical Model," dalam *Jurnal International Review of Economics & Finance*, Vol. 11 No. 2 Tahun 2002, hal. 117-138.

¹³³ Marek Antosiewicz & Piotr Lewandowski, "Labour Market Fluctuations in GIPS-Shocks vs Adjustments," dalam *Jurnal International Journal of Manpower*, Vol. 38 No. 7 Tahun 2017, hal. 913-939.

¹³⁴ Milan Zafirovski, "The Rational Choice Generalization of Neoclassical Economics Reconsidered: Any Theoretical Legitimation for Economic Imperialism?," dalam *Jurnal Sociological Theory*, Vol. 18 No. 3 Tahun 2000, hal. 448-471.

¹³⁵ Darley Jose Kjosavik, "Methodological Individualism and Rational Choice in Neoclassical Economics: A Review of Institutional Critique." Dalam *Forum for Development Studies*, Vol. 30. No. 2. Tahun 2003, Taylor & Francis Group, hal. 205-245.

Walaupun pendekatan ortodoks dalam kebijakan moneter memiliki sejumlah keunggulan, banyak ekonom dan praktisi juga mengkritik keterbatasannya. Dalam kondisi krisis, seperti resesi yang berkepanjangan atau krisis keuangan, pendekatan konvensional sering kali tidak memadai. Dalam situasi di mana suku bunga mendekati nol, seperti yang terjadi pada banyak negara setelah krisis keuangan 2008, alat kebijakan moneter tradisional menjadi kurang efektif.¹³⁶

Sebagai respons, banyak bank sentral mulai mengadopsi kebijakan yang lebih inovatif dan tidak konvensional, seperti *quantitative easing*, untuk merangsang perekonomian. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan likuiditas dan mendorong investasi, meskipun sering kali menghadapi kritik karena berpotensi menciptakan ketidakstabilan jangka panjang.¹³⁷

Dari sini terlihat jelas bahwa paradigma ekonomi ortodoks menekankan pada stabilitas inflasi, penggunaan kebijakan moneterisme, dan asumsi bahwa pasar akan menyesuaikan diri secara otomatis. Meskipun pendekatan ini memiliki landasan teoritis yang kuat dan berhasil dalam banyak konteks, tantangan praktis di dunia nyata, terutama selama krisis, menunjukkan bahwa pendekatan ini mungkin perlu diperluas dan disesuaikan untuk menangani ketidakpastian ekonomi yang kompleks. Penerapan kebijakan moneter yang lebih fleksibel dan responsif, serta pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika pasar dan perilaku ekonomi, menjadi semakin penting dalam menghadapi tantangan ekonomi modern.

7. Refleksi Fiskal

Paradigma ekonomi ortodoks, yang mengedepankan keyakinan pada efisiensi pasar dan minimnya intervensi pemerintah, memiliki sejumlah konsekuensi dan refleksi penting dalam konteks kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal mencakup penggunaan pengeluaran pemerintah dan pajak untuk memengaruhi perekonomian, dan paradigma ortodoks menawarkan pandangan tertentu tentang bagaimana kebijakan ini seharusnya dirumuskan dan diterapkan.

Salah satu poin utama dari paradigma ortodoks adalah pengurangan peran pemerintah dalam ekonomi. Dalam kerangka ini, pemerintah dianggap sebagai pengganggu efisiensi pasar, dan intervensi yang terlalu besar dalam bentuk pengeluaran publik atau

¹³⁶ Philip Arestis et al., "Post Keynesian Economics and Its Critics." Dalam *Jurnal of Post Keynesian Economics*, Vol. 21 No. 4 Tahun 1999, hal. 527-549.

¹³⁷ Manuela Moschella, *Unexpected Revolutionaries: How Central Banks Made and Unmade Economic Orthodoxy*, New York, Cornell University Press, 2024, hal. 56-134.

subsidi dianggap dapat menyebabkan distorsi. Akibatnya, kebijakan fiskal cenderung berfokus pada pengurangan anggaran dan utang publik, dengan tujuan untuk mencapai keseimbangan anggaran.¹³⁸

Sebagai contoh, dalam banyak negara yang menganut prinsip ortodoks, program penghematan dan pemotongan anggaran menjadi kebijakan yang umum selama periode pertumbuhan ekonomi yang lambat. Pemerintah berusaha untuk mengurangi defisit dan utang publik dengan memangkas pengeluaran untuk layanan publik dan program sosial. Meskipun langkah-langkah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas fiskal, konsekuensinya sering kali mengakibatkan pengurangan dalam layanan yang krusial bagi masyarakat, yang pada gilirannya dapat memperburuk ketimpangan sosial.¹³⁹

Refleksi fiskal dalam paradigma ortodoks juga menunjukkan penekanan pada stabilitas dan keseimbangan anggaran. Dalam konteks ini, kebijakan fiskal yang baik adalah kebijakan yang menghasilkan anggaran seimbang, di mana pengeluaran tidak melebihi pendapatan. Para pendukung paradigma ini berargumen bahwa defisit anggaran dapat merusak kepercayaan investor dan memicu inflasi.¹⁴⁰

Hal ini tercermin dalam banyak kebijakan fiskal negara-negara berkembang dan maju yang berusaha untuk mencapai kriteria Maastricht (dalam konteks Uni Eropa), yang mengharuskan negara-negara anggota untuk mempertahankan defisit anggaran di bawah 3% dari PDB dan utang publik di bawah 60% dari PDB. Kebijakan ini berfokus pada disiplin fiskal, yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pasar dan mengurangi risiko krisis keuangan.¹⁴¹

Dalam kerangka ortodoks, ketika menghadapi resesi atau perlambatan ekonomi, pendekatan kebijakan fiskal sering kali menghindari penggunaan stimulus fiskal yang agresif. Keyakinan

¹³⁸ Christoph Hermann, "Structural Adjustment and Neoliberal Convergence in Labour Markets and Welfare: The Impact of the Crisis and Austerity Measures on European Economic and Social Models," dalam *Jurnal Competition & Change*, Vol. 18 No. 2 Tahun 2014, hal. 111-130.

¹³⁹ George Petrakos et al., "Income Inequality in the Over-Indebted Eurozone Countries and The Role of The Excessive Deficit Procedure," dalam *Jurnal Open Economies Review*, Vol. 35 No. 2 Tahun 2024, hal. 301-322.

¹⁴⁰ Mehmet Cinar et al., "Examining The Role of Budget Deficit Policies in Economic Growth from A Keynesian Perspective," dalam *Jurnal International Journal of Economics and Finance*, Vol. 6 no. 10 Tahun 2014, hal. 191-200.

¹⁴¹ Fabian Zuleeg and Hans Martens, "Beyond the Current Crisis: How Should Europe Deal with Government Deficits and Public Debt in Future?," dalam Carlo Secchi & Antonio Vilafranca, *Liberalism in Crisis?: European Economic Governance in The Age of Thurbulence*, Massachusetts, Edward Elgar Publishing, Inc., 2009, hal. 148-177.

bahwa pasar akan berfungsi secara efisien dan pulih dengan sendirinya membuat pemerintah enggan untuk meningkatkan pengeluaran publik atau menurunkan pajak secara signifikan.¹⁴²

Sebagai contoh, selama krisis keuangan global 2008, beberapa negara awalnya hesitatif dalam menerapkan paket stimulus fiskal besar-besaran karena kekhawatiran akan inflasi dan meningkatnya utang publik. Meskipun beberapa negara akhirnya menerapkan langkah-langkah stimulus, pendekatan ortodoks masih cenderung melihat stimulus fiskal sebagai langkah terakhir, dengan fokus lebih pada kebijakan moneter untuk merangsang perekonomian.¹⁴³

Kebijakan fiskal yang berdasarkan paradigma ortodoks sering kali dihadapkan pada kritik terkait ketidakadilan distribusi pendapatan. Dengan mengutamakan pengurangan pajak dan pembatasan pengeluaran sosial, kebijakan ini dapat memperburuk ketimpangan sosial. Kebijakan pajak yang lebih rendah bagi individu dan korporasi kaya, bersamaan dengan pemotongan anggaran untuk layanan sosial, dapat menyebabkan kerugian bagi kelompok masyarakat yang lebih rentan.¹⁴⁴

Misalnya, pemotongan anggaran untuk kesehatan, pendidikan, dan program kesejahteraan sosial sering kali mengakibatkan penurunan kualitas layanan yang diterima oleh kelompok masyarakat berpendapatan rendah, sementara mereka yang berada di atas terus mendapatkan keuntungan dari pengurangan pajak. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan sosial dan meningkatkan kesenjangan antara yang kaya dan miskin.¹⁴⁵

Walaupun paradigma ortodoks menekankan pentingnya disiplin fiskal, tantangan ekonomi yang kompleks, seperti resesi yang berkepanjangan atau krisis kesehatan global seperti COVID-19, memaksa pemerintah untuk mempertimbangkan pendekatan baru dalam kebijakan fiskal. Refleksi ini terlihat dalam adopsi kebijakan yang lebih inovatif, seperti penerapan kebijakan fiskal ekspansif yang

¹⁴² Edward E. Learner & Summit Shinde, "Theory and Evidence as Drivers of Economists' Opinion Regarding The Impact of Fiscal Stimulus," dalam Kincaid et al., *A Modern Guide to Philosophy of Economics*, Massachusetts, Edward Elgar Publishing, Inc., 2021, hal. 312-343

¹⁴³ Partha Ray, & Parthapratim Pal, "Fiscal Stimulus and The Ghost of Keynes: An Evolutionary Chronicle," dalam Yoshino et al., *Studies in International Economics and Finance: Essays in Honour of Prof. Bandi Kamaiah*. Singapore: Springer, 2022, hal. 55-72.

¹⁴⁴ John Bellamy Foster & Michael D. Yates, "Piketty and The Crisis of Neoclassical Economics," dalam *Jurnal Monthly Review*, Vol. 66 No. 6 Tahun 2014, hal. 1-24.

¹⁴⁵ Henry A. Giroux, "Austerity and The Poison of Neoliberal Miseducation," dalam *Jurnal Symplokē*, Vol. 22. No. 1-2 Tahun 2014, hal. 9-21.

menekankan pada investasi infrastruktur, pendidikan, dan teknologi.¹⁴⁶

Dalam banyak kasus, pemerintah menyadari bahwa pengeluaran untuk infrastruktur dan pendidikan dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman bahwa kebijakan fiskal tidak hanya berfungsi untuk menjaga keseimbangan anggaran, tetapi juga dapat berperan dalam mendorong pertumbuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁴⁷

Refleksi fiskal dari paradigma ekonomi ortodoks menyoroti sejumlah prinsip, seperti pengurangan peran pemerintah, penekanan pada keseimbangan anggaran, minimnya stimulus fiskal, dan dampak ketidakadilan dalam distribusi pendapatan. Meskipun pendekatan ini memiliki landasan teoritis yang kuat, tantangan praktis dan kompleksitas ekonomi saat ini menunjukkan perlunya fleksibilitas dan inovasi dalam kebijakan fiskal. Di tengah perubahan global dan tantangan baru, penting bagi pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan fiskal mereka agar dapat mendukung pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa layanan publik tetap terjaga bagi semua lapisan masyarakat.

F. Paradigma Heterodoks

Ekonomi heterodoks merujuk pada berbagai pendekatan ekonomi yang menolak atau mempertanyakan asumsi dasar dari ekonomi arus utama (ortodoks). Berbagai cabang seperti ekonomi institusional, Marxian, post-Keynesian, feminis, ekologi, dan lainnya, termasuk dalam kategori heterodoks.¹⁴⁸ Aliran-aliran ini memiliki pandangan epistemologis yang lebih luas dan lebih kritis, yang menantang cara kita memahami fenomena ekonomi dan menawarkan metodologi alternatif untuk menganalisis berbagai masalah ekonomi.¹⁴⁹ Untuk memahami lebih

¹⁴⁶ Unggul Purnomo Aji et al., "National Economic and Health Recovery in the Disruptive Pandemic: A Proposal for Indonesia," dalam *Jurnal Academia Letters*, Artikel No. 1345 Tahun 2021, hal. 1-7. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3899576 diakses 1 Oktober 2024.

¹⁴⁷ Erik Thorbecke, "The Evolution of The Development Doctrine, 1950–2005," dalam G. Mavrotas & A. Shorrocks, *Advancing Development: Core Themes in Global Economics*, London: Palgrave Macmillan, 2007, hal. 3-36.

¹⁴⁸ William Mitchell et al., *Macroeconomics*, hal. 437-442.

¹⁴⁹ Piet Keizer, "A Multidisciplinary Economic Framework of Analysis," dalam *Jurnal of Philosophical Economics*, Vol. 11 No. 1 Tahun 2017, hal. 103-132.

jauh, mari kita telaah epistemologi ekonomi heterodoks dari berbagai perspektif.

Salah satu prinsip epistemologi ekonomi heterodoks adalah pluralisme metodologis. Sementara ekonomi ortodoks cenderung menggunakan metode positivis yang berusaha menemukan hukum-hukum universal yang berlaku dalam berbagai konteks ekonomi, ekonomi heterodoks lebih terbuka terhadap penggunaan berbagai metode yang berbeda. Ini berarti bahwa tidak ada satu metode yang dianggap paling benar atau dominan dalam memahami fenomena ekonomi.¹⁵⁰

Dalam konteks ini, metode kualitatif, historis, institusional, dan sosial diakui sama pentingnya dengan metode kuantitatif. Ekonomi heterodoks menolak pendekatan reduksionis yang sering kali menjadi ciri dari ekonomi ortodoks, di mana fenomena ekonomi kompleks sering kali direduksi menjadi model-model matematis yang dianggap dapat menjelaskan seluruh realitas ekonomi. Sebaliknya, heterodoks percaya bahwa ekonomi harus dianalisis dengan mempertimbangkan kompleksitas sosial, politik, budaya, dan sejarah.¹⁵¹

Misalnya, fenomena ekonomi seperti ketimpangan pendapatan atau krisis keuangan tidak dapat dipahami hanya melalui analisis matematis yang statis; mereka membutuhkan pendekatan yang lebih interdisipliner yang mencakup aspek politik dan sosial. Epistemologi heterodoks menolak klaim bahwa teori ekonomi dapat dipisahkan dari konteks sosial atau institusional di mana ia muncul dan berkembang.¹⁵²

Paradigma ekonomi ortodoks sering kali berasumsi bahwa individu adalah aktor ekonomi yang rasional, yang bertindak untuk memaksimalkan kepuasan atau keuntungan mereka berdasarkan informasi yang sempurna. Namun, ekonomi heterodoks menolak gagasan ini dengan berargumen bahwa perilaku manusia dalam ekonomi jauh lebih kompleks daripada yang digambarkan oleh teori rasionalitas sempurna.¹⁵³

Dalam ekonomi heterodoks, individu dianggap memiliki rasionalitas yang terbatas (*bounded rationality*), di mana mereka

¹⁵⁰ Robert F. Garnett Jr, "Paradigms and Pluralism in Heterodox Economics," dalam *Jurnal Review of Political Economy*, Vol. 18 No. 4 Tahun 2006, hal. 521-546.

¹⁵¹ Sheila C. Dow, "A Future for Schools of Thought and Pluralism in Heterodox Economics," dalam John T. Harvey & Robert F. Garnett Jr., *Future Directions for Heterodox Economics*, Michigan: The University of Michigan Press, 2008, hal. 9-26.

¹⁵² Christina McRorie, "Heterodox Economics, Social Ethics, and Inequalities: New Tools for Thinking Critically about Markets and Economic Injustices," dalam *Jurnal of Religious Ethics*, Vol. 47 No. 2 Tahun 2019, hal. 232-258.

¹⁵³ John F. Tomer, "Economic Man vs. Heterodox Men: The Concepts of Human Nature in Schools of Economic Thought," dalam *Jurnal The Journal of Socio-Economics*, Vol. 30 No. 4 Tahun 2001, hal. 281-293.

mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tidak lengkap atau tidak sempurna. Selain itu, keputusan ekonomi juga dipengaruhi oleh emosi, norma sosial, kebiasaan, serta konteks budaya dan politik. Misalnya, keputusan konsumen untuk membeli barang tidak hanya didorong oleh harga atau preferensi yang rasional, tetapi juga oleh pengaruh sosial, status, atau bahkan ideologi.¹⁵⁴

Salah satu asumsi fundamental dalam ekonomi ortodoks adalah kepercayaan pada mekanisme pasar sebagai cara terbaik untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien. Asumsi ini mengarah pada pandangan bahwa pasar secara alami akan mencapai keseimbangan di mana penawaran dan permintaan bertemu, dan di mana efisiensi maksimum tercapai tanpa perlu intervensi pemerintah. Paradigma ekonomi heterodoks menolak keyakinan ini dengan argumen bahwa pasar tidak selalu bekerja secara efisien dan sering kali mengalami kegagalan. Pasar tidak hanya dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran, tetapi juga oleh kekuatan politik, institusional, dan sosial. Misalnya, dalam banyak kasus, monopoli atau oligopoli dapat membatasi persaingan dan mengarah pada alokasi sumber daya yang tidak efisien. Lebih jauh lagi, ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dan pendapatan sering kali tidak diselesaikan oleh mekanisme pasar bebas, tetapi justru diperburuk olehnya.¹⁵⁵

Ekonomi heterodoks juga mengkritik kebijakan neoliberal yang berfokus pada deregulasi dan privatisasi dengan asumsi bahwa pasar bebas selalu menghasilkan hasil yang optimal. Sebaliknya, mereka berargumen bahwa regulasi pemerintah dan intervensi institusional diperlukan untuk memastikan hasil ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.¹⁵⁶

Dalam epistemologi ekonomi ortodoks, ekonomi dipisahkan dari institusi sosial dan politik. Ekonomi dianggap sebagai disiplin yang mandiri, dengan hukumnya sendiri yang terpisah dari faktor-faktor sosial. Namun, dalam ekonomi heterodoks, ada pengakuan bahwa ekonomi tidak

¹⁵⁴ Morris Altman, "Rational Inefficiency: Smart Thinking, Bounded Rationality and The Scientific Basis for Economic failure and Success," dalam Morris Altman, *Handbook of Behavioural Economics and Smart Decision-Making*, Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2017, hal. 11-42.

¹⁵⁵ Peter Schmidt, "Market Failure vs System Failure as A Rationale for Economic Policy? A Critique from an Evolutionary Perspective," dalam *Journal of Evolutionary Economics*, Vol. 28 No. 4 Tahun 2018, hal. 785-803.

¹⁵⁶ Joseph Dorfman, "Heterodox Economic Thinking and Public Policy," dalam *Journal of Economic Issues*, Vol. 4 No. 1 Tahun 1970, hal. 1-22.

dapat dipisahkan dari konteks sosial, budaya, politik, dan institusional di mana ia beroperasi.¹⁵⁷

Ekonomi heterodoks berpendapat bahwa institusi sosial memainkan peran penting dalam membentuk perilaku ekonomi. Institusi seperti sistem hukum, pemerintahan, budaya, dan norma sosial memengaruhi bagaimana individu dan perusahaan berperilaku di pasar. Sebagai contoh, struktur hukum yang mengatur hak kepemilikan, aturan kontrak, serta kebijakan perburuhan akan memengaruhi bagaimana sumber daya didistribusikan dalam masyarakat.¹⁵⁸

Pendekatan ini menolak gagasan bahwa pasar adalah entitas yang otonom dan menyatakan bahwa pasar selalu dipengaruhi oleh keputusan-keputusan politik dan sosial. Dalam hal ini, ekonomi heterodoks sering menggunakan pendekatan historis dan institusional untuk memahami bagaimana ekonomi berkembang dari waktu ke waktu, serta bagaimana struktur sosial membentuk hasil-hasil ekonomi.¹⁵⁹

Salah satu pilar utama epistemologi heterodoks adalah kritik terhadap gagasan bahwa ekonomi adalah disiplin yang sepenuhnya obyektif dan netral. Dalam pandangan ortodoks, ilmu ekonomi sering diperlakukan sebagai ilmu yang bebas dari nilai, di mana teori dan model yang dihasilkan tidak dipengaruhi oleh politik atau ideologi. Namun, ekonomi heterodoks menolak klaim ini dengan berargumen bahwa semua teori ekonomi pada dasarnya dipengaruhi oleh nilai-nilai, ideologi, dan kepentingan tertentu. Misalnya, teori-teori yang mendukung pasar bebas sering kali dihubungkan dengan ideologi liberal atau kapitalis, sementara teori yang mendukung intervensi negara sering kali terkait dengan ideologi sosialis atau progresif.¹⁶⁰

Epistemologi heterodoks menekankan bahwa tidak ada teori ekonomi yang sepenuhnya bebas dari konteks sosial dan politik, dan bahwa ilmu ekonomi selalu terlibat dalam pertarungan kekuasaan dan kepentingan. Oleh karena itu, teori ekonomi tidak hanya mencerminkan kenyataan ekonomi, tetapi juga membantu membentuk kenyataan tersebut

¹⁵⁷ Frederic S. Lee, "Heterodox Economics," dalam *Jurnal The Long Term View*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2008, hal. 23-30.

¹⁵⁸ Nicolas Postel & Richard Sobel, "Towards a Heterodox Theory of the Economic Actor. The Contribution of Two French Institutional Schools," dalam *Jurnal History of Economic Ideas*, Vol. 19 No. 2 Tahun 2011, hal. 43.

¹⁵⁹ Milan Zafirovski, "Orthodoxy and Heterodoxy in Analyzing Institutions: Original and New Institutional Economics Reexamined," dalam *Jurnal International Journal of Social Economics*, Vol. 30 No. 7 Tahun 2003, hal. 798-826.

¹⁶⁰ Frederic S. Lee, "Heterodox Surplus Approach: Production, Prices and Value Theory, dalam *Jurnal MPRA*, No. 31824 Tahun 2011, hal. 1-62. <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/31824/> diakses 1 Oktober 2024.

melalui kebijakan dan keputusan yang diambil berdasarkan teori tersebut.¹⁶¹

Epistemologi ekonomi heterodoks juga mencakup refleksi kritis tentang peran ilmu ekonomi dalam masyarakat. Ini termasuk pertanyaan tentang siapa yang diuntungkan oleh teori ekonomi tertentu, bagaimana teori ekonomi digunakan untuk membenarkan kebijakan yang memengaruhi masyarakat luas, dan bagaimana ilmu ekonomi dapat digunakan untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan yang lebih luas. Ekonomi heterodoks menolak pandangan bahwa tujuan utama ekonomi adalah untuk memaksimalkan efisiensi atau pertumbuhan ekonomi semata. Sebaliknya, ekonomi harus digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang lebih luas, seperti keadilan sosial, pengurangan kemiskinan, dan kelestarian lingkungan. Dalam pandangan ini, ekonomi adalah ilmu sosial yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup manusia, bukan hanya pada angka-angka statistik atau indikator makroekonomi.¹⁶²

Epistemologi dalam ekonomi heterodoks menawarkan pendekatan yang lebih pluralis, kritis, dan kontekstual dibandingkan dengan ekonomi ortodoks. Dengan menolak asumsi-asumsi dasar seperti rasionalitas penuh, efisiensi pasar, dan objektivitas ilmu ekonomi, paradigma heterodoks berusaha memahami ekonomi sebagai fenomena sosial yang kompleks. Pendekatan ini menekankan pentingnya metode interdisipliner, interaksi antara ekonomi dan institusi sosial, serta refleksi kritis terhadap peran ilmu ekonomi dalam masyarakat. Dalam banyak hal, epistemologi heterodoks bertujuan untuk menciptakan ilmu ekonomi yang lebih relevan dengan realitas sosial dan politik, serta lebih responsif terhadap tantangan yang dihadapi masyarakat modern. Adapun beberapa bagian dari penyusun paradigma ekonomi heterodoks adalah sebagai berikut:

1. Teori Uang

Teori uang dalam paradigma ekonomi heterodoks menawarkan pandangan yang lebih luas dan kritis tentang asal-usul, fungsi, dan dampak uang dalam ekonomi dibandingkan dengan teori-teori uang yang dianut oleh paradigma ekonomi ortodoks. Dalam ekonomi ortodoks, uang sering dipandang hanya sebagai alat pertukaran netral, yang memfasilitasi transaksi dan memungkinkan mekanisme pasar bekerja secara efisien. Uang, dalam pandangan ini, dianggap memiliki

¹⁶¹ L. Randall Wray et al., *Guaranteed Jobs through A Public Service Employment Programme for The United States: A Modern Guide to State Intervention*, Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2019, hal. 253-275.

¹⁶² Annette Ostendorf & Michael Thoma, "Demands and Design Principles of A heterodox Didactics for Promoting Critical Thinking in Higher Education," dalam *Jurnal Higher Education*, Vol. 84 No. 1 Tahun 2022, hal. 33-50.

peran sekunder setelah barang dan jasa, karena fokus utama adalah pada produksi, konsumsi, dan keseimbangan antara penawaran dan permintaan.¹⁶³

Namun, paradigma heterodoks melihat uang dengan cara yang lebih komprehensif. Teori uang heterodoks menolak pandangan bahwa uang hanya bersifat netral, dan menekankan bahwa uang adalah fenomena sosial dan politik yang berperan sangat penting dalam pembentukan struktur ekonomi, distribusi kekayaan, dan dinamika sosial. Mari kita telaah teori uang dalam paradigma heterodoks secara lebih rinci dari berbagai perspektif utama, termasuk teori uang modern (*Modern Monetary Theory*), teori uang endogen, serta peran institusi dan negara dalam menciptakan dan mengelola uang.¹⁶⁴

Salah satu ciri utama dari teori uang heterodoks adalah gagasan bahwa uang bukan hanya alat pertukaran netral, melainkan sebuah konstruksi sosial. Dalam pandangan ini, uang diciptakan dan dijalankan oleh institusi-institusi sosial seperti pemerintah, bank sentral, dan sistem keuangan. Uang, dengan demikian, tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial, politik, dan historis di mana ia ada.¹⁶⁵

Sebagai contoh, menurut pendekatan ini, uang memiliki nilai karena ada kesepakatan sosial yang mendukungnya, bukan semata-mata karena memiliki nilai intrinsik atau berdasarkan standar emas (sebagaimana dipercaya pada era sebelumnya). Dalam ekonomi modern, uang fiat -yakni uang yang tidak didukung oleh komoditas seperti emas- bernilai karena pemerintah menjamin penggunaannya dan menetapkan bahwa pajak serta kewajiban lainnya harus dibayar dengan mata uang tersebut.¹⁶⁶

Hal ini sangat berbeda dengan pandangan ekonomi ortodoks, di mana uang sering kali hanya dianggap sebagai alat yang membantu efisiensi pasar dan tidak mempengaruhi struktur fundamental ekonomi. Pandangan heterodoks menekankan bahwa cara uang diciptakan dan didistribusikan berperan langsung dalam membentuk hasil ekonomi,

¹⁶³ Pavlina Tcherneva, "Money: A Comparison of The Post Keynesian and Orthodox Approaches," dalam *Jurnal Oeconomicus*, Vol. 4 No. 4 Tahun 2001, hal. 109-114.

¹⁶⁴ L. Randall Wray, "From The State Theory of Money to Modern Money Theory: An Alternative to Economic Orthodoxy," dalam *Jurnal Levy Economics Institute Working Papers Series*, Tahun 2014, hal. 1-32. <https://ssrn.com/abstract=2407711> diakses 2 Oktober 2024.

¹⁶⁵ Innes, A. Mitchell. "The Credit Theory of Money," dalam L. Randall Wray, *Credit and State Theories of Money*, Massachusetts: Edward Elgar, 2004, hal. 50-78.

¹⁶⁶ Pavlina R. Tcherneva, "Chartalism and The Tax-Driven Approach to Money," dalam Philip Arestis & Malcom Sawyer, *A Handbook of Alternative Monetary Economics*, Massachusetts, Edward Elgar Publishing Limited, 2006, hal. 69-86.

termasuk ketidaksetaraan pendapatan dan kekayaan, stabilitas ekonomi, dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.¹⁶⁷

Salah satu konsep penting dalam teori uang heterodoks adalah gagasan bahwa uang bersifat endogen, yang berarti bahwa uang diciptakan dari dalam sistem ekonomi itu sendiri, khususnya melalui sektor perbankan. Teori ini berlawanan dengan pandangan ortodoks yang sering kali berasumsi bahwa uang diciptakan oleh otoritas moneter (seperti bank sentral) dan kemudian beredar dalam ekonomi.¹⁶⁸

Dalam teori uang endogen, bank komersial memainkan peran kunci dalam penciptaan uang melalui proses pemberian kredit. Ketika bank memberikan pinjaman, mereka pada dasarnya menciptakan uang baru, yang kemudian beredar dalam ekonomi. Proses ini dikenal sebagai proses penciptaan uang melalui kredit. Jumlah uang dalam perekonomian bukan merupakan keputusan eksklusif dari otoritas moneter, tetapi merupakan hasil dari keputusan yang dibuat oleh berbagai pelaku ekonomi, termasuk bank, perusahaan, dan individu, yang dipengaruhi oleh permintaan kredit dan kondisi ekonomi.¹⁶⁹

Menurut teori ini, bank sentral memiliki kontrol terbatas atas jumlah uang yang beredar, karena penciptaan uang bergantung pada kebutuhan kredit di ekonomi riil. Ini berlawanan dengan teori ortodoks, di mana uang dipandang sebagai variabel eksogen yang dikontrol oleh bank sentral melalui kebijakan moneter. Dalam pandangan heterodoks, bank sentral lebih berperan dalam menetapkan suku bunga dan mengelola kondisi likuiditas, daripada mengontrol langsung jumlah uang yang beredar.¹⁷⁰

Salah satu cabang teori uang heterodoks yang semakin populer dalam beberapa dekade terakhir adalah Teori Uang Modern (*Modern Monetary Theory - MMT*). MMT menawarkan pandangan radikal tentang peran negara dalam menciptakan dan mengelola uang, dengan fokus pada bagaimana pemerintah dengan kedaulatan moneter dapat

¹⁶⁷ Dirk H. Ehnts, "Modern Monetary Theory and The Public Purpose," dalam *Jurnal American Review of Political Economy*, Vol. 15 No.1 Tahun 2020. <https://arpejournal.com/article/id/173/> diakses 2 Oktober 2024.

¹⁶⁸ Peter Howells, "The Endogeneity of Money: Empirical Evidence," dalam Philip Arestis & Malcom Sawyer, *A Handbook of Alternative Monetary Economics*, Massachusetts, Edward Elgar Publishing Limited, 2006, hal. 52-68.

¹⁶⁹ Hyman P. Minsky, "The Endogeneity of Money," dalam Edward J. Nell & Willi Semmler, *Nicholas Kaldor and Mainstream Economics: Confrontation or Convergence?*, London: Palgrave Macmillan UK, 1991, hal. 207-220.

¹⁷⁰ L. Randall Wray, "When are interest rates exogenous?," dalam Mark Setterfield, *Complexity, Endogenous Money and Macroeconomic Theory Essays in Honour of Basil J. Moore*, Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2006, hal. 271-289.

mengelola ekonominya tanpa batasan yang sering diklaim oleh pandangan ortodoks.¹⁷¹

Menurut MMT, negara dengan kedaulatan moneter penuh yaitu negara yang memiliki kontrol penuh atas mata uangnya sendiri, seperti Amerika Serikat, Jepang, atau Inggris tidak pernah kehabisan uang karena mereka dapat mencetaknya sesuai kebutuhan. Dalam pandangan MMT, defisit anggaran pemerintah bukanlah masalah, selama pemerintah dapat mencetak uang untuk membayar pengeluarannya.¹⁷²

Asumsi utama dari teori MMT ini adalah: *pertama*, Pemerintah yang memiliki kontrol penuh atas mata uangnya sendiri tidak terikat oleh kebutuhan untuk meminjam atau menabung sebelum membelanjakan uang. Dalam situasi seperti itu, pemerintah bisa terus menciptakan uang baru untuk mendanai pengeluarannya. *Kedua*, pajak dan pinjaman sebagai pengendali inflasi yang dalam pandangan ortodoks, defisit anggaran sering kali dipandang sebagai hal yang berbahaya karena dapat memicu inflasi atau menumpuk utang yang tidak berkelanjutan. Namun, MMT berpendapat bahwa pajak dan pinjaman dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi, bukan untuk mendanai pengeluaran pemerintah. Pajak bukanlah sumber pendanaan utama bagi pemerintah dengan kedaulatan moneter, tetapi lebih berfungsi untuk mengurangi daya beli masyarakat guna mengendalikan permintaan yang berlebihan dan mencegah inflasi.¹⁷³

Ketiga, kebijakan fiskal lebih penting daripada kebijakan moneter yang mana MMT juga menekankan bahwa kebijakan fiskal - pengeluaran dan pajak pemerintah- lebih penting daripada kebijakan moneter -suku bunga dan kontrol jumlah uang beredar- dalam mengelola ekonomi. Dalam pandangan ini, pemerintah dapat menggunakan pengeluaran fiskal untuk merangsang permintaan agregat dan mengurangi pengangguran, sementara suku bunga dapat ditetapkan pada tingkat rendah untuk memfasilitasi investasi swasta. Dalam konteks ini, defisit anggaran bukanlah masalah, selama ada kapasitas produktif yang belum dimanfaatkan di dalam ekonomi. Masalah utama, dalam pandangan MMT, adalah inflasi yang mungkin

¹⁷¹ Phil Armstrong, "An MMT Perspective on Macroeconomic Policy Space," dalam *Jurnal Real-world economics review*, Edisi ke 89 Tahun 2019, hal. 32-45.

¹⁷² Yeva Nersisyan & L. Randall Wray, "Sovereign Nations Face Resource Constraints, Not Financial Constraints," dalam L. Randall Wray et al., *Modern Monetary Theory*, Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2023, hal. 67-86.

¹⁷³ Stephanie Hollings & David A. Turner, "Economics of Education after Covid," dalam *Jurnal World Studies in Education*, Vol. 22 No.1 Tahun 2021, hal. 45-55.

timbul jika pengeluaran pemerintah berlebihan dan melebihi kapasitas produksi ekonomi.¹⁷⁴

Keempat, MMT juga menyoroti tentang relasi uang dan distribusi kekuasaan yaitu bahwa teori uang dalam ekonomi heterodoks juga menyoroti bagaimana uang berkaitan dengan distribusi kekuasaan dalam masyarakat. Dalam pandangan ini, uang tidak hanya merupakan alat pertukaran tetapi juga sebuah alat kekuasaan yang menentukan siapa yang memiliki akses ke sumber daya dan siapa yang dikucilkan dari proses ekonomi. Proses penciptaan dan distribusi uang sangat dipengaruhi oleh struktur politik dan sosial yang ada, termasuk kebijakan pemerintah, peraturan perbankan, dan kontrol terhadap institusi keuangan.¹⁷⁵

Ekonomi heterodoks sering kali menyoroti bagaimana distribusi uang dan kredit cenderung mendukung kepentingan kelompok-kelompok tertentu, seperti kelas pengusaha atau pemilik modal, sementara kelompok lain, seperti pekerja atau masyarakat miskin, sering kali memiliki akses yang terbatas ke uang dan kredit. Proses ini memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi, yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif.¹⁷⁶

Selain itu, teori uang heterodoks juga menunjukkan bahwa kebijakan moneter yang tidak tepat sering kali lebih menguntungkan sektor keuangan daripada sektor riil. Misalnya, dalam situasi krisis, bank sentral sering kali menurunkan suku bunga untuk mendorong investasi dan konsumsi. Namun, kebijakan ini sering kali lebih banyak menguntungkan investor dan bank daripada pekerja atau produsen, karena mereka memiliki akses yang lebih baik ke pasar keuangan dan dapat memanfaatkan suku bunga rendah untuk meningkatkan kekayaan mereka.¹⁷⁷

Dalam pandangan heterodoks, negara memegang peran penting dalam menciptakan dan mengelola uang. Uang dianggap sebagai instrumen kekuasaan negara yang memungkinkan pemerintah untuk

¹⁷⁴ Emilio Carnevali & Matteo Deleidi, "The Trade-off Between Inflation and Unemployment in an 'MMT world': An Open-Economy Perspective," dalam *Jurnal European Journal of Economics and Economic Policies*, Vol. 20 No. 1 Tahun 2023, hal. 90-124.

¹⁷⁵ Alan Shipman, "The Significance of MMT in Linking Money, Markets, Sector Balances and Aggregate Demand," dalam *Jurnal Real-World Economics Review*, Edisi 89 Tahun 2019, hal. 180.

¹⁷⁶ Michael Hudson, "Piketty vs The Classical Economic Reformers," dalam *Jurnal Real-World Economic Review*, Edisi 69 Tahun 2014, hal. 122-130.

¹⁷⁷ Michael Hudson, "Finance Capitalism versus Industrial Capitalism: The Rentier Resurgence and Takeover," dalam *Jurnal Review of Radical Political Economics*, Vol. 53 No. 4 Tahun 2021, hal. 557-573.

membiayai proyek-proyek publik, mengatur ekonomi, dan mencapai tujuan sosial tertentu. Pandangan ini sangat berbeda dari teori ortodoks, yang cenderung melihat peran negara dalam ekonomi sebagai minimal, terbatas pada pencetakan uang dan menjaga stabilitas harga.¹⁷⁸

Dalam ekonomi heterodoks, peran negara lebih aktif dalam mengelola pasokan uang dan mengatur distribusi kekayaan. Pemerintah dapat menciptakan uang baru melalui pengeluaran fiskal, yang kemudian digunakan untuk mempekerjakan tenaga kerja, membiayai proyek infrastruktur, atau mendanai program kesejahteraan sosial. Pandangan ini berakar pada keyakinan bahwa pasar tidak selalu menghasilkan hasil yang adil atau efisien, dan bahwa intervensi negara diperlukan untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi.¹⁷⁹

Teori uang dalam paradigma ekonomi heterodoks menolak pandangan tradisional yang menganggap uang hanya sebagai alat pertukaran netral. Sebaliknya, uang dipandang sebagai instrumen sosial, politik, dan ekonomi yang memiliki peran penting dalam membentuk distribusi kekayaan, kekuasaan, dan kesejahteraan di masyarakat. Dalam paradigma ini, uang tidak dipahami semata-mata sebagai medium yang memfasilitasi transaksi di pasar, tetapi sebagai alat yang menciptakan dinamika kekuatan di dalam sistem ekonomi.¹⁸⁰

Dengan menekankan bahwa uang bersifat endogen —diciptakan dalam proses pemberian kredit oleh sistem perbankan— teori heterodoks memberikan pandangan yang lebih dinamis dan kritis tentang peran uang. Uang tidak hanya dihasilkan oleh kebijakan bank sentral, melainkan juga oleh keputusan-keputusan yang diambil oleh sektor keuangan, lembaga perbankan, dan pelaku ekonomi lainnya. Ini menunjukkan bahwa penciptaan uang berhubungan langsung dengan struktur kekuasaan dan distribusi kekayaan, memperlihatkan bagaimana kelompok-kelompok tertentu dapat memperoleh keuntungan lebih besar dari sistem moneter dibandingkan yang lain.¹⁸¹

¹⁷⁸ Eric Tymoigne, "Seven Replies to The Critiques of Modern Money Theory," dalam *Jurnal Levy Economics Institute Working Papers Series*, Tahun 2021. <https://ssrn.com/abstract=3984305> diakses 2 Oktober 2024.

¹⁷⁹ Robert Hutterski, "The Concept of The State as Employer ff Last Resort in The Context of Modern Money Theory," dalam *Jurnal Polityka Społeczna*, Vol. 522 No. 9 Tahun 2017, hal. 14-18.

¹⁸⁰ Dirk Ehnts, *Modern Money Theory: Professional Practice in Governance and Public Organizations*, Berlin: Springer, 2024, hal. 49-72

¹⁸¹ William Mitchell, "Debt and Deficits an MMT perspective," dalam *Jurnal Centre of Full Employment and Equity CoffEE*, No. 20-05 Tahun 2020 hal. 1-14.

Teori MMT, yang merupakan salah satu cabang dari pemikiran heterodoks, memperluas pandangan ini dengan menyoroti bahwa negara dengan kedaulatan moneter tidak dibatasi oleh anggaran fiskal sebagaimana yang sering dipahami dalam kerangka ortodoks. Defisit anggaran bukan masalah selama ada kapasitas produksi yang belum dimanfaatkan, dan pemerintah dapat mencetak uang untuk memenuhi kebutuhan domestiknya tanpa menimbulkan risiko langsung terhadap stabilitas ekonomi, selama pengendalian inflasi tetap diperhatikan.¹⁸²

Dalam kesimpulannya, teori uang heterodoks menyarankan bahwa uang tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial, politik, dan institusional di mana ia beroperasi. Pendekatan ini menawarkan pandangan yang lebih luas tentang bagaimana uang diciptakan dan dikelola, serta dampaknya terhadap ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam ekonomi. Dengan demikian, kebijakan moneter dan fiskal dalam paradigma heterodoks lebih difokuskan pada pencapaian keadilan sosial, pengurangan kemiskinan, dan pengelolaan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan negara memainkan peran aktif dalam pengelolaan uang dan distribusi kekayaan.¹⁸³

2. Teori Suku Bunga Dan Pengangguran

Paradigma ekonomi heterodoks memberikan pendekatan yang sangat berbeda terhadap hubungan antara suku bunga dan pengangguran dibandingkan dengan pemikiran ekonomi ortodoks. Dalam pandangan ortodoks atau arus utama, suku bunga sering dilihat sebagai instrumen utama kebijakan moneter yang digunakan untuk mengelola inflasi dan mencapai tingkat pengangguran yang seimbang melalui pengaruhnya terhadap permintaan agregat.¹⁸⁴ Dalam paradigma heterodoks, hubungan ini lebih kompleks, melibatkan struktur ekonomi, dinamika kekuasaan, distribusi pendapatan, dan pentingnya kebijakan fiskal dalam mengurangi pengangguran. Untuk memahami relasi ini secara mendalam, kita akan mengeksplorasi berbagai pendekatan heterodoks, termasuk teori-teori uang endogen, Teori Uang Modern (*Modern Monetary Theory* - MMT), dan

¹⁸² Philip Armstrong, "The Contribution of Modern Monetary Theory to Heterodox Economics," dalam Theresa Jefferson & John E. King, *Post Keynesian Economics*, Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2024. 48-70.

¹⁸³ Robert McMaster, "Post-War Heterodox Approaches and Economic Policy," dalam Stavros Drakopoulos & Loannis Katselidis, *Economic Policy and the History of Economic Thought*, London: Routledge, 2023, hal. 206-223.

¹⁸⁴ Alfredo Saad-Filho, "Monetary Policy in the Neo-Liberal Transition: A Political Economy Critique of Keynesianism, Monetarism and Inflation Targeting," dalam Robert Albritton et al., *Political Economy and Global Capitalism: The 21st Century, Present and Future*, London: Anthem Press, 2007, hal. 89-123.

pandangan heterodoks tentang peran negara dalam mengelola perekonomian.¹⁸⁵

Dalam teori ekonomi ortodoks, suku bunga rendah dianggap mendorong investasi, konsumsi, dan permintaan agregat, yang pada akhirnya mengurangi pengangguran. Sebaliknya, suku bunga tinggi dianggap mengurangi inflasi tetapi berpotensi meningkatkan pengangguran karena biaya investasi dan konsumsi menjadi lebih tinggi. Namun, dalam pandangan heterodoks, hubungan ini dipandang tidak sesederhana itu. Menurut paradigma heterodoks, suku bunga bukan instrumen yang paling efektif untuk menurunkan pengangguran. Dalam banyak pendekatan heterodoks, termasuk Teori MMT, kebijakan moneter berbasis suku bunga sering kali memiliki dampak terbatas dalam mempengaruhi penciptaan lapangan kerja secara langsung. MMT secara khusus menekankan bahwa pengangguran adalah masalah yang harus dipecahkan melalui kebijakan fiskal, bukan moneter. Artinya, penurunan suku bunga yang diharapkan dapat meningkatkan investasi swasta tidak selalu efektif, terutama dalam kondisi di mana sektor swasta tidak memiliki insentif atau kepercayaan yang cukup untuk melakukan investasi yang menciptakan lapangan kerja baru.¹⁸⁶

Pandangan heterodoks menyarankan bahwa kebijakan suku bunga yang sangat rendah mungkin hanya menguntungkan sektor keuangan tanpa memberikan dampak signifikan pada sektor riil yang dapat menyerap tenaga kerja. Sektor keuangan cenderung mengambil keuntungan dari suku bunga rendah melalui spekulasi keuangan dan peningkatan nilai aset, sementara sektor riil seperti manufaktur atau jasa mungkin tidak mendapatkan manfaat yang sama dalam hal penciptaan lapangan kerja.¹⁸⁷

Selain itu, paradigma heterodoks sering kali menekankan bahwa suku bunga bukan satu-satunya variabel yang penting untuk dipertimbangkan. Keseimbangan yang stabil antara investasi publik dan swasta serta peran kebijakan fiskal yang aktif dianggap jauh lebih krusial dalam mengurangi pengangguran. Jadi, penurunan suku bunga

¹⁸⁵ William F Mitchell, "The Job Guarantee: Full Employment and Price Stability in A Small Open Economy," dalam Edward J. Neil & Mathew Forstater, *Reinventing Functional Finance: Transformational Growth and Full Employment*, Massachusetts: Edward Elgar Publishing Limited, 2003, hal. 278-298.

¹⁸⁶ Carlos Manera, "Orthodoxy versus Heterodoxy: Inflation, Unemployment, Growth, Profit," dalam *Jurnal eabh Papers*, Vol. 15 No. 1 Tahun 2015, hal. 1-19.

¹⁸⁷ Geoffrey Ingham, "Modern Money Theory: Sociology and Economics," dalam Yeva Nersian & L. Randall Wray, *The Elgar Companion to Modern Money Theory*, Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2024, hal. 35-46.

yang diterapkan bank sentral mungkin tidak cukup jika tidak diiringi dengan pengeluaran publik yang dapat merangsang sektor riil.¹⁸⁸

Pandangan heterodoks tentang suku bunga juga dipengaruhi oleh teori uang endogen, yang menyatakan bahwa uang diciptakan dari dalam sistem ekonomi, khususnya oleh sektor perbankan, melalui pemberian kredit. Dalam teori ini, jumlah uang dalam ekonomi bukanlah hasil langsung dari keputusan bank sentral, melainkan dari kebutuhan kredit oleh pelaku ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan suku bunga hanya mempengaruhi dinamika kredit secara tidak langsung dan tidak dapat dengan mudah dikendalikan oleh bank sentral.¹⁸⁹

Dalam konteks ini, ketika bank sentral menurunkan suku bunga, harapannya adalah bank akan lebih bersedia memberikan pinjaman, sehingga meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja. Namun, dalam paradigma heterodoks, kebijakan suku bunga rendah sering kali tidak cukup untuk memacu peningkatan kredit jika permintaan kredit dari sektor riil tetap rendah atau jika sektor keuangan lebih tertarik pada aktivitas spekulatif daripada investasi produktif.¹⁹⁰

Misalnya, setelah krisis keuangan 2008, suku bunga di banyak negara maju diturunkan hingga mendekati nol. Meskipun demikian, pertumbuhan investasi dan lapangan kerja tidak secepat yang diharapkan. Hal ini mengilustrasikan keterbatasan kebijakan moneter berbasis suku bunga dalam menciptakan lapangan kerja ketika ada kendala struktural yang lebih dalam di ekonomi.¹⁹¹

Salah satu aspek kunci yang ditonjolkan oleh paradigma heterodoks adalah bagaimana suku bunga memengaruhi distribusi kekayaan, yang pada gilirannya mempengaruhi pengangguran. Dalam banyak sistem ekonomi modern, perubahan suku bunga sering kali memiliki efek yang tidak merata pada berbagai kelompok dalam masyarakat. Ketika suku bunga rendah, mereka yang memiliki aset finansial (seperti saham, obligasi, dan properti) cenderung lebih

¹⁸⁸ George G. Kaufman, "Lender of Last Resort: A Contemporary Perspective," dalam *Jurnal of Financial Services Research*, Vol. 5 No. 2 Tahun 1991, hal. 95-110.

¹⁸⁹ Alexander C. Dow & Sheila C. Dow, "Endogenous Money Creation and Idle Balances," dalam John Phelby, *New directions in Post-Keynesian Economics*, Massachusetts: Edward Elgar Publishing Limited, 1989, hal. 147-164.

¹⁹⁰ Dirk Ehnts & Michael Paetz, "How Do We Finance The Covid-19 Debt? Attempt to Find A Right Answer to A Wrong Question from The Perspective of Modern Monetary Theory (MMT)," dalam *Jurnal Revista de Economía Crítica*, No. 31 Tahun 2021, hal. 139-148.

¹⁹¹ Thomas I. Palley, "The Fallacy of The Natural Rate of Interest and Zero Lower Bound Economics: Why Negative Interest Rates May Not Remedy Keynesian Unemployment," dalam *Jurnal Review of Keynesian Economics*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2019, hal. 151-170.

diuntungkan karena nilai aset-aset ini meningkat. Namun, pekerja dan masyarakat dengan pendapatan rendah mungkin tidak merasakan manfaat langsung karena mereka cenderung memiliki sedikit atau tidak ada aset yang nilainya dapat meningkat sebagai akibat dari kebijakan moneter.¹⁹²

Akibatnya, kebijakan suku bunga rendah dapat memperlebar kesenjangan kekayaan tanpa mengurangi pengangguran secara signifikan. Paradigma heterodoks menyoroti bahwa peningkatan nilai aset dan pertumbuhan sektor keuangan tidak selalu sejalan dengan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja atau penciptaan lapangan kerja. Jika kekayaan lebih banyak terkonsentrasi pada kelompok tertentu dalam masyarakat, permintaan agregat mungkin tidak meningkat secara signifikan, bahkan dengan suku bunga yang lebih rendah, karena kelompok-kelompok kaya cenderung menabung lebih banyak daripada kelompok miskin.¹⁹³

Sebagai respons terhadap tantangan ini, ekonomi heterodoks lebih menganjurkan intervensi fiskal langsung untuk menciptakan lapangan kerja, daripada bergantung pada mekanisme tidak langsung seperti suku bunga rendah.¹⁹⁴

Teori MMT menempatkan pengangguran sebagai masalah utama yang perlu dipecahkan melalui kebijakan fiskal aktif, bukan melalui penyesuaian suku bunga. MMT berargumen bahwa pemerintah dengan kedaulatan moneter penuh -yakni, negara yang memiliki kendali penuh atas mata uangnya sendiri/memiliki kedaulatan mata uang- tidak terikat oleh kekhawatiran tentang defisit anggaran dalam rangka menciptakan lapangan kerja. Alih-alih berfokus pada inflasi dan penggunaan suku bunga untuk menyesuaikan permintaan agregat, MMT mengusulkan bahwa pemerintah dapat mencetak uang dan mengeluarkan anggaran untuk menciptakan program-program pekerjaan langsung.¹⁹⁵

Program jaminan pekerjaan (*job guarantee*) adalah salah satu kebijakan yang sering diusulkan oleh para pendukung MMT. Dalam

¹⁹² James K. Gailbraith et al., "Inequality and Unemployment in Europe: The American Cure," dalam *Jurnal UTIP Working Paper*, No. 11 Tahun 2000, hal. 1-23 <https://ssrn.com/abstract=228689> diakses 3 Oktober 2024.

¹⁹³ William Mitchell, "Debt and Deficits an MMT perspective," dalam *Jurnal Centre of Full Employment and Equity CoffEE Working Paper*, Vol. 20 No. 5 Tahun 2020, hal. 1-14.

¹⁹⁴ Joëlle Leclaire, "Invited Article Fiscal and Monetary Policy for Difficult Times: MMT solutions," dalam *Jurnal European Journal of Economics and Economic Policies*, Vol. 20 No.2 Tahun 2023, hal. 356-368.

¹⁹⁵ Warren Mosler, "A Framework for The Analysis of The Price Level and Inflation," dalam L. Randall Wray et al., *Modern Monetary Theory*, Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2023, hal. 87-93.

skema ini, pemerintah akan menyediakan pekerjaan bagi siapa saja yang menginginkannya tetapi tidak bisa mendapat pekerjaan di sektor swasta. Program semacam ini akan langsung mengatasi masalah pengangguran, dengan cara menciptakan permintaan agregat melalui pengeluaran publik yang terarah. Dalam pandangan ini, penurunan suku bunga bukanlah solusi utama untuk mengatasi pengangguran, karena peran kebijakan fiskal dalam menciptakan lapangan kerja jauh lebih signifikan.¹⁹⁶

Dengan demikian, MMT menolak pandangan ortodoks bahwa inflasi harus selalu menjadi perhatian utama kebijakan ekonomi, dan mengusulkan agar pemerintah lebih fokus pada penciptaan lapangan kerja melalui kebijakan fiskal yang aktif. Suku bunga yang rendah memang dapat membantu, tetapi pengeluaran pemerintah yang diarahkan langsung pada penciptaan pekerjaan jauh lebih efektif dalam menurunkan pengangguran.¹⁹⁷

Paradigma heterodoks sering kali menekankan bahwa pengangguran adalah masalah struktural, bukan hanya masalah siklus ekonomi yang dapat diatasi dengan menyesuaikan suku bunga. Struktur ekonomi, ketidaksetaraan distribusi kekayaan, dan kurangnya intervensi negara dalam menciptakan lapangan kerja sering kali menjadi faktor yang lebih penting daripada suku bunga dalam menentukan tingkat pengangguran.¹⁹⁸

Dalam pendekatan ini, peran negara menjadi sangat penting. Negara perlu bertindak sebagai pencipta lapangan kerja melalui pengeluaran publik yang strategis, bukan hanya mengandalkan pasar atau perubahan suku bunga untuk menstimulasi sektor swasta. Misalnya, program-program pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan dapat meningkatkan kapasitas produktif ekonomi sekaligus menciptakan lapangan kerja. Dengan demikian, fokus pada kebijakan fiskal proaktif dianggap lebih efektif daripada kebijakan moneter berbasis suku bunga.¹⁹⁹

¹⁹⁶ William Mitchell & Thomas Fazi, *Reclaiming The State*, hal. 221-248.

¹⁹⁷ Emilio Carnevali & Matteo Deleidi, "The Trade-Off between Inflation and Unemployment in An MMT World: An Open-Economy Perspective." Dalam *Jurnal European Journal of Economics and Economic Policies*, Vol. 20 No. 1 Tahun 2023, hal. 90-124.

¹⁹⁸ William F. Mitchell, "The Buffer Stock Employment Model and The NAIRU: The Path to Full Employment," dalam *Jurnal of Economic Issues*, Vol. 32 No. 2 Tahun 1998, hal. 547-555.

¹⁹⁹ Yeva Nersisyan & L. Randall Wray, "How to pay for The Green New Deal," dalam *Jurnal Levy Economics Institute Working Papers*, Seri 931 tahun 2019, hal. 1-56. <https://ssrn.com/abstract=3398983> diakses 2 Oktober 2024.

Dalam paradigma ekonomi heterodoks, hubungan antara suku bunga dan pengangguran tidak sederhana yang diusulkan dalam ekonomi ortodoks. Suku bunga, meskipun memengaruhi sektor keuangan, sering kali memiliki dampak terbatas pada penciptaan lapangan kerja riil, terutama ketika masalah struktural yang lebih mendasar tidak diatasi. Pendekatan heterodoks menekankan pentingnya kebijakan fiskal, distribusi kekayaan yang lebih adil, dan intervensi negara dalam menciptakan lapangan kerja, yang semuanya lebih signifikan daripada sekadar penyesuaian suku bunga. Program seperti jaminan pekerjaan dan pengeluaran publik yang strategis dipandang sebagai solusi utama untuk mengatasi pengangguran dalam paradigma heterodoks. Kebijakan fiskal yang proaktif, terutama melalui penciptaan lapangan kerja langsung oleh negara, dianggap lebih efektif dalam menangani masalah pengangguran ketimbang hanya mengandalkan kebijakan moneter berbasis suku bunga.²⁰⁰

Secara keseluruhan, dalam pendekatan heterodoks, suku bunga dipandang sebagai instrumen yang memiliki batasan, terutama dalam kaitannya dengan penciptaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran. Pandangan ini berbeda tajam dari ekonomi ortodoks, yang melihat suku bunga sebagai alat utama untuk menstabilkan perekonomian melalui penyesuaian permintaan agregat. Dalam paradigma heterodoks, masalah pengangguran lebih berakar pada struktur ekonomi yang tidak seimbang, distribusi kekayaan yang tidak merata, dan kurangnya intervensi negara dalam menciptakan lapangan kerja.²⁰¹

Selain itu, paradigma heterodoks juga menekankan pentingnya memahami peran uang sebagai instrumen yang diciptakan secara endogen dalam ekonomi. Dalam pandangan ini, penciptaan uang melalui kredit perbankan dan keputusan keuangan sektor swasta sering kali tidak selaras dengan kebutuhan penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, tanggung jawab utama untuk mengurangi pengangguran terletak pada kebijakan fiskal negara yang dapat

²⁰⁰ Paulo L. Dos Santos, "Not Wage-Led versus Profit-Led but Investment-Led versus Consumption-Led Growth," dalam *Jurnal of Post Keynesian Economics*, Vol. 37 No. 4 Tahun 2015, hal. 661-686.

²⁰¹ Stephen Rousseas, *Post Keynesian Monetary Economics*, London: Springer, 1998, hal. 37-139.

secara langsung menciptakan permintaan agregat dan menggerakkan sektor riil.²⁰²

Dalam kesimpulan ini, jelas bahwa paradigma heterodoks menuntut perubahan pendekatan dalam mengelola perekonomian. Suku bunga yang rendah atau tinggi bukanlah solusi yang cukup untuk mengatasi masalah pengangguran secara struktural. Negara harus memainkan peran aktif dalam menciptakan lapangan kerja, merancang kebijakan distribusi yang lebih adil, dan mengelola dinamika kekuasaan ekonomi agar pengangguran dapat ditekan secara efektif. Oleh karena itu, paradigma heterodoks mengusulkan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, di mana penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan sosial menjadi prioritas utama, bukan sekadar stabilitas harga atau keseimbangan fiskal seperti dalam paradigma ekonomi ortodoks.

3. Relasi Otoritas Dan Pasar

Dalam paradigma ekonomi heterodoks, relasi antara otoritas dan pasar sangat berbeda dibandingkan dengan pandangan ekonomi ortodoks atau arus utama. Di dalam ekonomi ortodoks, peran negara atau otoritas umumnya dianggap sebagai pelindung stabilitas makroekonomi melalui kebijakan moneter dan fiskal yang minimal. Pasar di sini dipandang sebagai mekanisme yang efisien untuk mengalokasikan sumber daya dan mencapai keseimbangan, sementara intervensi pemerintah dianggap perlu diminimalisir, karena bisa mengganggu efisiensi pasar.²⁰³

Namun, paradigma heterodoks menolak asumsi dasar tersebut dan berargumen bahwa pasar tidak selalu mampu mengatur dirinya sendiri dengan cara yang efisien, dan bahwa otoritas negara memiliki peran yang krusial dalam memastikan kesejahteraan sosial, stabilitas ekonomi, dan distribusi yang adil. Pasar dalam pandangan heterodoks cenderung dianggap sebagai konstruksi sosial yang bisa memiliki kelemahan, ketidakstabilan, dan ketidakadilan jika dibiarkan beroperasi tanpa regulasi atau kontrol dari otoritas.²⁰⁴

Dalam ekonomi heterodoks, pasar tidak dipandang sebagai entitas yang netral dan alami, melainkan sebagai hasil dari konstruksi

²⁰² Ilker Aslan, "Employer of Last Resort as A New 'New Deal': A few Thoughts on Turkey," dalam *Jurnal American Review of Political Economy*, Vol. 16 No. 2 Tahun 2021, hal. 1-14. <https://doi.org/10.38024/arpe.235> diakses 2 Oktober 2024.

²⁰³ Werner Bonefeld, "Monetarism and Crisis," dalam Werner Bonefeld & John Holloway, *Global Capital, National State and the Politics of Money*, London: Palgrave Macmillan, 1995, hal. 35-68.

²⁰⁴ Barkin Cihanli, "MMT: How To Pay For Economic Development," dalam *Jurnal SSRN*, Tahun 2020. <https://ssrn.com/abstract=3826961> diakses 2 Oktober 2024.

sosial dan politik. Pasar terbentuk dari aturan, norma, dan kebijakan yang diciptakan oleh manusia, sehingga tidak ada pasar yang "bebas" secara absolut. Karena pasar adalah ciptaan institusi, keputusan-keputusan politik dan kebijakan publik mempengaruhi bagaimana pasar berfungsi dan siapa yang mendapatkan manfaat dari mekanisme pasar tersebut. Oleh karena itu, otoritas memiliki peran penting dalam membentuk struktur dan aturan pasar agar lebih inklusif dan adil.²⁰⁵

Paradigma heterodoks sangat menekankan pada kegagalan pasar yaitu situasi di mana pasar gagal mengalokasikan sumber daya dengan cara yang efisien atau adil. Kegagalan ini bisa berupa monopoli, ketimpangan distribusi kekayaan, pengangguran, serta ketidakadilan sosial dan lingkungan. Dalam konteks ini, otoritas negara dipandang sebagai aktor penting yang harus campur tangan untuk memperbaiki kegagalan pasar tersebut.²⁰⁶

Misalnya, ketika pasar gagal menciptakan lapangan kerja yang cukup atau ketika ada distribusi kekayaan yang sangat timpang, negara diharapkan hadir dengan kebijakan-kebijakan yang dapat mengurangi ketidakadilan ini. Kebijakan fiskal, seperti redistribusi pendapatan melalui pajak progresif atau program jaminan pekerjaan, dianggap sebagai alat utama bagi negara untuk memperbaiki disfungsi pasar dan memastikan ekonomi bekerja untuk kepentingan masyarakat luas, bukan hanya bagi segelintir kelompok elit.²⁰⁷

Dalam paradigma heterodoks, salah satu peran utama negara adalah penciptaan lapangan kerja. Di sini, pemerintah tidak hanya bertindak sebagai pengatur pasar tetapi juga sebagai pencipta pasar melalui pengeluaran publik, terutama dalam kondisi di mana sektor swasta tidak dapat menciptakan lapangan kerja yang cukup. Salah satu konsep yang paling dikenal dalam heterodoksi adalah program jaminan pekerjaan (*job guarantee*).²⁰⁸

Negara dalam hal ini bertindak sebagai pemberi pekerjaan terakhir, menyediakan pekerjaan bagi siapa saja yang ingin bekerja tetapi tidak dapat menemukan pekerjaan di sektor swasta. Intervensi negara semacam ini bertujuan untuk memastikan tingkat pengangguran

²⁰⁵ Frederic S. Lee, "Heterodox Economics," dalam *Jurnal The Long Term View*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2008, hal. 23-30.

²⁰⁶ Tae-Hee Jo et al., "Beyond Market-Fundamentalist Economics: An Agenda for Heterodox Economics to Change The Dominant Narrative," dalam *Jurnal On the Horizon*, Vol. 20 No. 3 Tahun 2012, hal. 155-163.

²⁰⁷ Joseph Dorfman, "Heterodox Economic Thinking and Public Policy," dalam *Jurnal of Economic Issues*, Vol. 4 No. 1 Tahun 1970, hal. 1-22.

²⁰⁸ Marc Lavoie, "Was Hyman Minsky a Post-Keynesian Economist?," dalam *Jurnal Review of Evolutionary Political Economy*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2020, hal. 85-101.

yang rendah dan menjaga permintaan agregat yang stabil, yang pada gilirannya menguntungkan pasar dengan menciptakan konsumen yang lebih banyak dan meningkatkan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.²⁰⁹

Dalam pandangan ortodoks, kebijakan moneter melalui suku bunga dianggap sebagai alat utama untuk mengendalikan ekonomi, sementara kebijakan fiskal sering kali dilihat dengan skeptisisme karena dapat menyebabkan defisit anggaran atau utang negara yang tinggi. Sebaliknya, dalam paradigma heterodoks, kebijakan fiskal dipandang sebagai alat yang lebih efektif untuk mengelola ekonomi dibandingkan kebijakan moneter. Otoritas negara harus aktif menggunakan kebijakan fiskal untuk menstimulasi ekonomi, khususnya dalam hal pengeluaran publik untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan ekonomi.²¹⁰

Kebijakan fiskal yang ekspansif, seperti pengeluaran negara untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, dipandang penting untuk menciptakan pertumbuhan inklusif yang tidak hanya mengandalkan mekanisme pasar. Dalam banyak kasus, negara dianggap sebagai aktor yang harus menstimulasi sektor-sektor ekonomi yang diabaikan oleh pasar.²¹¹

Dalam ekonomi heterodoks, regulasi dan intervensi pasar oleh negara dipandang sangat penting untuk menjaga agar pasar tidak melenceng dari tujuan sosialnya. Deregulasi atau pengurangan peran negara, seperti yang dipromosikan oleh neoliberalisme, sering kali menghasilkan ketidakstabilan ekonomi, peningkatan kesenjangan, dan krisis keuangan.²¹²

Otoritas dalam paradigma heterodoks tidak hanya diharapkan untuk mengatur sektor keuangan secara ketat, tetapi juga melibatkan diri dalam pengawasan berbagai sektor ekonomi lainnya untuk mencegah penumpukan kekuasaan di tangan segelintir entitas besar, mencegah monopoli, dan melindungi kepentingan publik. Regulasi di

²⁰⁹ Engelbert Stockhammer & Özlem Onaran, "Growth Models and Post-Keynesian Macroeconomics," dalam Lucio Baccaro et al., *Diminishing Returns: The New Politics of Growth and Stagnation*, United Kingdom: Oxford University Press, 2022, hal. 53-73.

²¹⁰ James R. Crotty, "Post-Keynesian Economic Theory: An Overview and Evaluation," dalam *Jurnal The American Economic Review*, Vol. 70 No. 2 Tahun 1980, hal. 20-25.

²¹¹ Giulio Guarini & Gabriel Porcile. "Sustainability in A Post-Keynesian Growth Model for An Open Economy," dalam *Jurnal Ecological Economics*, Edisi 126 Tahun 2016, hal.14-22.

²¹² Ron Martin & Peter Sunley, "The Post-Keynesian State and The Space Economy," dalam Ron Martin, *Economy: Critical Essay in Human Geography*, New York: Routledge, 2017, hal. 459-473.

sini termasuk pengendalian terhadap sistem perbankan, pasar modal, serta pasar tenaga kerja untuk memastikan bahwa semua pihak bermain dengan aturan yang adil dan transparan.²¹³

Negara dalam paradigma heterodoks bukan hanya pengelola ekonomi, tetapi juga penggerak keadilan sosial. Relasi otoritas dan pasar tidak boleh hanya didorong oleh pencarian efisiensi ekonomi, tetapi harus mempertimbangkan keadilan distribusi dan dampak sosial dari mekanisme pasar. Negara harus aktif dalam redistribusi kekayaan melalui kebijakan perpajakan progresif, layanan publik yang kuat, serta jaminan sosial yang mencakup seluruh masyarakat.²¹⁴

Dalam kerangka ini, otoritas berperan dalam mengurangi ketidaksetaraan yang dihasilkan oleh pasar dan memastikan akses yang setara terhadap peluang ekonomi bagi semua warga negara. Dengan demikian, negara tidak hanya berfungsi sebagai wasit dalam pasar bebas, tetapi juga sebagai penjamin kesejahteraan sosial yang memastikan bahwa hasil ekonomi didistribusikan dengan adil dan inklusif.²¹⁵

Dalam paradigma heterodoks, relasi antara otoritas dan pasar sangat erat, di mana negara berperan sebagai pengatur, pencipta, dan penyeimbang pasar. Pasar dipandang tidak sempurna, dan kegagalannya dalam menciptakan kesejahteraan yang merata memerlukan intervensi aktif dari negara. Otoritas negara tidak hanya mengatur mekanisme pasar untuk mencegah ketidakstabilan dan ketidakadilan, tetapi juga mengambil peran proaktif dalam menciptakan lapangan kerja, menstimulasi pertumbuhan ekonomi, dan memastikan keadilan sosial melalui kebijakan redistributif. Di sini, pasar dan otoritas bekerja bersama-sama, dengan negara yang bertindak sebagai kekuatan yang mendukung terciptanya ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.²¹⁶

4. Konsekuensi Teoretis

Paradigma ekonomi heterodoks memiliki sejumlah konsekuensi teoretis yang signifikan, terutama karena pendekatan ini menantang

²¹³ Anna Klimina, "Constructing an Economically Democratic Society in the Former Soviet Union: Post-Keynesian Institutional Insights in Historical Perspective," dalam Charles J. Whalen, *A Modern Guide to Post-Keynesian Institutional Economics*, Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2022, hal. 194-215.

²¹⁴ Anthony William Donald Anastasi, "Marxism and Mmt," dalam *Jurnal World Review of Political Economy*, Vol. 12 No. 4 Tahun 2021, hal. 541-557.

²¹⁵ Justin P. Holt, *Modern Monetary Theory and Distributive Justice*, New York: Springer Nature, 2023, hal. 7-99.

²¹⁶ L. Randall Wray, *The Ownership Society: Social Security is Only The Beginning...*, dalam *Jurnal Public Policy Brief*, No. 82 Tahun 2005. <https://www.econstor.eu/handle/10419/54263> diakses 3 Oktober 2024.

banyak asumsi dan prinsip dasar dari ekonomi ortodoks atau arus utama. Ekonomi heterodoks tidak hanya menawarkan kritik tajam terhadap gagasan dominan dalam ekonomi neoliberal dan neoklasik, tetapi juga memperkenalkan kerangka konseptual baru yang bertujuan untuk memahami dinamika ekonomi secara lebih inklusif, manusiawi, dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa konsekuensi teoretis utama dari paradigma ekonomi heterodoks:

Pertama, salah satu kritik utama dalam ekonomi heterodoks adalah terhadap asumsi ortodoks tentang rasionalitas individu. Dalam ekonomi ortodoks, individu sering diasumsikan bertindak secara rasional, selalu mencari keuntungan maksimal dan berusaha mengoptimalkan utilitas. Paradigma heterodoks menolak pandangan ini sebagai penyederhanaan yang tidak realistis. Teori-teori seperti ekonomi perilaku menunjukkan bahwa perilaku manusia dalam konteks ekonomi sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis, sosial, dan budaya yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan rasionalitas sempit.²¹⁷

Dalam paradigma heterodoks, manusia dipandang sebagai makhluk yang kompleks, yang bertindak tidak selalu demi keuntungan pribadi, tetapi juga karena motivasi sosial, etika, kebiasaan, dan emosi. Hal ini memiliki konsekuensi teoretis penting dalam bagaimana keputusan ekonomi dipahami, menantang model-model yang berbasis pada asumsi rasionalitas penuh dan optimalisasi.²¹⁸

Kedua, Ekonomi heterodoks menolak gagasan bahwa pasar selalu efisien dan mampu mengalokasikan sumber daya dengan cara yang optimal. Teori ekonomi ortodoks, terutama yang berbasis pada model keseimbangan umum, mengasumsikan bahwa pasar, jika dibiarkan bebas dari intervensi, akan mencapai hasil yang efisien secara otomatis. Namun, paradigma heterodoks memandang pasar sebagai entitas yang tidak sempurna, sering kali penuh dengan kegagalan seperti monopoli, oligopoli, asimetri informasi, dan eksternalitas negatif.²¹⁹

²¹⁷ John P. Watkins & James E. Seidelman, "The Great Hypocrisy: Neoliberalism's Critique of Modern Monetary Theory," dalam *Jurnal of Economic Issues*, Vol. 57 No. 3 Tahun 2023, hal. 793-807.

²¹⁸ Phil Armstrong, "History and Origin of Money in MMT and Austrian Economics: The Difference Methodology Makes?," dalam *Jurnal Real-World Economics Review*, Edisi 105 Tahun 2023, hal. 57-73.

²¹⁹ Ricardo Summa, "Alternative Uses of Functional Finance: Lerner, MMT, and The Sraffian Supermultiplier," dalam *Jurnal Review of Keynesian Economics*, Vol. 12 No. 1 Tahun 2024, hal. 27-52.

Sebagai konsekuensi teoretis, ekonomi heterodoks menekankan pentingnya intervensi negara dan regulasi untuk memperbaiki kegagalan pasar ini. Pasar bukanlah mekanisme otomatis yang dapat mencapai hasil optimal tanpa intervensi eksternal; sebaliknya, intervensi otoritas diperlukan untuk mengoreksi ketimpangan, mencegah krisis ekonomi, dan memastikan bahwa pasar melayani kepentingan publik secara luas.²²⁰

Ketiga, Paradigma heterodoks memandang dinamika sosial dan kekuatan politik sebagai elemen penting dalam membentuk hasil ekonomi. Teori ekonomi arus utama sering mengabaikan aspek-aspek ini, melihat ekonomi sebagai sistem yang bersifat apolitis dan terlepas dari kekuasaan sosial. Sebaliknya, dalam ekonomi heterodoks, distribusi kekayaan dan pendapatan tidak hanya dipengaruhi oleh mekanisme pasar tetapi juga oleh struktur kekuasaan politik dan sosial.²²¹

Ini memiliki konsekuensi teoretis penting dalam memahami ketimpangan ekonomi. Ekonomi heterodoks menekankan bahwa ketidaksetaraan ekonomi tidak hanya merupakan hasil dari perbedaan dalam produktivitas atau keterampilan, tetapi juga merupakan cerminan dari distribusi kekuasaan yang tidak merata. Oleh karena itu, teori heterodoks mengintegrasikan analisis kekuasaan dalam studi ekonomi, menyoroti bagaimana kelompok elit atau dominan dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi dan distribusi sumber daya melalui pengaruh politik dan sosial.²²²

Keempat, Dalam ekonomi ortodoks, negara dipandang sebagai pemain pinggiran yang seharusnya seminimal mungkin terlibat dalam ekonomi, kecuali untuk menjaga stabilitas makroekonomi melalui kebijakan moneter dan fiskal yang terbatas. Sebaliknya, paradigma heterodoks menekankan peran negara sebagai aktor kunci dalam ekonomi, yang tidak hanya mengatur pasar tetapi juga secara aktif terlibat dalam penciptaan lapangan kerja, distribusi kekayaan, dan pembangunan ekonomi.²²³

²²⁰ Yan Liang, "An MMT Informed Fiscal Reform for China," dalam *Jurnal The Chinese Economy*, Vol. 57 No. 3 Tahun 2024, hal. 207-224.

²²¹ Aaron Sahr, "Claims to Sovereignty: MMT as A Challenge to Money's Technical Imaginary," dalam Benjamin Braun, *Capital Claims: Power and Global Finance*, London: Routledge, 2022, hal. 88-103.

²²² Brian Chi-ang Lin, "MMT or Public Enterprises? A Contribution to Economic Sustainability," dalam *Jurnal of Economic Issues*, Vol. 56 No. 2 Tahun 2022, hal. 455-462.

²²³ Phil Armstrong, "Modern Monetary Theory and A Heterodox Alternative Paradigm," dalam *Jurnal The Gower Initiative of Modern Money Studies*, Tahun 2018, hal. 1-51. <https://gimms.org.uk/wp-content/uploads/2018/12/Modern-Monetary-Theory-and-a-Heterodox-Alternative-Paradigm-Phil-Armstrong.pdf> diakses 3 Oktober 2024.

Ekonomi heterodoks berpendapat bahwa negara harus memiliki peran sentral dalam mengatasi masalah kegagalan pasar, mengurangi ketimpangan sosial, dan mendorong pembangunan yang inklusif. Ini berarti bahwa kebijakan publik dan intervensi negara dipandang sebagai instrumen yang penting, dan bukan sebagai gangguan terhadap mekanisme pasar.²²⁴

Sebagai konsekuensinya, teori-teori heterodoks seperti MMT atau *Post-Keynesian* memperkenalkan konsep-konsep kebijakan fiskal yang lebih proaktif, di mana pengeluaran pemerintah dan program-program sosial dipandang sebagai cara yang efektif untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil. Negara tidak lagi dipandang sebagai "penonton" dalam ekonomi, tetapi sebagai aktor penting yang dapat memandu perkembangan ekonomi untuk melayani kepentingan masyarakat luas.²²⁵

Kelima, Salah satu konsekuensi teoretis yang paling penting dalam paradigma heterodoks adalah konsep uang endogen. Teori ortodoks menganggap bahwa bank sentral memiliki kendali penuh atas jumlah uang beredar melalui kebijakan moneter, seperti mengatur suku bunga atau kebijakan cadangan. Sebaliknya, dalam paradigma heterodoks, terutama dalam MMT dan *Post-Keynesian*, uang dipandang sebagai sesuatu yang diciptakan secara endogen oleh sistem perbankan melalui proses pinjaman.²²⁶

Ini berarti bahwa bank komersial menciptakan uang ketika mereka memberikan kredit, dan tidak harus dibatasi oleh kebijakan cadangan yang ditetapkan oleh bank sentral. Konsekuensi dari teori ini adalah bahwa kontrol terhadap ekonomi tidak sepenuhnya berada di tangan bank sentral melalui instrumen moneter tradisional, dan bahwa kebijakan fiskal (pengeluaran pemerintah) lebih penting dalam mengelola permintaan agregat dan mencapai stabilitas ekonomi.²²⁷

Keenam, Dalam paradigma ekonomi heterodoks, krisis ekonomi dianggap sebagai sesuatu yang inheren dalam sistem kapitalis. Teori ortodoks seringkali beranggapan bahwa ekonomi, jika dibiarkan

²²⁴ Joseph Dorfman, "Heterodox Economic Thinking and Public Policy," dalam *Journal of Economic Issues*, Vol. 4 No.1 Tahun 1970, hal. 1-22.

²²⁵ Tony Ramsay, "The Jobs Guarantee: A Post Keynesian Analysis," dalam *Journal of Post Keynesian Economics*, Vol. 25 No. 2 Tahun 2002, hal. 273-291.

²²⁶ Thomas I. Palley, "Competing Views of The Money Supply Process: Theory and Evidence," dalam *Jurnal Metroeconomica*, Vol. 45 No. 1 Tahun 1994, hal. 67-88.

²²⁷ Lance Taylor, "Synthetic MMT: Old Line Keynesianism with an Expansionary Twist," dalam *Jurnal Institute for New Economic Thinking*, Working Paper Series No. 103 Tahun 2019, hal. 1-31. <https://ssrn.com/abstract=3482211> diakses 3 Oktober 2024.

berjalan dengan sendirinya, akan mencapai keseimbangan, dan bahwa krisis adalah gangguan sementara yang disebabkan oleh faktor eksternal. Sebaliknya, paradigma heterodoks menganggap krisis sebagai sesuatu yang struktural dalam kapitalisme, disebabkan oleh dinamika akumulasi modal, ketimpangan distribusi, dan spekulasi finansial.²²⁸

Teori *Post-Keynesian* menekankan bahwa ketidakstabilan dan siklus boom-bust adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ekonomi pasar bebas. Ini memiliki implikasi teoretis yang penting, yaitu bahwa stabilitas ekonomi tidak dapat dicapai melalui deregulasi pasar dan kebijakan moneter yang pasif, tetapi memerlukan intervensi aktif dari negara dan pengawasan ketat terhadap sektor keuangan untuk mencegah spekulasi yang berlebihan dan ketidakseimbangan struktural.²²⁹

Ketujuh, paradigma heterodoks juga sering mengintegrasikan ekonomi ekologis dalam analisisnya. Ekonomi ortodoks cenderung mengabaikan atau meremehkan dampak lingkungan dari aktivitas ekonomi, menganggap alam sebagai sumber daya yang tak terbatas. Sebaliknya, ekonomi heterodoks memperhitungkan batas-batas ekologis dan menekankan pentingnya keberlanjutan dalam jangka panjang. Konsekuensi teoretisnya adalah bahwa pertumbuhan ekonomi tidak bisa terus-menerus dikejar tanpa memperhatikan dampak ekologisnya. Pertumbuhan harus dipahami dalam konteks batasan lingkungan, dan kebijakan ekonomi harus dirancang untuk meminimalkan eksploitasi alam serta mendorong penggunaan sumber daya yang berkelanjutan.²³⁰

Dapat disimpulkan bahwa paradigma ekonomi heterodoks membawa sejumlah konsekuensi teoretis yang fundamental, terutama karena ia menantang banyak asumsi dasar dalam ekonomi arus utama. Dari kritik terhadap rasionalitas individu, peran negara dalam ekonomi, hingga konsep uang endogen dan pentingnya keberlanjutan ekologis, ekonomi heterodoks menawarkan pandangan yang lebih holistik dan kontekstual dalam memahami dinamika

²²⁸ Marshall Auerback et al., "What would Minsky Do?," dalam Dimitri B. Papadimitrou & L. Randall Wray, *The Elgar Companion to Hyman Minsky*, Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2010, hal. 117-133.

²²⁹ Cristian Ionescu, "Financial Instability and Financial Innovations," dalam *Jurnal Economy Transdisciplinarity Cognition*, Vol. 15 No. 2 Tahun 2012, hal. 30-38

²³⁰ Jason Hickel et al., "How to Pay for Saving The World: Modern Monetary Theory for A Degrowth Transition," dalam *Jurnal Ecological Economies*, Vol. 214 No. 107968 Tahun 2023, hal. 1-8. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2023.107968> diakses 3 Oktober 2024.

ekonomi. Paradigma ini menekankan bahwa ekonomi tidak bisa dipisahkan dari politik, sosial, dan ekologi, dan bahwa solusi ekonomi harus mempertimbangkan berbagai dimensi tersebut untuk mencapai hasil yang adil dan berkelanjutan.

5. Konsekuensi Praktis

Paradigma ekonomi heterodoks tidak hanya membawa konsekuensi teoretis, tetapi juga memiliki dampak langsung pada kebijakan dan praktik ekonomi sehari-hari. Konsekuensi praktis dari pendekatan ini mencakup bagaimana ekonomi dikelola, peran negara, distribusi sumber daya, serta bagaimana kebijakan publik dirancang untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Berikut adalah beberapa konsekuensi praktis utama dari paradigma ekonomi heterodoks:

Pertama, Salah satu konsekuensi praktis paling signifikan dari paradigma heterodoks adalah peran aktif negara dalam mengelola ekonomi. Alih-alih membiarkan pasar berjalan tanpa regulasi atau dengan sedikit intervensi, seperti yang dianjurkan oleh pendekatan neoliberalisme atau ortodoks, heterodoksi menekankan pentingnya kebijakan fiskal dan intervensi negara dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan memastikan distribusi yang adil.²³¹

Dalam praktiknya, ini berarti pemerintah mengambil langkah-langkah aktif untuk menciptakan lapangan kerja, mendukung sektor-sektor strategis, dan melakukan pengeluaran publik yang cukup besar untuk merangsang permintaan agregat. Program jaminan pekerjaan misalnya, adalah salah satu usulan kebijakan dari heterodoksi yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang yang ingin bekerja bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Pemerintah akan menyediakan lapangan kerja dalam sektor-sektor publik yang strategis, seperti infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan, yang tidak hanya menyerap tenaga kerja, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang lebih luas.²³²

Kedua, dalam pendekatan heterodoks, ketimpangan ekonomi tidak dianggap sebagai fenomena alamiah dari dinamika pasar bebas, tetapi sebagai masalah yang harus diatasi melalui kebijakan redistribusi yang efektif. Ini berbeda dengan pendekatan ortodoks yang sering kali menganggap bahwa ketimpangan dapat dikoreksi oleh pasar itu sendiri. Oleh karena itu, ekonomi heterodoks

²³¹ Hyman P. Minsky, "Money and The Lender of Last Resort," dalam *Jurnal Challenge*, Vol. 28 No. 1 Tahun 1985, hal. 12-18.

²³² Éric Tymoigne, "Minsky and Economic Policy: Keynesianism All Over Again?," dalam Dimitri B. Papadimitrou & L. Randall Wray, *The Elgar Companion to Hyman Minsky*, Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2010, hal. 47-83.

mendukung kebijakan seperti pajak progresif, di mana mereka yang lebih kaya membayar pajak lebih tinggi untuk mendanai program-program sosial yang mendukung mereka yang kurang mampu.²³³

Konsekuensi praktis dari pendekatan ini adalah pengurangan ketimpangan melalui penguatan sistem perpajakan yang adil, pemberian subsidi bagi kelompok berpenghasilan rendah, dan pengeluaran sosial yang lebih besar di bidang pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Redistribusi ini dirancang untuk memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir elit ekonomi.²³⁴

Ketiga, Ekonomi heterodoks menekankan pentingnya pengaturan dan regulasi pasar untuk mencegah ketidakstabilan ekonomi, mencegah monopoli, dan melindungi kepentingan publik. Dalam pendekatan ortodoks, pasar cenderung dianggap lebih efisien tanpa intervensi berlebihan, tetapi heterodoksi berpendapat bahwa pasar yang tidak diatur cenderung menciptakan ketimpangan, krisis, dan eksploitasi.²³⁵

Dalam praktiknya, ini berarti regulasi ketat terhadap sektor keuangan, termasuk perbankan dan pasar modal. Setelah krisis keuangan global 2008, ekonomi heterodoks menawarkan penjelasan mengenai bagaimana deregulasi di sektor keuangan menyebabkan krisis, dan mengadvokasi pengaturan yang lebih ketat untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Ini juga berarti negara perlu menjaga standar tenaga kerja yang lebih tinggi, melindungi hak-hak pekerja, serta mengatur harga barang-barang kebutuhan pokok yang vital bagi kesejahteraan masyarakat, seperti energi dan pangan.²³⁶

Keempat, dalam ekonomi ortodoks, kebijakan moneter melalui suku bunga dianggap sebagai alat utama untuk mengelola ekonomi, sementara kebijakan fiskal sering kali dianggap lebih berisiko karena bisa menyebabkan defisit anggaran atau inflasi. Namun, dalam paradigma heterodoks, kebijakan fiskal dianggap sebagai instrumen

²³³ Robert Guttman, "The Heterodox Notion of Structural Crisis," dalam *Jurnal Review of Keynesian Economics*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2015, hal. 194-212.

²³⁴ Alan Shipman, "The Significance of MMT in Linking Money, Markets, Sector Balances and Aggregate Demand," dalam *Jurnal Real World Economics Review*, Edisi 89 Tahun 2019, hal. 190-193.

²³⁵ Pavlina R. Tcherneva, "The Job Guarantee: MMT's Proposal for Full Employment and Price Stability," dalam *Jurnal Open Society University Network Economic Democracy Initiative*, Working Paper No. 02 Tahun 2021, hal. 1-21.

²³⁶ Steven Hail, "Paying for A Green New Deal: An Introduction to Modern Monetary Theory," dalam S. J. William & Rod Taylor, *Sustainability and The New Economics: Synthesising Ecological Economics and Modern Monetary Theory*, New York: Springer, 2002, hal. 279-302.

yang lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan.²³⁷

Konsekuensi praktis dari pendekatan ini adalah pemerintah yang lebih proaktif dalam mengelola ekonomi melalui pengeluaran publik, baik untuk infrastruktur maupun program-program sosial. Defisit anggaran dianggap bukan sebagai sesuatu yang selalu negatif, tetapi sebagai alat yang sah untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan permintaan agregat, dan memulihkan ekonomi yang sedang dalam resesi. Paradigma heterodoks juga mendukung kebijakan defisit fiskal yang dikelola dengan baik untuk memastikan bahwa pemerintah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa harus bergantung sepenuhnya pada kebijakan moneter yang lebih terbatas efeknya.²³⁸

Kelima, pendekatan heterodoks sangat menekankan pada jaminan pekerjaan sebagai alat untuk mengatasi pengangguran. Berbeda dengan ortodoksi yang cenderung menerima tingkat pengangguran tertentu sebagai hal yang tak terhindarkan, heterodoksi memandang bahwa negara harus menyediakan pekerjaan bagi setiap individu yang ingin bekerja, terutama ketika pasar tidak mampu menciptakan lapangan kerja yang cukup.²³⁹

Dalam praktiknya, ini berarti adanya program jaminan pekerjaan yang dijalankan oleh negara, di mana pemerintah menyediakan pekerjaan di sektor-sektor yang memiliki dampak sosial positif, seperti proyek-proyek infrastruktur, layanan sosial, dan konservasi lingkungan. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga tingkat pengangguran tetap rendah dan memastikan bahwa pendapatan masyarakat tetap stabil, yang pada akhirnya mendukung permintaan agregat dan stabilitas ekonomi.²⁴⁰

Keenam, ekonomi heterodoks sering kali menekankan pentingnya melindungi dan mendukung sektor-sektor strategis yang

²³⁷ Michael J. Murray, "Public Policy for Working People," dalam J. Murray & Mathew Forstater, *The Job Guarantee And Modern Money Theory: Realizing Keynes's Labor Standard*, London: Palgrave Macmillan, 2017, hal. 25-46.

²³⁸ Pavlina R. Tcherneva, "Full Employment, Inflation and Income Distribution: Evaluating The Impact of Alternative Fiscal Policies," dalam Dimitri B. Papadimitrou, *Contributions To Economic Theory, Policy, Development And Finance: Essays In Honor Of Jan A. Kregel*. London: Palgrave Macmillan, 2014, hal. 117-144.

²³⁹ Giuseppe Mastromatteo & Lorenzo Esposito, "Banking on ELR: How Hyman Minsky's Ideas Can Help Tackle Unemployment," dalam *Jurnal of Economic Issues*, Vol. 51 No. 3 Tahun 2017, hal. 635-650.

²⁴⁰ Pavlina R. Tcherneva, "The Job Guarantee: Design, Jobs, And Implementation," dalam *Jurnal Levy Economics Institute Working Papers*, Seri 902 Tahun 2018, hal. 1-67. <https://ssrn.com/abstract=3155289> diakses 4 Oktober 2024.

dianggap vital bagi kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan sosial, seperti industri manufaktur, pertanian, energi, dan teknologi. Pasar tidak selalu memberikan dukungan yang cukup untuk sektor-sektor ini, terutama ketika mereka tidak menghasilkan keuntungan jangka pendek yang tinggi.²⁴¹

Konsekuensi praktis dari ini adalah negara dapat menggunakan kebijakan industri strategis, yang mungkin melibatkan subsidi, proteksi tarif, atau investasi langsung ke dalam sektor-sektor tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk membangun fondasi ekonomi yang kuat dan mandiri, yang dapat mendukung pertumbuhan jangka panjang dan mengurangi ketergantungan terhadap pasar global yang fluktuatif.²⁴²

Ketujuh, ekonomi heterodoks juga sering kali mengintegrasikan ekonomi ekologis dan keberlanjutan sebagai bagian dari analisisnya. Dalam praktiknya, ini berarti adanya kebijakan publik yang pro-lingkungan, yang mendorong penggunaan sumber daya alam yang lebih bijak dan investasi dalam teknologi energi terbarukan. Konsekuensi praktis dari hal ini adalah pergeseran menuju ekonomi hijau, di mana negara dan sektor swasta bersama-sama berinvestasi dalam energi bersih, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan inovasi teknologi ramah lingkungan.²⁴³

Kebijakan iklim yang ketat, pengaturan emisi karbon, dan pajak karbon juga merupakan alat penting yang diusulkan oleh ekonomi heterodoks untuk memitigasi dampak perubahan iklim, mengurangi eksploitasi lingkungan, dan mendorong pembangunan berkelanjutan yang seimbang antara ekonomi dan ekologi.²⁴⁴

Kedelapan, ekonomi heterodoks menekankan pentingnya kesejahteraan sosial dan akses yang merata terhadap layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, dan transportasi. Dalam ekonomi ortodoks, sektor-sektor ini sering kali diserahkan pada pasar, dengan asumsi bahwa persaingan akan menghasilkan layanan

²⁴¹ Rhonda F. Levine, "Class Struggle And The New Deal: Industrial Labor, Industrial Capital, And The State," dalam Stanley Aronowitz & Michael J. Roberts, *Class: The Anthology*, New Jersey: Willey Publishing, 2017, hal. 413-436.

²⁴² Dustin Guastella, "7 Jobs for All: A Job Guarantee Puts Workers in the Driver's Seat," dalam Craig Calhoun & Benjamin Y. Fong, *The Green New Deal and the Future of Work*, New York: Columbia University Press, 2022, hal. 153-176.

²⁴³ Eric Tymoigne, "The Cost of Job Guarantee in The United States: Insights from The 1930s Work Programs," dalam *Jurnal Review of Radical Political Economics*, Vol. 46 No. 4 Tahun 2014, hal. 517-535.

²⁴⁴ Maurizio Solari, et al., "Ecological Transition in A Monetary Economy of Production: A Heterodox Approach," dalam *Jurnal Eurasian Economic Review*, Vol. 14 No. 1 Tahun 2024, hal. 13-37.

yang lebih baik dan efisien. Namun, heterodoksi menolak gagasan ini, mengklaim bahwa pasar tidak selalu memberikan layanan publik yang terjangkau dan berkualitas.²⁴⁵

Konsekuensi praktis dari pendekatan ini adalah peningkatan investasi dalam layanan publik oleh pemerintah, memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses terhadap kebutuhan dasar tanpa harus bergantung pada mekanisme pasar yang dapat mengeksklusi kelompok-kelompok tertentu. Program jaminan kesehatan universal, pendidikan gratis, dan perumahan yang terjangkau adalah beberapa contoh kebijakan yang dipromosikan dalam pendekatan ini.²⁴⁶

Kesembilan, ekonomi heterodoks sangat menekankan pada pembangunan ekonomi yang inklusif, di mana pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat pada segelintir elit atau wilayah tertentu, tetapi dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Ini berarti bahwa negara harus merancang kebijakan yang memastikan pembangunan regional dan perataan pembangunan antarwilayah, terutama di negara-negara berkembang yang sering kali memiliki ketimpangan geografis yang tinggi.²⁴⁷

Konsekuensi praktisnya adalah adanya program-program pengembangan infrastruktur di daerah-daerah tertinggal, kebijakan yang mendukung pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM), serta investasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan angkatan kerja.²⁴⁸

Secara keseluruhan, paradigma ekonomi heterodoks membawa konsekuensi praktis yang signifikan dalam cara negara mengelola ekonomi dan menciptakan kebijakan publik. Dari peran aktif negara dalam ekonomi, kebijakan redistribusi kekayaan, hingga penekanan pada regulasi pasar dan kebijakan fiskal yang proaktif, pendekatan

²⁴⁵ Wolfram Elsner, "Complexity Economics As Heterodoxy: Theory And Policy," dalam *Jurnal of Economic Issues*, Vol. 51 No. 4 Tahun 2017, hal. 939-978.

²⁴⁶ Martin Hensher, "The Economics of The Wellbeing Economy: Understanding Heterodox Economics for Health In All Policies and Co-Benefits," dalam *Jurnal Health Promotion Journal of Australia*, Vol. 34 No. 3 Tahun 2023, hal. 651-659.

²⁴⁷ Malte Luebker, "Poverty, Employment and Inequality in The SDG's: Heterodox Discourse, Orthodox Policies?," dalam Peter A. G. van Bergejik & Rolph van der Hoeven, *Sustainable Development Goals and income inequality*, Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2017, hal. 141-168.

²⁴⁸ Lili Li et al., "Government Finance and Money Creation in China: An MMT Perspective," dalam *Jurnal The Chinese Economy*, Vol. 53 No. 4 Tahun 2020, hal. 329-341.

heterodoks berupaya untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.²⁴⁹

Pendekatan ini secara tegas menolak asumsi dasar yang dipegang oleh ekonomi ortodoks, seperti kepercayaan bahwa pasar selalu efisien, atau bahwa ketidaksetaraan adalah hasil alami dari perbedaan produktivitas. Sebaliknya, ekonomi heterodoks mengakui bahwa dinamika kekuasaan, struktur sosial, dan ketidakseimbangan struktural mempengaruhi distribusi sumber daya dan hasil ekonomi.²⁵⁰

Dalam praktiknya, konsekuensi dari paradigma ini mencakup fokus yang lebih besar pada kesejahteraan sosial, akses terhadap layanan publik yang merata, pengembangan ekonomi yang inklusif, dan pengaturan pasar untuk mencegah krisis dan ketidakstabilan ekonomi. Pemerintah tidak hanya dilihat sebagai pengatur atau fasilitator, tetapi sebagai aktor utama dalam menciptakan lapangan kerja, mendistribusikan kekayaan secara adil, dan menjaga keseimbangan antara kepentingan pasar dan kepentingan publik.²⁵¹

Paradigma ini juga menekankan pentingnya keberlanjutan lingkungan, dengan pengakuan bahwa model pertumbuhan ekonomi yang ada sering kali mengorbankan ekosistem alam dan keseimbangan lingkungan. Kebijakan yang mendukung transisi menuju ekonomi hijau, pengurangan ketergantungan pada energi fosil, dan investasi dalam teknologi ramah lingkungan menjadi prioritas dalam pendekatan ini.²⁵²

Pada intinya, ekonomi heterodoks menawarkan kerangka kerja yang lebih holistik, yang memandang ekonomi bukan hanya sebagai sistem efisiensi angka dan angka, tetapi sebagai bagian integral dari struktur sosial, politik, dan ekologis yang lebih luas. Pendekatan ini menekankan perlunya peran negara yang lebih besar dan kebijakan yang dirancang untuk mengatasi masalah-masalah sosial-ekonomi seperti ketimpangan, pengangguran, dan krisis lingkungan, yang

²⁴⁹ Michael J. Murray, "Public Policy for Working People," dalam Michael J. Murray & Mathew Forstater, *The Job Guarantee And Modern Money Theory: Realizing Keynes's Labor Standard*, New York: Springer Link, 2017, hal. 25-46.

²⁵⁰ Phil Armstrong, "An MMT Perspective on Macroeconomic Policy Space," dalam *Jurnal Real-World Economics Review*, Edisi 89 Tahun 2019, hal. 32-45.

²⁵¹ James Juniper, "An MMT Perspective on How Agenda 30 Could Be Implemented In Australia," dalam Taha Chaiechi & Jacob Wood, *Community Empowerment, Sustainable Cities, and Transformative Economies*, New York: Springer link, 2022, hal. 21-30.

²⁵² Joseph Zayed, "Use of MMT in Canadian Gasoline: Health and Environment Issues," dalam *Jurnal American Journal of Industrial Medicine*, Vol. 39 No. 4 Tahun 2001, hal. 426-433.

tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan mekanisme pasar. Dengan demikian, konsekuensi praktis dari paradigma ini adalah penciptaan ekonomi yang lebih manusiawi, adil, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.²⁵³

6. Refleksi Moneter

Dalam paradigma ekonomi heterodoks, pandangan tentang kebijakan moneter dan peran uang dalam perekonomian sangat berbeda dari pendekatan ekonomi ortodoks. Paradigma ini menawarkan pemahaman yang lebih fleksibel dan inklusif terhadap fungsi uang dan kebijakan moneter, di mana uang tidak hanya diperlakukan sebagai medium pertukaran yang pasif, tetapi sebagai instrumen yang aktif dalam mendukung tujuan sosial, stabilitas ekonomi, dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Berikut adalah beberapa refleksi mengenai kebijakan moneter dalam konteks ekonomi heterodoks:

Pertama, dalam paradigma heterodoks, uang tidak dipandang hanya sebagai medium pertukaran netral yang mencerminkan nilai barang dan jasa. Sebaliknya, uang dilihat sebagai alat sosial dan politik yang diproduksi oleh negara dan digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial tertentu. MMT, salah satu aliran utama dalam heterodoksi, berpendapat bahwa negara yang memiliki kedaulatan moneter penuh, yaitu dapat mencetak uangnya sendiri, tidak dibatasi oleh kebutuhan untuk meminjam uang atau menyeimbangkan anggaran sebagaimana rumah tangga atau bisnis.²⁵⁴

Konsekuensinya, kebijakan moneter dapat digunakan secara lebih aktif untuk mendukung tujuan-tujuan sosial, seperti penciptaan lapangan kerja penuh, pemberantasan kemiskinan, dan pembangunan infrastruktur. Pemerintah tidak perlu khawatir tentang “menghabiskan terlalu banyak” selama pengeluaran tersebut diarahkan pada tujuan produktif yang mendukung perekonomian secara keseluruhan. Ini menggeser fokus dari efisiensi anggaran menjadi efektivitas dalam mencapai hasil sosial.²⁵⁵

Kedua, dalam paradigma ortodoks, kebijakan moneter dipusatkan pada pengendalian inflasi melalui pengaturan suku bunga

²⁵³ L. Randall Wray, "Foundations of Modern Money Theory," dalam Frank Stilwell et al., *Handbook of Alternative Theories of Political Economy*, Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2022, hal. 216-230.

²⁵⁴ Julia Coronado, "Giving MMT The Credit It Is Due," dalam *Jurnal Business Economics*, Vol. 55 No. 1 Tahun 2020, hal. 23-25.

²⁵⁵ Joëlle Leclaire, "Invited Article Fiscal and Monetary Policy for Difficult Times: MMT solutions," dalam *Jurnal European Journal of Economics and Economic Policies*, Vol. 20 No. 2 Tahun 2023, hal.356-368.

oleh bank sentral. Kebijakan ini sering kali dibatasi oleh asumsi bahwa inflasi yang rendah adalah prasyarat untuk pertumbuhan ekonomi yang stabil. Namun, pendekatan heterodoks menawarkan pemahaman yang lebih fleksibel terhadap kebijakan moneter, di mana pengelolaan inflasi tidak selalu menjadi tujuan utama. Dalam konteks ini, pengangguran dan ketimpangan sering kali dilihat sebagai masalah yang lebih mendesak daripada inflasi moderat.²⁵⁶

Ekonom heterodoks sering menekankan bahwa kebijakan moneter yang terlalu kaku dalam mengendalikan inflasi melalui peningkatan suku bunga justru dapat memicu pengangguran yang lebih tinggi. Hal ini pada akhirnya merugikan stabilitas ekonomi jangka panjang. Sebaliknya, heterodoksi mendorong kebijakan moneter yang lebih fokus pada penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan inklusif, meskipun ada risiko inflasi dalam jangka pendek. Dengan demikian, inflasi moderat seringkali dianggap sebagai biaya yang dapat diterima untuk mencapai tujuan yang lebih besar, seperti lapangan kerja penuh.²⁵⁷

Ketiga, dalam ekonomi ortodoks, peran bank sentral terutama difokuskan pada menjaga stabilitas harga dan mengelola inflasi. Bank sentral cenderung beroperasi secara independen dari pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan moneter tidak digunakan untuk kepentingan politik jangka pendek. Namun, dalam paradigma heterodoks, bank sentral dipandang sebagai lembaga yang lebih terintegrasi dengan kebijakan fiskal dan sosial negara. Peran utamanya bukan hanya menjaga inflasi, tetapi juga mendukung stabilitas makroekonomi yang lebih luas, termasuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan sosial.²⁵⁸

Bank sentral dalam pandangan heterodoks diharapkan memainkan peran yang lebih aktif dalam menstimulasi ekonomi ketika diperlukan, dengan memperluas peran mereka dalam menciptakan likuiditas yang mendukung investasi publik dan sektor swasta, terutama di masa-masa resesi atau krisis. Dalam kerangka ini, bank sentral sering dianggap sebagai instrumen kebijakan

²⁵⁶ Emilio Carnevali & Matteo Deleidi, "The Trade-Off Between Inflation and Unemployment in An 'MMT World': An Open-Economy Perspective," dalam *Jurnal European Journal of Economics and Economic Policies*, Vol. 20 No. 1 Tahun 2023, hal. 90-124.

²⁵⁷ Kenny Pradipta Montoya Putra Pratama & Ali Zainal Abidin, "A Literature Study On Modern Monetary Theory (Mmt): Implementation And Impact," dalam *Prosiding of Midyear International Conference*, Vol. 2 Tahun 2023.

²⁵⁸ Joseph Dorfman, "Heterodox Economic Thinking and Public Policy," dalam *Jurnal of Economic Issues*, Vol. 4 No. 1 Tahun 1970, hal. 1-22.

pemerintah yang lebih terintegrasi dengan kebijakan fiskal, dan lebih mendukung tujuan-tujuan pembangunan daripada sekadar menjaga inflasi.²⁵⁹

Keempat, ekonomi heterodoks mengakui bahwa inflasi bisa menjadi ancaman, tetapi cara menanganinya berbeda dari pendekatan ortodoks. Alih-alih mengandalkan kebijakan suku bunga yang tinggi untuk menekan inflasi, heterodoksi menekankan pentingnya kebijakan struktural yang bisa memperbaiki ketidakseimbangan yang mendasari munculnya inflasi. Misalnya, peningkatan kapasitas produksi, pengelolaan rantai pasokan yang lebih efisien, dan pengurangan hambatan di sektor-sektor tertentu dianggap sebagai cara yang lebih efektif untuk mengelola tekanan harga.²⁶⁰

Dalam refleksi moneter heterodoks, kebijakan fiskal yang proaktif, termasuk pengeluaran publik untuk infrastruktur dan pembangunan sosial, tidak hanya membantu pertumbuhan ekonomi tetapi juga menekan inflasi dengan memperbaiki kapasitas produktif ekonomi secara keseluruhan. Kebijakan-kebijakan ini diarahkan untuk mengatasi ketidakseimbangan struktural yang sering menjadi penyebab inflasi, bukan sekadar menggunakan suku bunga sebagai alat utama untuk mengendalikannya.²⁶¹

Kelima, dalam paradigma ortodoks, kebijakan moneter sering kali dianggap terpisah dan terlepas dari kebijakan fiskal, dengan fokus utama pada pengendalian inflasi melalui kebijakan suku bunga. Namun, paradigma heterodoks melihat hubungan yang lebih erat antara kedua kebijakan tersebut. Kebijakan moneter dan fiskal saling mendukung, dan pengeluaran fiskal yang tinggi dapat dibiayai melalui penciptaan uang, selama ekonomi memiliki kapasitas yang cukup untuk menyerap peningkatan likuiditas tanpa menciptakan inflasi yang tidak terkendali.²⁶²

Teori heterodoks, khususnya MMT, berpendapat bahwa selama sebuah negara memiliki kedaulatan moneter, negara dapat membiayai defisitnya dengan menciptakan uang, dan bahwa risiko utama dari

²⁵⁹ Eric Tymoigne, "Modern Money Theory and Interrelations between The Treasury and Central Bank: The Case of The United States," dalam *Jurnal of Economic Issues*, Vol. 48 No. 3 Tahun 2014, hal. 641-662.

²⁶⁰ L. Randall Wray, "Alternative Paths to Modern Money Theory," dalam *Jurnal Real-World Economics Review*, Vol. 89 No. 1 Tahun 2019, hal. 5-22.

²⁶¹ Anthony William Donald Anastasi, "Marxism and Mmt," dalam *Jurnal World Review of Political Economy*, Vol. 12 No. 4 Tahun 2021, hal. 541-557.

²⁶² Isadora Bonitz Silva Gomes & Norberto Montani Martins, "MMT, Monetary Sovereignty And Fiscal Policy Space In Brazil (1999-2019)," dalam *Jurnal Cuadernos de Economía*, Vol. 42 No. 88 Tahun 2023, hal. 1-22.

kebijakan semacam ini adalah inflasi, bukan kebangkrutan. Dengan demikian, selama inflasi dapat dikelola melalui kebijakan struktural dan peningkatan kapasitas produksi, kebijakan fiskal yang lebih ekspansif dapat mendukung penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi tanpa harus terlalu khawatir tentang pembiayaan.²⁶³

Keenam, paradigma heterodoks juga melihat kebijakan moneter sebagai alat untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Ketika pemerintah menciptakan uang untuk mendanai program-program sosial atau infrastruktur publik, mereka tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperbaiki kondisi sosial dengan mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Dalam pandangan heterodoks, stabilitas sosial dan ekonomi tidak dapat dipisahkan, dan kebijakan moneter yang efektif harus mendukung keduanya.²⁶⁴

Kebijakan moneter yang dirancang dengan memperhatikan dampak sosial dapat membantu menciptakan ekonomi yang lebih inklusif, di mana semua orang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pertumbuhan ekonomi. Hal ini berlawanan dengan pendekatan ortodoks yang cenderung fokus pada indikator-indikator ekonomi yang lebih sempit, seperti inflasi dan pertumbuhan PDB, tanpa mempertimbangkan dampak sosial dari kebijakan tersebut.²⁶⁵

Refleksi moneter dalam paradigma ekonomi heterodoks menekankan pentingnya peran aktif negara dalam mengelola uang dan kebijakan moneter untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang lebih luas. Dalam paradigma ini, uang dipandang sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial, penciptaan lapangan kerja penuh, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, bukan hanya sebagai medium pertukaran yang netral.²⁶⁶

Kebijakan moneter dalam pendekatan heterodoks lebih fleksibel, dengan fokus yang lebih besar pada pencapaian kesejahteraan sosial dan pertumbuhan inklusif, bukan sekadar pengendalian inflasi. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya integrasi antara kebijakan

²⁶³ Thomas Palley, "What's Wrong with Modern Money Theory: Macro and Political Economic Restraints on Deficit-Financed Fiscal Policy," dalam *Jurnal Review of Keynesian Economics*, Vol. 8 No. 4 Tahun 2020, hal. 472-493.

²⁶⁴ Eric Tymoigne, "Modern Money Theory On Fiscal And Monetary Policies: Empirics, Theory And Policymaking," dalam *Jurnal Open Society University Network Economic Democracy Initiative*, Edisi ke 4 Tahun 2021, hal. 1-17.

²⁶⁵ Garzón Espinosa et al., "Fiscal Policy Approaches: An Inquiring Look From The Modern Monetary Theory," dalam *Journal of Economic Issues*, Vol. 55 No. 4 Tahun 2021, hal. 999-1022.

²⁶⁶ Joëlle Leclaire, "Invited Article Fiscal and Monetary Policy for Difficult Times: MMT Solutions," dalam *Jurnal European Journal of Economics and Economic Policies*, Vol. 20 No. 2 Tahun 2023, hal. 356-368.

moneter dan fiskal, serta peran bank sentral dalam mendukung tujuan-tujuan pembangunan dan stabilitas ekonomi jangka panjang. Dengan demikian, paradigma heterodoks menawarkan kerangka alternatif yang melihat kebijakan moneter sebagai instrumen penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan inklusif, serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi dalam jangka panjang.²⁶⁷

7. Refleksi Fiskal

Kebijakan fiskal dalam paradigma ekonomi heterodoks memiliki pendekatan yang sangat berbeda dibandingkan dengan ekonomi ortodoks. Paradigma heterodoks menolak beberapa asumsi dasar dari pendekatan fiskal ortodoks yang menekankan pada keseimbangan anggaran, pengurangan defisit, dan pembatasan peran negara dalam ekonomi. Sebaliknya, heterodoksi mengusulkan peran negara yang lebih aktif melalui kebijakan fiskal yang dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan sosial, memperbaiki ketimpangan, dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa refleksi tentang kebijakan fiskal dalam ekonomi heterodoks:

Pertama, salah satu pilar utama dari ekonomi heterodoks adalah pandangan bahwa pemerintah memiliki peran sentral dalam mengelola ekonomi. Hal ini kontras dengan paradigma ortodoks yang sering menekankan pada peran minimal pemerintah dan mempercayakan alokasi sumber daya pada mekanisme pasar. Dalam heterodoksi, kebijakan fiskal negara dianggap sebagai instrumen penting untuk mengatasi masalah ketimpangan, pengangguran, dan ketidakadilan sosial.²⁶⁸

Negara tidak hanya bertindak sebagai penentu aturan permainan ekonomi, tetapi juga sebagai aktor utama yang berperan dalam mendistribusikan sumber daya secara lebih merata, menciptakan lapangan kerja, dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang adil terhadap layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pemerintah aktif menggunakan belanja publik sebagai alat untuk menstimulasi ekonomi, terutama dalam situasi-situasi di mana pasar gagal menyediakan solusi yang adil dan efisien.²⁶⁹

Kedua, dalam paradigma ortodoks, anggaran yang berimbang dan penghindaran defisit menjadi tujuan utama kebijakan fiskal. Defisit

²⁶⁷ Reynold F. Nesiba, "Do Institutionalists and Post-Keynesians Share A Common Approach to Modern Monetary Theory (MMT)?," dalam *Jurnal European Journal of Economics and Economic Policies*, Vol. 10 No. 1 Tahun 2013, hal. 44-60.

²⁶⁸ Joseph Dorfman, "Heterodox Economic Thinking and Public Policy," dalam *Jurnal of Economic Issues*, Vol. 4 No. 1 Tahun 1970, hal. 1-22.

²⁶⁹ Diana Coyle, *GDP: A Brief but Affectionate History*, Princeton: Princeton University Press, 2015, hal. 13.

anggaran sering kali dianggap sebagai beban ekonomi yang harus dikendalikan untuk menghindari inflasi atau hutang yang terlalu tinggi. Sebaliknya, dalam ekonomi heterodoks, defisit anggaran dipandang sebagai alat kebijakan fiskal yang sah, dan dalam beberapa kasus, bahkan perlu untuk memacu perekonomian.²⁷⁰

Teori MMT berargumen bahwa negara dengan kedaulatan moneter tidak perlu khawatir tentang defisit selama pengeluaran tersebut dilakukan untuk kegiatan produktif, seperti infrastruktur, pendidikan, atau layanan sosial. Dalam pandangan ini, negara yang memiliki kontrol atas mata uangnya sendiri (seperti Amerika Serikat atau Jepang) dapat mencetak uang untuk membiayai defisit anggaran tanpa takut kehabisan uang, selama inflasi masih terkendali dan ekonomi memiliki kapasitas untuk menyerap pengeluaran tersebut.²⁷¹

Ketiga, Pengeluaran pemerintah dalam paradigma heterodoks dilihat sebagai investasi sosial daripada sekadar pengeluaran konsumtif. Ketika negara berinvestasi dalam pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial, hal ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan rakyat secara langsung, tetapi juga mendorong produktivitas ekonomi dalam jangka panjang. Sebagai contoh, investasi dalam pendidikan meningkatkan kualitas tenaga kerja, sementara infrastruktur yang baik mendukung pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lainnya.²⁷²

Dalam konteks ini, pengeluaran publik dipandang sebagai cara untuk menciptakan lapangan kerja, mendukung sektor swasta, dan mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan dan ketimpangan. Negara tidak hanya bertanggung jawab dalam menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam memastikan bahwa hasil dari pertumbuhan tersebut didistribusikan secara adil di seluruh lapisan masyarakat.²⁷³

Keempat, Paradigma Ekonomi heterodoks memberikan peran sentral kepada kebijakan fiskal dalam mengatasi krisis ekonomi. Ketika ekonomi menghadapi resesi atau depresi, heterodoksi menyarankan

²⁷⁰ L. Randall Wray, "MMT and Two Paths to Big Deficits," dalam *Jurnal Challenge*, Vol. 62 No. 6 Tahun 2019, hal. 398-415.

²⁷¹ Yasuhito Tanaka, "An Elementary Mathematical Model For MMT (Modern Monetary Theory)," dalam *Jurnal Research in Applied Economics (Macrothink Institute)*, Tahun 2021, hal. 1-20. <https://ssrn.com/abstract=3882002> diakses 5 Oktober 2024.

²⁷² L. Randall Wray, *A Great Leap Forward Heterodox Economic Policy for the 21st Century*, London: Academic Press, 2020, hal. 137-186.

²⁷³ L. Randall Wray, "Godley Got It Right," dalam Dimitri B. Papadimitrou & Gennaro Zezza, *Contributions in Stock-flow Modeling: Essays in Honor of Wynne Godley*, London: Palgrave Macmillan, 2012, hal. 36-62.

agar pemerintah meningkatkan pengeluarannya untuk menstimulasi permintaan agregat dan mencegah spiral deflasi. Dalam konteks ini, pemerintah dapat menjalankan defisit anggaran yang lebih besar untuk mendorong investasi publik dan menciptakan lapangan kerja.²⁷⁴

Kelima, Kebijakan fiskal ekspansif dianggap sebagai respons yang tepat dalam situasi di mana sektor swasta tidak mampu memacu pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatkan pengeluaran, pemerintah dapat membantu meningkatkan permintaan agregat, mendorong produksi, dan pada akhirnya mempercepat pemulihan ekonomi. Ini adalah pendekatan yang berbeda dengan paradigma ortodoks, yang lebih mengandalkan kebijakan moneter untuk menstabilkan perekonomian melalui pengaturan suku bunga.²⁷⁵

Keenam, heterodoksi menekankan bahwa kebijakan fiskal tidak boleh hanya fokus pada stabilitas jangka pendek atau keseimbangan anggaran, tetapi harus dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dalam jangka panjang. Ini berarti pemerintah perlu berinvestasi dalam infrastruktur, pendidikan, teknologi, dan program-program sosial yang dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.²⁷⁶

Pandangan ini berlawanan dengan pemikiran ortodoks yang cenderung memprioritaskan pengendalian anggaran dalam upaya untuk mengurangi defisit dan utang negara. Ekonomi heterodoks, sebaliknya, melihat investasi jangka panjang yang didanai melalui pengeluaran publik sebagai cara yang lebih efektif untuk membangun ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.²⁷⁷

Ketujuh, paradigma heterodoks juga menekankan pentingnya kebijakan fiskal dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan menangani krisis lingkungan. Negara diharapkan memainkan peran kunci dalam transisi ke ekonomi yang lebih hijau melalui investasi dalam energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, dan infrastruktur ramah lingkungan.²⁷⁸

²⁷⁴ L. Randall Wray, "Minsky's Approach to Employment Policy and Poverty: Employer Of Last Resort And The War On Poverty," dalam *Jurnal Levy Economic Institute*, Working Paper Series No. 515 Tahun 2007, hal. 1-19. <https://ssrn.com/abstract=1014163> diakses 5 Oktober 2024.

²⁷⁵ J. J. A. Burke, "Modern Monetary Policy," dalam J. J. A. Burke, *Financial Services in the Twenty-First Century: The Present System and Future Developments in Fintech and Financial Innovation*, London: Palgrave Macmillan, 2021, hal. 189-198.

²⁷⁶ William Mitchel et al., *Macroeconomics*, hal. 290-311.

²⁷⁷ William Mitchel et al., *Macroeconomics*, hal. 520-522.

²⁷⁸ James Juniper, "Degrowth And Full Employment-A Modern Monetary Theory Perspective," dalam *Jurnal of Resilient Economies*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2021, hal. 22-31.

Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal untuk mendukung inovasi hijau, memberikan insentif kepada industri yang ramah lingkungan, dan mendanai program-program yang bertujuan untuk mengurangi emisi karbon. Hal ini tidak hanya penting untuk mengatasi tantangan perubahan iklim, tetapi juga untuk menciptakan lapangan kerja baru dalam sektor-sektor hijau yang sedang berkembang.²⁷⁹

Refleksi fiskal dalam paradigma ekonomi heterodoks menekankan bahwa kebijakan fiskal harus proaktif, fleksibel, dan dirancang untuk mencapai kesejahteraan sosial yang lebih luas. Dalam pendekatan ini, negara memainkan peran sentral dalam mengelola perekonomian, mengurangi ketimpangan, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pengeluaran publik dan defisit anggaran dipandang bukan sebagai beban, melainkan sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan ekonomi yang lebih adil.²⁸⁰

Dengan demikian, kebijakan fiskal dalam paradigma heterodoks tidak hanya berfokus pada angka-angka ekonomi makro seperti inflasi atau defisit, tetapi juga pada pencapaian tujuan sosial, redistribusi kekayaan, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Paradigma ini melihat kebijakan fiskal sebagai instrumen penting untuk menciptakan ekonomi yang lebih manusiawi, di mana keuntungan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi oleh seluruh masyarakat.

G. Sinopsis Komparasi Paradigma Ortodoks dan Heterodoks

1. Teori Uang

| ORTODOKS | PEMBAHASAN | HETERODOKS |
|--|-----------------------------|--------------------------|
| Medium of Exchange | Definisi Uang | State Unit of Account |
| Komoditas | Perspektif Uang | Kredit |
| Classical | Pijakan Teoretis | Chartalisme |
| Quantity Theory of Money | Pijakan Praktis | Modern Monetary Theory |
| Exogenous Money | Peredaran Uang | Endogenous Money |
| Endogenous Interest Rates/Market Mechanism | Penetapan Suku Bunga | Exogenous Interest Rates |

Tabel 2.6

²⁷⁹ Jamie Morgan, "Degrowth: Necessary, Urgent And Good For You," dalam *Jurnal Real-World Economics Review*, Edisi 93 Tahun 2020, hal. 113-131.

²⁸⁰ Andy Pike, "Heterodoxy And The Governance of Economic Development," dalam *Jurnal Environment And Planning A*, Vol. 36 No.12 Tahun 2004, hal. 2141-2161.

Teori Uang

2. Teori Suku Bunga dan Pengangguran

| ORTODOKS | PEMBAHASAN | HETERODOKS |
|--------------------------------------|---|---|
| Trade Off | Relasi Inflasi Dan Pengangguran | Linear |
| Philips Curve | Dasar Teori | Mmt |
| Tidak Mungkin | Penerapan Zero Interest Rates Policy | Sangat Mungkin |
| Reserve Army of Unemployment (Nairu) | Proposal Kebijakan | Non-Accelerating Inflation Buffer Employment Ratio (Naiber) |

Tabel 2.7
Teori Suku Bunga dan Pengangguran

3. Relasi Otoritas dan Pasar

| ORTODOKS | PEMBAHASAN | HETERODOKS |
|---|--|---|
| Liberal (Efisiensi Pasar) | Dasar Pemikiran | Marxis (Sosial Justice) |
| Pasar Selalu Menemukan Ekuilibriumnya | Pandangan Terhadap Pasar | Pasar Secara Natural Memiliki Internal Destabilizing Forces |
| Night Watchman State | Peran Pemerintah Terhadap Pasar | Lender/Employer of Last Resort |
| Pasar Akan Selalu Menemukan Titik Kestabilannya | Pandangan Terhadap Krisis | Pasar Selalu Tidak Stabil, Pemerintah Yang Berkewajiban Menstabilkannya |

Tabel 2.8
Relasi Otoritas dan Pasar

4. Konsekuensi Teoretis

| ORTODOKS | PEMBAHASAN | HETERODOKS |
|---|----------------------------|--------------------------|
| Less | Regulasi Pemerintah | Tight |
| Self-Correcting | Market | Market Intervention |
| Natural Rate Of Unemployment | Pengangguran | Political Decision |
| Market Mechanism, Endogenous Interest Rates | Inflasi/Suku Bunga | Exogenous Interest Rates |

| | | |
|----------------------------|------------------------------|------------------------|
| Menghambat Efisiensi Pasar | Distribusi Pendapatan | Mandatory |
| Menjaga Inflasi | Tugas Bank Sentral | Mendukung Peran Fiskal |

Tabel 2.9
Konsekuensi Teoretis

5. Konsekuensi Praktis

| ORTODOKS | PEMBAHASAN | HETERODOKS |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Minimal | Peran Pemerintah | Buffer Stocks Institution |
| Austerity | Kebijakan Fiskal | Deficit Spending |
| Equilibrium Adjustment | Proposal Kebijakan | Simultaneous Adjustment |

Tabel 2.10
Konsekuensi Praktis

6. Refleksi Moneter

| ORTODOKS | PEMBAHASAN | HETERODOKS |
|------------------------|--|----------------------------------|
| Pengguna Uang | Peran Pemerintah Secara Moneter | Pencipta Uang |
| (TaB)S | Mekanisme Moneter | S(TaB) |
| Crowding Out | Pandangan Terhadap Budget Deficit | Beneficial |
| Supply-Demand Analysis | Analisa Moneter | T-Account Balance Sheet Analysis |

Tabel 2.11
Refleksi Moneter

7. Refleksi Fiskal

| ORTODOKS | PEMBAHASAN | HETERODOKS |
|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| Katalisator | Peran Pemerintah | Regulator |
| Investment Led-Growth | Tipe Kebijakan | Consumption Led-Growth |
| Fine Tuning | Proposal Kebijakan | Job Guarantee |

Tabel 2.12
Refleksi Fiskal

BAB III

ULASAN ISLAM TENTANG PARADIGMA EKONOMI, HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA DAN WARGA NEGARA, RELASI NEGARA DAN PASAR SERTA KONTEKSTUALISASI PENAFSIRAN AYAT-AYAT TENTANG MATA UANG

A. Ulasan Islam Tentang Paradigma Ekonomi

Mayoritas seluruh akademisi Islam memadamang bahwa uang merupakan alat tukar.¹ Bahkan al-Ghozali, *Hujjah al-Islâm* dan Ibnu Taimiyyah, *Syaikh al-Islâm*, juga berpandangan demikian.² Hanya sedikit dari akademisi Islam yang mengatakan bahwa uang merupakan relasi kontrak sosial antara pencipta uang (pemerintah) dan pengguna uang (rakyat).³ Bahkan ketika mendiskusikan permasalahan operasi moneter dan kebijakan moneter banyak dari akademisi Islam yang seakan memfabrikasi paradigma ekonomi ortodoks dan mencangkokkannya kepada diskursus

¹ Asyari Hasan et al., "The Concept of Money in an Islamic Perspective," dalam *Jurnal EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam*, Vol. 10 No. 2 Tahun 2023, hal. 194-207; Ziauddin Ahmad et al., "Money and Banking in Islam," dalam *Jurnal Res. Islamic Econ*, Vol. 3 No. 1 Tahun 1985, hal. 93-99; Hendri Hermawan Adinugraha, "How Does Money Function in The View Of Islamic Economics?" dalam *Jurnal PROFJES: Profetik Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No.1 Tahun 2024, hal. 1-12;

² Muhammad Irkham Firdaus, "The Concept of Money According to the Thought of Ibn Taymiyah and Imam Ghazali and its Impelemation in the Economic Field," dalam *Jurnal Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2020, hal. 120-135.

³ Alam Asadov, "Money in Islam: A Social Contract Perspective," dalam *Jurnal International Journal of Islamic Economics*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2020, hal. 39-53.

ekonomi Islam tanpa menimbang dan mendialektikan manfaat teoretis dan praktis dalam integrasi kedua rumpun ilmu tersebut.⁴

Terkait dengan suku bunga, akademisi Islam menganggap bahwa hal tersebut adalah riba yang didalamnya mengandung unsur-unsur keharaman.⁵ Namun kebanyakan yang terjadi adalah mereka tidak mengetahui secara spesifik bagaimana riba tersebut berasal dari sebuah mekanisme moneter yang parahnya teori yang diadopsi merupakan teori-teori yang tidak pernah terbukti secara empirik seperti teori kuantitas uang yang dipopulerkan oleh Paul Samuelson.⁶ Kebutaan akademisi Islam terkait definisi uang yang benar secara empirik dan bagaimana sistem moneter itu bekerja menghasilkan sebuah paradoks *-trade off* antara inflasi dan pengangguran persisi seperti teori ekonomi orthodox- yang membatasi institusi pencipta uang untuk menggunakan *provisioning powernya* dalam menciptakan kesejahteraan uang berdasarkan paaradgma ekonomi yang benar dan tepat sehingga penelitian-penelitian ekonomi yang mengatasnamakan Islam bukan menghasilkan kemajuan, malah menghasilkan kemunduran.⁷

Dari pengadopsian teori ekonomi yang secara genealogis bersambung kepada Paul Samuelson oleh para akademisi Islam yang menitikberatkan adanya *trade off* antara pengangguran dan inflasi secara tidak langsung hal ini memberikan kontribusi kepada pemangku kebijakan bahwa hanya ada satu pilihan dari keduanya dalam ekonomi yang harus diprioritaskan.⁸ Tentu dalam hal ini mayoritas akademisi Islam memberikan dorongan

⁴ M. Umer Chapra, "Monetary Management in An Islamic Economy," dalam *Jurnal Islamic Economic Studies*, Vol. 4 No. 1 Tahun 1996, hal. 1-35.

⁵ Sultan Rafli Siregar & Bambang Kurniawan, "Suku Bunga dalam Perpespektif Ekonomi Islam," dalam *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 3 No. 3 Tahun 2023, hal. 173-183.

⁶ Putri Nadhila Maulani, et al., "Konsep dan Teori Permintaan Uang dalam Perspektif Islam," dalam *Jurnal Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, Vol. 2 No. 3 Tahun 2023, hal. 234-246; Nirmadar Ningsih Hiya, "Studi Literatur Kebijakan Moneter Islam Tanpa Bunga," dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2022, hal. 868-875; Muchlis Yahya, "Tingkat Suku Bunga Bank Konvensional dan Komitmen Nasabah Menabung di Bank Syariah," dalam *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 16 No. 2 Tahun 2012, hal. 253-263; Erni Yusnita Siregar, "Kerangka Kerja Kebijakan Moneter Dalam Islam," dalam *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 17 No. 2 Tahun 2021, hal. 163-175.

⁷ Muchdie M. Syarun, "Inflasi, Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi Di Negara-Negara Islam," dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2016, hal. 27-44.

⁸ Mauizhotul Hasanah, "Pandemi Covid-19: Inflasi dan Pengangguran dalam Perspektif Ekonomi Islam," dalam *Jurnal Asy syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2021, hal. 1-22; Reni Mulyani, "Inflasi dan Cara Mengatasinya dalam Islam," dalam *Jurnal Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2020, hal. 267-278.

lebih kepada pengendalian inflasi bukan pada cara bagaimana mengentaskan pengangguran.⁹

Solusi atas pengangguran oleh akademisi Islam dimasukkan ke dalam diskursus yang sifatnya mikroskopis seperti dengan mendorong adanya investasi terhadap bisnis halal pada sektor real,¹⁰ mendorong pengusaha Islam untuk menciptakan lapangan kerja bagi umat Islam,¹¹ mendorong pemberian modal usaha mikro,¹² serta mendorong untuk negara melakukan pemajakan efektif dan insentif aktif dalam perekonomian.¹³ Pendekatan mikroskopis *-investment led-growth-* inisecara agregat makro adalah tidak signifikan karena tidak mempengaruhi neraca swasta dan negara dalam analisa balance sheet. Justru tanpa adanya defisit dari neraca negara justru mengakibatkan defisit pada neraca swasta karena ekonomi tidak ditopang oleh konsumsi namun oleh investasi (modal dari pinjaman) yang mengakibatkan kapasitas produktif sektor swasta terhisap perputarannya oleh perbankan dan membuat ekonomi mengecil secara spiral.¹⁴

Seharusnya proposal paradigma yang diajukan dan proposal kebijakan yang didorong untuk diterapkan adalah *consumption-led growth* oleh para akademisi Islam seperti yang digagas para ekonom heterodoks yaitu dengan menerapkan kebijakan fiskal tepat sasaran yang memacu perputaran ekonomi membesar secara spiral yaitu jaminan pekerjaan.¹⁵ Hal ini didasarkan pada data empirik dari program *New Deal* era Presiden Roosevelt di Amerika tahun 1930an yang mampu merekonstruksi iklim

⁹ Samsul et al., "Sistem Pengendalian Inflasi dalam Sistem Ekonomi Islam," dalam *Jurnal Al-Azhar: Journal of Islamic Economics*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2019, hal. 16-28.

¹⁰ Amsah Hendri Doni et al. "Pengangguran dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Kovenasional," dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Syariah*, Vol. 2 No. 3 Tahun 2023, hal. 1-10.

¹¹ Ismail Ismail, "Analisis Peran Pengusaha dalam Mengurangi Pengangguran Terbuka Perspektif Ekonomi Islam di Kota Bima (Studi Kasus HIPMI dan TDA Kota Bima)," dalam *Jurnal J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2021, hal. 11-26.

¹² Sedinadia Putri, "Kontribusi UMKM terhadap Pendapatan Masyarakat Ponorogo: Analisis Ekonomi Islam tentang Strategi Bertahan di Masa Pandemi Covid-19," dalam *Jurnal EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2020, hal. 147-162.

¹³ Lutfi Mustofa, "Penarikan Pajak pada Saat Pandemi Virus Corona dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam," dalam *Jurnal Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2021, hal.: 72-102.

¹⁴ Ross Garnaut and Yiping Huang, "The Risk of Investment-led Growth," dalam Ross Garnaut & Ligang Song, *The China Boom and Its Discontent*, Canberra: ANU Press, 2005, hal. 1-19.

¹⁵ Paulo L. Dos Santos, "Not "Wage-Led" versus "Profit-Led," But Investment-Led versus Consumption-Led Growth," dalam *Jurnal of Post Keynesian Economics*, Vol. 37 No. 4 Tahun 2015, hal. 661-686.

ekonomi menjadi stabil dan terbukti dengan ini juga meningkatkan formasi kapital yaitu dibangunnya ratusan ribu kilometer jalan tol, ribuan rumah sakit dan sekolah dan infrastruktur lainnya yang dengannya mempermudah iklim ekonomi sekaligus memperbaiki kondisi dari depresi besar menjadi kondisi yang mapan untuk menjadi negara maju tanpa ada efek samping seperti inflasi dan sebagainya.¹⁶

B. Definisi Negara Secara Etimologi, Terminologi, dan Epistemologi

Istilah “negara” dapat dijelaskan dari tiga perspektif utama: etimologi, terminologi, dan epistemologi. Setiap perspektif memberikan pemahaman yang berbeda tentang konsep negara, baik dari asal katanya, penggunaannya dalam konteks tertentu, maupun pendekatannya sebagai objek kajian ilmiah.

Secara etimologis, kata “negara” memiliki akar yang berbeda dalam berbagai bahasa. Dalam bahasa Sanskerta, istilah *nagoro* merujuk pada kota atau wilayah kekuasaan. Kata ini kemudian berkembang menjadi istilah yang menggambarkan suatu wilayah yang memiliki pemerintahan atau pengaturan tertentu.¹⁷ Dalam bahasa Latin, istilah *status* atau *statum* memiliki arti keadaan atau berdiri tetap, yang menggambarkan suatu situasi yang mapan dan terorganisasi. Dari sini, kata *state* dalam bahasa Inggris dan *staat* dalam bahasa Jerman juga berkembang, merujuk pada konsep pemerintahan dan otoritas wilayah.¹⁸ Secara sederhana, dari sisi etimologi, negara adalah wilayah atau entitas yang berdiri secara terorganisasi dan memiliki pemerintahan tertentu. Pemahaman ini merupakan dasar awal dalam memahami konsep negara secara lebih mendalam.

Dalam terminologi, negara didefinisikan sebagai suatu entitas politik atau organisasi yang memiliki kedaulatan atas wilayah tertentu, yang mengatur masyarakatnya melalui pemerintahan yang sah. Menurut definisi klasik, negara adalah organisasi tertinggi di suatu wilayah yang memiliki otoritas penuh untuk mengatur dan mengelola segala aspek

¹⁶ Britannica, The Editors of Encyclopaedia. "Public Works Administration". Encyclopedia Britannica," dalam *Website*, <https://www.britannica.com/topic/Public-Works-Administration>. Diakses 6 Oktober 2024.

¹⁷ Siriporn Maneechukate, “Kata Serapan Bahasa Sanskerta dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Thai sebagai Bahan Pengajaran Bahasa,” dalam *Jurnal Kependidikan*, Vol. 44 No. 2 Tahun 2014, hal. 158-167.

¹⁸ Abid Zamzami et al., *Ilmu Negara: Kajian Hukum dan Kenegaraan*, Malang: Unisma Press, 2021, hal. 23-43.

kehidupan masyarakat. Dalam terminologi ilmu politik, konsep negara sering dikaitkan dengan tiga elemen utama:¹⁹

1. Wilayah: Suatu negara harus memiliki wilayah yang jelas, baik darat, laut, maupun udara.
2. Penduduk: Negara membutuhkan masyarakat yang tinggal dan berinteraksi di dalam wilayahnya.
3. Pemerintah: Organisasi yang mengatur jalannya negara melalui pembuatan dan penegakan hukum.
4. Kedaulatan: Kemampuan negara untuk mengatur dirinya sendiri tanpa campur tangan pihak lain.

Para ahli seperti Max Weber mendefinisikan negara sebagai institusi yang memiliki monopoli atas penggunaan kekerasan yang sah dalam suatu wilayah. Sedangkan menurut George Jellinek, negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang menempati wilayah tertentu.²⁰

Dari perspektif epistemologi, negara adalah objek kajian dalam berbagai disiplin ilmu, seperti filsafat, sosiologi, hukum, dan ilmu politik. Dalam filsafat politik, konsep negara sering dikaitkan dengan teori kontrak sosial. Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau adalah beberapa tokoh yang membahas bagaimana negara terbentuk sebagai solusi atas keadaan alamiah manusia.²¹

Hobbes, misalnya, melihat negara sebagai entitas yang muncul untuk menghindari konflik dalam keadaan alamiah yang penuh kekacauan. Dalam pandangan Locke, negara adalah hasil kesepakatan masyarakat untuk melindungi hak asasi manusia, seperti hak atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Rousseau, di sisi lain, menekankan pentingnya kehendak umum (*general will*) dalam negara untuk menciptakan keadilan.²²

Dari perspektif sosiologi dan hukum, negara dipandang sebagai sistem yang menciptakan tatanan sosial, menjamin keadilan, dan melindungi hak-hak warganya. Dalam epistemologi modern, negara juga dikaji

¹⁹ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2011, hal. 301.

²⁰ Duncan Kelly, "Revisiting The Rights of Man: Georg Jellinek on Rights and The State," dalam *Jurnal Law and History Review*, Vol. 22 No. 3 Tahun 2004, hal. 493-529.

²¹ Yan Zhang, "An Analysis of Social Contract Theory: Based on a Comparative Analysis of Hobbes, Locke and Rousseau," dalam *Jurnal of Sociology and Ethnology*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2024, hal. 120-126.

²² Peter J. Steinberger, "Hobbes, Rousseau and The Modern Conception of The State," dalam *Jurnal The Journal of Politics*, Vol. 70 No. 3 Tahun 2008, hal. 595-611.

melalui pendekatan globalisasi, yang menyoroti peran negara dalam dunia yang semakin saling terhubung.²³

Dari ketiga pendekatan ini, dapat disimpulkan bahwa negara adalah sebuah konsep yang kompleks. Secara etimologis, negara berasal dari istilah yang menggambarkan wilayah atau organisasi. Secara terminologis, negara adalah entitas politik yang berdaulat. Sedangkan secara epistemologis, negara merupakan subjek kajian yang terus berkembang, dipengaruhi oleh dinamika masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan.

C. Tujuan, Fungsi, Peran, dan Sistem Negara

Negara merupakan entitas yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat. Untuk memahami konsep ini secara menyeluruh, kita perlu melihat tujuan, fungsi, peran, dan sistem negara.

1. Tujuan Negara

Tujuan negara mencerminkan alasan utama keberadaannya. Meskipun tujuan ini dapat berbeda tergantung pada ideologi dan sistem pemerintahan yang dianut, beberapa tujuan utama negara antara lain:²⁴

- a. Melindungi masyarakat: Negara bertujuan memberikan perlindungan terhadap ancaman, baik dari dalam maupun luar.
- b. Menjamin keadilan: Negara bertugas menegakkan hukum agar keadilan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
- c. Mewujudkan kesejahteraan: Negara bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui kebijakan ekonomi, sosial, dan pendidikan.
- d. Menciptakan ketertiban dan perdamaian: Negara harus memastikan stabilitas politik dan keamanan dalam masyarakat.
- e. Menghormati hak asasi manusia: Negara harus melindungi dan menjamin hak-hak individu tanpa diskriminasi.

Sebagai contoh, dalam Pembukaan UUD 1945, tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah:²⁵

- a. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- b. Memajukan kesejahteraan umum.
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.

²³ John L. Campbell, "The state and fiscal sociology," dalam *Jurnal Annual Review of Sociology*, Vol. 19 No. 1 Tahun 1993, hal. 163-185.

²⁴ Maleha Soemarsono, "Negara Hukum Indonesia Ditinjau dari Sudut Teori Tujuan Negara," dalam *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 37 No. 2 Tahun 2007, hal. 300-322.

²⁵ Ade Fartini, "Hukum dan Fungsi Negara Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 14 No. 1 Tahun 2018, hal. 1-19.

- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
2. Fungsi Negara
Fungsi negara adalah implementasi dari tujuan negara. Berikut adalah fungsi utama negara:²⁶
 - a. Fungsi pertahanan dan keamanan: Negara melindungi wilayahnya dari ancaman luar dan menjaga keamanan dalam negeri.
 - b. Fungsi keadilan: Negara menegakkan hukum melalui lembaga-lembaga peradilan yang independen.
 - c. Fungsi kesejahteraan: Negara berperan aktif dalam memberikan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
 - d. Fungsi pengaturan: Negara mengatur hubungan sosial, politik, dan ekonomi agar tercipta harmoni dalam masyarakat.
 - e. Fungsi simbolik: Negara menjadi simbol identitas kolektif bagi warganya, seperti melalui bendera, lagu kebangsaan, dan konstitusi.
 3. Peran Negara
Negara memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Beberapa peran utama negara meliputi:²⁷
 - a. Pengatur kehidupan masyarakat: Negara memastikan aturan yang berlaku ditaati untuk menjaga ketertiban.
 - b. Pemberi layanan publik: Negara menyediakan fasilitas publik seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan transportasi.
 - c. Mediator konflik: Negara berperan dalam menyelesaikan konflik di antara kelompok masyarakat melalui hukum dan kebijakan.
 - d. Pelindung hak warga negara: Negara bertanggung jawab memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama di mata hukum.
 - e. Pelaku hubungan internasional: Negara mewakili rakyatnya dalam menjalin hubungan dengan negara lain untuk kerja sama politik, ekonomi, dan budaya.
 4. Sistem Negara
Sistem negara adalah cara negara menjalankan pemerintahan dan pengelolaan kekuasaannya. Ada beberapa sistem negara yang umum diterapkan:²⁸

²⁶ Ade Fartini, "*Hukum dan Fungsi Negara Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*", hal. 1-19.

²⁷ Tatar Bonar Silitonga, "Tantangan Globalisasi, Peran Negara, dan Implikasinya terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Ideologi Negara," dalam *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, Vol. 17 No. 1 Tahun 2020, hal. 15-28.

- a. Sistem Monarki
Pemerintahan dikuasai oleh raja atau ratu yang biasanya diwariskan secara turun-temurun. Contoh: Arab Saudi (monarki absolut), Inggris (monarki konstitusional).
- b. Sistem Republik
Pemerintahan dikelola oleh pejabat yang dipilih oleh rakyat untuk jangka waktu tertentu. Contoh: Indonesia, Amerika Serikat.
- c. Sistem Demokrasi
Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya. Contoh: Indonesia (demokrasi Pancasila), India.
- d. Sistem Otoriter
Kekuasaan terpusat pada satu pemimpin atau kelompok tertentu, dengan kontrol ketat terhadap masyarakat. Contoh: Korea Utara.
- e. Sistem Federal
Pemerintahan dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang memiliki otonomi besar. Contoh: Amerika Serikat, Jerman.
- f. Sistem Kesatuan
Kekuasaan terpusat di pemerintah pusat, dengan sedikit otonomi untuk pemerintah daerah. Contoh: Indonesia (meskipun memiliki otonomi daerah).

Negara memiliki tujuan untuk melindungi, menyejahterakan, dan menciptakan keadilan bagi rakyatnya. Fungsi negara mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari keamanan hingga kesejahteraan. Peran negara adalah pengatur kehidupan masyarakat dan pelindung hak-hak warganya. Sementara itu, sistem negara mencerminkan bagaimana negara mengelola pemerintahan sesuai dengan ideologi, budaya, dan kondisi sosial politik masing-masing.

D. Hak dan Kewajiban Negara terhadap Rakyat

1. Adapun hak negara kepada rakyat sesuai yang tertera di UUD 45 antara lain:²⁹
 - a. Negara berhak meminta kesetiaan dari setiap warga negara untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia {Pasal 27 ayat (3) UUD 1945}.

²⁸ Radis Bastian, *Buku Pintar Terlengkap Sistem-Sistem Pemerintahan Sedunia: Ragam Bentuk Dan Sistem Pemerintahan Negara-Negara Di Dunia*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2015, hal. 27-88.

²⁹ Ahmad Redi, "Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam," dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12 No. 2 Tahun 2015, hal. 401-421.

- b. Negara berhak menetapkan pajak dan pungutan lainnya dari rakyat sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai pembangunan nasional {Pasal 23A UUD 1945}.
 - c. Negara memiliki hak untuk menguasai sumber daya alam yang penting untuk hajat hidup orang banyak dan memanfaatkannya demi kemakmuran rakyat {Pasal 33 ayat (3) UUD 1945}.
 - d. Negara berhak menegakkan hukum dan keadilan dengan menjatuhkan sanksi bagi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan {Pasal 24 ayat (1) UUD 1945}.
2. Adapun kewajiban negara terhadap rakyat sesuai dengan UUD 45 adalah sebagai berikut:³⁰
- a. Negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia {Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4}.
 - b. Negara berkewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia setiap warga negara tanpa diskriminasi {Pasal 28I ayat (4) UUD 1945}.
 - c. Negara berkewajiban memberikan akses pendidikan yang layak dan merata untuk seluruh rakyat Indonesia {Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, Pasal 31 ayat (1) dan (2)}.
 - d. Negara wajib mengusahakan kesejahteraan rakyat melalui pengelolaan kekayaan alam, penyediaan pekerjaan, dan pengentasan kemiskinan {Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, Pasal 33 ayat (3)}.
 - e. Negara wajib memberikan perlindungan hukum yang adil kepada seluruh warga negara {Pasal 24 ayat (1)}.
 - f. Negara wajib menjamin kebebasan beragama dan melindungi pelaksanaan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing {Pasal 29 ayat (2)}.
 - g. Negara berkewajiban menciptakan keamanan dan ketertiban untuk mendukung kehidupan yang damai dan harmonis bagi masyarakat {Pasal 30 ayat (4)}.
 - h. Negara wajib memberikan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial bagi rakyat untuk hidup layak {Pasal 34 ayat (1) dan (2)}.

Dengan demikian, hak dan kewajiban negara kepada rakyat didasarkan pada prinsip keadilan, kemakmuran, dan perlindungan hukum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

E. Hak dan Kewajiban Rakyat terhadap Negara

³⁰ Yuliana Surya Galih, "Kewajiban Negara Melindungi Anak Bangsa," dalam *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 5 No.1 Tahun 2017, hal. 113-133.

1. Adapun hak warga negara kepada negara sesuai dengan UUD 45 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:³¹
 - a. Setiap warga negara berhak atas perlindungan dari negara terhadap ancaman dalam bentuk apa pun yang mengganggu keselamatan, keamanan, dan ketenteraman hidup {Pasal 28G ayat (1) UUD 1945}.
 - b. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan merata {Pasal 31 ayat (1) UUD 1945}.
 - c. Setiap rakyat berhak untuk hidup sejahtera, mendapatkan pekerjaan, dan penghidupan yang layak {Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945}.
 - d. Warga negara berhak memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing {Pasal 29 ayat (2) UUD 1945}.
 - e. Setiap warga negara berhak mendapatkan layanan kesehatan dan jaminan sosial yang layak {Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945}.
 - f. Setiap warga negara berhak untuk menyampaikan aspirasi, memilih, dan dipilih dalam pemerintahan {Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945}.
 - g. Rakyat berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi {Pasal 28D ayat (1) UUD 1945}.
2. Adapun kewajiban warga negara sesuai dengan UUD 45 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:³²
 - a. Setiap warga negara wajib menaati hukum, menghormati hak asasi manusia orang lain, serta tunduk kepada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah {Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945}.
 - b. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya bela negara untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah {Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) UUD 1945}.
 - c. Warga negara wajib membayar pajak dan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung pembangunan nasional {Pasal 23A UUD 1945}.
 - d. Warga negara wajib menjaga ketertiban, keamanan, dan kedamaian dalam masyarakat serta tidak melakukan tindakan

³¹ Septi Yunita & Dinie Anggraeni Dewi. "Urgensi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang," dalam *Jurnal De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol. 1 No. 12 Tahun 2021, hal. 429-436.

³² Siti Zikrina Farahdiba et al., "Tinjauan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945," dalam *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2021, hal. 837-845.

yang merugikan orang lain atau negara {Pasal 30 ayat (1) dan (2) UUD 1945}.

- e. Setiap warga negara wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, nilai-nilai moral, adat istiadat, dan norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat {Pasal 28J ayat (1) UUD 1945}.
- f. Warga negara wajib berperan aktif dalam mendukung pembangunan untuk kesejahteraan bersama sesuai kemampuan masing-masing {Pasal 27 ayat (2) UUD 1945}.
- g. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup demi generasi mendatang {UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup}.

Hak dan kewajiban rakyat ini saling berkaitan dengan fungsi negara, yang diatur untuk menciptakan keseimbangan antara hak yang diterima dan kewajiban yang dilaksanakan oleh setiap warga negara.

F. Relasi Negara dan Pasar dalam Islam serta Hak dan Kewajiban Pemerintah kepada Rakyat dalam Islam

Gagasan dalam intervensi pemerintah dalam ekonomi bermula ketika dilatarbelakangi oleh krisis besar (*great depression*) di Amerika satu abad silam. Kondisi ini mengubah asumsi klasik bahwa ekonomi dalam suatu negara selayaknya diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar dan intervensi pemerintah harus dilakukan secara minimal untuk tidak mengganggu efisiensi dan stabilitas ekuilibrium dalam pasar namun dengan adanya krisis besar ini yang dibiarkan justru memperburuk kondisi sehingga memerlukan peran kuat negara dalam mengatur dan menolongnya. Keynes adalah pelopor gagasan ini dengan teorinya ia mendorong pemerintah melakukan kebijakan fiskal efektif dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi.³³

Mengingat peran dan posisi negara menjadi objek perdebatan yang menarik bagi pakar ekonomi, menimbulkan pertanyaan. Bagaimana Islam memandang peran dan campur tangan negara dalam roda perekonomian. Paling kurang ada dua pendapat dari kalangan cendekiawan Muslim antara yang menginginkan adanya campur tangan pemerintah yang menganggap tidak perlu. Pertama, meniadakan campur tangan negara dalam urusan ekonomi. Al-Ghazâlî menafikan campur tangan pemerintah secara berlebihan dalam dalam perekonomian karena persaingan bebas yang terjadi di pasar

³³ Minarni, "Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Taimiyah dan John Maynard Keynes tentang Keuangan Publik," dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7 No.2 Tahun 2021, hal. 734-747. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2406>

akan menemukan efektivitasnya dan pada akhirnya akan menemukan keadilan.³⁴

Kedua, pendapat al-Bâjî ketika mengutip sikap Umar ibn al-Khaththâb yang menegur seorang pedagang yang menetapkan harga murah barang dagangannya di bawah dari harga pasar, “Naikkan harga barang daganganmu atau tinggalkan pasar kami.” Teguran Umar ini menunjukkan bahwa perekonomian yang adil akan terbentuk bila tidak pihak yang menjamin harga. Dan ini juga menjadi dalil bahwa kontrol dalam arti pengawasan diperlukan dari pemerintah, atau penguasa yang berjalan.³⁵

Ibn Taymiyyah sebagaimana para pemikir Islam lainnya, memandang pemerintah sebagai institusi yang sangat penting. Dengan bekal moralitas dan religiusitas menjadi instrumen pokok dalam proses pengambilan kebijakan, "Tujuan terbesar dari negara adalah mengajak penduduknya melaksanakan kebaikan dan mencegah mereka berbuat munkar".³⁶

Al-Ghazâlî menyatakan bahwa agama adalah dasar atau pondasi. Sementara kekuasaan, dalam hal ini negara, adalah berfungsi untuk menjaga dasar tersebut. Model hubungan yang adalah (simbiosis mutualime). Pada satu sisi, agama menjadi pondasi negara dalam menyebarkan nilai-nilai kesejah-teraan buat rakyatnya. Sedangkan negara bagi agama adalah alat agar agama dapat menyebar secara benar dan efisien. Sedangkan menurut Nejatullah Siddiqi menegaskan bahwa masyarakat tidak akan dapat diorganisasi atau diatur menggunakan prinsip-prinsip Islam kecuali menggunakan negara sebagai media. Seperti mekanisme pembayaran zakat dan penghapusan praktik riba.³⁷

Menurut Hasanuzzaman, segala fungsi negara ditujukan untuk memastikan bahwa keadilan dan keseimbangan dimasyarakat dapat terjaga. Di antaranya membuat kebijakan dan legislasi, pertahanan negara, pendidikan, dan penelitian, pembangunan dan pengawasan moral sosial masyarakat, menegakkan hukum, menjaga ketertiban dan menjalankan hukum, kesejahteraan publik, dan hubungan luar negeri, Demikian pula pendapat Mahmood M. Sanusi, bahwa Termasuk di antara fungsi negara adalah mencetak mata uang yang beredar resmi dalam negara. Dalam sejarah, tercatat bahwa yang pertama mencetak nilai mata uang yang resmi bersumber dari pemerintah Islam adalah pada era Khalifah ‘Alî ibn Abî

³⁴ Abû Hâmid al-Ghazâlî, *Ihyâ ‘Ulûm al-Dîn*, Beirut: Dâr al-Ma‘rifah, t.th., Juz III, hal. 83- 84.

³⁵ Abû Wâlid Sulaymân ibn Khalâf ibn Sa‘ad al-Bâjî, *al-Muntaqâ Syarh al-Muwaththa’*, Beirut: Dâr al-Kitâb al‘Arabî, 1332 H., Juz V, hal. 18.

³⁶ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer*, Jakarta: Granada Press, 2007, hal.179.

³⁷ Masri Damang et al., “Relasi Negara, Kebijakan Fiskal dan Ekonomi Islam,” dalam *Jurnal Attractive: Innovative Education Journal*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2023, hal. 114.

Thâlib. Karena sebelum itu, yang digunakan adalah mata uang yang berasal dari negara lain. Dinar emas berasal dari kerajaan Byzantium dan Dirham perak dan kerajaan Sassanian.³⁸

Gambaran ini dijelaskan dalam Surah Yusuf ayat 43-50 yang mengindikasikan bahwa Fir'aun bertanggung jawab penuh atas pemerintahannya dan diperkuat dengan HR. Muslim No. 2337 yang menyatakan bahwa “setiap dari kalian adalah pemimpin dan memiliki pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya.” Hal ini jelas mengindikasikan bahwa peran negara terhadap pasar khususnya pada permasalahan ekonomi mutlak memiliki tanggung jawab dalam arti bahwa jika ada kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, ketidakadilan tercipta maka negara secara penuh memiliki tanggung jawab atasnya.³⁹

Adapun, seperti disebutkan di atas bahwa negara memiliki tanggung jawab terkhusus pada permasalahan ekonomi yaitu: 1) pengangguran, 2) ketimpangan, 3) kemiskinan, 4) pendidikan, 5) kesehatan, 6) riba.

1. Pengangguran

Dalam Islam, pengangguran dianggap sebagai masalah yang serius, bukan hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga sosial dan spiritual. Bekerja dalam Islam dipandang sebagai ibadah dan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, setiap individu dianjurkan untuk berusaha mencari nafkah yang halal dan produktif. Namun, ketika individu mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan, masyarakat dan negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan bantuan.⁴⁰

Negara dalam Islam memiliki peran sentral dalam mengatasi pengangguran. Negara bertanggung jawab menciptakan lapangan kerja melalui kebijakan ekonomi yang mendukung pertumbuhan sektor produktif, seperti industri, pertanian, dan jasa. Selain itu, instrumen ekonomi Islam seperti zakat dan wakaf dapat dimanfaatkan untuk membantu mereka yang menganggur dengan memberikan bantuan finansial atau pelatihan kerja.⁴¹

Islam juga menawarkan solusi untuk mengurangi pengangguran melalui pembiayaan berbasis bagi hasil, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, yang memungkinkan individu mengakses modal tanpa harus terjerat dalam utang berbunga. Etika kerja dalam Islam mendorong setiap individu untuk terus

³⁸ Masri Damang et al., “Relasi Negara, Kebijakan Fiskal dan Ekonomi Islam,” hal. 115.

³⁹ Monzer Kahf, *Ayat dan Hadits Tentang Ekonomi*, Jakarta: Komite Nasional dan Keuangan Syari'ah (KNEKS), 2022, hal. 865.

⁴⁰ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Ekonomi*, edisi ke 3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 271.

⁴¹ Moh. Subhan, "Pengangguran dan Tawaran Solutif dalam Perspektif Islam," dalam *Jurnal JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2018, hal. 153-165.

berusaha memperbaiki kehidupannya melalui kerja yang jujur dan bermanfaat.⁴²

Pengangguran yang berkepanjangan dalam masyarakat Muslim dapat menimbulkan implikasi sosial yang serius, seperti meningkatnya kemiskinan dan ketidakstabilan sosial. Oleh karena itu, negara harus berperan aktif dalam mengatasi pengangguran demi menjaga stabilitas sosial dan meningkatkan kesejahteraan umum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁴³

2. Ketimpangan

Ketimpangan ekonomi merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh banyak negara di seluruh dunia, termasuk negara-negara muslim. Ketimpangan ini terjadi ketika distribusi kekayaan dan sumber daya tidak merata di antara individu atau kelompok dalam masyarakat, sehingga menyebabkan perbedaan yang mencolok dalam akses terhadap kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Dalam pandangan Islam, ketimpangan ekonomi merupakan masalah serius yang harus diatasi, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan yang diajarkan oleh agama.⁴⁴

Islam menempatkan keadilan sebagai salah satu pilar utama dalam tatanan sosial dan ekonomi. Al-Qur'an menegaskan pentingnya berlaku adil dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam distribusi kekayaan. Keadilan ekonomi dalam Islam berarti memastikan bahwa kekayaan dan sumber daya didistribusikan dengan cara yang adil, sehingga semua orang mendapatkan kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Islam tidak mendukung kesetaraan ekonomi dalam arti setiap individu memiliki jumlah kekayaan yang sama, tetapi menekankan pada keadilan distribusi, di mana mereka yang lebih mampu secara finansial memiliki kewajiban untuk membantu yang kurang mampu melalui berbagai mekanisme sosial.⁴⁵

Islam menawarkan berbagai instrumen untuk mengatasi ketimpangan ekonomi, yang sebagian besar berakar pada prinsip

⁴² Yusuf al-Qardawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, hal. 51.

⁴³ Ellyza Cindi Mentari et al., "Peran Pemerintah melalui Program Pelatihan dalam Mengurangi Jumlah Pengangguran Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan)," dalam *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 8 No.1 Tahun 2023, hal. 505-601.

⁴⁴ Indra Sholeh Husni, "Konsep Keadilan Ekonomi Islam dalam Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konsepsional," dalam *Jurnal Islamic Economics Journal*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2020, hal. 57-74.

⁴⁵ Aditama Dewantara, "Etika Distribusi Ekonomi Islam: Perbandingan Sistem Distribusi Kapitalis dengan Sistem Distribusi Islam," dalam *Jurnal Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2020, hal. 20-36.

solidaritas sosial dan redistribusi kekayaan. Beberapa di antaranya termasuk:

- a. Zakat: Zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu secara finansial untuk memberikan sebagian dari hartanya kepada mereka yang membutuhkan. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dengan cara mendistribusikan kekayaan dari yang kaya kepada yang miskin. Zakat terdiri dari beberapa jenis, termasuk zakat harta (maal) dan zakat fitrah, yang semuanya bertujuan untuk membantu mereka yang kurang beruntung.⁴⁶
- b. Infaq dan Sedekah: Selain zakat yang sifatnya wajib, Islam juga menganjurkan umatnya untuk berinfaq dan bersedekah, yang merupakan pemberian sukarela. Infaq dan sedekah bisa diberikan kapan saja dan dalam jumlah berapa pun sesuai kemampuan. Instrumen ini memperkuat solidaritas sosial dan membantu mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin.⁴⁷
- c. Wakaf: Wakaf adalah aset yang diberikan secara sukarela oleh individu untuk kepentingan umum atau kemaslahatan umat. Wakaf bisa berupa tanah, bangunan, atau aset lain yang produktif. Hasil dari wakaf digunakan untuk tujuan amal, seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, atau fasilitas publik lainnya. Dengan adanya wakaf, sumber daya ekonomi dapat dimanfaatkan secara kolektif untuk kepentingan bersama, yang pada akhirnya membantu mengurangi ketimpangan.⁴⁸

Islam sangat menentang penumpukan kekayaan oleh segelintir orang atau kelompok tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Surah At-Taubah ayat 34 menegaskan bahwa menimbun kekayaan tanpa memberikan kontribusi kepada masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dilarang dalam Islam. Dengan mendorong zakat, infaq, sedekah, dan wakaf, Islam

⁴⁶ Ahmad Jalili et al., "Zakat dan Keadilan Ekonomi Perspektif Islam, Kapitalisme, dan Sosialisme," dalam *Jurnal Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2022, hal. 1-10.

⁴⁷ Anita Rahmawaty, "Distribusi dalam Ekonomi Islam Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif," dalam *Jurnal Equilibrium*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2013, hal. 1-17.

⁴⁸ Sri Wahyuni et al., "Mekanisme Distribusi Kekayaan Negara dalam Ekonomi Islam," dalam *Jurnal Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 10 No. 5 Tahun 2023, hal. 2652-2666.

berupaya mencegah konsentrasi kekayaan di tangan sekelompok kecil orang dan mendorong redistribusi kekayaan demi kebaikan bersama.⁴⁹

Islam juga mendorong pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pembangunan ekonomi dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ini berarti bahwa negara dan pemimpin memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi juga memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama yang miskin dan terpinggirkan.⁵⁰

Negara dalam Islam diharapkan mengambil peran aktif dalam mengatur dan mengawasi distribusi kekayaan, serta mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Negara dapat memanfaatkan instrumen seperti pajak dan pengeluaran publik untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh kelas atas, tetapi juga oleh seluruh masyarakat.⁵¹

Islam menawarkan pendekatan yang komprehensif untuk mengatasi ketimpangan ekonomi, dengan menekankan prinsip keadilan, solidaritas sosial, dan redistribusi kekayaan. Melalui instrumen seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf, Islam mendorong pengurangan kesenjangan ekonomi dan memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang sama terhadap kebutuhan dasar. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, masyarakat Muslim dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan sejahtera, yang sejalan dengan nilai-nilai syariah dan mengutamakan kesejahteraan bersama.⁵²

3. Kemiskinan

Kemiskinan adalah salah satu masalah utama yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk di dunia Muslim. Dalam Islam, kemiskinan

⁴⁹ Mabid Barokah et al., "Larangan Menimbun Harta dalam Al-Qur'an: Analisis Metode Tafsir Maudhu'i Fazlur Rahman," dalam *Jurnal Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits*, Vol. 17 No. 2 Tahun 2023, hal. 313-324.

⁵⁰ Eka Junila Saragih, "Konsep Monopoli dalam Tinjauan Bisnis Islam," dalam *Jurnal Al-Maslahah*, Vol. 13 No. 2 Tahun 2017, hal. 268-269.

⁵¹ Kuni Zakiyah, "Peran Negara dalam Distribusi Kekayaan: Perspektif Ekonomi Islam," dalam *Jurnal AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2017, hal. 37-52.

⁵² Indra Sholeh Husni, "Konsep Keadilan Ekonomi Islam dalam Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konseptual," dalam *Jurnal Islamic Economics Journal*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2020, hal. 57-74.

tidak hanya dipandang sebagai masalah ekonomi, tetapi juga sebagai tantangan sosial, moral, dan spiritual. Islam menawarkan pandangan yang komprehensif untuk mengatasi kemiskinan dengan pendekatan berbasis keadilan sosial, solidaritas, dan kesejahteraan bersama. Ajaran Islam memberikan panduan tentang bagaimana menangani kemiskinan secara individu, komunitas, dan negara, dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.⁵³

Islam mengakui kemiskinan sebagai keadaan yang sulit dan berpotensi menimbulkan dampak negatif pada individu maupun masyarakat. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT mengingatkan bahwa kemiskinan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan tanggung jawab sosial. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW juga menunjukkan keprihatinan mendalam terhadap orang miskin, di mana Nabi secara konsisten menyerukan bantuan kepada mereka yang membutuhkan dan memberikan perhatian kepada mereka yang hidup dalam kemiskinan.⁵⁴

Islam tidak menganggap kemiskinan sebagai bentuk nasib yang harus diterima, melainkan masalah yang perlu diatasi melalui kerja sama antara individu, masyarakat, dan negara. Prinsip-prinsip solidaritas dan keadilan yang menjadi landasan ekonomi Islam memberikan kerangka kerja yang kuat untuk mengurangi kemiskinan dan mencegahnya menjadi fenomena yang meluas.⁵⁵

Zakat adalah salah satu instrumen utama dalam Islam untuk mengurangi kemiskinan. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu secara finansial, di mana mereka harus memberikan sebagian kecil dari harta mereka (biasanya 2,5%) kepada golongan yang berhak menerimanya, termasuk orang miskin dan fakir. Zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang bertujuan untuk menyeimbangkan ketimpangan ekonomi. Dengan mewajibkan zakat, Islam memastikan bahwa orang yang kurang mampu mendapatkan dukungan finansial yang dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Selain itu, zakat juga dapat digunakan untuk memberikan bantuan jangka panjang, seperti modal usaha bagi

⁵³ Firman Setiawan & Iswatul Hasanah. "Kemiskinan dan Pengentasannya dalam pandangan Islam," dalam *Jurnal Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2016, hal. 1-11.

⁵⁴ Arif Chasanul Muna, "Prinsip-prinsip Penanganan Kemiskinan di Madinah pada Masa Nabi Muhammad Saw," dalam *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*, Vol. 9 No. 2 Tahun 2012, hal. 1-13.

⁵⁵ Syaiful Ilmi, "Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam," dalam *Jurnal Al-Maslahah*, Vol. 13 No. 1 Tahun 2017, hal. 67-84.

mereka yang ingin memulai usaha sendiri, sehingga mereka dapat keluar dari kemiskinan.⁵⁶

Selain zakat, Islam juga menganjurkan infaq dan sedekah sebagai bentuk solidaritas sosial. Infaq adalah sumbangan sukarela yang dapat diberikan kapan saja tanpa batasan jumlah, sementara sedekah merupakan tindakan kebaikan yang dilakukan demi mendapatkan ridha Allah, baik berupa materi maupun non-materi. Kedua instrumen ini memungkinkan individu untuk berpartisipasi aktif dalam membantu mereka yang membutuhkan, di luar kewajiban zakat. Wakaf juga menjadi instrumen penting dalam ekonomi Islam yang berfungsi sebagai aset produktif yang dikelola untuk kepentingan publik. Hasil dari wakaf dapat digunakan untuk mendanai berbagai proyek sosial, seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, atau program kemanusiaan lainnya, yang secara langsung berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan.⁵⁷

Dalam Islam, negara memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kesejahteraan rakyatnya, termasuk dalam hal mengatasi kemiskinan. Negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif bagi penciptaan lapangan kerja, memastikan akses yang adil terhadap pendidikan dan kesehatan, serta menjamin distribusi kekayaan yang adil. Negara juga harus menegakkan sistem zakat, infaq, dan wakaf dengan efektif untuk memastikan bahwa bantuan sampai kepada yang membutuhkan. Negara Islam memiliki kewajiban untuk mengembangkan kebijakan ekonomi yang berkeadilan dan inklusif, serta mencegah penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang atau kelompok. Melalui kebijakan pajak yang adil, investasi dalam infrastruktur, dan program sosial, negara dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin dan mengurangi ketergantungan mereka pada bantuan.⁵⁸

Keadilan sosial adalah landasan utama dalam ekonomi Islam. Islam mengajarkan bahwa setiap orang berhak atas kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Ketika kemiskinan menghalangi seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar ini, tanggung jawab jatuh pada masyarakat dan negara untuk

⁵⁶ Irsyad Andriyanto, "Strategi Pengelolaan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan," dalam *Jurnal Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 19 No. 1 Tahun 2011, hal. 25-46.

⁵⁷ Fitri Hayati & Andri Soemitra, "Filantropi Islam Dalam Pengentasan Kemiskinan," dalam *Jurnal E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, Vol. 23 No. 2 Tahun 2022, hal. 109-121.

⁵⁸ Lukman Hakim & Ahmad Danu Syaputra, "Al-Qur'an dan Pengentasan Kemiskinan," dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6 No. 3 Tahun 2020, hal. 629-644.

membantu mereka. Islam menekankan pentingnya memastikan bahwa kekayaan tidak hanya terkonsentrasi pada segelintir orang, tetapi didistribusikan secara merata untuk menciptakan keseimbangan sosial. Hal ini tercermin dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang mengatur agar mereka yang memiliki kekayaan berkontribusi kepada kesejahteraan umum melalui zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Islam juga mendorong umatnya untuk bekerja keras dan mandiri secara ekonomi. Nabi Muhammad SAW memberikan teladan dengan mendorong para sahabatnya untuk berusaha dengan gigih, sekaligus mengajarkan bahwa memintaminta bukanlah solusi yang diutamakan dalam Islam. Dengan memberikan dukungan berupa modal usaha melalui zakat atau wakaf produktif, Islam mendorong umatnya untuk keluar dari kemiskinan melalui usaha mandiri dan produktif.⁵⁹

Islam melihat kemiskinan sebagai masalah serius yang perlu diatasi dengan tindakan nyata oleh individu, masyarakat, dan negara. Melalui instrumen seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf, Islam menawarkan solusi yang efektif untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Dengan menerapkan prinsip keadilan sosial, Islam memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk hidup dengan martabat dan memenuhi kebutuhan dasarnya.⁶⁰

4. Pendidikan

Pendidikan memiliki posisi yang sangat penting dalam Islam. Al-Qur'an dan Hadis menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan pembelajaran bagi setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam Islam, pendidikan dipandang sebagai sarana utama untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama, serta sebagai jalan menuju pengembangan diri dan kontribusi bagi masyarakat. Islam menekankan bahwa mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan Hadis.⁶¹

Islam menempatkan ilmu pengetahuan sebagai salah satu aspek utama dalam kehidupan seorang Muslim. Ayat pertama yang

⁵⁹ Sri Budi Cantika, "Strategi Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif Islam," dalam *Jurnal of Innovation in Business and Economics*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2013, hal. 101-114.

⁶⁰ Andi Suseno, "Pengentasan Kemiskinan Perspektif Hadis Nabi: Studi Hadis Tematis-Kontekstualis," dalam *Jurnal Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 9 No. 1 Tahun 2021, hal. 27-44.

⁶¹ Nashria Rahayuning Tyas, "Model Kepemimpinan Pendidikan Nabi Muhammad SAW," dalam *Tesis*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.

diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah perintah untuk membaca. Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya membaca dan belajar dalam Islam. Rasulullah SAW juga bersabda, “Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim” (HR. Ibnu Majah). Pendidikan tidak hanya terbatas pada ilmu agama, tetapi juga mencakup ilmu-ilmu duniawi yang dapat membawa manfaat bagi individu dan masyarakat.⁶²

Islam mengajarkan bahwa melalui pendidikan, manusia dapat memperoleh pengetahuan tentang penciptaan, hukum-hukum Allah, dan memahami tugas mereka sebagai khalifah di muka bumi. Pendidikan menjadi alat untuk memperkuat iman, meningkatkan akhlak, serta menyeimbangkan antara aspek spiritual dan material dalam kehidupan.⁶³

Dalam perspektif Islam, pendidikan tidak hanya mencakup aspek intelektual, tetapi juga moral dan spiritual. Tujuan utama pendidikan dalam Islam adalah membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Pendidikan Islam harus mencakup tiga elemen utama: 1) Pendidikan Spiritual (*Tarbiyah Ruhiyah*): Pendidikan yang menekankan pada hubungan manusia dengan Allah SWT dan memperkuat iman. Ini mencakup pengajaran tentang tauhid, ibadah, dan etika berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Hadis.⁶⁴ 2) Pendidikan Moral (*Tarbiyah Akhlakiyah*): Menekankan pengembangan karakter dan akhlak yang baik, seperti kejujuran, kesabaran, tanggung jawab, dan empati terhadap sesama.⁶⁵ 3) Pendidikan Intelektual (*Tarbiyah Aqliyah*): Mencakup pengajaran ilmu pengetahuan yang luas, baik ilmu agama maupun ilmu duniawi. Pendidikan intelektual ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kemandirian dalam mencari solusi atas masalah kehidupan. Dengan demikian, pendidikan dalam Islam bertujuan untuk menciptakan manusia yang tidak hanya cerdas secara

⁶² Abdul Rahman, "Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Islam-Tinjauan Epistemologi dan Isi-Materi," dalam *Jurnal Eksis*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2012, hal. 2053-2059.

⁶³ Fatimah Nur Rahma et al., "Penerapan Kepemimpinan Nabi Muhammad pada Pendidikan Islam," dalam *Jurnal PANDAWA*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2022, hal. 141-153.

⁶⁴ Imam Mashudi Latif, "Aspek-Aspek Kecerdasan Spiritual Dalam Konsep Pendidikan Nabi Ibrahim AS," dalam *Jurnal Sumbula: Jurnal Studi Keagamaan, Sosial dan Budaya*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2016, hal. 179-202.

⁶⁵ Rubini, "Pendidikan Moral dalam Perspektif Islam," dalam *Jurnal AL-MANAR: Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2019, hal. 225-271.

intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral dan spiritual yang tinggi.⁶⁶

Islam menegaskan pentingnya pendidikan bagi semua, tanpa memandang jenis kelamin atau status sosial. Nabi Muhammad SAW menekankan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini tercermin dalam contoh kehidupan istri Nabi, Aisyah RA, yang dikenal sebagai salah satu ulama perempuan terkemuka pada masanya. Selain itu, Islam tidak membedakan antara kaya dan miskin dalam hal akses terhadap pendidikan. Dalam sejarah Islam, banyak madrasah dan lembaga pendidikan yang didirikan dengan tujuan menyediakan pendidikan gratis bagi semua orang, termasuk mereka yang tidak mampu. Lembaga-lembaga seperti ini memainkan peran penting dalam penyebaran ilmu pengetahuan di dunia Muslim selama berabad-abad.⁶⁷

Negara Islam memiliki kewajiban untuk mendukung pendidikan bagi seluruh warganya. Ini termasuk menyediakan fasilitas pendidikan, menggaji guru-guru yang berkualitas, dan memastikan bahwa setiap anak mendapatkan akses yang setara terhadap pendidikan, baik di bidang agama maupun ilmu dunia. Negara juga diharapkan untuk menjamin bahwa kurikulum pendidikan didasarkan pada nilai-nilai Islam dan mempersiapkan individu untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab.⁶⁸

Dalam sejarah Islam, banyak penguasa Muslim yang mendirikan universitas, perpustakaan, dan pusat-pusat studi ilmu pengetahuan. Contohnya adalah Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko, yang didirikan pada abad ke-9 dan dianggap sebagai salah satu universitas tertua di dunia. Selain itu, rumah hikmah di Baghdad pada masa Dinasti Abbasiyah menjadi pusat ilmu pengetahuan yang mengumpulkan karya-karya besar dari berbagai disiplin ilmu.⁶⁹

⁶⁶ Dwi Fitri Wiyono, "Pemikiran Pendidikan Islam: Konseptualisasi Pendidikan Karakter Dalam Perspektif Intelektual Islam Klasik," dalam *Jurnal Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 2 No. 3 Tahun 2017, hal. 164-179.

⁶⁷ Muhamad Tisna Nugraha, "Aisyah Sebagai Figur Emansipasi Perempuan Dunia," dalam *Jurnal Raheema: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2019, hal. 220.

⁶⁸ Imam Machali, "Islam Memandang Hak Asasi Pendidikan," dalam *Jurnal MP*, Vol. 17 No. 1 Tahun 2012, hal. 2-20.

⁶⁹ Trisno Wardy Putra et al, "Kontribusi Wakaf dalam Membangun Peradaban Dunia Islam dan Barat: Studi Pada Lembaga Pendidikan Tinggi," dalam *Jurnal Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 10 No. 1 Tahun 2024, hal. 77-89.

Pendidikan dalam Islam juga dipandang sebagai sarana untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Melalui pendidikan, individu didorong untuk mempelajari keterampilan yang diperlukan untuk memajukan masyarakat dalam bidang ekonomi, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Pada saat yang sama, pendidikan juga menanamkan nilai-nilai moral yang mencegah perilaku destruktif seperti korupsi, penindasan, dan ketidakadilan. Islam mengajarkan bahwa kemajuan suatu masyarakat bergantung pada kualitas pendidikan warganya. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan dipandang sebagai investasi dalam masa depan umat, karena pendidikan yang baik akan menghasilkan generasi yang mampu memimpin dengan adil dan membawa kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan.⁷⁰

Islam memandang pendidikan sebagai hak dan kewajiban setiap individu. Pendidikan tidak hanya dilihat sebagai sarana untuk mencapai tujuan duniawi, tetapi juga sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengamalkan ajaran-Nya. Dengan menekankan pada pendidikan spiritual, moral, dan intelektual, Islam berupaya menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berakhlak mulia. Negara, masyarakat, dan individu semua memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pendidikan tersedia bagi semua, dan bahwa pendidikan tersebut sejalan dengan nilai-nilai Islam.

5. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dan Islam memberikan perhatian yang besar terhadap pemeliharaan kesehatan, baik fisik, mental, maupun spiritual. Dalam pandangan Islam, kesehatan dipandang sebagai anugerah dari Allah SWT yang harus dijaga dan dipelihara dengan baik. Al-Qur'an dan Hadis mengandung banyak petunjuk dan nasihat tentang bagaimana menjaga kesehatan, pola makan yang seimbang, kebersihan, serta pentingnya pengobatan ketika seseorang jatuh sakit.⁷¹

Islam menekankan pentingnya menjaga kesehatan sebagai bagian dari upaya memelihara tubuh yang diamankan oleh Allah SWT.

⁷⁰ Nunzairina, "Dinasti Abbasiyah: Kemajuan Peradaban Islam, Pendidikan dan Kebangkitan Kaum Intelektual," dalam *Jurnal JUSPI: Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2020, hal. 93-104; Muh Ilham Muchtar, "Pendidikan Karakter; Garansi Peradaban Berkemajuan," dalam *Jurnal TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2017, hal. 130-138.

⁷¹ Achmad Fuadi Husin, "Islam dan kesehatan," dalam *Jurnal Islamuna: Jurnal Studi Islam*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2014, hal. 194-210.

Dalam salah satu hadisnya riwayat Ibn Majah, Rasulullah SAW bersabda, “Tidak ada nikmat yang lebih baik setelah keimanan selain kesehatan.” Hadis ini menegaskan bahwa kesehatan adalah salah satu nikmat terbesar setelah keimanan, dan karenanya perlu dijaga dengan baik.⁷²

Al-Qur’an juga menyiratkan pentingnya menjaga kesehatan melalui petunjuk tentang kebersihan, makanan halal dan thayyib (baik), serta larangan mengonsumsi sesuatu yang membahayakan tubuh. Kesehatan dalam Islam bukan hanya sekadar kebugaran fisik, tetapi mencakup kesejahteraan mental dan spiritual, yang semuanya saling terkait dan berkontribusi terhadap kehidupan yang seimbang.⁷³

Islam sangat menekankan kebersihan sebagai salah satu aspek utama dari kesehatan fisik. Kebersihan dianggap sebagai bagian dari iman, sebagaimana dinyatakan dalam hadis riwayat Muslim, “Kebersihan adalah sebagian dari iman.” Ini diwujudkan dalam ajaran tentang wudhu dan mandi, yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari umat Muslim. Selain itu, Islam juga mengajarkan tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, pakaian, dan makanan.⁷⁴

Pola makan yang sehat juga menjadi perhatian dalam Islam. Umat Muslim diajarkan untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik, yang berarti bukan hanya halal dari segi hukum syariah, tetapi juga sehat dan baik bagi tubuh. Nabi Muhammad SAW juga memberikan nasihat tentang moderasi dalam makan, yaitu agar seseorang tidak makan hingga kekenyangan, melainkan makan secukupnya. Hal ini menunjukkan bahwa menjaga pola makan yang seimbang adalah bagian dari menjaga kesehatan dan kesejahteraan fisik.⁷⁵

Kesehatan mental juga merupakan aspek penting dalam ajaran Islam. Al-Qur’an dan Hadis mengandung banyak nasihat tentang menjaga ketenangan pikiran, mengendalikan emosi, dan bersabar

⁷² Abdul Hadi, "Konsep dan Praktek Kesehatan Berbasis Ajaran Islam," dalam *Jurnal Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 11 No. 2 Tahun 2020, hal. 53-70.

⁷³ Mia Fitriah, "Kajian Al-Quran dan Hadits Tentang Kesehatan Jasmani Dan Ruhani," dalam *Jurnal Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol.15 No. 1 Tahun 2016, hal. 105-126.

⁷⁴ Nayla Dwi Amanda, "Menjaga Kesehatan Tubuh dalam Perspektif Islam," dalam *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, Vol. 1 No. 5 Tahun 2023, hal. 373-380.

⁷⁵ Fauzan Irfan et al., "Pola Makan Sesuai Anjuran Nabi Muhammad SAW Menurut Perspektif Kesehatan," dalam *Jurnal of Creative Student Research*, Vol. 1 No. 5 Tahun 2023, hal. 393-406.

dalam menghadapi cobaan hidup. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu bersikap optimis, tidak berputus asa, dan mempercayai bahwa setiap cobaan memiliki hikmah. Selain itu, Islam mendorong umatnya untuk saling memberikan dukungan emosional dan sosial, serta menjaga hubungan yang baik dengan keluarga dan komunitas, yang semuanya berperan penting dalam menjaga kesehatan mental.⁷⁶

Sabar dan syukur adalah dua konsep utama dalam menghadapi stres dan tantangan kehidupan. Rasulullah SAW menekankan pentingnya sabar dalam menghadapi kesulitan dan syukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Dengan memiliki mental yang kuat, seseorang dapat menghadapi tekanan hidup dengan lebih baik dan menjaga keseimbangan mentalnya.⁷⁷

Islam tidak hanya menganjurkan untuk menjaga kesehatan, tetapi juga memerintahkan untuk mencari pengobatan ketika sakit. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhori, “Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit melainkan Dia juga menurunkan penawarnya.” Hadis ini menunjukkan bahwa Islam mendukung upaya pengobatan dan mendorong umat Muslim untuk mencari perawatan medis ketika mereka sakit.⁷⁸

Pada masa Nabi, berbagai bentuk pengobatan tradisional dikenal dan digunakan, termasuk penggunaan madu, habbatus sauda (jintan hitam), serta teknik-teknik pengobatan lain yang sesuai dengan tradisi Arab pada masa itu. Namun, Islam juga mendorong umatnya untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan, sehingga pengobatan modern pun diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.⁷⁹

Selain kesehatan fisik dan mental, kesehatan spiritual juga menjadi fokus utama dalam Islam. Hati yang sehat dan jiwa yang bersih dianggap sebagai kunci untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan seimbang. Islam mengajarkan bahwa hubungan yang kuat dengan Allah SWT, melalui ibadah, zikir, dan doa, adalah dasar untuk menjaga kesehatan spiritual. Ibadah seperti shalat dan puasa

⁷⁶ Zulkarnain & Siti Fatimah, "Kesehatan Mental Dan Kebahagiaan: Tinjauan Psikologi Islam," dalam *Jurnal Mawaizh: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, Vol. 10 No. 1 Tahun 2019, hal. 18-38.

⁷⁷ Farra Anisa Rahmania & Fuad Nashori, "Mediator Syukur dan Sabar pada Dukungan Sosial dan Stres Tenaga Kesehatan selama Pandemi Covid-19," dalam *Jurnal Psikologi Islam dan Budaya*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2021, hal. 81-94.

⁷⁸ Moh. Badrudin, "Hukum Berobat dalam Pandangan Islam," dalam *Jurnal Al Qalam*, Vol. 8 No. 2 Tahun 2020, hal. 1-20.

⁷⁹ Saji Sonjaya, "Pengobatan Tradisional dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kesehatan di Indonesia," dalam *Jurnal PEMULIAAN HUKUM*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2022, hal. 39-54.

tidak hanya membawa manfaat spiritual, tetapi juga memiliki efek positif pada kesehatan fisik dan mental.⁸⁰

Pembersihan hati dari sifat-sifat negatif seperti hasad (iri hati), takabur (sombong), dan amarah juga diajarkan sebagai bagian dari menjaga kesehatan spiritual. Dengan demikian, kesehatan spiritual menurut Islam tidak hanya berkaitan dengan ibadah ritual, tetapi juga dengan pengembangan karakter dan moralitas yang baik.⁸¹

Negara dalam Islam memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kesehatan rakyatnya. Pemimpin Muslim harus berupaya menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh warga. Negara juga diharapkan untuk memastikan kebersihan lingkungan, mencegah penyebaran penyakit, dan mempromosikan gaya hidup sehat melalui kebijakan publik yang berbasis pada nilai-nilai Islam.⁸²

Sejarah mencatat bahwa dalam peradaban Islam klasik, banyak rumah sakit dan pusat kesehatan didirikan oleh para khalifah dan penguasa Muslim untuk melayani kebutuhan kesehatan rakyat tanpa memandang status sosial. Institusi kesehatan ini memainkan peran penting dalam pengembangan ilmu kedokteran dan pengobatan, serta menjadi model bagi pelayanan kesehatan di dunia Barat di kemudian hari.⁸³

Islam memandang kesehatan sebagai bagian integral dari kehidupan yang seimbang dan harmonis. Dengan memberikan panduan yang komprehensif tentang menjaga kesehatan fisik, mental, dan spiritual, Islam menawarkan pendekatan holistik untuk kesejahteraan manusia. Melalui ajaran tentang kebersihan, pola makan yang sehat, moderasi, serta dukungan terhadap pengobatan dan kesehatan mental, Islam berupaya menciptakan masyarakat yang sehat secara menyeluruh. Selain itu, negara memiliki peran penting dalam menyediakan layanan kesehatan yang adil dan merata, sehingga setiap individu dapat

⁸⁰ Nur Ahmad, "Kerangka Dasar Membangun Kesehatan Spiritual Melalui Pendekatan Psikologi Islam," dalam *Jurnal STAIN Kudus*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2015, hal. 277-299.

⁸¹ Bisyr Abdul Karim & M. Hasibuddin, "Revolusi Mental Melalui Pendidikan Islam Berbasis Metode Tazkiyatun Nafs," dalam *Jurnal Education and Learning Journal*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2021, hal. 10-18.

⁸² Rifatul Hidayat, "Hak atas Derajat Pelayanan Kesehatan yang Optimal," dalam *Jurnal Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 16 No. 2 Tahun 2016, Hal. 127-134.

⁸³ Ifa Afida, "Konsep Kesejahteraan pada Masa Islam Klasik Dan Masa Modern," dalam *Jurnal Al-tsaman: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2020, hal. 117-134.

menikmati nikmat kesehatan yang merupakan anugerah dari Allah SWT.⁸⁴

6. Diskursus Riba

Riba adalah salah satu konsep yang sangat penting dan mendasar dalam ekonomi Islam. Istilah ini secara umum merujuk pada setiap keuntungan tambahan yang diperoleh dari pinjaman atau transaksi yang dianggap tidak adil dan eksploitatif. Dalam pandangan Islam, riba secara tegas dilarang, karena dianggap sebagai salah satu bentuk penindasan ekonomi dan eksploitasi yang merusak tatanan sosial dan moral masyarakat. Larangan riba telah menjadi salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam, dengan tujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan tidak eksploitatif.⁸⁵

Riba secara harfiah berarti “tambahan” atau “pertambahan” yang diperoleh tanpa usaha atau risiko nyata. Menurut para ulama, riba terjadi ketika ada keuntungan tambahan yang dihasilkan dari transaksi yang tidak berimbang atau tidak adil, khususnya dalam konteks pinjaman uang. Riba dibagi menjadi dua kategori utama: 1) Riba Fadl: Pertambahan nilai dalam pertukaran barang-barang yang sejenis, seperti pertukaran emas dengan emas atau gandum dengan gandum, tetapi dengan nilai yang tidak sama. Ini dianggap sebagai riba karena pertukaran barang-barang ini seharusnya dilakukan dengan nilai yang setara. 2) Riba Nasi'ah: Pertambahan yang timbul dari pinjaman atau kredit di mana peminjam harus membayar jumlah yang lebih besar dari yang ia pinjam sebagai imbalan untuk waktu yang lebih lama. Ini adalah bentuk riba yang paling sering dikaitkan dengan bunga dalam sistem perbankan konvensional.⁸⁶

Adapun ayat yang melarang terjadinya praktek riba ada pada penggalan Surah Ali Imran ayat 130 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

Dalam menafsirkan penggalan ayat 130 surah Âli ‘Imrân kalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat. Satu pendapat

⁸⁴ Ariza Fuadi, "Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Pandangan Islam dan Kapitalisme," dalam *Jurnal JESI: Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2016, hal. 13-32.

⁸⁵ Risanda Alirastra Budiantoro et al., "Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Historis," dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2018, hal. 1-13.

⁸⁶ M. Umer Chapra, "The Nature of Riba in Islam," dalam *Jurnal Millah: Journal of Religious Studies*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2008, hal. 1-16.

menyatakan, riba yang hanya dalam kadar yang sedikit saja hukumnya halal, namun golongan lain seperti Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho mengatakan bahwa riba meskipun sedikit adalah mutlak haram.⁸⁷ Hal ini lantaran meskipun ditetapkan dalam kadar yang sedikit saja, secara alami seiring bertambahnya waktu, riba yang sedikit itu lama kelamaan, pasti akan berubah menjadi berlipat ganda juga.⁸⁸

Riba tidak hanya berlaku pada pinjaman uang, tetapi juga dapat ditemukan dalam transaksi jual beli, leasing, atau pertukaran komoditas. Karena itu, riba dianggap sebagai masalah serius yang mengancam keadilan ekonomi dalam Islam. Larangan riba dalam Islam memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat. Ada beberapa hikmah yang dapat diambil dari larangan ini: pertama, riba menciptakan ketidakadilan ekonomi karena memungkinkan pihak yang meminjamkan uang untuk mendapatkan keuntungan tanpa menghadapi risiko yang sama seperti yang dihadapi oleh pihak yang meminjam. Dalam Islam, keuntungan hanya boleh diperoleh melalui usaha, kerja keras, dan risiko yang adil. Dengan melarang riba, Islam berusaha memastikan bahwa setiap keuntungan diperoleh melalui cara yang sah dan adil.⁸⁹

Kedua, riba sering kali mengakibatkan eksploitasi, terutama terhadap mereka yang berada dalam posisi lemah secara ekonomi. Peminjam yang miskin atau terdesak sering kali terjebak dalam lingkaran utang yang tak berkesudahan karena tingginya bunga yang harus mereka bayar. Islam melarang bentuk transaksi yang eksploitatif ini untuk melindungi masyarakat dari ketidakadilan.⁹⁰ Ketiga, Dengan melarang riba, Islam mendorong praktik-praktik ekonomi yang lebih adil dan manusiawi, seperti qard hasan (pinjaman tanpa bunga), zakat, sedekah, dan wakaf. Semua ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan sosial dan mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin.⁹¹

⁸⁷ Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manâr*, Lebanon: Dâr al-Ma'rifah, t.th: Jilid III, hAL. 93.

⁸⁸ Sayyid Quthb, *Fi Zhilâl al-Qurân*, t.tp: Dâr al-Fikr, t.th., Jilid IV hal. 74.

⁸⁹ Ummi Kalsum, "Riba dan Bunga Bank dalam Islam: Analisis Hukum dan Dampaknya terhadap Perekonomian Umat," dalam *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2014, hal. 97-83.

⁹⁰ Anwar Abbas, "Sistem Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Filsafat, Nilai-Nilai Dasar, dan Instrumental," dalam *Jurnal Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2012, hal. 111-125.

⁹¹ Aryati Arfah & Muhammad Arif. "Pembangunan Ekonomi, Keadilan Sosial dan Ekonomi Berkelanjutan dalam Perspektif Islam," dalam *Jurnal SEIKO: Journal of Management & Business*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2021, hal. 566-581.

Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh ekonomi Islam modern adalah bagaimana menangani masalah riba dalam konteks sistem perbankan global yang berbasis pada bunga. Sistem perbankan konvensional di seluruh dunia umumnya beroperasi dengan dasar bunga, di mana bank memberikan pinjaman kepada nasabah dengan imbalan bunga. Bunga ini dianggap sebagai riba dalam Islam, karena merupakan penambahan yang diperoleh tanpa usaha atau risiko nyata.⁹²

Sebagai tanggapan terhadap tantangan ini, berkembanglah sistem perbankan syariah, yang beroperasi tanpa bunga dan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Bank syariah menggunakan metode-metode yang sesuai dengan syariah, seperti *mudharabah* (kemitraan bagi hasil), *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan), dan *ijarah* (leasing). Sistem ini berusaha untuk menyediakan layanan keuangan yang adil dan etis sesuai dengan ajaran Islam.⁹³

Walaupun larangan riba diakui oleh sebagian besar umat Islam, praktiknya menghadapi tantangan dalam konteks ekonomi modern. Banyak negara Muslim masih menggunakan sistem perbankan konvensional yang berbasis bunga, dan adopsi penuh terhadap sistem keuangan syariah belum merata di seluruh dunia.⁹⁴

Kritik terhadap larangan riba sering kali berkaitan dengan kesulitan praktis dalam menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam dunia ekonomi global yang didominasi oleh kapitalisme dan sistem bunga. Beberapa pihak berpendapat bahwa perlu adanya penyesuaian terhadap interpretasi klasik riba untuk menyesuaikannya dengan realitas ekonomi saat ini. Di sisi lain, para pendukung ekonomi Islam berpendapat bahwa penerapan sistem keuangan yang berbasis syariah dapat menawarkan alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan bagi masyarakat.⁹⁵

Riba adalah salah satu konsep yang paling mendasar dalam ekonomi Islam dan secara tegas dilarang oleh Al-Qur'an dan Hadis. Larangan ini didasarkan pada prinsip keadilan dan pencegahan

⁹² Mufti Afif & Richa Angkita Mulyawisdawati, "Celah Riba pada Perbankan Syariah serta Konsekwensinya Terhadap Individu, Masyarakat dan Ekonomi," dalam *Jurnal Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, Vol. 11 No. 1 Tahun 2016, hal. 1-21.

⁹³ A. Taufiq Buhari, "Bank dan Riba: Implikasinya dalam Ekonomi Islam," dalam *Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2020, hal. 127-136.

⁹⁴ Abdul Haris Romdhoni et al., "Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga: Analisis Perdebatan Bunga Bank Termasuk Riba Atau Tidak," dalam *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, Vol. 13 No. 1 Tahun 2012, hal. 22-28.

⁹⁵ Hamdi Agustin, "Teori Bank Syariah," dalam *Jurnal JPS: Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2021, hal. 67-83; Chrisna Suhendi, "Kritik untuk Bank Syariah: Antara Harapan, Kenyataan dan Paradigma Rahmatan lil Alamin," dalam *Jurnal Fokus Ekonomi*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2008, hal. 52-58.

eksploitasi, dengan tujuan untuk menciptakan tatanan ekonomi yang lebih adil dan seimbang. Dalam upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip ini di dunia modern, muncul tantangan yang signifikan, terutama dalam konteks sistem perbankan dan keuangan global yang berbasis bunga. Namun, melalui inovasi seperti perbankan syariah, Islam berusaha menawarkan alternatif yang sesuai dengan ajaran agama dan dapat berfungsi dalam ekonomi global meskipun pada prakteknya hal ini dikritik pakar ekonomi karena sistem moneterinya hampir sama dengan bank konvensional.⁹⁶

G. Inklusifitas dalam Ekonomi

Secara etimologi, kata inklusivitas berasal dari bahasa Latin *inclusio* yang artinya menutup di dalam atau mengikutsertakan. Kata ini terbentuk dari kata dasar *includere* yang berarti “memasukkan” atau “menyertakan.” Dalam bahasa Indonesia, kata inklusivitas mengandung makna memasukkan atau melibatkan berbagai elemen yang berbeda ke dalam satu kesatuan yang lebih besar.⁹⁷ Secara terminologi, inklusivitas merujuk pada prinsip atau praktik di mana semua individu, kelompok, atau pihak, tanpa memandang perbedaan seperti suku, agama, ras, gender, status sosial, atau kemampuan, dilibatkan dan diberi akses yang setara dalam suatu sistem, organisasi, atau masyarakat. Inklusivitas berarti memastikan bahwa setiap orang mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan tidak ada yang dikecualikan atau didiskriminasi.⁹⁸ Secara epistemologi, inklusivitas dapat dipahami sebagai sebuah pendekatan pengetahuan yang mengakui keberagaman perspektif dan pengalaman sebagai sumber yang sah dalam pencarian kebenaran. Dalam konteks ini, inklusivitas menuntut keterbukaan terhadap berbagai sudut pandang, serta menghargai kontribusi dari individu atau kelompok yang mungkin secara tradisional diabaikan atau dimarginalisasi dalam proses pembentukan pengetahuan. Inklusivitas epistemologis menekankan pentingnya pluralisme dalam memahami dan merespons realitas yang kompleks.⁹⁹

Dalam paradigma ekonomi, inklusivitas merujuk pada suatu sistem ekonomi yang berusaha memastikan bahwa semua individu dan kelompok masyarakat, tanpa terkecuali, memiliki akses yang setara terhadap sumber daya

⁹⁶ Ja'far Nasution, "Memahami Tidak Syar'inya Bank Syariah," dalam *Jurnal Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2015, hal. 145-156.

⁹⁷ <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/inclusivity> diakses 16 Oktober 2024

⁹⁸ Merriam-Webster, "Inclusivity," dalam *Website* <https://www.merriam-webster.com/dictionary/inclusivity>. Diakses 16 Oktober 2024.

⁹⁹ Mireille Krischler, "What is Meant by Inclusion? On The Effects of Different Definitions on Attitudes Toward Inclusive Education," dalam *Jurnal European Journal of Special Needs Education*, Edisi 34 Tahun 2019, hal. 632-648.

ekonomi, peluang kerja, pendidikan, layanan keuangan, dan keuntungan dari pertumbuhan ekonomi. Inklusivitas ekonomi menekankan pentingnya partisipasi semua elemen masyarakat dalam proses produksi dan distribusi kekayaan, serta kebijakan ekonomi yang adil dan merata. Inklusivitas dalam ekonomi dapat diwujudkan melalui beberapa aspek, antara lain: 1) Akses yang Setara, 2) Keadilan Distribusi, 3) Penghapusan Hambatan Struktural, 4) Pemberdayaan Ekonomi. Dalam konteks ini, inklusivitas ekonomi berfungsi sebagai dasar untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil, di mana semua anggota masyarakat dapat memperoleh manfaat. Ekonomi yang inklusif tidak hanya berfokus pada pertumbuhan angka-angka makroekonomi, tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan pemerataan manfaat ekonomi di seluruh lapisan masyarakat.¹⁰⁰

Sebaliknya, ekstraktifitas merupakan konsep yang berkaitan dengan tindakan atau proses mengambil, mengeluarkan, atau mengeksploitasi sumber daya dari suatu sistem atau lingkungan untuk kepentingan tertentu, biasanya dengan cara yang intensif atau eksploitatif. Istilah ini sering digunakan dalam konteks ekonomi, politik, dan lingkungan. Secara etimologi, kata ekstraktifitas berasal dari kata Latin *extrahere* yang berarti menarik keluar atau mengambil dari. Dalam bahasa Indonesia, ekstraktifitas mengacu pada tindakan atau proses mengekstraksi sesuatu, biasanya sumber daya alam atau ekonomi. Secara terminologi, ekstraktifitas merujuk pada praktik atau kebijakan yang berfokus pada pengambilan sumber daya alam atau kekayaan dari suatu wilayah tanpa memperhatikan keberlanjutan atau kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Dalam konteks ekonomi, ekstraktifitas sering kali dikaitkan dengan industri seperti pertambangan, minyak, dan gas, di mana sumber daya alam diambil dari bumi dan dimanfaatkan untuk keuntungan ekonomi, namun sering kali meninggalkan dampak negatif seperti kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial. Secara epistemologi, ekstraktifitas dapat dipahami sebagai suatu pandangan yang melihat alam, atau sistem sosial, sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memenuhi kepentingan tertentu, tanpa mempertimbangkan keseimbangan jangka panjang atau dampak negatif bagi pihak lain. Ekstraktifitas epistemologis seringkali didasari oleh pandangan antroposentris yang menempatkan manusia atau kelompok tertentu sebagai pusat, dan mengabaikan dampak lingkungan atau kesejahteraan kolektif.¹⁰¹ Dalam paradigma ekonomi, ekstraktifitas merujuk pada sistem ekonomi yang didasarkan pada pengambilan sumber daya dari lingkungan dengan tujuan utama memaksimalkan keuntungan, sering kali tanpa memperhatikan aspek sosial atau

¹⁰⁰ Daron Acemoglu & James Robinson, *Why Nations Fail*, New York: Crown Publishing Group, 2012, hal. 302-334.

¹⁰¹ Merriam-Webster, "Extractive," dalam *Website* <https://www.merriam-webster.com/dictionary/extractive>. Diakses 16 Oktober 2024.

keberlanjutan. Ekonomi ekstraktif berfokus pada eksploitasi sumber daya seperti mineral, energi, atau tanah, dan cenderung menghasilkan ketimpangan kekayaan serta merugikan masyarakat lokal dan lingkungan alam. Ekonomi ekstraktif umumnya tidak berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang. Contohnya termasuk industri yang bergantung pada sumber daya tidak terbarukan, yang sering kali meninggalkan masalah lingkungan dan sosial setelah sumber daya tersebut habis dieksploitasi.¹⁰²

H. Tafsir Kontekstual

Tafsir kontekstual merupakan salah satu pendekatan modern dalam penafsiran Al-Qur'an yang berusaha memahami makna ayat-ayat suci dengan mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan budaya, serta kondisi kontemporer yang dihadapi oleh umat Islam. Pendekatan ini mencoba menjembatani ajaran normatif Al-Qur'an dengan realitas yang berubah dari waktu ke waktu, memastikan bahwa pesan Al-Qur'an tetap relevan dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan modern. Dalam makalah ini, akan dibahas definisi tafsir kontekstual, metode yang digunakan, serta pentingnya pendekatan ini bagi masyarakat Muslim masa kini.¹⁰³

Tafsir kontekstual didefinisikan sebagai upaya untuk memahami dan menjelaskan makna ayat-ayat Al-Qur'an dengan menghubungkan pesan teks dengan situasi sosial dan kondisi kontemporer. Berbeda dengan tafsir klasik yang seringkali berfokus pada pemaknaan literal atau normatif, tafsir kontekstual melibatkan analisis lebih mendalam terhadap *asbabun nuzul* (sebab turunnya ayat), serta berusaha menafsirkan pesan Al-Qur'an dengan cara yang sesuai dengan tantangan zaman. Dengan pendekatan ini, nilai-nilai ajaran Al-Qur'an dihidupkan kembali dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern, tanpa kehilangan esensinya.¹⁰⁴

Tafsir kontekstual sangat penting, terutama dalam menghadapi perubahan sosial yang cepat dan tantangan global seperti kesetaraan gender, hak asasi manusia, ekonomi global, dan politik. Isu-isu ini sering kali tidak dibahas secara eksplisit dalam teks Al-Qur'an, karena berbeda dengan konteks masyarakat Arab pada saat wahyu diturunkan. Oleh karena itu, penafsiran yang memperhitungkan kondisi sosial dan budaya modern sangat diperlukan agar umat Islam dapat menjawab persoalan-persoalan yang muncul di zaman sekarang. Dengan menggunakan tafsir kontekstual, umat Islam tidak hanya memahami makna

¹⁰² Daron Acemoglu & James Robinson, *Why Nations Fail*, hal. 134-152; 335-368.

¹⁰³ Muhammad Hasbiyallah, "Paradigma Tafsir Kontekstual: Upaya Membumikan Nilai-Nilai Al-Qur'an," dalam *Jurnal Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits*, Vol. 12 No. 1 Tahun 2018, hal. 21-50.

¹⁰⁴ Eni Zulaiha, "Tafsir Kontemporer: Metodologi, Paradigma dan Standar Validitasnya," dalam *Jurnal Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2017, hal. 81-94.

literal ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi juga mampu menyesuaikan pesan moralnya dengan perkembangan zaman. Sebagai contoh, isu-isu seperti kesetaraan gender atau keadilan ekonomi dapat dipahami dalam kerangka yang lebih luas, dengan tetap merujuk pada prinsip-prinsip dasar Al-Qur'an seperti keadilan, kebijaksanaan, dan persaudaraan.¹⁰⁵

Metode tafsir kontekstual melibatkan beberapa tahapan penting. Pertama, tafsir ini dimulai dengan menganalisis *asbabun nuzul*, yaitu konteks sejarah atau alasan turunnya ayat. Pemahaman konteks ini penting untuk mengetahui latar belakang sosial dan politik di sekitar turunnya wahyu. Kedua, tafsir kontekstual mencoba mengidentifikasi prinsip-prinsip universal dalam Al-Qur'an yang dapat diterapkan lintas waktu dan ruang. Ketiga, tafsir ini menggunakan pendekatan interdisipliner, yang melibatkan ilmu sosial, filsafat, hukum, dan politik untuk menafsirkan ayat-ayat sesuai dengan realitas kontemporer. Misalnya, dalam menafsirkan ayat tentang peran perempuan dalam masyarakat, penafsir kontekstual akan memperhatikan konteks sosio-kultural pada zaman Nabi, lalu mencari relevansinya dalam perjuangan kesetaraan gender di era modern. Ini mencakup pemahaman bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat normatif dapat diterapkan dengan fleksibilitas, selama prinsip-prinsip dasarnya tetap terjaga.¹⁰⁶

Meskipun tafsir kontekstual menawarkan solusi yang relevan untuk zaman modern, pendekatan ini juga menghadapi tantangan. Kritik utama datang dari kalangan konservatif yang menilai bahwa pendekatan ini terlalu liberal dan dapat menyimpang dari makna literal teks Al-Qur'an. Selain itu, sulit untuk mencapai kesepakatan tentang sejauh mana tafsir kontekstual dapat diterapkan tanpa mengorbankan otoritas teks atau tradisi hukum Islam yang sudah mapan. Tafsir kontekstual memberikan kontribusi penting dalam menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi oleh umat Islam saat ini. Pendekatan ini memungkinkan pesan Al-Qur'an untuk terus relevan dalam kehidupan modern tanpa mengabaikan esensi dari ajaran Islam. Meskipun masih ada tantangan dalam hal penerimaan dan aplikasi praktisnya, tafsir kontekstual menawarkan cara baru dalam memahami dan menerapkan ajaran Al-Qur'an di tengah kompleksitas kehidupan kontemporer.¹⁰⁷

I. Metode Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed

¹⁰⁵ Thoriq Aziz Jayana, "Model Interpretasi Alquran dalam Pendekatan Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed," dalam *Jurnal AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2019, hal. 37-52.

¹⁰⁶ Lien Iffah Naf'atu Fina, "Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed: Sebuah Penyempurnaan Terhadap Gagasan Tafsir Fazlur Rahman," dalam *Jurnal Hermeneutik*, Vol. 9 No. 1 Tahun 2015, hal. 65-89.

¹⁰⁷ Hatib Rachmawan, "Hermeneutika Al-Qur'an Kontekstual: Metode Menafsirkan Al-Qur'an Abdullah Saeed," dalam *Jurnal Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, Vol. 9 No. 2 Tahun 2013, hal. 148-161.

Abdullah Saeed adalah seorang sarjana Islam kontemporer yang dikenal karena pendekatan *tafsir kontekstual* yang disebut sebagai *Ethico-Legal Approach*. Dalam pendekatan ini, Saeed menekankan pentingnya memahami ayat-ayat hukum Al-Qur'an (ayat-ayat yang berisi norma-norma perilaku) dengan mempertimbangkan konteks sejarah dan sosial saat ayat-ayat tersebut diturunkan serta realitas kontemporer umat Islam saat ini. Berikut adalah beberapa prinsip utama dalam metode tafsir kontekstual Saeed:¹⁰⁸

1. Pemahaman Tekstual: Analisis Literal dan Kontekstual

Langkah pertama dalam metode tafsir Saeed adalah melakukan analisis tekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Penafsir harus memahami makna literal ayat dan memperhatikan *asbabun nuzul* (sebab-sebab turunnya ayat). Pada tahap ini, fokusnya adalah mengetahui kondisi sosial, politik, dan budaya yang melatarbelakangi turunnya ayat-ayat tersebut, karena hal ini sangat mempengaruhi pemahaman terhadap hukum dan pesan moral yang terkandung di dalamnya.

2. Memahami Konteks Historis

Setelah memahami teks, penafsir harus mengaitkan pesan Al-Qur'an dengan konteks sejarah di masa wahyu. Abdullah Saeed menekankan bahwa banyak ayat hukum dalam Al-Qur'an terkait erat dengan kondisi masyarakat Arab pada abad ke-7. Pemahaman terhadap konteks historis ini penting untuk membedakan antara ajaran-ajaran universal yang berlaku sepanjang waktu dan ajaran-ajaran yang spesifik untuk kondisi saat itu.

3. Identifikasi Prinsip-Prinsip Etis Universal

Pada tahap ini, Saeed mendorong untuk mengidentifikasi nilai-nilai etis dan prinsip-prinsip moral yang bersifat universal dari ayat-ayat tersebut. Prinsip-prinsip ini mencakup keadilan, kesetaraan, kehormatan manusia, kasih sayang, dan kepedulian sosial. Prinsip-prinsip universal ini dianggap lebih luas dari aturan-aturan legal spesifik yang mungkin relevan hanya dalam konteks sejarah tertentu.

4. Penerapan pada Konteks Kontemporer

Tahap selanjutnya adalah menerjemahkan prinsip-prinsip etis dan hukum yang ditemukan dalam ayat-ayat Al-Qur'an ke dalam konteks kehidupan kontemporer. Di sini, Saeed menekankan bahwa ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum sosial dan perilaku dapat mengalami reinterpretasi agar relevan dengan perkembangan sosial, budaya, dan politik saat ini. Misalnya, ayat tentang hak-hak perempuan dalam

¹⁰⁸ Abdullah Saeed, "Some Reflections on The Contextualist Approach to Ethico-Legal Texts of The Quran," dalam *Jurnal Bulletin of the School of Oriental and African Studies*, Vol. 71 No. 2 Tahun 2008, hal. 221-237.

masyarakat abad ke-7 dapat ditafsirkan ulang dalam konteks modern yang lebih menekankan pada kesetaraan gender.

5. Keterbukaan terhadap Dialog Interdisipliner

Saeed juga menyarankan agar penafsir terbuka terhadap ilmu pengetahuan modern dan disiplin ilmu lain seperti sosiologi, filsafat, hukum, dan politik. Pemahaman interdisipliner ini memungkinkan para penafsir untuk menggali lebih dalam implikasi sosial dan moral dari ajaran Al-Qur'an, serta memformulasikan hukum Islam yang relevan dengan dunia modern.

6. Keseimbangan Antara Tradisi dan Modernitas

Metode tafsir kontekstual Saeed mencoba mencari keseimbangan antara penghormatan terhadap tradisi Islam klasik dan kebutuhan untuk menafsirkan ajaran agama dalam konteks zaman modern. Ini bukan berarti mengabaikan ajaran-ajaran yang sudah mapan, tetapi lebih kepada memperbarui pemahaman dengan mempertimbangkan perubahan sosial yang terjadi saat ini.

7. Tujuan Sosial dan Kesejahteraan Manusia

Akhirnya, Saeed menekankan bahwa tujuan utama dari hukum dan etika dalam Islam adalah mencapai kesejahteraan manusia (masalah) dan masyarakat yang adil. Oleh karena itu, setiap penafsiran hukum atau aturan etis dalam Al-Qur'an harus dilihat melalui lensa kepentingan publik dan kesejahteraan sosial.

Metode *Ethico-Legal* Abdullah Saeed menekankan bahwa penafsiran Al-Qur'an harus lebih berfokus pada prinsip-prinsip etis yang universal daripada aturan legal yang kaku. Dengan memahami konteks sejarah, mengidentifikasi nilai-nilai etis, dan mengadaptasinya ke dalam konteks modern, pendekatan ini bertujuan untuk membuat ajaran Islam relevan dengan dunia kontemporer. Pendekatan ini menghadirkan tafsir yang dinamis dan inklusif, yang memungkinkan umat Islam untuk mempertahankan relevansi ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan modern tanpa mengabaikan nilai-nilai inti yang terkandung di dalamnya.¹⁰⁹

J. Kontekstualisasi Ayat-Ayat Mata Uang

Dalam Al-Qur'an, ditemukan banyak sekali ayat-ayat yang menyinggung tentang mata uang. Adapun mata uang yang disebutkan di dalam Al-Qur'an hampir semuanya diwakili oleh kata *dînâr*, dirham, emas dan perak. Penyebutan kata ini dilatarbelakangi oleh peradaban masyarakat arab kala itu yang menggunakan *dînâr*, dirham, emas dan perak dalam perniagaan sehari-hari

¹⁰⁹ Abdullah Saeed & Ali Akbar, "Contextualist Approaches and the Interpretation of the Qur'an," dalam *Jurnal Religions*, Vol. 12 No. 7 Tahun 2021, hal. 527-583.

sehingga dengan konteks historis tersebut maka Al-Quran merepresentasikannya dengan demikian.¹¹⁰

Adapun kata *dînâr* disebutkan di Al-Qur'an pada Surah Yusuf ayat 20 yang berbunyi:

وَشَرُّهُ بِثَمَنٍ مِّنْ بَحْسٍ دَرَاهِمٍ مَّعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

“Mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga murah, (yaitu) beberapa dirham saja sebab mereka tidak tertarik kepadanya.”

Adapun kata *dirham* disebutkan pada Surah Ali Imran ayat 75 yang berbunyi:

وَمِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِطَارٍ يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدُّ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِينِ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

“Di antara Ahlulkitab ada orang yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Akan tetapi, ada (pula) di antara mereka orang yang jika engkau percayakan kepadanya satu dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, “Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang umi.” Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.”

Adapun kata *emas* dan *perak* disebutkan delapan kali dalam Al-Qur'an yang salah satunya terdapat pada Surah At-Taubah ayat 34 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar ‘gembira’ kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.”

Adapun ulama-ulama seperti al-Ghozâlî dan Ibn Taimiyah yang memberikan argumentasi terhadap mata uang yaitu bahwa *dînâr*, *dirham*, *emas* dan *perak* bahwa hal tersebut merupakan alat tukar yaitu sebagai kiasan dari frasa alat tebus yang secara implisit menyiratkan bahwa *dînâr*, *dirham*, *emas* dan *perak* merupakan alat tukar menyandarkan argumentasinya pada Surah Ali Imran ayat 91¹¹¹ yang berbunyi:

¹¹⁰

¹¹¹ Muhammad Irkham Firdaus, "The Concept of Money According to the Thought of Ibn Taymiyah and Imam Ghazali and its Impelemation in the Economic Field," dalam *Jurnal Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2020, hal. 120-135

إِنَّ الدِّينَ كَفْرُهُمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ

“*Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sebagai orang-orang kafir tidak akan diterima (tebusan) dari seseorang di antara mereka sekalipun (berupa) emas sepenuh bumi, sekiranya dia hendak menebus diri dengannya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak ada penolong bagi mereka.*”

Memang pada faktanya pandangan al-Ghazâlî dan Ibn Taimiyyah ini difabrikasi kembali oleh hampir semua cendekiawan Islam yang menekuni bidang ekonomi.¹¹² Namun pandangan yang menafsirkan mata uang adalah merupakan alat tukar ini bisa dibenarkan dan disalahkan oleh beberapa alasan. Alasan bahwa penafsiran ini dibenarkan adalah didukung oleh fakta bahwa ekonomi sebelum abad 19 Masehi mayoritas menggunakan mata uang yang bukan merupakan *fiat currency*.¹¹³ Preskripsi cendekiawan muslim saat itu melihat fenomena ekonomi yang hanya terbatas kepada analisa bahwa dalam mata uang yang berlaku dimanapun adalah menggunakan logam mulia dan sejenisnya yang tentu hal tersebut berlaku jika digunakan dimana-mana karena dia memiliki nilai intrinsik yang jelas.¹¹⁴

Hal ini diperkuat oleh sebuah fakta sosiologis bahwa mata pencaharian mayoritas bangsa arab adalah dengan berdagang dan fakta historis-ekonomis bahwa dalam peradaban Islam pada masa Rasulullah dimana ayat-ayat tentang mata uang ini turun ditemukan bahwa disana tidak ada satupun kabilah yang bisa melakukan peran sebagai pencipta uang karena iklim kehidupan saat itu yang nomaden dan anarkis. Maka menjadi wajar bahwa uang yang mereka dapatkan merupakan hasil tukar baik barang ataupun jasa sehingga hal ini berpengaruh kepada pemberian definisi akademisi Islam klasik yang menyimpulkan bahwa mata uang baik *dînâr*, *dirham*, emas dan perak merupakan alat tukar.¹¹⁵

Dalam analisa berurutan dalam sebuah paradigma, jika mata uang didefinisikan sebagai alat tukar hal ini akan membuat konsekuensi teoretis yang lain dimana definisi alat tukar ini mengantarkan pemahaman ekonomi masuk

¹¹² Asyari Hasan et al., "The Concept of Money in an Islamic Perspective," dalam *Jurnal EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam*, Vol. 10 No. 2 Tahun 2023, hal. 194-207; Ziauddin Ahmad et al., "Money and Banking in Islam," dalam *Jurnal Res. Islamic Econ*, Vol. 3 No. 1 Tahun 1985, hal. 93-99; Hendri Hermawan Adinugraha, "How Does Money Function in The View Of Islamic Economics?" dalam *Jurnal PROFJES: Profetik Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No.1 Tahun 2024, hal. 1-12;

¹¹³ L. Randall Wray, *What is Money?*, New York: Routledge, 2002. 52-76.

¹¹⁴ G Gene W. Heck, *Money, Power and Politics in Early Islamic Syria*, New York: Routledge, 2016, hal. 97-124

¹¹⁵ Abdul Azim Islahi, "Mercantilism and the Muslim States: Lessons from the history," dalam *Jurnal Hamdard Islamicus*, Vol. 32 No. 3 Tahun 2008, hal. 23-43.

kepada paradigma ortodoks seperti yang dijelaskan pada bab II. Namun dengan fakta saat ini bahwa sistem moneter telah jauh mengalami perubahan dengan digantikannya mata uang yang berupa *dînâr*, *dirham*, emas dan perak menjadi fiat currency menimbulkan sebuah anomali kuat yang merubuhkan bangunan paradigma sebelumnya.¹¹⁶

Pasca ditemukannya temuan empirik oleh Hudson et al yang secara arkeologis membuktikan bahwa di era babilonia kuno bahwa dimana ada suatu otoritas yang berdiri secara otonom maka uang yang diciptakan -terlepas dari bentuknya- adalah bersifat kredit.¹¹⁷ Juga ditambah dengan berkembangnya institusi ekonomi seperti lahirnya bank sentral dan peralihan bentuk uang menjadi *fiat currency* semakin menguatkan bahwa terjadi sebuah jarak antara pemahaman dari mufassir maupun cendekiawan Islam yang meyakini bahwa uang adalah alat tukar dengan realita bahwa uang adalah satuan hitung.¹¹⁸

Definisi satuan hitung ini memiliki signifikansi korelasi positif pada paradigma heterodox yang memberikan dorongan pada ranah praktis bahwa pencipta uang (otoritas tertinggi/negara) mampu secara domestik untuk membeli apapun termasuk pengangguran sehingga arah kebijakan yang menuju kesejahteraan secara makroskopis mampu terakomodasi dengan paradigma ini.¹¹⁹

Dalam Al-Qur'an, konsep ekonomi heterodoks secara eksplisit mungkin tidak disebutkan, namun beberapa ayat dapat diinterpretasikan untuk mendukung pendekatan heterodoks terhadap ekonomi. Pendekatan ini biasanya melibatkan pengakuan atas peran negara, intervensi sosial, dan redistribusi kekayaan, dengan fokus pada keadilan sosial, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan ekonomi yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang dijelaskan sebelumnya.. Salah satu ayat yang sering dikaitkan dengan prinsip-prinsip keadilan ekonomi dalam perspektif Islam adalah terdapat pada Surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

"...supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu..."

Surat Al Hasyr ayat 7 juga menegaskan prinsip yang mengatur pembagian kekayaan dalam sistem kehidupan islam. Al Quran telah menetapkan aturan tertentu demi mencapai keadilan dalam pendistribusian kekayaan dalam

¹¹⁶ L. Randall Wray, *Political Economy for the 21st Century*, New York: Routledge, 2015, hal. 125-148.

¹¹⁷ Michael Hudson, *...and forgive them their debt: Lending, Foreclosure and Redemption from Bronze Age Finance to the Jubilee Year*, Dresden: ISLET-Verlag, 2018, hal. 25-28.

¹¹⁸ Michael Hudson, "Origins of Money and Interest: Palatial Credit, Not Barter," dalam S. Battilossi et al., *Handbook of the History of Money and Currency*, Singapore: Springer, 2020. https://doi.org/10.1007/978-981-13-0596-2_1 diakses 16 Oktober 2024.

¹¹⁹ William Mitchel & Thomas Fazi, *Reclaiming The State: A Progressive Vision of Sovereignty for a Post-Neoliberal World*, London: Pluto Press, hal. 172-220.

masyarakat. Dalam perspektif Islam, pengertian distribusi memiliki makna yang luas. Salah satunya yaitu sebagai peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar diantara golongan tertentu saja. Kata distribusi disamakan dengan kata duulah dalam penggalan ayat surah Al-Hasyr ayat 7, yaitu pada kalimat "*kay lâ yakûna dûlatan baina al-aghniya' minkum*". Dalam kaidah bahasa arab, secara etimologi kata duulah berarti terus berputar atau perpindahan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan secara terminologi kata duulah berarti suatu proses perputaran atau peredaran yang bersifat konstan tanpa ada hambatan.¹²⁰

Dalam kitab tafsir Fathul Qadir, Abu Amru bin Al 'Ala berkata "*dûlatan*" dengan fathah artinya harta yang beredar, sedangkan dengan dhammah artinya perbuatan. Abu Amrubin Al A'la berkata ad-duulah adalah nama bagi sesuatu yang diputar, yaitu harta. Menurut Asy Syauckani makna *al-dûlah* dimaknakan dengan "lingkaran" yang terdapat di dalam satu kaum. Mereka membentuk satu komunitas yang tertutup. Suatu kali harta tersebut dikuasai oleh seseorang dan lain kali dimanfaatkan oleh yang lain. Bisa juga artinya harta tersebut hanya dibagi kepada orang-orang yang berada di lingkaran tersebut (Asy-Syauckani, hal 213).¹²¹

Menurut Syeikh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Munir, Kata *dûlah* maksudnya adalah mutadaawilan yaitu berputar atau beredar. Ad-Duulah adalah harta yang berputar dan beredar, sedangkan ad-Daulah artinya adalah keadaan yang berputar silih berganti. Jadi, kata duulah dalam surah Al Hasyr ayat 7 dijelaskan maknanya adalah beredar, yaitu beredarnya harta fa'i kepada orang-orang yang sudah ditentukan dalam ayat ini agar supaya peredaran dan perputaran harta tidak hanya terbatas di antara orang-orang kaya, sementara kaum fakir miskin tidak ikut mendapatkan apa-apa darinya sehingga menyebabkan orang-orang miskin tersingkirkan oleh orang-orang kaya dan mereka hanya membaginya di antara mereka. Ini adalah prinsip pemerataan kekayaan kepada semua kalangan dan menjamin terciptanya likuiditas bagi semuanya.¹²²

Dalam kitab tafsir Hidayatul Insan bi Tafsiril Quran, Abu Yahya Marwan bin Musa menjelaskan bahwa Allah SWT menetapkan fa'i untuk kelima golongan ini agar harta tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja.

¹²⁰ Siti Solekha, "Tafsir Surat Al-Isra' ayat 29-30 dan Al-Hasyr Ayat 7: Perspektif Ilmu Ekonomi," dalam *Jurnal Ulumul Syar'i*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2017, hal. 1-15.

¹²¹ Syahrul Amsari et al., "Analisis Makna Distribusi Kekayaan Perspektif Ekonomi Islam dalam Pandangan Al-Qur'an dan Hadits," dalam *Jurnal Ekonomis: Journal of Economics and Business*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2023, hal. 1403-1412.

¹²² Muhamat Nur Maarif & Yusuf Wisnu Nugroho, "Law Of Ihtikar Perspective Surat Al-Hasyr Verse 7," dalam *Proceeding Of ICCoLaSS: International Collaboration Conference on Law, Sharia and Society*. Vol. 2 No. 1 Tahun 2023, hal. 181-199.

Karena jika Dia tidak menetapkan demikian, maka harta itu hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, sedangkan orang-orang lemah tidak memperolehnya dan tentu hal itu akan menimbulkan kerusakan yang besar yang hanya diketahui oleh Allah SWT, sebagaimana mengikuti perintah Allah dan syariat-Nya terdapat banyak masalah.¹²³ Dalam tafsir Al-Kasasyaf, Zamakhsyari menafsirkan ayat ini bahwa Allah SWT memberi aturan bagaimana seharusnya harta fa'i didistribusikan. Setidaknya ada enam kelompok yang berhak mendapatkan harta tersebut, yaitu untuk Allah, Rasul, kerabat dekat, anak yatim, orang miskin dan Ibnu sabil. Khusus bagian Allah, satu perenam dari harta fa'i tersebut didistribusikan ke fasilitas publik seperti pembangunan masjid, madrasah dan lain-lain.¹²⁴

Sedangkan menurut M Quraish Shihab dalam karyanya Tafsir Al-Misbah menjelaskan tentang makna daulah. Menurutnya, daulah adalah sesuatu yang beredar dan diperoleh secara silih berganti. Harta benda hendaknya jangan hanya menjadi milik dan kekuasaan sekelompok manusia, tetapi ia harus beredar sehingga dinikmati oleh semua anggota masyarakat. Penggalan ayat ini bukan saja membatalkan tradisi masyarakat jahiliyah, di mana kepala suku mengambil seperempat dari perolehan harta lalu membagi selebihnya sesuka hati —Bukan saja membatalkan itu— tetapi juga ia telah menjadi prinsip dasar Islam dalam bidang ekonomi dan keseimbangan peredaran harta bagi segenap anggota masyarakat.¹²⁵

Ayat ini menegaskan bahwa kekayaan tidak boleh hanya berputar di kalangan elite atau orang-orang kaya atau dalam pengertian isyhari adalah tidak boleh terkristalisasi pada golongan masyarakat tertentu., melainkan harus ada pemerataan dalam distribusi sumber daya. Dalam tafsir kontekstual, ini dapat dihubungkan dengan ide bahwa sistem ekonomi harus menciptakan keseimbangan sosial dan kesejahteraan bersama, sesuatu yang ditekankan dalam ekonomi heterodoks.¹²⁶

Baqir al-Sadr dalam bukunya *Iqtishâduna* membahas prinsip-prinsip ekonomi Islam yang meliputi pengelolaan harta kekayaan, keadilan distribusi, dan perlunya intervensi negara untuk memastikan keseimbangan ekonomi dan keadilan sosial. Gagasannya sangat berhubungan dengan ekonomi heterodoks yang menolak ide-ide *laissez-faire* kapitalisme murni, tetapi mendukung peran

¹²³ Syahrul Amsari et al., "Analisis Makna Distribusi Kekayaan Perspektif Ekonomi Islam dalam Pandangan Al-Qur'an dan Hadits," hal. 1403-1412.

¹²⁴ R. Yunus al-Misri, *Al-I'jaz Al-Iqtishâdi li Al-Qur'an Al-Karim*, Damaskus: Dar Al-Qalâm, 2005

¹²⁵ Mulyana Fitri, "Redistribusi Pendapatan dan Kekayaan: Telaah Surah Al-Hasyr ayat 7," dalam *Jurnal Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2024, hal. 68-78.

¹²⁶ Faiha Fikriyah & Rachmad Risqy Kurniawan, "Distribusi kekayaan dalam Perspektif Al-Qur'an Surah Al-Hasyr ayat 7," dalam *Jurnal Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 10 No. 10 Tahun 2022, hal. 1-15.

aktif pemerintah dalam perekonomian. Ia menganjurkan bahwa ekonomi harus berlandaskan pada prinsip-prinsip yang menekankan keadilan dan kesetaraan, bukan hanya efisiensi pasar.¹²⁷

Al-Faruqi menekankan pentingnya sistem ekonomi yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan bersama dalam karyanya *Islamization of Knowledge*. Ia mengembangkan gagasan bahwa Islam mengajarkan sistem ekonomi yang menghindari monopoli dan ketimpangan ekonomi. Pemikirannya mendukung intervensi negara dan kebijakan redistribusi untuk menghindari akumulasi kekayaan oleh segelintir orang, selaras dengan pandangan heterodoks dalam ekonomi.¹²⁸

Masudul Alam Choudhury adalah salah satu pemikir kontemporer yang mengkaji ekonomi Islam dalam konteks teori heterodoks. Dalam karyanya, *Islamic Economics and Finance: An Epistemological Inquiry*, Choudhury menjelaskan bahwa ekonomi Islam tidak kompatibel dengan model ekonomi neoklasik yang terlalu fokus pada rasionalitas individual dan pasar bebas. Sebaliknya, ia mengusulkan model ekonomi berbasis tauhid (kesatuan Tuhan), yang berfokus pada integrasi sosial, ekonomi, dan spiritual, serta menekankan peran negara dan kolektivitas dalam menciptakan kesejahteraan bersama merupakan hal yang sangat fundamental yang menuntut bahwa suatu kelompok masyarakat yang ingin menjunjung nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam didorong untuk mampu mengakomodirnya baik dari segi teoretis dan juga secara praktis.¹²⁹

Maka dalam hal ini, penafsiran-penafsiran klasik terkait mata uang yang menjadi dasar fondasi dari berdirinya suatu teori dan paradigma layak untuk diuji kembali untuk menemukan penafsiran mana yang secara teoretis paling valid, koheren dan reliabel terhadap realita saat ini. Untuk itu, tawaran dari pada penelitian ini untuk mendekonstruksi penafsiran lama tentang mata uang yang hingga saat ini didefinisikan sebagai alat tukar -fondasi paradigma ortodoks- dan merekonstruksinya menjadi satuan unit hitung perlu dilakukan dalam upaya menjaga prinsip dasar Islam bahwa agama Islam merupakan Agama yang *shâlih likulli zaman wa makan*.

¹²⁷ Agus Waluyo Nur, "Membangun Sistem Ekonomi Berkeadilan: Telaah atas Pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr," dalam *Jurnal Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2011, hal. 1-21.

¹²⁸ Ilyas Ba-Yunus, "Al Faruqi and Beyond: Future Directions in Islamization of Knowledge," dalam *Jurnal American Journal of Islam and Society*, Vol. 5 No. 1 Tahun 1988, hal. 13-28.

¹²⁹ Masudul Alam Choudhury, "Monetary and Fiscal Complementarities in Socioeconomic Sustainability," dalam T. Mukhlisin Azid et al., *Monetary Policy, Islamic Finance, and Islamic Corporate Governance: An International Overview*, Cambridge: Emerald Publishing Limited, 2021, hal. 85-111.

BAB IV

SINTESIS PARADIGMA EKONOMI ORTODOKS, HETERODOKS DAN PRINSIP EKONOMI ISLAM

A. Titik Temu dan Titik Seteru Paradigma Heterodoks, Ortoodoks

Dalam diskursus ekonomi, terdapat dua paradigma besar yang sering dibahas dan dianalisis secara mendalam yaitu paradigma ekonomi ortodoks dan heterodoks. Paradigma ortodoks umumnya merujuk pada pendekatan ekonomi neoklasik,¹ yang menekankan pada pasar bebas,² rasionalitas individu,³ efisiensi alokasi sumber daya,⁴ dan keseimbangan pasar.⁵ Di sisi lain, paradigma heterodoks merupakan payung dari berbagai aliran ekonomi yang tidak sepenuhnya mengikuti prinsip ekonomi neoklasik, termasuk ekonomi Post-Keynesian, Institusional, Marxis, Feminis, Ekologis, dan lainnya.⁶ Kedua pendekatan ini memiliki titik temu dalam beberapa aspek, tetapi lebih sering menunjukkan perbedaan signifikan yang memengaruhi kebijakan ekonomi dan cara pandang terhadap isu-isu ekonomi global.

Adapun titik Temu antara Ekonomi Ortodoks dan Heterodoks adalah:

¹ William Mitchell et al, *Macroeconomics*, hal. 432-436.

² Alvin I. Goldman & James C. Cox. "Speech, Truth, and The Free Market for Ideas." Dalam Jurnal *Legal Theory*, Vol. 2 No.1 Tahun 1996, hal. 1-32.

³ Milan Zafirovski, "The Rational Choice Generalization of Neoclassical Economics Reconsidered: Any Theoretical Legitimation for Economic Imperialism?," dalam Jurnal *Sociological Theory*, 18.3 (2000): 448-471.

⁴ Cass R. Sunstein, *Free Markets and Social Justice*, New York: Oxford University Press, 1997, hal. 271-297.

⁵ Hugh M. Neary, "Equilibrium Structure in an Economic Model of Conflict," dalam Jurnal *Economic Inquiry*, Vol. 35 No. 3 Tahun 2007, hal. 480-494.

⁶ William Mitchell et al, *Macroeconomics*, hal. 437-442.

1. Tujuan Akhir yaitu Kesejahteraan Ekonomi

Meskipun terdapat perbedaan mendasar dalam pendekatan analitis dan teoritis, baik ekonomi ortodoks maupun heterodoks pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Keduanya setuju bahwa perekonomian harus berfungsi untuk memastikan akses masyarakat terhadap sumber daya, kesempatan kerja, dan standar hidup yang lebih baik. Para ekonom dari kedua paradigma setuju bahwa masalah kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan ekonomi adalah isu yang perlu ditangani, meskipun cara mereka mendekatinya berbeda.⁷

2. Pengakuan Terhadap Peran Pasar

Walaupun para ekonom heterodoks sering kali kritis terhadap pasar bebas dan mekanisme pasar secara keseluruhan, mereka tidak sepenuhnya menolak pentingnya pasar. Bahkan dalam pendekatan heterodoks yang lebih radikal, seperti ekonomi Marxis atau institusional, terdapat pengakuan bahwa pasar memainkan peran dalam distribusi sumber daya. Paradigma heterodoks mungkin mengusulkan regulasi atau campur tangan yang lebih besar dari pemerintah, tetapi mereka tidak sepenuhnya menolak pentingnya pasar dalam proses ekonomi.⁸

3. Teori Keuangan dan Krisis

Kedua paradigma setuju bahwa sistem keuangan memainkan peran yang sangat penting dalam ekonomi modern. Dalam menghadapi krisis keuangan global seperti yang terjadi pada tahun 2008, baik ekonom ortodoks maupun heterodoks menyetujui bahwa ketidakstabilan dalam sektor keuangan dapat menimbulkan dampak luas terhadap ekonomi riil. Namun, analisis mereka tentang penyebab krisis dan solusi yang diusulkan sering kali berbeda, dengan para ekonom heterodoks lebih sering menekankan peran ketidakseimbangan struktural dan kegagalan regulasi.⁹

Adapun Titik Seteru antara Ekonomi Ortodoks dan Heterodoks adalah:

1. Pandangan tentang Rasionalitas Individu

⁷ Éric Tymoigne, "Minsky and Economic Policy: Keynesianism All Over Again?," Dimitri B. Papadimitrou & L. Randall Wray, *The Elgar Companion to Hyman Minsky*, Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2010, hal. 47-83.

⁸ Ilker Aslan, "Employer of Last Resort as A New 'New Deal': A few Thoughts on Turkey," dalam Jurnal *American Review of Political Economy*, Vol. 16 No. 2 Tahun 2021, hal. 1-14. <https://doi.org/10.38024/arpe.235> diakses 2 Oktober 2024.

⁹ Marshall Auerback et al., "What would Minsky Do?," dalam Dimitri B. Papadimitrou & L. Randall Wray, *The Elgar Companion to Hyman Minsky*, Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2010, hal. 117-133.

Salah satu perbedaan utama antara ekonomi ortodoks dan heterodoks adalah pandangan tentang perilaku individu dalam perekonomian. Ekonomi ortodoks, khususnya aliran neoklasik, berasumsi bahwa individu adalah agen rasional yang selalu bertindak berdasarkan informasi sempurna untuk memaksimalkan utilitas mereka sendiri. Asumsi ini menjadi dasar bagi banyak model ekonomi neoklasik yang fokus pada keseimbangan pasar dan efisiensi alokasi sumber daya.¹⁰

Sebaliknya, ekonomi heterodoks lebih skeptis terhadap asumsi rasionalitas sempurna. Para ekonom heterodoks, khususnya dari aliran ekonomi perilaku, institusional, dan feminis, berpendapat bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, psikologis, dan budaya yang kompleks. Mereka mengkritik pendekatan neoklasik karena cenderung menyederhanakan perilaku manusia menjadi hitungan matematis yang tidak realistis.¹¹

2. Peran Negara dalam Ekonomi

Dalam paradigma ortodoks, khususnya dalam ekonomi neoklasik dan liberal klasik, peran negara dalam ekonomi dipandang minimal. Negara seharusnya hanya berfungsi untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan, sementara pasar bebas dibiarkan bekerja untuk mencapai efisiensi alokasi sumber daya. Pandangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa intervensi negara cenderung menyebabkan inefisiensi dan distorsi pasar.¹²

Di sisi lain, paradigma heterodoks menekankan pentingnya peran negara dalam mengatur dan mengendalikan perekonomian. Para ekonom Keynesian, misalnya, percaya bahwa negara harus campur tangan dalam ekonomi untuk mengatasi siklus resesi dan inflasi melalui kebijakan fiskal dan moneter. Ekonom institusional dan Marxis bahkan berpendapat bahwa negara harus berperan lebih jauh dalam mendesain ulang struktur ekonomi untuk mengurangi ketimpangan dan memastikan distribusi kekayaan yang lebih adil.¹³

3. Teori Pasar Bebas dan Keadilan Sosial

¹⁰ Milan Zafirovski, "The Rational Choice Generalization of Neoclassical Economics Reconsidered: Any Theoretical Legitimation for Economic Imperialism?," dalam *Jurnal Sociological Theory*, 18.3 (2000): 448-471.

¹¹ John F. Tomer, "Economic Man vs. Heterodox Men: The Concepts of Human Nature in Schools of Economic Thought," dalam *Jurnal The Journal of Socio-Economics*, Vol. 30 No. 4 Tahun 2001, hal. 281-293.

¹² Joseph E. Stiglitz, "Markets, Market Failures, and Development," dalam *Jurnal The American Economic Review*, Vol. 79 No. 2 Tahun 1989, hal.197-203. <http://www.jstor.org/stable/1827756>. Diakses 30 September 2024.

¹³ Phil Armstrong, "An MMT Perspective on Macroeconomic Policy Space," dalam *Jurnal Real-world Economics Review*, Edisi ke 89 Tahun 2019, hal. 32-45.

Ekonomi ortodoks cenderung menekankan pada keunggulan pasar bebas sebagai mekanisme utama distribusi sumber daya. Para pendukungnya berargumen bahwa melalui persaingan yang sehat, pasar bebas akan menciptakan efisiensi dan inovasi yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mereka percaya bahwa jika pasar dibiarkan berfungsi dengan sendirinya tanpa campur tangan yang berlebihan, hasilnya akan optimal.¹⁴

Sebaliknya, para ekonom heterodoks mengkritik keyakinan ini sebagai terlalu simplistik dan mengabaikan realitas ketidakadilan yang ada di dunia nyata. Mereka berpendapat bahwa pasar bebas sering kali menghasilkan ketimpangan ekonomi yang semakin melebar, di mana kekayaan terkonsentrasi pada sekelompok kecil elit, sementara sebagian besar masyarakat mengalami kemiskinan dan ketidakamanan ekonomi. Aliran ekonomi Marxis, feminis, dan ekologis, misalnya, sangat kritis terhadap kapitalisme pasar bebas yang mereka anggap sebagai sistem yang eksploitatif dan merusak lingkungan.¹⁵

4. Pendekatan terhadap Krisis Ekonomi

Ekonom ortodoks sering kali menjelaskan krisis ekonomi sebagai akibat dari gangguan sementara di pasar atau akibat kesalahan kebijakan yang dapat diperbaiki dengan penyesuaian kebijakan yang sesuai. Mereka percaya bahwa pasar pada akhirnya akan kembali ke keadaan keseimbangan, asalkan diberi waktu yang cukup dan kondisi yang mendukung.¹⁶

Sebaliknya, para ekonom heterodoks sering memandang krisis ekonomi sebagai gejala dari masalah struktural yang lebih dalam dalam sistem kapitalis. Mereka berpendapat bahwa krisis adalah bagian inheren dari dinamika kapitalisme itu sendiri, dan tidak bisa diatasi hanya dengan penyesuaian kebijakan jangka pendek. Para ekonom Marxis, misalnya, berpendapat bahwa kapitalisme secara alami menciptakan krisis karena kontradiksi internalnya, seperti kecenderungan overproduksi dan konsentrasi modal. Oleh karena itu,

¹⁴ G. R. Steele, "Laissez-faire and The institutions of The Free Market," dalam *Jurnal Economic Affairs*, Vol. 19 No. 3 Tahun 1999, hal. 47-50.

¹⁵ L. Randall Wray, *The Ownership Society: Social Security is Only The Beginning...*, dalam *Jurnal Public Policy Brief*, No. 82 Tahun 2005. <https://www.econstor.eu/handle/10419/54263> diakses 3 Oktober 2024.

¹⁶ James Tobin, "Money and Finance in the Macroeconomic Process" dalam *Jurnal of Money, Credit and Banking*, Vol. 14 No. 2 Tahun 1982, hal. 171-204.

mereka mengusulkan perubahan struktural yang lebih mendasar dalam sistem ekonomi.¹⁷

5. Pendekatan terhadap Lingkungan

Ekonomi ortodoks, khususnya dalam bentuk ekonomi neoklasik, sering kali mengabaikan dampak lingkungan dari aktivitas ekonomi atau menganggapnya sebagai eksternalitas yang dapat diatasi dengan mekanisme pasar, seperti pajak karbon atau perdagangan emisi. Model-model neoklasik cenderung fokus pada pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan keterbatasan sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan.¹⁸

Sebaliknya, ekonomi heterodoks, khususnya dari aliran ekonomi ekologis, menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tidak mungkin tercapai tanpa memperhitungkan batasan-batasan ekologis. Mereka mengkritik pendekatan neoklasik yang berorientasi pada pertumbuhan sebagai tidak berkelanjutan dan merusak planet. Para ekonom heterodoks ekologis mengusulkan transisi ke ekonomi yang lebih berkelanjutan, di mana pertumbuhan ekonomi tidak lagi menjadi tujuan utama, melainkan kesejahteraan manusia dan keberlanjutan lingkungan.¹⁹

Perdebatan antara paradigma ekonomi ortodoks dan heterodoks mencerminkan perbedaan mendasar dalam cara pandang tentang bagaimana ekonomi seharusnya berfungsi. Titik temu antara kedua paradigma ini terletak pada pengakuan terhadap peran pasar dan tujuan kesejahteraan ekonomi, tetapi titik seteru mereka muncul dalam hal asumsi tentang rasionalitas, peran negara, pasar bebas, krisis ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Perbedaan ini bukan hanya persoalan teoretis, tetapi juga mempengaruhi kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah dan lembaga internasional di seluruh dunia. Sementara ekonomi ortodoks sering menjadi arus utama dalam kebijakan ekonomi, pendekatan heterodoks menawarkan kritik dan alternatif yang penting untuk mencapai keadilan sosial dan keberlanjutan dalam perekonomian global.

Kesimpulannya, perbedaan antara paradigma ortodoks dan heterodoks menciptakan dua cara pandang yang saling melengkapi dan saling mengkritisi dalam memahami fenomena ekonomi. Ekonomi ortodoks menawarkan kerangka yang stabil untuk analisis pasar dan efisiensi, sementara ekonomi heterodoks mengajukan

¹⁷ Hyman Minsky, *Stabilizing An Unstable Economy*, United States: Yale University Press, 1986, hal. 218.

¹⁸ Krishnan S. Anand & François C. Giraud-Carrier. "Pollution Regulation of Competitive Markets," dalam *Jurnal Management Science*, Vol. 66 No.9 Tahun 2020, hal. 4193-4206.

¹⁹ Eric Tymoigne, "The Cost of Job Guarantee in The United States: Insights from The 1930s Work Programs," dalam *Jurnal Review of Radical Political Economics*, Vol. 46 No. 4 Tahun 2014, hal. 517-535.

pendekatan yang lebih inklusif, mempertimbangkan dimensi sosial, politik, dan lingkungan yang diabaikan oleh ortodoksi. Dalam banyak kasus, kebijakan ekonomi yang ideal mungkin terletak di antara keduanya, menggabungkan keunggulan dari kedua pendekatan ini.

Kebijakan ekonomi yang sepenuhnya berbasis pada ekonomi ortodoks berisiko mengabaikan ketimpangan sosial dan kerusakan lingkungan, sementara kebijakan yang terlalu heterodoks mungkin menghadapi kesulitan dalam mencapai tujuan karena paradigma ortodoks saat ini menghegemoni para akademisi dan pemangku kebijakan, perlu ada pergeseran paradigma terlebih dahulu sebelum paradigma ini bisa diterapkan. Oleh karena itu, para pembuat kebijakan dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan efisiensi ekonomi dengan keadilan sosial, stabilitas lingkungan, dan kesejahteraan manusia.

Dengan semakin kompleksnya tantangan ekonomi global seperti perubahan iklim, ketimpangan, dan krisis keuangan keterbukaan terhadap kedua paradigma ini menjadi semakin penting. Diskursus antara ekonomi ortodoks dan heterodoks memungkinkan dialog yang konstruktif untuk menciptakan kebijakan ekonomi yang lebih responsif, adil, dan berkelanjutan.

B. Titik Temu dan Titik Seteru Proposal Kebijakan Moneter antara Paradigma Ortodoks dan Heterodoks

Diskusi tentang perbedaan kebijakan moneter antara paradigma ortodoks dan heterodoks mencakup beberapa persamaan, seperti pentingnya peran kebijakan moneter dalam stabilitas ekonomi dan penggunaan instrumen seperti suku bunga. Namun, perbedaan utama muncul dalam tujuan kebijakan moneter dan cara pandang terhadap inflasi serta penciptaan lapangan kerja. Ekonomi ortodoks menekankan pada stabilitas harga dan independensi bank sentral,²⁰ sementara ekonomi heterodoks, terutama dari pendekatan Keynesian dan MMT, menekankan bahwa kebijakan moneter harus juga memprioritaskan penciptaan lapangan kerja dan mendukung kebijakan fiskal yang proaktif, dengan keyakinan bahwa pengeluaran publik yang tepat dapat meningkatkan pertumbuhan dan menopang kebijakan fiskal serta mengontrol suku bunga.²¹ Adapun titik temu dari kedua paradigma ini adalah:

1. Pengakuan Pentingnya Kebijakan Moneter dalam Pengelolaan Ekonomi

Kedua paradigma baik ortodoks maupun heterodoks sepakat bahwa kebijakan moneter merupakan instrumen yang sangat penting dalam mengelola perekonomian meskipun ortodoks menekankan pada pengaturan instrumen seperti suku bunga, pengaturan likuiditas, dan pengendalian jumlah uang beredar memiliki dampak yang signifikan terhadap inflasi, tingkat pengangguran, dan

²⁰ G. R. Steele, "Laissez-faire and The institutions of The Free Market," dalam *Jurnal Economic Affairs*, Vol. 19 No. 3 Tahun 1999, hal. 47-50.

²¹ Eric Tymoigne, "Modern Money Theory On Fiscal And Monetary Policies: Empirics, Theory And Policymaking," dalam *Jurnal Open Society University Network Economic Democracy Initiative*, Edisi ke 4 Tahun 2021, hal. 1-17.

pertumbuhan ekonomi²² sedangkan paradigma heterodox lebih melihat peranan moneter sebagai penyokong dari kebijakan fiskal.²³

2. Kebijakan Moneter Saat Krisis

Dalam situasi krisis ekonomi, seperti resesi atau ketidakstabilan keuangan global, kedua paradigma sepakat bahwa kebijakan moneter yang ekspansif diperlukan. Mereka setuju bahwa kebijakan seperti penurunan suku bunga atau pemberian likuiditas tambahan melalui pelonggaran kuantitatif (*quantitative easing*) dapat membantu menstabilkan ekonomi dan memulihkan kepercayaan pasar. Saat ekonomi mengalami kontraksi, kedua aliran mendukung peningkatan likuiditas sebagai cara untuk menjaga permintaan agregat dan mencegah kehancuran ekonomi yang lebih dalam.²⁴

Adapun titik seteru dari kedua paradigma ini adalah:

1. Tujuan Utama Kebijakan Moneter: Inflasi vs. Pengangguran

Paradigma ortodoks, khususnya yang dipengaruhi oleh aliran neoklasik atau monetarisme, berpendapat bahwa tujuan utama kebijakan moneter adalah stabilitas harga. Mereka percaya bahwa inflasi rendah dan stabil adalah kunci untuk menjaga kesehatan ekonomi dalam jangka panjang. Dalam pandangan ini, tugas utama bank sentral adalah menjaga inflasi agar tidak terlalu tinggi, karena inflasi yang tidak terkendali dapat merusak daya beli dan menimbulkan ketidakpastian ekonomi.²⁵

Di sisi lain, paradigma heterodoks seperti Post-Keynesian atau Teori Moneter Modern (MMT) mengajukan bahwa kebijakan moneter harus memiliki fokus yang lebih luas, yaitu tidak hanya menjaga inflasi, tetapi juga mencapai tingkat pengangguran yang rendah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Mereka percaya bahwa kebijakan moneter harus proaktif dalam mendukung penciptaan lapangan kerja, bahkan jika itu berarti harus menerima tingkat inflasi yang sedikit lebih tinggi.²⁶

²² Joseph Okwori & John Abu, "Monetary Policy and Inflation Targeting in Nigeria," dalam Jurnal *International Journal of Economics and Financial Management*, Vol. 2 No. 3 Tahun 2017, hal. 1-12.

²³ Eric Tymoigne, "Modern Money Theory On Fiscal And Monetary Policies: Empirics, Theory And Policymaking," hal. 1-17.

²⁴ L. Randall Wray, "Money, Interest Rates, and Monetarist Policy: Some More Unpleasant Monetarist Arithmetic?," dalam Jurnal *of Post Keynesian Economics*, Vol. 15 No. 4 Tahun 1993, hal. 541-569.

²⁵ Ipppei Fujiwara & Kiminori Matsuyama, "Competition and The Philips Curve," dalam *Discussion Paper*, London: Centre for Economic Policy Research, 2023, hal. 1-45.

²⁶ Isadora Bonitz Silva Gomes & Norberto Montani Martins, "MMT, Monetary Sovereignty And Fiscal Policy Space In Brazil (1999-2019)," dalam Jurnal *Cuadernos de Economía*, Vol. 42 No. 88 TAHUN 2023, hal. 1-22.

2. Independensi Bank Sentral

Ekonomi ortodoks umumnya menekankan pentingnya independensi bank sentral dari pengaruh politik, terutama dalam hal penentuan kebijakan moneter. Mereka berpendapat bahwa bank sentral harus netral dan fokus pada menjaga inflasi rendah, karena intervensi politik bisa mengakibatkan kebijakan moneter yang terlalu ekspansif demi tujuan jangka pendek, seperti memenangkan pemilu.²⁷

Sebaliknya, beberapa aliran heterodoks, terutama yang menganut MMT, menekankan bahwa bank sentral harus lebih kooperatif dengan kebijakan fiskal pemerintah untuk mencapai tujuan yang lebih luas seperti penciptaan lapangan kerja penuh (full employment). Dalam pandangan ini, independensi bank sentral bisa menghambat koordinasi yang diperlukan antara kebijakan fiskal dan moneter, terutama dalam kondisi resesi ekonomi.²⁸

3. Pengendalian Jumlah Uang Beredar

Ekonom ortodoks percaya bahwa pertumbuhan jumlah uang beredar harus dikontrol dengan ketat untuk mencegah inflasi. Mereka berpendapat bahwa peningkatan jumlah uang dalam perekonomian tanpa adanya peningkatan output yang sebanding akan menyebabkan inflasi, mengurangi daya beli masyarakat, dan menimbulkan ketidakstabilan ekonomi.²⁹

Sebaliknya, ekonomi heterodoks, terutama MMT, berpendapat bahwa peningkatan jumlah uang beredar dapat dilakukan selama ada kapasitas produksi yang belum digunakan sepenuhnya dalam ekonomi. Mereka berargumen bahwa negara dengan kedaulatan moneter dapat mencetak uang untuk mendanai belanja publik, selama inflasi terkendali. Dalam situasi tertentu, pencetakan uang dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek publik yang meningkatkan lapangan kerja tanpa menyebabkan inflasi berlebihan, selama ekonomi belum mencapai batas kapasitas produksinya.³⁰

²⁷ David Laidler, "Financial Stability, Monetarism and The Wicksell Connection," dalam *Jurnal Review of Economic Analysis*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2009, hal. 60-79; Matthew Watson, "The Institutional Paradoxes of Monetary Orthodoxy: Reflections on The Political Economy of Central Bank Independence," dalam *Jurnal Review of International Political Economy*, Vol. 9 No. 1 Tahun 2002, hal. 183-196.

²⁸ L. Randall Wray, "Alternative Paths to Modern Money Theory," dalam *Jurnal Real-World Economics Review*, Vol. 89 No. 1 Tahun 2019, hal. 5-22.

²⁹ Thomas I. Palley, "Competing Views of The Money Supply Process: Theory and Evidence," dalam *Jurnal Metroeconomica*, Vol. 45 No. 1 Tahun 1994, hal. 67-88.

³⁰ Tony Ramsay, "The Jobs Guarantee: A Post Keynesian Analysis," dalam *Journal of Post Keynesian Economics*, Vol. 25 No. 2 Tahun 2002, hal. 273-291.

4. Peran Suku Bunga dalam Stabilitas Ekonomi

Ekonomi ortodoks berfokus pada pengelolaan suku bunga sebagai instrumen utama kebijakan moneter. Mereka percaya bahwa suku bunga yang tinggi dapat membantu mengekang inflasi dan mencegah gelembung ekonomi, sementara suku bunga rendah dapat mendorong investasi dan konsumsi. Namun, mereka juga berhati-hati agar suku bunga tidak diturunkan terlalu rendah untuk waktu yang lama, karena hal ini bisa memicu inflasi atau spekulasi yang berlebihan di pasar aset.³¹

Sementara itu, aliran heterodoks seperti MMT berargumen bahwa suku bunga dapat tetap rendah atau mendekati nol dalam jangka waktu lama tanpa memicu inflasi yang signifikan. Mereka lebih mendukung pendekatan di mana kebijakan fiskal (pengeluaran pemerintah) yang lebih berperan dalam mengatur perekonomian daripada mengandalkan manipulasi suku bunga. Mereka juga berpendapat bahwa suku bunga rendah membantu mendorong investasi publik dan swasta yang dibutuhkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi.³²

5. Pandangan Tentang Peran Bank Sentral dalam Pengelolaan Utang

Dalam paradigma ortodoks, bank sentral diharapkan untuk menjaga stabilitas keuangan dan tidak terlalu terlibat dalam pendanaan langsung bagi pemerintah. Mereka berpendapat bahwa peran bank sentral harus fokus pada pengendalian inflasi dan menjaga kredibilitas keuangan, sementara utang pemerintah harus dikelola dengan hati-hati agar tidak terlalu besar.³³

Paradigma heterodoks, terutama dalam MMT, memandang bahwa bank sentral bisa berperan aktif dalam mendukung pembiayaan pemerintah, terutama dalam konteks belanja publik yang diperlukan untuk menciptakan lapangan kerja atau memacu pertumbuhan. Mereka berpendapat bahwa utang pemerintah tidak

³¹ Ho-fung Hung & Daniel Thompson. "Money Supply, Class Power, and Inflation: Monetarism Reassessed," dalam Jurnal *American Sociological Review*, Vol. 81 No. 3 Tahun 2016, hal. 447-466.

³² L. Randall Wray, "When are interest rates exogenous?," dalam Mark Setterfield, *Complexity, Endogenous Money and Macroeconomic Theory Essays in Honour of Basil J. Moore*, Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2006, hal. 271-289.

³³ Ravi Batra, "The Long-Run Real-Wage Rigidity and Full Employment Adjustment in the Classical Model," dalam Jurnal *International Review of Economics & Finance*, Vol. 11 No. 2 Tahun 2002, hal. 117-138; Gregorius Nasiansenus Masdjojo, "Kajian Pendekatan Keynesian Dan Moneteris Terhadap Dinamika Cadangan Devisa Melalui Penelusuran Neraca Pembayaran Internasional: Studi Empiris Di Indonesia Periode 1983-2008," dalam *Tesis*, Universitas Diponegoro 2010.

perlu dilihat sebagai ancaman, asalkan mata uang tetap dikendalikan oleh pemerintah sendiri, karena negara memiliki kemampuan untuk menciptakan uang dan membayar utang dalam mata uangnya sendiri tanpa risiko gagal bayar.³⁴

Kedua paradigma memiliki kesamaan dalam pengakuan terhadap pentingnya kebijakan moneter dan peran bank sentral, terutama dalam situasi krisis ekonomi. Namun, mereka berbeda tajam dalam hal tujuan kebijakan moneter dan cara penggunaan instrumen seperti suku bunga dan jumlah uang beredar. Paradigma ortodoks menekankan stabilitas harga dan independensi bank sentral, sementara paradigma heterodoks lebih fleksibel dan mendorong penciptaan lapangan kerja serta keterlibatan bank sentral dalam mendukung kebijakan fiskal pemerintah.

C. Titik Temu dan Titik Seteru Proposal Kebijakan Fiskal antara Paradigma Ortodoks dan Heterodoks

Diskusi tentang kebijakan fiskal antara paradigma ortodoks dan heterodoks menyoroti sejumlah persamaan dan perbedaan dalam pendekatan mereka terhadap pengelolaan ekonomi. Kedua paradigma sepakat bahwa kebijakan fiskal memainkan peran penting, terutama dalam situasi krisis, seperti resesi atau pandemi, di mana peningkatan pengeluaran pemerintah dianggap penting untuk merangsang perekonomian. Namun, perbedaan muncul dalam hal pengelolaan defisit dan utang publik, peran pengeluaran pemerintah, dan pandangan tentang pajak. Paradigma ortodoks menekankan disiplin fiskal dan peran sektor swasta, sedangkan paradigma heterodoks lebih fleksibel, mendukung belanja publik yang proaktif serta kebijakan pajak progresif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan. Adapun titik temu dari kedua paradigma ini adalah:

1. Pengakuan Pentingnya Kebijakan Fiskal dalam Krisis

Baik paradigma ortodoks maupun heterodoks sepakat bahwa kebijakan fiskal dapat memainkan peran kunci dalam menstabilkan ekonomi, terutama dalam situasi krisis. Misalnya, selama krisis global seperti resesi besar atau pandemi, kedua aliran mendukung peningkatan pengeluaran pemerintah (*quantitative easing*) untuk menghindari kontraksi ekonomi yang lebih parah dan memitigasi dampak sosial-ekonomi. Stimulus fiskal, dalam bentuk bantuan sosial atau pengeluaran spesifik yang ditujukan untuk pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pembukaan lapangan kerja baru serta kebijakan-kebijakan yang mendukung terhadap

³⁴ L. Randall Wray, "Sovereign Currency and Non-Sovereign Budgets: The Modern Money Theory Approach," dalam *Jurnal Public Budgeting & Finance*, Vol. 40 No. 3 Tahun 2020, hal. 26-48.

terbentuknya *capital formation* dianggap penting untuk merangsang pertumbuhan ekonomi.³⁵

2. Penggunaan Pajak sebagai Instrumen Ekonomi

Kedua paradigma setuju bahwa pajak merupakan salah satu instrumen utama kebijakan fiskal dalam mengumpulkan pendapatan negara. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran publik dan menjalankan berbagai program sosial. Selain itu, keduanya sepakat bahwa sistem perpajakan yang efisien dan adil sangat penting untuk menjaga stabilitas fiskal dan membiayai layanan publik yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Adapun titik seteru dari kedua pandangan ini adalah

1. Pendekatan terhadap Defisit dan Utang Publik

Paradigma ortodoks menekankan disiplin fiskal, dengan keyakinan bahwa anggaran yang seimbang dan defisit yang terkendali adalah kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi. Mereka percaya bahwa defisit fiskal yang berkelanjutan dapat menyebabkan inflasi, kenaikan suku bunga, dan krisis utang jangka panjang. Dalam pandangan ortodoks, pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab adalah penting untuk menjaga kepercayaan investor dan kredibilitas keuangan negara.³⁶

Di sisi lain, ekonomi heterodoks, terutama yang terinspirasi oleh Teori MMT, berpandangan bahwa defisit fiskal bukanlah masalah utama bagi negara yang memiliki kedaulatan moneter, yaitu yang mengendalikan mata uangnya sendiri. Mereka berpendapat bahwa pemerintah dapat menjalankan defisit selama ekonomi memiliki kapasitas produksi yang belum dimanfaatkan secara penuh. Defisit fiskal dianggap sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi

³⁵ George Petrakos et al., "Income Inequality in the Over-Indebted Eurozone Countries and The Role of The Excessive Deficit Procedure," dalam *Jurnal Open Economies Review*, Vol. 35 No. 2 Tahun 2024, hal. 301-322; Joseph Dorfman, "Heterodox Economic Thinking and Public Policy," dalam *Jurnal of Economic Issues*, Vol. 4 No. 1 Tahun 1970, hal. 1-22; Erik Thorbecke, "The Evolution of The Development Doctrine, 1950–2005," dalam G. Mavrotas & A. Shorrocks, *Advancing Development: Core Themes in Global Economics*, London: Palgrave Macmillan, 2007, hal. 3-36.

³⁶ Abby Kendrick & Juan Pablo Bohoslavsky, "Austerity Measures and Womens Social and Economic Rights: We Need to Look Deeper," dalam Christiana Binder et al., *Research handbook on Internasional Law and Social Rights*, Massachusetts: Edward Elgar Publishing Limited, 2020, hal. 326-339; Thomas Stubbs et al., "Poverty, Inequality, and The International Monetary Fund: How Austerity Hurts The Poor and Widens Inequality," dalam *Jurnal of Globalization and Development*, Vol. 13 No. 1 Tahun 2022, hal. 61-89.

dan menciptakan lapangan kerja, bukan ancaman terhadap stabilitas keuangan.³⁷

2. Pandangan Tentang Peran Pengeluaran Uang Pemerintah

Dalam pandangan ortodoks, pengeluaran pemerintah yang berlebihan dianggap berisiko karena bisa menimbulkan inflasi, meningkatkan utang negara, dan mengurangi insentif bagi sektor swasta untuk berinvestasi. Ekonomi ortodoks cenderung mendorong pengurangan belanja publik dan fokus pada sektor swasta sebagai motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi.³⁸

Sebaliknya, paradigma heterodoks, terutama dari pendekatan Post-Keynesian, mendukung pengeluaran pemerintah yang proaktif, terutama selama masa-masa resesi. Mereka berargumen bahwa peningkatan belanja publik dapat merangsang permintaan agregat, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat pemulihan ekonomi. Dalam pandangan ini, pemerintah memiliki peran penting dalam mengintervensi pasar untuk menstabilkan perekonomian melalui belanja publik yang ditargetkan.³⁹

3. Kebijakan Pajak

Ekonomi ortodoks sering menganjurkan struktur pajak yang minimalis, di mana pajak sebaiknya tidak mengganggu insentif pasar dan pertumbuhan ekonomi. Pajak yang tinggi dianggap dapat mengurangi insentif kerja, investasi, dan inovasi, yang berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi.⁴⁰

Di sisi lain, ekonomi heterodoks berpendapat bahwa pajak yang progresif dan tinggi, terutama terhadap kelompok kaya, diperlukan untuk mendistribusikan kembali kekayaan dan mendanai program-program publik yang penting. Mereka melihat pajak sebagai alat untuk mengurangi ketimpangan sosial, membuat mata uang bernilai, mengurangi tekanan inflasi.⁴¹

³⁷ L. Randall Wray, "MMT and Two Paths to Big Deficits," dalam *Jurnal Challenge*, Vol. 62 No. 6 Tahun 2019, hal. 398-415.

³⁸ Fabian Zuleeg and Hans Martens, "Beyond the Current Crisis: How Should Europe Deal with Government Deficits and Public Debt in Future?," dalam Carlo Secchi & Antonio Vilafranca, *Liberalism in Crisis?: European Economic Governance in The Age of Thurbulance*, Massachusetts, Edward Elgar Publishing, Inc., 2009, hal. 148-177.

³⁹ Stephanie Kelton, *The Deficit Myth: Modern Monetary Theory and The Birth Of The People's Economy*, New York: Public Affairs, 2020, hal. 28-44, 83-94, 107, 215-238.

⁴⁰ Stephanie Kelton, *The Deficit Myth: Modern Monetary Theory and The Birth Of The People's Economy*, hal. 21-27.

⁴¹ Alan Shipman, "The Significance of MMT in Linking Money, Markets, Sector Balances and Aggregate Demand," dalam *Jurnal Real World Economics Review*, Edisi 89 Tahun 2019, hal. 190-193.

Meskipun ada titik temu dalam pengakuan pentingnya kebijakan fiskal, terutama dalam krisis ekonomi, perbedaan utama antara paradigma ortodoks dan heterodoks terletak pada cara pandang terhadap defisit, pengeluaran pemerintah, dan peran pajak. Ekonomi ortodoks menekankan disiplin fiskal dan peran swasta, sementara heterodoks mendukung peran pemerintah yang lebih aktif dalam mengelola ekonomi melalui belanja publik dan pajak yang progresif.

D. Signifikansi Paradigma Heterodoks dan Ortoodoks dalam Mengakomodasi Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip ekonomi Islam dibangun dengan asumsi dasar bahwa fondasi utama dalam membangun kehidupan yang sejahtera haruslah terpenuhi. Hal ini menyangkut berbagai aspek seperti penyelesaian terhadap pengangguran,⁴² ketimpangan,⁴³ kemiskinan,⁴⁴ pendidikan,⁴⁵ kesehatan⁴⁶ dan praktek ekonomi ribawi⁴⁷ haruslah diselesaikan terlebih dahulu. Dalam penyelesaiannya negara bertanggungjawab dan memiliki peran vital sehingga perangkat lunak (paradigma) yang diadopsi haruslah memberikan akomodasi yang mampu mengimplementasikan prinsip ekonomi Islam tersebut.⁴⁸

Sebagaimana diketahui bahwa paradigma orthodox memiliki asumsi dasar bahwa pasar haruslah dibiarkan berjalan dengan intervensi pemerintah yang seminimal mungkin sehingga tercapai efisiensi dan mampu mencapai ekuilibrium aslinya.⁴⁹ Pandangan ini secara konkrit memberikan penegasian bahwa permasalahan ekonomi seperti pengangguran, ketimpangan dan kemiskinan merupakan hasil asli dari mekanisme pasar. Intervensi pemerintah terkait hal tersebut akan menyebabkan ketidakefisienan pasar dan hal

⁴² Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Ekonomi*, edisi ke 3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 271.

⁴³ Aditama Dewantara, "Etika Distribusi Ekonomi Islam: Perbandingan Sistem Distribusi Kapitalis dengan Sistem Distribusi Islam," dalam *Jurnal Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2020, hal. 20-36.

⁴⁴ Andi Suseno, "Pengentasan Kemiskinan Perspektif Hadis Nabi: Studi Hadis Tematis-Kontekstualis," dalam *Jurnal Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 9 No. 1 Tahun 2021, hal. 27-44.

⁴⁵ Imam Machali, "Islam Memandang Hak Asasi Pendidikan," dalam *Jurnal MP*, Vol. 17 No. 1 Tahun 2012, hal. 2-20.

⁴⁶ Rifatul Hidayat, "Hak atas Derajat Pelayanan Kesehatan yang Optimal," dalam *Jurnal Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 16 No. 2 Tahun 2016, Hal. 127-134.

⁴⁷ Risanda Alirastra Budiantoro et al., "Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Historis," dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2018, hal. 1-13.

⁴⁸ Abû Wâlid Sulaymân ibn Khalâf ibn Sa'ad al-Bâjî, *al-Muntaqâ Syarh al-Muwaththa'*, Beirut: Dâr al-Kitâb al'Arabî, 1332 H., Juz V, hal. 18.

⁴⁹ Cass R. Sunstein, *Free Markets and Social Justice*, New York: Oxford University Press, 1997, hal. 271-297.

intervensi ini acapkali ditentang oleh ekonom ortodoks kecuali untuk beberapa hal yang minor.⁵⁰

Sedangkan paradigma heterodoks dalam basis argumentasinya melihat bahwa pasar selamanya tidak akan pernah mencapai puncak efisiensinya karena mekanisme pasar secara internal memiliki orientasi untuk menghancurkan dirinya sendiri (*internal destabilizing forces*) kecuali ada intervensi dari institusi tertinggi (pemerintah) yang inklusif.⁵¹ Paradigma ini lebih potensial dalam mengaplikasikan prinsip ekonomi Islam karena keduanya sejala dan sepakat bahwa peran pemerintah memegang peran penting dalam perekonomian sehingga tanggung jawab terhadap pengentasan permasalahan ekonomi menjadi tanggung jawab mutlak dari pemerintah.⁵²

Juga paradigma ortodoks dalam analisis moneter dan fiskalnya tidak memberikan ruang epistemis terhadap pencipta uang untuk melakukan kewajibannya yaitu melakukan *fiscal deficit* yang hal ini membatasi ruang bagi penganut paradigma ini untuk mengimplementasikan program-program inklusif seperti pendidikan dan kesehatan gratis. Kekurangan pengetahuan tentang analisis empirik dan historis berimplikasi pada hilangnya pihak pencipta uang dan pengguna uang yang kemudian mereka samakan sehingga membentuk asumsi bahwa pencipta uang (pemerintah) perlu pendapatan (pajak) sebelum bisa melakukan *spending*. Hal ini merupakan kecatatan dalam berpikir dan secara tidak langsung menghambat ekonomi menjadi maju serta menciptakan efek buruk yakni ketika akun pemerintah mengalami surplus artinya akun swasta mengalami defisit yang hal ini jelas menimbulkan krisis dalam ekonomi.⁵³

Sedangkan paradigma heterodoks memberikan pendekatan berbeda yang mengaktifkan kembali peran pencipta uang dan mendorongnya untuk melakukan *spending* guna memaksimalkan kapasitas ekonomi khususnya pada pemberian fleksibilitas ruang bagi pemangku kebijakan untuk bisa

⁵⁰ Krishnan S. Anand & François C. Giraud-Carrier. "Pollution Regulation of Competitive Markets," dalam Jurnal *Management Science*, Vol. 66 No.9 Tahun 2020, hal. 4193-4206.

⁵¹ Barkin Cihanli, "MMT: How To Pay For Economic Development," dalam Jurnal SSRN, Tahun 2020. <https://ssrn.com/abstract=3826961> diakses 2 Oktober 2024; Frederic S. Lee, "Heterodox Economics," dalam Jurnal *The Long Term View*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2008, hal. 23-30.

⁵² Pavlina R. Tcherneva, "The Job Guarantee: Modern Money Theory's Proposal for Full Employment and Price Stability," dalam Yeva Nersisyan & L. Randall Wray, *The Elgar Companion to Modern Money Theory*, Massachusetts: Edward Elgar Publishing, Inc., 2024, hal. 196-212.

⁵³ Fabian Zuleeg and Hans Martens, "Beyond the Current Crisis: How Should Europe Deal with Government Deficits and Public Debt in Future?," dalam Carlo Secchi & Antonio Vilafranca, *Liberalism in Crisis?: European Economic Governance in The Age of Thurbulance*, Massachusetts, Edward Elgar Publishing, Inc., 2009, hal. 148-177.

menerapkan program-program yang bermanfaat dan berguna bagi masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan gratis, pembangunan infrastruktur publik dan lain sebagainya.⁵⁴

Serta paradigma ortodoks dalam kasus penyelesaian sistem riba oleh perbankan mereka tidak memiliki analisa yang mumpuni -hanya mengandalkan teori kuantitas uang- yang melihat inflasi adalah hasil dari penciptaan uang yang terlalu banyak. Sedangkan pada faktanya ketika terjadi *global finansial crisis* tahun 2008, The Fed Amerika melakukan *Quantitative Easing* tiga kali lipat dari GDP Amerika dan inflasi hanya berkisar diantara 0.25%.⁵⁵

Sedangkan paradigma heterodoks memberikan gambaran yang kompleks terkait dengan sistem moneter dan memberikan analisa bahwa kebijakan suku bunga yang menjadi titik tumpu sistem riba berasal bisa dihilangkan dengan memberikan batasan nihil pada *interbank lending*. Hal ini sekali lagi memberikan peluang kepada pemangku kebijakan bahwa sistem riba yang ada pada ekonomi kapitalis saat ini bukanlah sesuatu yang tidak bisa diselesaikan, namun ini hanyalah terkait dari kemauan dari pembuat kebijakan itu sendiri.⁵⁶

Dengan diparkannya kedua paradigma ini besar harapan menjadi sebuah kajian awal bahwa segera permasalahan pasti memiliki solusi dan menerapkan paradigma heterodoks dalam kurikulum pendidikan dan kebijakan adalah suatu keharusan untuk mencapai tujuan-tujuan Islam yaitu pengentasan terhadap pengangguran, kemiskinan, ketimpangan dan mampu memberikan pelayanan publik seperti kesehatan dan pendidikan secara gratis serta membuat sistem perekonomian yang anti terhadap riba.

E. Signifikansi Paradigma Heterodoks dan Ortodoks dalam Mengakomodasi Nilai Inklusivitas Ekonomi

Inklusivitas Ekonomi merujuk pada sistem ekonomi yang berusaha memastikan partisipasi semua kelompok masyarakat, termasuk yang termarjinalkan, dalam proses ekonomi, distribusi sumber daya, dan akses terhadap peluang ekonomi. Tujuannya adalah menciptakan kesejahteraan yang merata dan mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Inklusivitas

⁵⁴ Unggul Purnomo Aji et al., "National Economic and Health Recovery in the Disruptive Pandemic: A Proposal for Indonesia," dalam Jurnal *Academia Letters*, Artikel No. 1345 Tahun 2021, hal. 1-7. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3899576 diakses 7 Oktober 2024.

⁵⁵ Partha Ray, & Parthapratim Pal, "Fiscal Stimulus and The Ghost of Keynes: An Evolutionary Chronicle," dalam Yoshino et al., *Studies in International Economics and Finance: Essays in Honour of Prof. Bandi Kamaiah*. Singapore: Springer, 2022, hal. 55-72.

⁵⁶ Warren Mosler, "Full Employment and Price Stability," dalam *Jurnal of Post Keynesian Economics*, Vol. 20 No. 2 Tahun 1997, hal. 167-182.

ekonomi menekankan pentingnya akses yang adil terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan keuangan, serta pengentasan kemiskinan.⁵⁷

Paradigma ekonomi ortodoks, yang cenderung berfokus pada pasar bebas dan efisiensi, sering kali gagal mendorong inklusivitas ekonomi. Dalam pandangan ini, intervensi negara seringkali minimal, dengan keyakinan bahwa pasar secara alami akan menciptakan keseimbangan. Namun, hal ini sering mengabaikan ketimpangan dan ketidakadilan yang dapat muncul ketika kelompok-kelompok tertentu tidak memiliki akses yang setara terhadap sumber daya.⁵⁸

Sebaliknya, paradigma ekonomi heterodoks lebih selaras dengan prinsip inklusivitas ekonomi. Ekonomi heterodoks mendukung peran negara dalam menciptakan kebijakan yang memastikan distribusi kekayaan yang lebih adil dan partisipasi yang luas dalam ekonomi. Pendekatan ini mengakui bahwa pasar bebas saja tidak cukup untuk mencapai kesejahteraan kolektif, sehingga perlu ada intervensi kebijakan untuk memastikan inklusi dan keadilan ekonomi bagi semua lapisan masyarakat, termasuk yang paling rentan.⁵⁹

Dalam konteks ini, ekonomi heterodoks lebih mendukung inklusivitas, karena secara aktif mendorong redistribusi kekayaan dan kesempatan bagi semua, sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang menjadi inti dari tujuan inklusivitas ekonomi.

F. Signifikansi Paradigma Ortodoks dan Heterodoks terhadap Kontekstualisasi Ayat-Ayat yang Mendefinisikan tentang Mata Uang

Paradigma ortodoks dan heterodoks memainkan peran penting dalam memahami konteks ekonomi, khususnya terkait mata uang, dalam perspektif Islam. Paradigma Ortodoks berfokus pada fungsi mata uang sebagai medium of exchange (alat tukar), sesuai dengan interpretasi klasik yang menganggap uang sebagai alat netral untuk memfasilitasi perdagangan. Pendekatan ini sering menekankan mekanisme pasar dan nilai intrinsik mata uang tanpa memperhitungkan peran negara atau regulasi dalam pembentukan nilai uang. Dalam konteks Al-Qur'an, interpretasi ortodoks sering kali fokus pada pengontrolan inflasi -larangan riba (bunga)- meskipun tidak tahu cara mengontrolnya secara moneter dengan benar dan memastikan transaksi keuangan yang adil, namun kurang memperhatikan intervensi negara dalam

⁵⁷ Arno Van Niekerk, "A Conceptual Framework For Inclusive Economics," dalam *Jurnal South African Journal of Economic and Management Sciences*, Vol. 22 No. 1 Tahun 2019, hal. 1-9.

⁵⁸ Lane Vanderslice, "Orthodox Economics and the Economics of Harm," dalam *Jurnal of Economic Issues*, Vol. 55 No. 3 Tahun 2021, hal. 847-854.

⁵⁹ Sandra Waddock, "Transforming Economics Values Toward Life: From Heterodoxy To Orthodoxy," dalam *Jurnal Business Ethics, the Environment & Responsibility*, Vol. 31 No. 1 Tahun 2022, hal. 274-280.

relasinya untuk secara aktif ikut andil dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.⁶⁰

Paradigma Heterodoks, sebaliknya, melihat mata uang sebagai state unit of account, di mana peran negara dalam menciptakan dan mengendalikan mata uang sangat penting. Pendekatan ini lebih relevan dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang mendorong keadilan ekonomi dan distribusi kekayaan secara merata, seperti pada Surat Al-Hasyr ayat ke tujuh yang menjelaskan tentang penghindaran akumulasi kekayaan kepada segelintir kelompok masyarakat tertentu. Paradigma ini menafsirkan bahwa uang bukan hanya alat tukar, tetapi instrumen kebijakan ekonomi yang dapat digunakan untuk memerangi ketidakadilan sosial, pengangguran, kemiskinan, ketimpangan, memberikan akses pendidikan dan kesehatan gratis serta mampu dalam mengontrol inflasi (riba) menjadi kebijakan suku bunga nol.⁶¹

Secara keseluruhan, paradigma heterodoks lebih sesuai dengan konteks ayat-ayat yang mendefinisikan tentang mata uang dalam Islam, karena mendukung intervensi negara dan pengaturan ekonomi demi keadilan sosial dan kesejahteraan umat seperti yang tertera pada Surah Al-Hasyr ayat 7.

⁶⁰ Kanishka Jayasuriya & Andrew Rosser. "Economic Orthodoxy and The East Asian Crisis," dalam *Jurnal Third World Quarterly*, Vol. 22 No. 3 Tahun 2001, hal. 381-396.

⁶¹ Joseph Dorfman, "Heterodox Economic Thinking And Public Policy," dalam *Jurnal of Economic Issues*, Vol. 4 No. 1 Tahun 1970, hal. 1-22.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan Diskursus Paradigma Makroekonomi Inklusif Dalam Perspektif Al-Qur'an dapat diambil kesimpulan bahwa ditemukan adanya titik temu dan titik seteru antara paradigma paradigma heterodoks dan ortodoks antara lain: 1) memiliki tujuan akhir yaitu kesejahteraan, 2) menganggap bahwa pasar mempunyai peranan penting dalam ekonomi, 3) sama-sama menganggap bahwa sistem keuangan memainkan peranan penting dalam terciptanya krisis. Namun ditemukan pula adanya titik seteru dari kedua paradigma ini antara lain: 1) dalam pandangan rasionalitas individu, ortodoks menganggap bahwa semua pelaku pasar memiliki kesempurnaan rasio sedangkan heterodox skeptis pada asumsi tersebut, 2) dalam peran negara (otoritas) dalam ekonomi, ortodoks mendorong untuk dilakukan seminimal mungkin sedangkan heterodoks sebaliknya, 3) dalam teori pasar dan keadilan sosial, ortodoks berargumen bahwa *free market* kerangka kerja terbaik sedangkan heterodoks menganggap bahwa tanpa adanya kontrol pemerintah pasar adalah suatu entitas yang cenderung eksploitatif, 4) dalam melihat krisis ekonomi, paradigma ortodoks melihatnya hanya sebagai *external shock* sedangkan heterodoks melihatnya sebagai kegagalan institusi dalam mengontrol pasar, 5) dalam konteks pendekatan terhadap lingkungan, ortodoks cenderung mengutamakan pertumbuhan ekonomi sedangkan heterodoks sebaliknya.

Dalam proposal kebijakan moneter kedua paradigma ini memiliki persamaan yaitu: 1) sama-sama mengakui bahwa kebijakan moneter merupakan instrumen penting dalam ekonomi, 2) kebijakan moneter ekspansif saat kondisi krisis sangat diperlukan. Namun keduanya juga memiliki titik perbedaan yang antara lain: 1) tujuan utama kebijakan moneter dalam paradigma ortodoks adalah mengontrol inflasi sedangkan pada paradigma heterodoks adalah mendukung kebijakan fiskal melalui penciptaan uang yang berorientasi, 2) bank sentral dalam paradigma ortodoks dituntut untuk independen, sedangkan paradigma heterodoks mempertanyakannya karena tidak sesuai dengan operasi moneter dan kebutuhan fiskal, 2) dalam masalah inflasi, ortodoks beranggapan bahwa hal ini tercipta karena terlalu banyaknya uang beredar sedangkan heterodoks berargumen bahwa peningkatan uang beredar tidak akan menciptakan inflasi selama masih ada output yang ditarget dalam kapasitas ekonomi yang masih bisa untuk dimaksimalkan, 3) dalam peran suku bunga dalam stabilitas ekonomi, ortodoks berpendapat bahwa suku bunga yang tinggi berpengaruh untuk mengekang inflasi dan suku bunga rendah berpengaruh untuk mendorong belanja dan investasi, maka suku bunga harus dikontrol sedemikian rupa dalam ekuilibrium untuk bisa menstabilisasi ekonomi. Sedangkan kaum heterodoks berpendapat bahwa suku bunga rendah bisa dilakukan kapan saja dalam rentang waktu kapanpun dan hal ini otomatis akan menstabilisasi ekonomi, 4) dalam konteks peran bank sentral dalam pembiayaan ekonomi, paradigma ortodoks beranggapan bahwa mereka harus fokus hanya pada pengendalian inflasi sedangkan paradigma heterodoks berargumentasi bahwa bank sentral harus ikut secara aktif dalam menyediakan pembiayaan fiskal yang inklusif.

Dalam proposal kebijakan fiskal antara kedua paradigma ditemukan titik temu antara lain: 1) paradigma heterodoks dan ortodoks sama sama menganggap bahwa kebijakan fiskal adalah penting untuk menjaga stabilitas ekonomi makro, terutama dalam hal pengendalian inflasi dan defisit anggaran meskipun keduanya memiliki cara dan dasar asumsi yang berbeda. Sedangkan perbedaan keduanya adalah bahwa: 1) paradigma heterodoks melihat bahwa defisit anggaran adalah baik dan sustainable sedangkan ortodoks sebaliknya, 2) paradigma heterodoks fokus pada kesetaraan dan inklusifitas dalam ekonomi sedangkan ortodoks hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, 3) dalam masalah pajak, paradigma heterodoks melihat bahwa fungsi utama pajak adalah alat untuk menciptakan demand pada mata uang sedangkan paradigma ortodoks melihatnya sebagai pendapatan bagi kas negara, 5) dalam krisis ekonomi, paradigma heterodoks menganggap bahwa peran pemerintah sebagai *lender/employer of last resort* adalah suatu keharusan sedangkan paradigma ortodoks cenderung

menihilkan pentingnya peran pemerintah dan menganggap bahwa pasar akan dengan sendirinya menemukan titik kestabilannya.

Dalam signifikansi prinsip ekonomi Islam terhadap paradigma ortodoks dan heterodoks ditemukan bahwa paradigma heterodoks lebih sesuai dalam mengakomodasi prinsip ekonomi islam dari pada paradigma ortodoks dengan pertimbangan argumentasi antara lain: 1) kesesuaian prinsip bahwa intervensi pemerintah perlu dilakukan untuk menangani pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan serta untuk mengimplementasikan pendidikan dan kesehatan gratis serta menerapkan sistim ekonomi yang anti riba, 2) kesesuaian pendapat bahwa menangani pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan serta untuk mengimplementasikan pendidikan dan kesehatan gratis serta menerapkan sistim ekonomi yang anti riba adalah mutlak tanggung jawab pemerintah, 3) kesesuaian secara teoretis bahwa negara yang berdaulat atas mata uangnya mampu membeli dan membiayai apapun secara domestik, 4) Kesesuaian secara praktis bahwa pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan bisa diselesaikan dengan program jaminan pekerjaan dan pendidikan, kesehatan gratis serta kebijakan suku bunga 0% merupakan gagasan yang sangat mungkin dilakukan.

Dalam signifikansinya dengan nilai inklusifitas yang menekankan bahwa kesejahteraan seyogyanya bisa diimplementasikan kepada seluruh kelompok masyarakat, maka paradigma heterodoks lebih sesuai dari pada paradigma ortodoks karena paradigma heterodoks menekankan kepada pentingnya intervensi pemerintah demi terciptanya keadilan sosial dan hal ini tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar yang memiliki *internal destabilizing forces*.

Dalam signifikansi paradigma terhadap kontekstualisasi ayat-ayat yang berhubungan dengan mata uang yang menjadi bangunan dasar dari sebuah paradigma, paradigma heterodoks lebih sesuai dengan konteks ayat-ayat yang mendefinisikan tentang mata uang dalam Islam, karena mendukung intervensi negara dan pengaturan ekonomi demi keadilan sosial dan kesejahteraan umat seperti yang tertera pada Surah Al-Hasyr ayat 7

B. Saran

Dari penelitian ini, penulis memberikan saran kepada:

1. Pemerintah Indonesia supaya melakukan kajian ulang pada paradigma ekonomi yang dianut.
2. Kemenristek Dikti dan Kemendikbud supaya kurikulum ekonomi yang diajarkan baik di perguruan tinggi maupun di sekolah menengah dan dasar untuk dikaji ulang.
3. Kemenkeu untuk meninjau kembali dasar paradigma yang dianut sebagai fondasi dalam penerapan kebijakan fiskal.

4. Bank Indonesia untuk meninjau kembali dasar paradigma yang dianut sebagai fondasi dalam penerapan kebijakan moneter.
5. Seluruh Perguruan Tinggi untuk menguji ulang secara empirik paradigma ortodoks dan heterodoks
6. Seluruh Lembaga Think Thank untuk menguji kembali paradigma ekonomi yang dianut dan meninjau kembali rekomendasi kebijakan kepada pemerintah
7. Kepada seluruh civitas akademik untuk memperdebatkan kembali terkait dua paradigma ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Anwar, "Sistem Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Filsafat, Nilai-Nilai Dasar, dan Instrumental," dalam *Jurnal Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2012.
- Adinugraha, Hendri Hermawan, "How Does Money Function in The View Of Islamic Economics?" dalam *Jurnal PROFJES: Profetik Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No.1 Tahun 2024.
- Afida, Ifa, "Konsep Kesejahteraan pada Masa Islam Klasik Dan Masa Modern," dalam *Jurnal Al-tsaman: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2020.
- Afif, Mufti & Richa Angkita Mulyawisdawati, "Celah Riba pada Perbankan Syariah serta Konsekwensinya Terhadap Individu, Masyarakat dan Ekonomi," dalam *Jurnal Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, Vol. 11 No. 1 Tahun 2016.
- Agustin, Hamdi, "Teori Bank Syariah," dalam *Jurnal JPS: Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2021.
- Ahmad, Nur, "Kerangka Dasar Membangun Kesehatan Spiritual Melalui Pendekatan Psikologi Islam," dalam *Jurnal STAIN Kudus*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2015.
- Ahmad, Ziauddin et al., "Money and Banking in Islam," dalam *Jurnal Res. Islamic Econ*, Vol. 3 No. 1 Tahun 1985.
- Aji, Unggul Purnomo et al., "National Economic and Health Recovery in the Disruptive Pandemic: A Proposal for Indonesia," dalam *Jurnal Academia Letters*, Artikel No. 1345 Tahun 2021, hal. 1-7.

- https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3899576 diakses 1 Oktober 2024.
- , "Monetarily Sovereign Government Doesn't Have Insolvency Risk on Spending, and Taxation Doesn't Give The Funds to It: An Intro of MMT," lihat dalam: <https://neweconomicthinking1.blogspot.com/2021/01/monetarily-sovereign-governmentdoesnt.html?m=1> diakses 27 September 2024.
- , "The Economic Problem in Global South," lihat dalam: <https://neweconomicthinking1.blogspot.com/2020/11/the-economic-problem-in-global-south.html?m=1> diakses 29 September 2024.
- al-Bâjî, Abû Wâlid Sulaymân ibn Khalâf ibn Sa'ad, *al-Muntaqâ Syarh al-Muwaththa'*, Beirut: Dâr al-Kitâb al'Arabî, 1332 H.
- Albritton, Robert et al., *Political Economy and Global Capitalism: The 21st Century, Present and Future*, London: Anthem Press, 2007.
- al-Fattah, Abd, *Madkhal ila al-Falsafah*, Kaherah: Dar al-Falsafah, (t.th).
- Al-Ghazâlî, Abû Hâmid, *Ihyâ 'Ulûm al-Dîn*, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, t.th.
- Alisa, Maximova, "The Relationship Between Inflation and Unemployment: A Theoretical Discussion about The Philips Curve," dalam *Journal of International Business and Economics*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2015.
- Al-Kramly, Anestas, *al-Nuqud al-'Arabiyah wa al-Islamiyah wa Ilmu al-Nammiyat*, t.tp.: al-Markaz al-Islamy, 1987.
- Al-Mawdudi, Sayyid Abu al-A'la, *First Principles of Islamic Economics*. United Kingdom: The Islamic Foundation, 2011.
- Al-Misri, R. Y., *Ushulul Iqtishad al-Islamiyah*. Beirut. Dar al-Qalam, 2005.
- al-Qardawi, Yusuf, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Al-Qasim, Abu Ubaid, *al-Amwal*, diahqiq oleh: Muhammad Khalil Harras, Beirut: Dar al-Fikr, 1988.
- Altman, Morris, *Handbook of Behavioural Economics and Smart Decision-Making*, Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2017.
- Al-Zamakhsyari, *Asas al-Balaghoh*, Beirut: Dar Shadir, 1979.
- Amalia, Euis, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer*, Jakarta: Granada Press, 2007.
- Amanda, Nayla Dwi, "Menjaga Kesehatan Tubuh dalam Perspektif Islam," dalam *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, Vol. 1 No. 5 Tahun 2023.
- Amann, Edmund & Werner Baer, "Economic Orthodoxy versus Social Development? The Dilemmas Facing Brazil's Labour Government," dalam *Jurnal Oxford Development Studies*, Vol. 34 No. 2 Tahun 2006.

- Anand, Krishnan S. & François C. Giraud-Carrier. "Pollution Regulation of Competitive Markets," dalam *Jurnal Management Science*, Vol. 66 No.9 Tahun 2020.
- Anastasi, Anthony William Donald, "Marxism and Mmt," dalam *Jurnal World Review of Political Economy*, Vol. 12 No. 4 Tahun 2021.
- Andriyanto, Irsyad, "Strategi Pengelolaan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan," dalam *Jurnal Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 19 No. 1 Tahun 2011.
- Antosiewicz, Marek & Piotr Lewandowski, "Labour Market Fluctuations in GIPS–Shocks vs Adjustments," dalam *Jurnal International Journal of Manpower*, Vol. 38 No. 7 Tahun 2017.
- Arestis, Philip & Malcom Sawyer, *A Handbook of Alternative Monetary Economics*, Massachussets, Edward Elgar Publishing, 2006.
- Arestis, Philip et al., "Post Keynesian Economics and Its Critics." Dalam *Jurnal of Post Keynesian Economics*, Vol. 21 No. 4 Tahun 1999.
- Arfah, Aryati & Muhammad Arif. "Pembangunan Ekonomi, Keadilan Sosial dan Ekonomi Berkelanjutan dalam Perspektif Islam," dalam *Jurnal SEIKO: Journal of Management & Business*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2021.
- Armstrong, Phil "An MMT Perspective on Macroeconomic Policy Space," dalam *Jurnal Real-World Economics Review*, Edisi 89 Tahun 2019.
- . "History and Origin of Money in MMT and Austrian Economics: The Difference Methodology Makes?," dalam *Jurnal Real-World Economics Review*, Edisi 105 Tahun 2023.
- . "Modern Monetary Theory and A Heterodox Alternative Paradigm," dalam *Jurnal The Gower Initiative of Modern Money Studies*, Tahun 2018.
- Aronowitz, Stanley & Michael J. Roberts, *Class: The Anthology*, New Jersey: Willey Publishing, 2017.
- Asadov, Alam, "Money in Islam: A Social Contract Perspective," dalam *Jurnal International Journal of Islamic Economics*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2020.
- Asian Development Bank, *Policies to Support The Development of Indonesia's Manufacturing Sector During 2020-2024*, Philippines: Asian Development Bank, 2019, DOI: <http://dx.doi.org/10.22617/TCS199910-2> Diakses 25 Agustus 2024.
- Aslan, Ilker, "Employer of Last Resort as A New 'New Deal': A few Thoughts on Turkey," dalam *Jurnal American Review of Political Economy*, Vol. 16 No. 2 Tahun 2021.
- Awang, Hashim et al., *Pengajian Sastra dan Sosio-budaya Melayu Memasuki Alaf Baru*, Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 1998.

- Baccaro, Lucio et al., *Diminishing Returns: The New Politics of Growth and Stagnation*, United Kingdom: Oxford University Press, 2022.
- Badrudin, Moh., "Hukum Berobat dalam Pandangan Islam," dalam *Jurnal Al Qalam*, Vol. 8 No. 2 Tahun 2020.
- Ball, Laurence & N. Gregory Mankiw. "The NAIRU in Theory and Practice," dalam *Jurnal of Economic Perspectives*, Vol. 16 No.4 Tahun 2002.
- Banerjee, Abhijit V. & Maskin, Eric S., *The Quarterly Journal of Economics*, https://scholar.harvard.edu/files/maskin/files/a_walrasian_theory_of_money_and_barter.pdf Diakses 25 Agustus 2024.
- Barokah, Mabid et al., "Larangan Menimbun Harta dalam Al-Qur'an: Analisis Metode Tafsir Maudhu'i Fazlur Rahman," dalam *Jurnal Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits*, Vol. 17 No. 2 Tahun 2023.
- Batra, Ravi, "The Long-Run Real-Wage Rigidity and Full Employment Adjustment in the Classical Model," dalam *Jurnal International Review of Economics & Finance*, Vol. 11 No. 2 Tahun 2002.
- Bernanke, Ben S. & Frederic S. Mishkin. "Inflation targeting: a new framework for monetary policy?," dalam *Jurnal of Economic perspectives*, Vol. 11 No. 2 Tahun 1997.
- Bhowmik, Sharit K., *The State of Labour: The Global Financial Crisis and Its Impact*, London: Routledge, 2014.
- Binder, Christiana et al., *Research handbook on Internasional Law and Social Rights*, Massachusetts: Edward Elgar Publishing Limited, 2020.
- Bonefeld, Werner & John Holloway, *Global Capital, National State and the Politics of Money*, London: Palgrave Macmillan, 1995.
- Bongenaar, A. C. V. M., ed., *Interdependency of Institutions and Private Entrepreneurs*, Istanbul: MOS Studies 2, 2000.
- Braun, Benjamin, *Capital Claims: Power and Global Finance*, London: Routledge, 2022.
- Britannica, The Editors of Encyclopaedia. "Public Works Administration". Encyclopedia Britannica," dalam Website, <https://www.britannica.com/topic/Public-Works-Administration>. Diakses 6 Oktober 2024.
- Buchanan, A. E., *Ethics, Efficiency, and Market*, Oxford: Clarendon Press, 1985.
- Budd, A. P., "The Debate on Fine-Tuning: The Basic Issues," dalam *Jurnal National Institute Economic Review*, Edisi 74 Tahun 1975, hal. 56-59. <https://doi.org/10.1177/002795017507400105> diakses 28 September 2024.

- Budiantoro, Risanda Alirastra et al., "Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Historis," dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2018.
- Buhari, A. Taufiq, "Bank dan Riba: Implikasinya dalam Ekonomi Islam," dalam *Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2020.
- Burke, J. J. A., *Financial Services in the Twenty-First Century: The Present System and Future Developments in Fintech and Financial Innovation*, London: Palgrave Macmillan, 2021.
- Byarwati, Anis & Tjiptoahaadi Sawarjuwono, "Ekonomi Islam atau Iqtishad" dalam *Jurnal IMANESI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi Islam*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2013.
- Calhun, Craig & Benjamin Y. Fong, *The Green New Deal and the Future of Work*, New York: Columbia University Press, 2022.
- Calleja, Emilio Diaz & Ruben Osuna Guerrero, "Inside Orthodoxy: The Return of Classical Macroeconomics and the Problem of Unemployment," dalam *International Journal of Political Economy*, Vol. 30 No. 2 Tahun 2000.
- Cantika, Sri Budi, "Strategi Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif Islam," dalam *Jurnal of Innovation in Business and Economics*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2013.
- Carnevali, Emilio & Matteo Deleidi, "The Trade-off Between Inflation and Unemployment in an 'MMT world': An Open-Economy Perspective," dalam *Jurnal European Journal of Economics and Economic Policies*, Vol. 20 No. 1 Tahun 2023.
- Chaiechi, Taha & Jacob Wood, *Community Empowerment, Sustainable Cities, and Transformative Economies*, New York: Springer link, 2022.
- Chapra, M. U., *Masa Depan Ilmu Ekonomi*, Jakarta. Gema Insani Press, 2010.
- , "Monetary Management in An Islamic Economy," dalam *Jurnal Islamic Economic Studies*, Vol. 4 No. 1 Tahun 1996.
- , "The Nature of Riba in Islam," dalam *Jurnal Millah: Journal of Religious Studies*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2008.
- , *Sistem Moneter Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Chichilnisky, G., "Markets with Endogenous Uncertainty: Theory and Policy", dalam *Jurnal Theory and Decision*, Volume 41, No. 2 Tahun 1996.
- , *Markets Information and Uncertainty: Essays in Honor of Kenneth Arrow*, Cambridge University Press, 2008.
- Christ, Carl F., "A Short-Run Aggregate-Demand Model of The Interdependence and Effects of Monetary and Fiscal Policies with

- Keynesian and Classical Interest Elasticities,” dalam *Jurnal The American Economic Review*, Vol. 57 No. 2 Tahun 1967.
- Cihanli, Barkin, "MMT: How To Pay For Economic Development," dalam *Jurnal SSRN*, Tahun 2020. <https://ssrn.com/abstract=3826961> diakses 2 Oktober 2024.
- Cinar, Mehmet et al., "Examining The Role of Budget Deficit Policies in Economic Growth from A Keynesian Perspective," dalam *Jurnal International Journal of Economics and Finance*, Vol. 6 no. 10 Tahun 2014.
- Coronado, Julia, "Giving MMT The Credit It Is Due,” dalam *Jurnal Business Economics*, Vol. 55 No. 1 Tahun 2020.
- Coyle, Diana, *GDP: A Brief but Affectionate History*, Princeton: Princeton University Press, 2015.
- Crotty, James R., "Post-Keynesian Economic Theory: An Overview and Evaluation,” dalam *Jurnal The American Economic Review*, Vol. 70 No. 2 Tahun 1980.
- Cutamora, Jezyl, “The Market Distortion Effect of Government Intervention in Higher Education,” dalam *Jurnal Recoletos Multidisciplinari Research Journal*, Vol. 9 No. 1 Tahun 2021.
- da Silva, Danilo Freitas Ramalho, “Friedman, Phelps, Lucas and The Natural Rate of Unemployment,” dalam *Jurnal CHOPE*, Edisi ke 11 Tahun 2011.
- Damang, Masri et al., “Relasi Negara, Kebijakan Fiskal dan Ekonomi Islam,” dalam *Jurnal Attractive: Innovative Education Journal*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2023.
- Daymon, Christine et al., *Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Public Relations & Marketing Communications*, Bandung: PT Bentang Pustaka, 2008.
- Deleplace, Ghislain, "Orthodox versus Unorthodox Views on Ricardo’s Theory of Money,” dalam *Jurnal The European Journal of the History of Economic Thought*, Vol. 27 No. 6 Tahun 2020.
- Dewantara, Aditama, "Etika Distribusi Ekonomi Islam: Perbandingan Sistem Distribusi Kapitalis dengan Sistem Distribusi Islam," dalam *Jurnal Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2020.
- Dimiyati, *Teori Keuangan Islam: Rekonstruksi Metodologis Terhadap Konsep Keuangan al-Ghazali*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Doni, Amsah Hendri et al. "Pengangguran dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Kovenasional,” dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Syariah*, Vol. 2 No. 3 Tahun 2023.
- Dorfman, Joseph, "Heterodox Economic Thinking and Public Policy," dalam *Jurnal of Economic Issues*, Vol. 4 No. 1 Tahun 1970.

- Dos Santos, Paulo L., "Not "Wage-Led" versus "Profit-Led," But Investment-Led versus Consumption-Led Growth," dalam *Jurnal of Post Keynesian Economics*, Vol. 37 No. 4 Tahun 2015.
- Drakopoulos, Stavros & Loannis Katselidis, *Economic Policy and the History of Economic Thought*, London: Routledge, 2023.
- Eatwell et al, *General Equilibrium*, London: Palgrave Macmillan, 1989.
- Ehnts, Dirk & Michael Paetz, "How Do We Finance The Covid-19 Debt? Attempt to Find A Right Answer to A Wrong Question from The Perspective of Modern Monetary Theory (MMT)," dalam *Jurnal Revista de Economía Crítica*, No. 31 Tahun 2021.
- Ehnts, Dirk H., "Modern Monetary Theory and The Public Purpose," dalam *Jurnal American Review of Political Economy*, Vol. 15 No.1 Tahun 2020. <https://arpejournal.com/article/id/173/> diakses 2 Oktober 2024.
- , *Modern Money Theory: Professional Practice in Governance and Public Organizations*, Berlin: Springer, 2024.
- Elsner, Wolfram, "Complexity Economics As Heterodoxy: Theory And Policy," dalam *Jurnal of Economic Issues*, Vol. 51 No. 4 Tahun 2017.
- Espinosa, Garzón et al., "Fiscal Policy Approaches: An Inquiring Look From The Modern Monetary Theory," dalam *Journal of Economic Issues*, Vol. 55 No. 4 Tahun 2021.
- Faber, Pamela & Silvia Montero Martinez, "Terminologi" dalam *Jurnal Akademia*, https://www.researchgate.net/publication/334112813_Terminology diakses 23 September 2024.
- Firdaus, Muhammad Irkham, "The Concept of Money According to the Thought of Ibn Taymiyah and Imam Ghazali and its Impelemation in the Economic Field," dalam *Jurnal Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2020.
- Fitriah, Mia, "Kajian Al-Quran dan Hadits Tentang Kesehatan Jasmani Dan Ruhani," dalam *Jurnal Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol.15 No. 1 Tahun 2016.
- Foster, John Bellamy & Michael D. Yates, "Piketty and The Crisis of Neoclassical Economics," dalam *Jurnal Monthly Review*, Vol. 66 No. 6 Tahun 2014.
- Fraenkel, J.R & Wallen, E., *How to Design and Evaluate Research in Education*, Singapore: McGraw Hill, 2007.
- Fried, Barbara H., *The Progressive Assault on Laissez Faire: Robert Hale and The First Law and Economic Movement*, United States: Havard University Press, 1998.
- Friedman, Milton, *Quantity Theory of Money*, London: Palgrave Macmillan, 1989.
- Froyen, Richard T., *Macroeconomics: Theories and Policies*, London: Pearson Educated Limited, 2006.

- Fuadi, Ariza, "Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Pandangan Islam dan Kapitalisme," dalam *Jurnal JESI: Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2016.
- Fujiwara, Ipei & Kiminori Matsuyama, "Competition and The Philips Curve," dalam *Discussion Paper*, London: Centre for Economic Policy Research, 2023.
- Gailbraith, James K. et al., "Inequality and Unemployment in Europe: The American Cure," dalam *Jurnal UTIP Working Paper*, No. 11 Tahun 2000, hal. 1-23 <https://ssrn.com/abstract=228689> diakses 3 Oktober 2024.
- Gali, Jordi, "Notes for a New Guide to Keynes: Wages, Aggregate Demand, and Employment," dalam *Jurnal of the European Economic Association*, Vol. 11 No. 5 Tahun 2013, hal. 973-1003. <https://doi.org/10.1111/jeea.12032> Diakses 24 September 2024
- Garegnani, P., "On the Labour Theory of Value in Marx and in the Marxist Tradition" dalam *Jurnal Review of Political Economy*, Vol. 30 No. 4 Tahun 2018.
- Garfinkle, Steven J., "Shepherds, Merchants, and Credit: Some Observations On Lending Practices in Ur III Mesopotamia," dalam *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, edisi 47 Tahun 2004.
- , *Entrepreneurs and Enterprise in Early Mesopotamia: A Study of Three Archives from the Third Dynasty of Ur (2112–2004 BC)*, Bethesda, Maryland: CDL Press, 2012.
- Garnaut, Ross & Ligang Song, *The China Boom and Its Discontent*, Canberra: ANU Press, 2005.
- Garnett Jr, Robert F., "Paradigms and Pluralism in Heterodox Economics," dalam *Jurnal Review of Political Economy*, Vol. 18 No. 4 Tahun 2006.
- Garrison, Roger W., *Time and Money: The Macroeconomics of Capital Structure*, New York: Routledge, 2001.
- Giroux, Henry A., "Austerity and The Poison of Neoliberal Miseducation," dalam *Jurnal Symplekē*, Vol. 22. No. 1-2 Tahun 2014.
- Glaser, B.G. & Strauss, A.L., *The Discovery of Grounded Theory*, New York: Aldine Publishing Co., 1967.
- Goldman, Alvin I. & James C. Cox. "Speech, Truth, and The Free Market for Ideas." Dalam *Jurnal Legal Theory*, Vol. 2 No.1 Tahun 1996.
- Gomes, Isadora Bonitz Silva & Norberto Montani Martins, "MMT, Monetary Sovereignty And Fiscal Policy Space In Brazil (1999-2019)," dalam *Jurnal Cuadernos de Economía*, Vol. 42 No. 88 Tahun 2023.

- Gotz, Norbert, "Moral Economy: Its Conceptual History and Analytical Prospects," dalam *Jurnal of Global Ethics*, Vol. 11 No. 2 Tahun 2015.
- Gourevitch, Peter Alexis, "Breaking with Orthodoxy: The Politics of Economic Policy Responses to The Depression of the 1930s," dalam *Jurnal International Organization*, Vol. 38 No.1 Tahun 1984.
- Guarini, Giulio & Gabriel Porcile. "Sustainability in A Post-Keynesian Growth Model for An Open Economy," dalam *Jurnal Ecological Economics*, Edisi 126 Tahun 2016.
- Guttmann, Robert, "The Heterodox Notion of Structural Crisis," dalam *Jurnal Review of Keynesian Economics*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2015.
- Husin, Achmad Fuadi. "Islam dan kesehatan," dalam *Jurnal Islamuna: Jurnal Studi Islam*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2014.
- Hadi, Abdul, "Konsep dan Praktek Kesehatan Berbasis Ajaran Islam," dalam *Jurnal Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 11 No. 2 Tahun 2020.
- Hakim, Lukman & Ahmad Danu Syaputra, "Al-Qur'an dan Pengentasan Kemiskinan," dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6 No. 3 Tahun 2020.
- Hamzah, Amir, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2020.
- Hanley, Ryan Patrick *Adam Smith: His Life, Thought, and Legacy*, Princeton: Princeton University Press, 2016.
- Harahap, Darwis, "Analisis Stabilitas Dinar Dirham dan Dolar AS dalam Denominasi Rupiah", *Tesis*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2006.
- Harvey, John T. & Robert F. Garnett Jr., *Future Directions for Heterodox Economics*, Michigan: The University of Michigan Press, 2008.
- Hasan, Ahmad, *Mata Uang Islami: Telaah komprehensif Sistem Keuangan Islami*, diterjemah oleh: Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Hasan, Asyari et al., "The Concept of Money in an Islamic Perspective," dalam *Jurnal EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam*, Vol. 10 No. 2 Tahun 2023.
- Hasanah, Mauizhotul, "Pandemi Covid-19: Inflasi dan Pengangguran dalam Perspektif Ekonomi Islam," dalam *Jurnal Asy syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2021.
- Hayati, Fitri & Andri Soemitra, "Filantropi Islam Dalam Pengentasan Kemiskinan," dalam *Jurnal E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, Vol. 23 No. 2 Tahun 2022.
- Hensher, Martin, "The Economics of The Wellbeing Economy: Understanding Heterodox Economics for Health In All Policies and Co-Benefits," dalam *Jurnal Health Promotion Journal of Australia*, Vol. 34 No. 3 Tahun 2023.

- Hermann, Christoph, "Structural Adjustment and Neoliberal Convergence in Labour Markets and Welfare: The Impact of the Crisis and Austerity Measures on European Economic and Social Models," dalam *Jurnal Competition & Change*, Vol. 18 No. 2 Tahun 2014.
- Hickel, Jason et al., "How to Pay for Saving The World: Modern Monetary Theory for A Degrowth Transition," dalam *Jurnal Ecological Economies*, Vol. 214 No. 107968 Tahun 2023, hal. 1-8. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2023.107968> diakses 3 Oktober 2024.
- Hidayat, Rifatul, "Hak atas Derajat Pelayanan Kesehatan yang Optimal," dalam *Jurnal Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 16 No. 2 Tahun 2016.
- Hiya, Nirmadar Ningsih, "Studi Literatur Kebijakan Moneter Islam Tanpa Bunga," dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2022.
- Hollings, Stephanie & David A. Turner, "Economics of Education after Covid," dalam *Jurnal World Studies in Education*, Vol. 22 No.1 Tahun 2021.
- Holt, Justin P., *Modern Monetary Theory and Distributive Justice*, New York: Springer Nature, 2023.
- Hudson, Michael, "Finance Capitalism versus Industrial Capitalism: The Rentier Resurgence and Takeover," dalam *Jurnal Review of Radical Political Economics*, Vol. 53 No. 4 Tahun 2021.
- , "Piketty vs The Classical Economic Reformers," dalam *Jurnal Real-World Economic Review*, Edisi 69 Tahun 2014.
- , "Origins of Money and Interest: Palatial Credit, Not Barter," dalam Battilossi, S., Cassis, Y., Yago, K. (ed) *Handbook of the History of Money and Currency*, Singapore: Springer, 2020. https://doi.org/10.1007/978-981-13-0596-2_1 diakses 1 Agustus 2024.
- , "Palatial Credit: Origins of Money and Interest" dalam *website* <https://michael-hudson.com/2018/04/palatial-credit-origins-of-money-and-interest/> diakses 20 Agustus 2024.
- , "The Development of Money-of-Account in Sumer's Temples," dalam Michael Hudson and Cornelia Wunsch, (ed), *Creating Economic Order: Record-Keeping, Standardization and the Development of Accounting in the Ancient Near East*, Bethesda: CDL Press, 2004.
- , *and forgive them their debt: Lending, Foreclosure and Redemption from Bronze Age Finance to the Jubilee Year*, Dresden: ISLET-Verlag, 2018.
- , *The Bubble and Beyond*, Dresden: ISLET-Verlag, 2012.

- Hung, Ho-fung & Daniel Thompson. "Money Supply, Class Power, and Inflation: Monetarism Reassessed," dalam *Jurnal American Sociological Review*, Vol. 81 No. 3 Tahun 2016.
- Husni, Indra Sholeh, "Konsep Keadilan Ekonomi Islam dalam Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konsepsional," dalam *Jurnal Islamic Economics Journal*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2020.
- Huterski, Robert, "The Concept of The State as Employer ff Last Resort in The Context of Modern Money Theory," dalam *Jurnal Polityka Spoleczna*, Vol. 522 No. 9 Tahun 2017.
- Ilmi, Syaiful, "Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam," dalam *Jurnal Al-Maslahah*, Vol. 13 No. 1 Tahun 2017.
- Imbs, J. et al, "Sectoral Phillips Curves and The Aggregate Phillips curve," dalam *Jurnal of Monetary Economics*, Vol. 58 No. 4 Tahun 2011.
- Ionescu, Cristian, "Financial Instability and Financial Innovations," dalam *Jurnal Economy Transdisciplinarity Cognition*, Vol. 15 No. 2 Tahun 2012.
- Irfan, Fauzan et al., "Pola Makan Sesuai Anjuran Nabi Muhammad SAW Menurut Perspektif Kesehatan," dalam *Jurnal of Creative Student Research*, Vol. 1 No. 5 Tahun 2023.
- Ismail, Ismail, "Analisis Peran Pengusaha dalam Mengurangi Pengangguran Terbuka Perspektif Ekonomi Islam di Kota Bima (Studi Kasus HIPMI dan TDA Kota Bima)," dalam *Jurnal J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2021.
- Izzan, Ahmad & Tanjung, Syahri, *Referensi Ekonomi Syariah; Ayat-ayat al-Qur'an yang berdimensi Ekonomi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Jalili, Ahmad et al., "Zakat dan Keadilan Ekonomi Perspektif Islam, Kapitalisme, dan Sosialisme," dalam *Jurnal Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2022.
- Jefferson, Therese & John E. King, *Post Keynesian Economics*, Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2024.
- Jevđović, Gordana & Ivan Milenković, "Monetary versus Fiscal Dominance in Emerging European Economies," dalam *Jurnal Facta Universitatis, Series: Economics and Organization*, Edisi ke 1 Tahun 2018.
- Jo, Tae-Hee et al., "Beyond Market-Fundamentalist Economics: An Agenda for Heterodox Economics to Change The Dominant Narrative," dalam *Jurnal On the Horizon*, Vol. 20 No. 3 Tahun 2012.
- Jung, Alexander, "The Quantity Theory of Money, 1870-2020," dalam *Jurnal ECB Working Paper No. 2024/2940*. <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4828359> diakses 28 September 2024.

- Juniper, James, "Degrowth And Full Employment-A Modern Monetary Theory Perspective," dalam *Jurnal of Resilient Economies*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2021.
- Kahf, Monzer, *Ayat dan Hadits Tentang Ekonomi*, Jakarta: Komite Nasional dan Keuangan Syari'ah (KNEKS), 2022.
- Kara, Muslimin, "Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam", dalam *Jurnal Assets*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2012.
- Karim, Adiwarmanto Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, ed. III, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Karim, Bisyril Abdul & M. Hasibuddin, "Revolusi Mental Melalui Pendidikan Islam Berbasis Metode Tazkiyatun Nafs," dalam *Jurnal Education and Learning Journal*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2021.
- Kates, Steven, "Supply Creates its Own Demand: A Discussion of the Origins of the Phrase and of its Adequacy as an Interpretation of Say's Law of Markets," dalam *Jurnal History of Economics Review*, Vol. 41 No.1 Tahun 2005.
- Kaufman, George G., "Lender of Last Resort: A Contemporary Perspective," dalam *Jurnal of Financial Services Research*, Vol. 5 No. 2 Tahun 1991.
- Keen, Steve, *Debunking Economics: The Naked Emperor Dethroned*, London: Zrd Books, 2011.
- Kehoe, Timothy J. et al., "More on Money as A Medium of Exchange," dalam *Jurnal Economic Theory*, Vol. 3 No. 2 Tahun 1993.
- Keizer, Piet, "A Multidisciplinary Economic Framework of Analysis," dalam *Jurnal of Philosophical Economics*, Vol. 11 No. 1 Tahun 2017.
- Kelton, Stephanie, *The Deficit Myth: Modern Monetary Theory and The Birth Of The People's Economy*, New York: Public Affairs, 2020.
- Keynes, John Maynard, *The General Theory of Employment, Interest and Money*, London: Palgrave Macmillan, 2018.
- Khopiatusiadah, "Konsep Uang dan Kebijakan Moneter dalam Islam: Studi atas Pemikiran M.A. Choudhury," *Tesis*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2004.
- Kincaid et al., *A Modern Guide to Philosophy of Economics*, Massachusetts, Edward Elgar Publishing, Inc., 2021.
- Kjosavik, Darley Jose, "Methodological Individualism and Rational Choice in Neoclassical Economics: A Review of Institutional Critique." Dalam *Forum for Development Studies*, Vol. 30. No. 2. Tahun 2003.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Kregel, Jan, et al., *Financial Stability and Growth: Perspective on Financial Regulation and New Developmentalism*, New York: Routledge, 2014.

- Krueger, Anne O., "Government Failures in Development," dalam *Jurnal of Economic perspectives*, Vol. 4 No. 3 Tahun 1990.
- Laidler, David, "Financial Stability, Monetarism and The Wicksell Connection," dalam *Jurnal Review of Economic Analysis*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2009.
- , "On Say's Law, Money, and the Business Cycle," dalam *Arsip Department of Economics Research Reports*, No. 8106 Department of Economics, University of Western Ontario, Tahun 1981, <https://ir.lib.uwo.ca/economicsresrpt> diakses 30 September 2024.
- Latif, Imam Mashudi, "Aspek-Aspek Kecerdasan Spiritual Dalam Konsep Pendidikan Nabi Ibrahim AS," dalam *Jurnal Sumbula: Jurnal Studi Keagamaan, Sosial dan Budaya*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2016.
- Lavoie, Marc, "Was Hyman Minsky a Post-Keynesian Economist?," dalam *Jurnal Review of Evolutionary Political Economy*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2020.
- Leclaire, Joëlle, "Invited Article Fiscal and Monetary Policy for Difficult Times: MMT solutions," dalam *Jurnal European Journal of Economics and Economic Policies*, Vol. 20 No.2 Tahun 2023.
- Lee, Frederic S., "Heterodox Economics," dalam *Jurnal The Long Term View*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2008.
- , "Heterodox Surplus Approach: Production, Prices and Value Theory, dalam *Jurnal MPRA*, No. 31824 Tahun 2011, <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/31824/> diakses 1 Oktober 2024.
- Li, Lili et al., "Government Finance and Money Creation in China: An MMT Perspective," dalam *Jurnal The Chinese Economy*, Vol. 53 No. 4 Tahun 2020.
- Liang, Yan, "An MMT Informed Fiscal Reform for China," dalam *Jurnal The Chinese Economy*, Vol. 57 No. 3 Tahun 2024.
- Lin, Brian Chi-ang, "MMT or Public Enterprises? A Contribution to Economic Sustainability," dalam *Jurnal of Economic Issues*, Vol. 56 No. 2 Tahun 2022.
- Lincoln, Y. S. & E.G. Guba, *Paradigmatic Controversies, Contradictions and Emerging Confluences*, California: Sage Publications, 2000.
- Lubis, A. Y., *Filsafat Ilmu: Klasik hingga Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Machali, Imam, "Islam Memandang Hak Asasi Pendidikan," dalam *Jurnal MP*, Vol. 17 No. 1 Tahun 2012.
- Manera, Carlos, "Orthodoxy versus Heterodoxy: Inflation, Unemployment, Growth, Profit," dalam *Jurnal eabh Papers*, Vol. 15 No. 1 Tahun 2015.
- Marko, Backovic & Popovic Zoran, "The Analysis Model of General Equilibrium and Financial Instability of Economic System," dalam

- Jurnal Montenegerin Journal of Economic*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2012, hal. 63-85.
- Martin, Ron, *Economy: Critical Essay in Human Geography*, New York: Routledge, 2017.
- Masdjojo, Gregorius Nasiansenus, "Kajian Pendekatan Keynesian Dan Moneteris Terhadap Dinamika Cadangan Devisa Melalui Penelusuran Neraca Pembayaran Internasional: Studi Empiris Di Indonesia Periode 1983-2008," *Tesis*, Universitas Diponegoro 2010.
- Mastromatteo, Giuseppe & Lorenzo Esposito, "Banking on ELR: How Hyman Minsky's Ideas Can Help Tackle Unemployment," dalam *Jurnal of Economic Issues*, Vol. 51 No. 3 Tahun 2017.
- Maulani, Putri Nadhila et al., "Konsep dan Teori Permintaan Uang dalam Perspektif Islam," dalam *Jurnal Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, Vol. 2 No. 3 Tahun 2023.
- Mavrotas, G. & A. Shorrocks, *Advancing Development: Core Themes in Global Economics*, London: Palgrave Macmillan, 2007.
- McCombie, J. S. L. & M. R. M. Spreafico, "Income Inequality and Growth: Problems with The Orthodox Approach," dalam *Konferensi Analyzing Growth and Inequality in the 21st Century The INET Conference Paris*, 2015.
- McRorie, Christina, "Heterodox Economics, Social Ethics, and Inequalities: New Tools for Thinking Critically about Markets and Economic Injustices," dalam *Jurnal of Religious Ethics*, Vol. 47 No. 2 Tahun 2019.
- Mentari, Ellyza Cindi et al., "Peran Pemerintah melalui Program Pelatihan dalam Mengurangi Jumlah Pengangguran Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan)," dalam *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 8 No.1 Tahun 2023.
- Minarni, "Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Taimiyah dan John Maynard Keynes tentang Keuangan Publik," dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7 No.2 Tahun 2021.
- Minsky, Hyman P., "Money and The Lender of Last Resort," dalam *Jurnal Challenge*, Vol. 28 No. 1 Tahun 1985.
- , *Stabilizing An Unstable Economy*, United States: Yale University Press, 1986.
- Mitchel, William F. & Fazi, Thomas, *Reclaiming The State: A Progressive Vision of Sovereignty for a Post-Neoliberal World*, London: Pluto Press.
- Mitchel, William F., et al., *Macroeconomics*, Red Globe Press: London, 2019.

- Mitchell, William F. & Muysken, John, *Full Employment Abandoned: Shifting Sands and Policy Failures*, Northampton: Edward Elgar, 2008.
- Mitchell, William F., "The Buffer Stock Employment Model and The NAIRU: The Path to Full Employment," dalam *Jurnal of Economic Issues*, Vol. 32 No. 2 Tahun 1998.
- , "The Nairu, Structural Imbalance and The Macroequilibrium Unemployment Rate," dalam *Jurnal Australian Economic Papers*, Vol. 26 No. 48 Tahun 1987.
- , "Debt and Deficits an MMT perspective," dalam *Jurnal Centre of Full Employment and Equity CoffEE*, No. 20-05 Tahun 2020.
- Morgan, Jamie, "Degrowth: Necessary, Urgent And Good For You," dalam *Jurnal Real-World Economics Review*, Edisi 93 Tahun 2020.
- Moschella, Manuela,, *Unexpected Revolutionaries: How Central Banks Made and Unmade Economic Orthodoxy*, New York, Cornell University Press, 2024.
- Mosler, Warren, *7 Deadly Innocent Frauds of Economic Policy*, United States: Valence Co.Inc, 2004.
- , "Full Employment and Price Stability," dalam *Jurnal Post Keynesian Economics*, Vol. 20 No. 2 Tahun 1997.
- , *Soft Currency Economics II: What Everyone Thinks That They Know About Monetary Policy Is Wrong*, United States: Valence Co.Inc, 1996.
- Muchtar, Muh Ilham, "Pendidikan Karakter; Garansi Peradaban Berkemajuan," dalam *Jurnal TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2017.
- Mujibatun, Siti, "Konsep Uang dalam Hadis", *Desertasi*, Semarang: IAIN Walisongo, 2012.
- Mulyani, Reni, "Inflasi dan Cara Mengatasinya dalam Islam," dalam *Jurnal Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2020.
- Muna, Arif Chasanul, "Prinsip-prinsip Penanganan Kemiskinan di Madinah pada Masa Nabi Muhammad Saw," dalam *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*, Vol. 9 No. 2 Tahun 2012.
- Murray, Michael J. Murray & Mathew Forstater, *The Job Guarantee And Modern Money Theory: Realizing Keynes's Labor Standard*, London: Palgrave Macmillan, 2017.
- Murray, Michael J., & Mathew Forstater, *The Job Guarantee And Modern Money Theory: Realizing Keynes's Labor Standard*, New York: Springer Link, 2017.

- Mustofa, Lutfi, "Penarikan Pajak pada Saat Pandemi Virus Corona dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam," dalam *Jurnal Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2021.
- Nasution, Ja'far, "Memahami Tidak Syar'inya Bank Syariah," dalam *Jurnal Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2015.
- Nasution, Mustafa Edwin, *Pengenalan Ekklusif Ekonomi Islam*, cet. II, Jakarta: Kencana, 2007.
- Nazir, M., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Neary, Hugh M., "Equilibrium Structure in an Economic Model of Conflict," dalam *Jurnal Economic Inquiry*, Vol. 35 No. 3 Tahun 2007.
- Neil, Edward J. & Mathew Forstater, *Reinventing Functional Finance: Transformational Growth and Full Employment*, Massachusetts: Edward Elgar Publishing Limited, 2003.
- Nell, Edward J. & Willi Semmier, *Nicholas Kaldor and Mainstream Economics: Confrontation or Convergence?*, London: Palgrave Macmillan UK, 1991.
- Nelson, Joan M., *Economic Crisis and Policy Choice: The Politics of Adjustment in the Third World*, Princenton: Princenton University Press, 1990.
- Nersian, Yeva & L. Randall Wray, *The Elgar Companion to Modern Money Theory*, Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2024.
- , "How to pay for The Green New Deal," dalam *Jurnal Levy Economics Institute Working Papers*, Seri 931 tahun 2019.
- Nesiba, Reynold F., "Do Institutionalists and Post-Keynesians Share A Common Approach to Modern Monetary Theory (MMT)?," dalam *Jurnal European Journal of Economics and Economic Policies*, Vol. 10 No. 1 Tahun 2013.
- Nugraha, Muhamad Tisna, "Aisyah Sebagai Figur Emansipasi Perempuan Dunia," dalam *Jurnal Raheema: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2019.
- Nunzairina, "Dinasti Abbasiyah: Kemajuan Peradaban Islam, Pendidikan dan Kebangkitan Kaum Intelektual," dalam *Jurnal JUSPI: Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2020.
- Nycz, Grzegorz, "Questioning the Neoliberal Paradigm: A Critique of the Washington Consensus in Historical Perspective." Dalam *Jurnal of American Studies*, Edisi 11 Tahun 2010.
- O'Hara, P. A., "Principles of Institutional-Evolutionary Political Economy: Converging Themes from the Schools of Heterodoxy," dalam *Jurnal of Economic Issues*, Vol. 41 No. 1 Tahun 2007.

- Okwori, Joseph & John Abu, "Monetary Policy and Inflation Targeting in Nigeria," dalam *Jurnal International Journal of Economics and Financial Management*, Vol. 2 No. 3 Tahun 2017.
- Ostendorf, Annette & Michael Thoma, "Demands and Design Principles of A heterodox Didactics for Promoting Critical Thinking in Higher Education," dalam *Jurnal Higher Education*, Vol. 84 No. 1 Tahun 2022.
- Palley, Thomas I., "The Fallacy of The Natural Rate of Interest and Zero Lower Bound Economics: Why Negative Interest Rates May Not Remedy Keynesian Unemployment," dalam *Jurnal Review of Keynesian Economics*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2019.
- , "Competing Views of The Money Supply Process: Theory and Evidence," dalam *Jurnal Metroeconomica*, Vol. 45 No. 1 Tahun 1994.
- , "What's Wrong with Modern Money Theory: Macro and Political Economic Restraints on Deficit-Financed Fiscal Policy," dalam *Jurnal Review of Keynesian Economics*, Vol. 8 No. 4 Tahun 2020.
- Papadimitrou, Dimitri B. & Gennaro Zezza, *Contributions in Stock-flow Modeling: Essays in Honor of Wynne Godley*, London: Palgrave Macmillan, 2012.
- Papadimitrou, Dimitri B. & L. Randall Wray, *The Elgar Companion to Hyman Minsky*, Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2010.
- Papadimitrou, Dimitri B., *Contributions To Economic Theory, Policy, Development And Finance: Essays In Honor Of Jan A. Kregel*. London: Palgrave Macmillan, 2014.
- Patton, *How to Use Qualitative Methodss in Evaluation*, diterjemahkan oleh: Budi Puspo Priyadi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Peoples, James, "Deregulation and the labor market," dalam *Jurnal of Economic Perspectives*, Vol. 12 No. 3 Tahun 1998.
- Petrakos, George et al., "Income Inequality in the Over-Indebted Eurozone Countries and The Role of The Excessive Deficit Procedure," dalam *Jurnal Open Economies Review*, Vol. 35 No. 2 Tahun 2024.
- Phelby, John, *New directions in Post-Keynesian Economics*, Massachusetts: Edward Elgar Publishing Limited, 1989.
- Pike, Andy, "Heterodoxy And The Governance of Economic Development," dalam *Jurnal Environment And Planning A*, Vol. 36 No.12 Tahun 2004.
- Polli, W.I.M, *Tonggak-Tonggak Sejarah Pemikiran Ekonomi*, Surabaya: Brilian Internasional, 2010.
- Postel, Nicolas & Richard Sobel, "Towards a Heterodox Theory of the Economic Actor. The Contribution of Two French Institutionalists

- Schools,” dalam *Jurnal History of Economic Ideas*, Vol. 19 No. 2 Tahun 2011.
- Prais, Sigbert J., "Some Mathematical Notes On The Quantity Theory Of Money In An Open Economy," dalam *Jurnal International Monetary Fund*, Vol. 8 No. 2 Tahun 1961.
- Pratama, Kenny Pradipta Montoya Putra & Ali Zainal Abidin, "A Literature Study On Modern Monetary Theory (Mmt): Implementation And Impact,” dalam *Prosiding of Midyear International Conference*, Vol. 2 Tahun 2023.
- Pullen, John, *The Marginal Productivity Theory of Distribution*, London, Routledge, 2010.
- Putong, Iskandar, *Economics: Pengantar Mikro dan Makro*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010.
- Putra, Ahimsa dan Jawahir Thontowi, “Paradigma Profetik Dalam Pengajaran Dan Penelitian Ilmu Hukum”, dalam *Jurnal UNISIA*, Vol. 37 No. 76 Tahun 2012.
- Putra, Trisno Wardy et al, "Kontribusi Wakaf dalam Membangun Peradaban Dunia Islam dan Barat: Studi Pada Lembaga Pendidikan Tinggi,” dalam *Jurnal Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 10 No. 1 Tahun 2024.
- Putri, Sedinadia, "Kontribusi UMKM terhadap Pendapatan Masyarakat Ponorogo: Analisis Ekonomi Islam tentang Strategi Bertahan di Masa Pandemi Covid-19,” dalam *Jurnal EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2020.
- Rahma, Fatimah Nur et al., "Penerapan Kepemimpinan Nabi Muhammad pada Pendidikan Islam,” dalam *Jurnal PANDAWA*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2022.
- Rahman, Abdul, "Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Islam-Tinjauan Epistemologi dan Isi-Materi,” dalam *Jurnal Eksis*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2012.
- Rahmania, Farra Anisa & Fuad Nashori, "Mediator Syukur dan Sabar pada Dukungan Sosial dan Stres Tenaga Kesehatan selama Pandemi Covid-19,” dalam *Jurnal Psikologi Islam dan Budaya*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2021.
- Rahmawaty, Anita, "Distribusi dalam Ekonomi Islam Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif,” dalam *Jurnal Equilibrium*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2013.
- Ramsay, Tony, "The Jobs Guarantee: A Post Keynesian Analysis,” dalam *Journal of Post Keynesian Economics*, Vol. 25 No. 2 Tahun 2002.
- Ramsay, Tony, “The Jobs Guarantee: A Post Keynesian Analysis,” dalam *Journal of Post Keynesian Economics*, Vol. 25 No. 2 Tahun 2002.

- Reese, William L., *Dictionary of Philosophy and Religion: Eastern and Western Thought*, New Jersey: Humanities Press, 1980.
- Renger, Johannes, "Interaction of Temple, Palace, and Private Enterprise in the Old Babylonian Economy," dalam Lipinski, Eduard (ed.), *State and Temple Economy in the Ancient Near East* (Leuven) I, 1979.
- , "Patterns of Non-Institutional Trade and Non-Commercial Exchange in Ancient Mesopotamia at the Beginning of the Second Millennium BC," dalam Alfonso Archi, *Circulation of Goods in Non-Palatial Context in the Ancient Near East*, Roma: Incunabula Graeca LXXII, 1984.
- Reza, Veni, "Kegagalan Pasar (Market Failure): Information Asymmetric, Externalities, Public Goods Dan Inefficient Allocation, dalam *Jurnal Indratech*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2021.
- Roger E. Backhouse & Steven G. Medema, "Retrospective on the Definition of Economics," dalam *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 23 No. 1 Tahun 2009.
- Romdhoni, Abdul Haris et al., "Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga: Analisis Perdebatan Bunga Bank Termasuk Riba Atau Tidak," dalam *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, Vol. 13 No. 1 Tahun 2012.
- Roshnaei, Nima & Nargs Khoramshahi, "Government Intervention in Free Market: The Shipping Industri," dalam *Jurnal of Entrepreneurship, Business and Economics*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2020
- Rosia, Rina, "Pemikiran Imam al-Ghazali Tentang Uang," dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2018.
- Roubini and Mihm, *Crisis Economics: A Crash Course in the Future of Finance*, London: Penguin, 2011.
- Rousseas, Stephen, *Post Keynesian Monetary Economics*, London: Springer, 1998.
- Rubini, "Pendidikan Moral dalam Perspektif Islam," dalam *Jurnal AL-MANAR: Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2019.
- Runes, Dagobert D., *Dictionary of Philosophy*, New Jersey: Little-Field, Adams & Co., 1982.
- Saliba, Jamil, *al-Mu`jam al-Falsafibi al-Alfaz al-`Arabiyyah wa al-Faransiyyah wa al-Injiliziyyah wa al-Latiniyyah*, Beirut: Dar al-Kitab al-Lubnani, 1979.
- Samsul et al., "Sistem Pengendalian Inflasi dalam Sistem Ekonomi Islam," dalam *Jurnal Al-Azhar: Journal of Islamic Economics*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2019.
- Samuelson, P. & W. D. Nordhaus, *Microeconomic*, (ed 17), New York: McGraw-Hill. 2001.

- Saragih, Eka Junila, "Konsep Monopoli dalam Tinjauan Bisnis Islam," dalam *Jurnal Al-Maslahah*, Vol. 13 No. 2 Tahun 2017.
- Sari, Milya & Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA," dalam *Jurnal Natural Science: Jurnal Pendidikan Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2020.
- Sawyer, Malcom & Jonathan Michie, *Capitalism: An Unsustainable Future?*, London: Routledge 2022.
- Schmidt, Peter, "Market Failure vs System Failure as A Rationale for Economic Policy? A Critique from an Evolutionary Perspective," dalam *Jurnal of Evolutionary Economics*, Vol. 28 No. 4 Tahun 2018.
- Secchi, Carlo & Antonio Vilafranca, *Liberalism in Crisis?: European Economic Governance in The Age of Thurbulance*, Massachusetts, Edward Elgar Publishing, Inc., 2009.
- Setiawan, Firman & Iswatul Hasanah. "Kemiskinan dan Pengentasannya dalam pandangan Islam," dalam *Jurnal Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2016.
- Setterfield, Mark, *Complexity, Endogenous Money and Macroeconomic Theory Essays in Honour of Basil J. Moore*, Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2006.
- Sherman, Howard, "The Sad of Orthodox Economics" dalam *Jurnal of Economic Issues*, Vol. 9 No. 2 Tahun 1975.
- Shihab, Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1994.
- Shipman, Alan, "The Significance of MMT in Linking Money, Markets, Sector Balances and Aggregate Demand," dalam *Jurnal Real-World Economics Review*, Edisi 89 Tahun 2019.
- Shipman, Alan, "The SIgnificance of MMT in Linking Money, Markets, Sector Balances and Aggregate Demand," dalam *Jurnal Real World Economics Review*, Edisi 89 Tahun 2019.
- Singarimbun, Masri & Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: LP3ES.
- Singarimbun, Masri, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Siregar, Erni Yusnita, "Kerangka Kerja Kebijakan Moneter Dalam Islam," dalam *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 17 No. 2 Tahun 2021.
- Siregar, Sultan Rafli & Bambang Kurniawan, "Suku Bunga dalam Perpespektif Ekonomi Islam," dalam *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 3 No. 3 Tahun 2023.
- Smith, Adam (1776), *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, Oxford: Oxford University Press, 1976.
- Sofiah, "Konsep Uang dalam Al-Qur'an: Telaah Tafsir al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir," *Tesis*, Jember: Program Studi Ekonomi Syari'ah Pascasarjana IAIN Jember, 2016.

- Solari, Maurizio et al., "Ecological Transition in A Monetary Economy of Production: A Heterodox Approach," dalam *Jurnal Eurasian Economic Review*, Vol. 14 No. 1 Tahun 2024.
- Solikin Dan Suseno, *Uang: Pengertian, Penciptaan dan Peranannya dalam Perekonomian*, Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPPSK) Bank Indonesia, 2002.
- Sonjaya, Saji, "Pengobatan Tradisional dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kesehatan di Indonesia," dalam *Jurnal PEMULIAAN HUKUM*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2022.
- Soros, George, "Toward A Global Open Society," dalam *Jurnal The Atlantic*, Vol 281 No. 1 Tahun 1998.
- Sowell, Thomas, *Say's Law: An Historical Analysis*. United States: Princeton University Press, 2015.
- Spencer, D., "Deconstructing the Labour Supply Curve," dalam *Jurnal Metroeconomica*, Vol. 55, No. 4 Tahun 2004.
- , "From Pain to Opportunity Cost: The Eclipse of the Quality of Work as a Factor in Economic Theory," dalam *Jurnal History of Political Economy*, Vol. 36, No. 2 Tahun 2004.
- , "Love's Labor's Lost? The Disutility of Work and Work Avoidance in the Economic Analysis of Labor Supply," dalam *Jurnal Review of Social Economy*, Vol. 61, No. 2 Tahun 2003.
- Stantcheva, Stefanie, "The Effects of Taxes on Innovation: Theory and Empirical Evidence," dalam *Jurnal NBER Working Paper No. 29359*, Tahun 2021.
- Steele, G. R., "Laissez-faire and The institutions of The Free Market," dalam *Jurnal Economic Affairs*, Vol. 19 No. 3 Tahun 1999.
- Stiglitz, Joseph E., "Markets, Market Failures, and Development," dalam *Jurnal The American Economic Review*, Vol. 79 No. 2 Tahun 1989.
- Stilwell, Frank et al., *Handbook of Alternative Theories of Political Economy*, Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2022.
- Strauss, Anselm L., *Qualitative Analysis for social Scientist*, Cambridge: Cambrigde University Press, 1987.
- Straussman, Jeffrey D., "The Reserve Army of Unemployed Revisited," dalam *Jurnal Society*, Vol. 14 No. 3 Tahun 1977.
- Stubbs, Thomas et al., "Poverty, Inequality, and The International Monetary Fund: How Austerity Hurts The Poor and Widens Inequality," dalam *Jurnal of Globalization and Development*, Vol. 13 No. 1 Tahun 2022
- Subhan, Moh., "Pengangguran dan Tawaran Solutif dalam Perspektif Islam," dalam *Jurnal JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2018

- Suhendi, Chrisna, "Kritik untuk Bank Syariah: Antara Harapan, Kenyataan dan Paradigma Rahmatan lil Alamin," dalam *Jurnal Fokus Ekonomi*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2008.
- Sukirno, Sadono, *Pengantar Teori Ekonomi*, edisi ke 3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Summa, Ricardo. "Alternative Uses of Functional Finance: Lerner, MMT, and The Sraffian Supermultiplier," dalam *Jurnal Review of Keynesian Economics*, Vol. 12 No. 1 Tahun 2024.
- Sunstein, Cass R., *Free Markets and Social Justice*, New York: Oxford University Press, 1997.
- Susanti, Ressi, "Sejarah Transformasi Uang Dalam Islam," dalam *Jurnal of Islam and Plurality*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2017.
- Suseno, Andi, "Pengentasan Kemiskinan Perspektif Hadis Nabi: Studi Hadis Tematis-Kontekstualis," dalam *Jurnal Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 9 No. 1 Tahun 2021.
- Syarun, Muchdie M., "Inflasi, Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi Di Negara-Negara Islam," dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2016.
- Takiddin, "Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam", dalam *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, edisi: Juni Tahun 2014.
- Tan, Kim Song & Sock-Yong Phang, "From Efficiency-Driven to Innovation-Driven Economic Growth: Perspective from Singapore," dalam *Research Working Paper 3569, World Bank Group*, Vol. 1 No. 1 tahun 2005.
- Tanaka, Yasuhito, "An Elementary Mathematical Model For MMT (Modern Monetary Theory)," dalam *Jurnal Research in Applied Economics (Macrothink Institute)*, Tahun 2021.
- Taylor, Lance, "Synthetic MMT: Old Line Keynesianism with an Expansionary Twist," dalam *Jurnal Institute for New Economic Thinking, Working Paper Series No. 103* Tahun 2019.
- Tcherneva, Pavlina R., "The Job Guarantee: Design, Jobs, And Implementation," dalam *Jurnal Levy Economics Institute Working Papers*, Seri 902 Tahun 2018.
- , "The Job Guarantee: MMT's Proposal for Full Employment and Price Stability," dalam *Jurnal Open Society University Network Economic Democracy Initiative, Working Paper No. 02* Tahun 2021.
- , "Money: A Comparison of The Post Keynesian and Orthodox Approaches," dalam *Jurnal Oeconomicus*, Vol. 4 No. 4 Tahun 2001.
- Tcherneva, Pavlina, "Money: Comparison of the Post Keynesian and Orthodox Approaches," dalam *Jurnal Oeconomicus*, Vol. 4 No. 6 Tahun 2001.

- Tobin, James, "Money and Finance in the Macroeconomic Process" dalam *Jurnal of Money, Credit and Banking*, Vol. 14 No. 2 Tahun 1982.
- Tomer, John F., "Economic Man vs. Heterodox Men: The Concepts of Human Nature in Schools of Economic Thought," dalam *Jurnal The Journal of Socio-Economics*, Vol. 30 No. 4 Tahun 2001.
- Tyas, Nashria Rahayuning, "Model Kepemimpinan Pendidikan Nabi Muhammad SAW," dalam *Tesis*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.
- Tymoigne, Eric, "Modern Money Theory and Interrelations between The Treasury and Central Bank: The Case of The United States," dalam *Jurnal of Economic Issues*, Vol. 48 No. 3 Tahun 2014.
- , "Seven Replies to The Critiques of Modern Money Theory," dalam *Jurnal Levy Economics Institute Working Papers Series*, Tahun 2021.
- , "The Cost of Job Guarantee in The United States: Insights from The 1930s Work Programs," dalam *Jurnal Review of Radical Political Economics*, Vol. 46 No. 4 Tahun 2014.
- , "Modern Money Theory On Fiscal And Monetary Policies: Empirics, Theory And Policymaking," dalam *Jurnal Open Society University Network Economic Democracy Initiative*, Edisi ke 4 Tahun 2021.
- , *The Financial System and The Economy*, Portland: Lewis & Clark College, 2018.
- , *The Financial System and The Economy: Principles of Money and Banking*, Portland: Lewis and Clark College, 2018.
- Ummi Kalsum, "Riba dan Bunga Bank dalam Islam: Analisis Hukum dan Dampaknya terhadap Perekonomian Umat," dalam *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2014.
- van Bergejik, Peter A. G. & Rolph van der Hoeven, *Sustainable Development Goals and income inequality*, Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2017.
- Vaughan, Diana, *Theory Elaboration: The Heuristic of Case Analysis*, New York: Cambridge University Press, 1992.
- Wahidah, S. B. & Saepudin, A., "Dimensi Ekonomi Dalam Kehidupan Nabi Adam: Tafsir Surat Thaha 117-119 Dan Surat Al-Baqarah Ayat 36," dalam *Jurnal EKSISBANK*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2018.
- Wahyuni, Sri et al., "Mekanisme Distribusi Kekayaan Negara dalam Ekonomi Islam," dalam *Jurnal Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 10 No. 5 Tahun 2023.
- Warsh, David, *Knowledge and the Wealth of Nations*, United States: W. W. Norton & Company. Inc., 2006.
- Watkins, John P. & James E. Seidelman, "The Great Hypocrisy: Neoliberalism's Critique of Modern Monetary Theory," dalam *Jurnal of Economic Issues*, Vol. 57 No. 3 Tahun 2023.

- Watson, Matthew, "The Institutional Paradoxes of Monetary Orthodoxy: Reflections on The Political Economy of Central Bank Independence," dalam *Jurnal Review of International Political Economy*, Vol. 9 No. 1 Tahun 2002.
- Weatherford, Jack, *The History of Money*, New York: Crown Publisher, 1988.
- Weeden, Kim A. & David B. Grusky. "Inequality and market failure," dalam *Jurnal American Behavioral Scientist*, Vol. 58 No. 3 Tahun 2014.
- Wellisz, Stainslaw, "On External Diseconomies and Government-Assisted Invisible Hand," dalam *Jurnal Economica*, Vol. 21 No. 124 Tahun 1964.
- Whalen, Charles J., *A Modern Guide to Post-Keynesian Institutional Economics*, Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2022.
- William, S. J. & Rod Taylor, *Sustainability and The New Economics: Synthesising Ecological Economics and Modern Monetary Theory*, New York: Springer, 2002.
- Wiyono, Dwi Fitri, "Pemikiran Pendidikan Islam: Konseptualisasi Pendidikan Karakter dalam Perspektif Intelektual Islam Klasik," dalam *Jurnal Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 2 No. 3 Tahun 2017.
- Wray, L. Randall et al., *Guaranteed Jobs through A Public Service Employment Programme for The United States: A Modern Guide to State Intervention*, Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2019.
- Wray, L. Randall et al., *Modern Monetary Theory*, Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2023.
- Wray, L. Randall, "Alternative Paths to Modern Money Theory," dalam *Jurnal Real-World Economics Review*, Vol. 89 No. 1 Tahun 2019.
- , "From The State Theory of Money to Modern Money Theory: An Alternative to Economic Orthodoxy," dalam *Jurnal Levy Economics Institute Working Papers Series*, Tahun 2014.
- , "Minsky's Approach to Employment Policy and Poverty: Employer Of Last Resort And The War On Poverty," dalam *Jurnal Levy Economic Institue*, Working Paper Series No. 515 Tahun 2007.
- , "MMT and Two Paths to Big Deficits," dalam *Jurnal Challenge*, Vol. 62 No. 6 Tahun 2019.
- , "Money, Interest Rates, and Monetarist Policy: Some More Unpleasant Monetarist Arithmetic?," dalam *Jurnal of Post Keynesian Economics*, Vol. 15 No. 4 Tahun 1993.
- , "Sovereign Currency and Non-Sovereign Budgets: The Modern Money Theory Approach," dalam *Jurnal Public Budgeting & Finance*, Vol. 40 No. 3 Tahun 2020.
- , *A Great Leap Forward Heterodox Economic Policy for the 21st Century*, London: Academic Press, 2020.

- Wray, L. Randall, *Credit and State Theories of Money*, Massachusetts: Edward Elgar, 2004.
- , *Modern Money Theory: A Primer on Macroeconomics for Sovereign Monetary Systems*, New York: Palgrave Macmillan, 2015.
- , *Why Minsky Matters*, UK: Princenton Press, 2016
- , The Ownership Society: Social Security is Only The Beginning, dalam *Jurnal Public Policy Brief*, No. 82 Tahun 2005.
- Wright, Ian, "Classical Macrodynamics and The Labor Theory of Value," dalam *Jurnal Open Discussion Papers in Economic*, No. 76 Tahun 2011.
- Xulin, Dong, "World Crisis, Currency War, and The End Of US/Dollar Hegemony: A Conversation with Michael Hudson." Dalam *Jurnal Internasional Critical Thought*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2011.
- Yahya, Muchlis, "Tingkat Suku Bunga Bank Konvensional dan Komitmen Nasabah Menabung di Bank Syariah," dalam *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 16 No. 2 Tahun 2012.
- Yoshino et al., *Studies in International Economics and Finance: Essays in Honour of Prof. Bandi Kamaiah*. Singapore: Springer, 2022.
- Zafirovski, Milan, "Orthodoxy and Heterodoxy in Analyzing Institutions: Original and New Institutional Economics Reexamined," dalam *Jurnal International Journal of Social Economics*, Vol. 30 No. 7 Tahun 2003.
- , "The Rational Choice Generalization of Neoclassical Economics Reconsidered: Any Theoretical Legitimation for Economic Imperialism?," dalam *Jurnal Sociological Theory*, Vol. 18 No. 3 Tahun 2000.
- Zakiyah, Kuni, "Peran Negara dalam Distribusi Kekayaan: Perspektif Ekonomi Islam," dalam *Jurnal AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2017.
- Zayed, Joseph, "Use of MMT in Canadian Gasoline: Health and Environment Issues," dalam *Jurnal American Journal of Industrial Medicine*, Vol. 39 No. 4 Tahun 2001.
- Zulkarnain & Siti Fatimah, "Kesehatan Mental Dan Kebahagiaan: Tinjauan Psikologi Islam," dalam *Jurnal Mawaizh: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, Vol. 10 No. 1 Tahun 2019.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Unggul Purnomo Aji
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 26-07-1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Ahmad Yani, Poncokusumo,
 Poncokusumo,
 Malang, Jatim
Email : alibadri595@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

2002-2008 SDN 1 Poncokusumo
 2008-2012 SMPN 1 Poncokusumo
 2012-2015 PP Nurul Hikmah Assalafiyah
 2015-2019 Universitas Wisnuwardhana
 2020-2022 University of Missouri Kansas City
 2022-2024 Universitas PTIQ Jakarta

Daftar Karya Tulis Ilmiah:

1. Aji, Unggul Purnomo. "Teologi Wahabi: Sejarah, Pemikiran Dan Perkembangannya," dalam *Jurnal El-Adabi: Jurnal Studi Islam*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2023, hal. 45-61.
2. Aji, Unggul Purnomo. "Penafsiran Bernuansa Mu'tazili Dalam Tafsir Al-Kasyaf," dalam *Jurnal At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2024, hal. 165-178.
3. Abraham, Juneman, Buhaerah, Pihri, Aji, Unggul Purnomo, Onie, Sandersan and Dalimunthe, Surya, "National Economic and Health Recovery in the Disruptive Pandemic: A Proposal for Indonesia," dalam *Jurnal Academia Letters*, Article 1345 Tahun 2021, hal. 1-7. <https://ssrn.com/abstract=3899576>
4. Aji, Unggul Purnomo & Buhaerah, Pihri, "The Possibility of Running Full Employment: A New Insight from Indonesia's Village Funds," dalam *The 4th SEASIA Biennial Conference*, Tahun 2022. https://ipsh.brin.go.id/wp-content/uploads/2022/06/Conference-Book-Seasia-2022_8june_ef.pdf

DISKURSUS PARADIGMA MAKROEKONOMI INKLUSIF DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

ORIGINALITY REPORT

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 20% SIMILARITY INDEX | 19% INTERNET SOURCES | 11% PUBLICATIONS | 10% STUDENT PAPERS |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|

PRIMARY SOURCES

| | | |
|----------|--|---------------|
| 1 | repository.ptiq.ac.id Internet Source | 3% |
| 2 | Faiha Fikriyyah, Rachmad Risqy Kurniawan, SEI, MM, Ph.D. "Distribusi Kekayaan dalam Perspektif Al Quran Surah Al Hasyr ayat 7", Open Science Framework, 2022 Publication | 1% |
| 3 | text-id.123dok.com Internet Source | 1% |
| 4 | digilib.uinkhas.ac.id Internet Source | 1% |
| 5 | attractivejournal.com Internet Source | 1% |
| 6 | eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source | <1% |
| 7 | dspace.uil.ac.id Internet Source | <1% |
| 8 | jurnal.staiddimakassar.ac.id Internet Source | <1% |
| 9 | docplayer.info | |